



Katalog : 9199007

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2019



LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2019



LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2019

Indonesian Economic Report, 2019

ISSN: 1858-0963

No. Publikasi/Publication Number: 07330.1910

Katalog/Catalog: 9199007

Ukuran Buku/Book Size: 17,6x25 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: xx + 202 halaman/pages

Naskah/Manuscript:

Subdirektorat Indikator Statistik

Subdirectorate of Statistics Indicator

Penyunting/Editor:

Subdirektorat Indikator Statistik

Subdirectorate of Statistics Indicator

Desain Kover oleh/Cover Designed by:

Subdirektorat Indikator Statistik

Subdirectorate of Statistics Indicator

Penerbit/Published by:

©BPS RI/BPS-Statistics Indonesia

Pencetak/Printed by:

CV NARIO SARI

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Ali Said

Editor :

Rustam

Sofaria Ayuni

Penulis :

Sofaria Ayuni

Nia Setiyawati

Putri Larasaty

Chairul Anam

Riyadi

Adwi Hastuti

Anna Kurniasih

Valent Gigih Saputri

Aprilia Ira Pratiwi

Pengolahan Data/Penyiapan Draft :

Chairul Anam

Nia Setiyawati

Desain/layout :

Anna Kurniasih

Chairul Anam

Kontributor Data :

- Direktorat Neraca Produksi
- Direktorat Neraca Pengeluaran
 - Direktorat Statistik Harga
 - Direktorat Statistik Distribusi
- Direktorat Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata
- Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

KATA PENGANTAR

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 merupakan publikasi rutin tahunan yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini memberikan gambaran perkembangan kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2018 dan perkembangan selama awal tahun 2019, yang tercermin pada indikator makro terpilih.

Statistik yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari BPS maupun institusi lain seperti IMF, ADB, Bank Indonesia (BI), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian/Lembaga lainnya yang dapat memberikan gambaran perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Publikasi ini menyajikan informasi mengenai pertumbuhan ekonomi, penerimaan dan pengeluaran negara, perkembangan ekonomi maritim, laju inflasi, perdagangan luar negeri, sektor moneter, investasi, pariwisata, dan ketenagakerjaan.

Akhirnya, penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan penulisan publikasi ini, sehingga dapat lebih bermanfaat bagi pengguna data di masa mendatang.

Jakarta, Agustus 2019
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suhariyanto

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xiii
Penjelasan Umum	xv
Penjelasan Teknis	xvi
Singkatan	xix
 BAB I. TINJAUAN EKONOMI DUNIA DAN INDONESIA	 1
Pertumbuhan Ekonomi Global Kembali Melambat	3
Inflasi Dunia Meningkat	8
Ekonomi dan Inflasi Ke Depan Lebih Terkendali	10
Daya Saing Industri 4.0	15
Tantangan Ekonomi Indonesia Masa Depan	19
 BAB II. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA	 23
Pajak Sumber Utama Penerimaan Negara	26
Belanja Negara Harus Berprinsip <i>Value for Money</i>	30
Utang Negara Meningkat	35
Kondisi Ekonomi Indonesia di Tengah Tahun Pemilu	37
 BAB III. PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DAN REGIONAL	 39
Kondisi Perekonomian Indonesia	41
PDB Menurut Lapangan Usaha	42
PDB Menurut Penggunaan	47
Pertumbuhan Ekonomi Spasial	56
PDB Per Kapita	60
Capaian Triwulan I 2019	61
 BAB IV. PERKEMBANGAN POROS EKONOMI MARITIM INDONESIA ...	 65
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Meningkat Pada 2016	68
Nilai Tukar Pelaku Usaha Perikanan Terus Membaik	69
PDB Perikanan Tumbuh Di Atas PDB Nasional	71
Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap Ekonomi Nasional ..	73
Konsumsi Ikan Per Kapita Mencapai Target	75
Produksi Perikanan Indonesia Kian Melaju	76
Surplus Neraca Perdagangan Luar Negeri Produk Perikanan ...	78
Pengembangan Kawasan Konservasi Perikanan	79
Isu Strategis Pembangunan Subsektor Perikanan	80
 BAB V. INFLASI DAN DAYA BELI MASYARAKAT	 83
Inflasi Inti dan Non Inti	85
Perkembangan Inflasi Nasional Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	87

Variasi Inflasi Antar Wilayah Di Indonesia	90
Inflasi, Daya Beli, dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	94
Inflasi Indonesia Di Tengah Negara ASEAN.....	95
BAB VI. PERDAGANGAN INDONESIA.....	97
Perkembangan Ekspor.....	99
Perkembangan Impor.....	108
Neraca Perdagangan Indonesia.....	113
BAB VII. MONETER	117
Perkembangan Uang Beredar (M2)	119
Peredaran Uang Primer dan Komponennya.....	123
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah	125
Pergerakan Suku Bunga.....	128
BAB VIII. INVESTASI DAN PERDAGANGAN SAHAM.....	133
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).....	135
Penanaman Modal Asing (PMA)	140
Bursa Efek Indonesia (BEI).....	144
Investasi Asing yang Masuk ke Indonesia.....	146
BAB IX. PARIWISATA	149
Kunjungan Wisatawan Mancanegara Melalui Pintu Masuk/Bandara.....	152
Akomodasi.....	156
BAB X. KETENAGAKERJAAN	163
Angkatan Kerja di Indonesia.....	165
Variasi Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi	171
Rendahnya Pendidikan Penduduk yang Bekerja	173
Akibat Transformasi Ekonomi dalam Penyerapan Tenaga Kerja	174
Upah Pekerja	176
Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja	181
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia.....	182
Peran Sektor Informal dalam Menyerap Tenaga Kerja	185
BAB XI. PENUTUP	189

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN (Persen) Tahun 2014–2018	4
Tabel 1.2 Laju Inflasi Dunia, Negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN (persen) Tahun 2014–2018	9
Tabel 1.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Dunia, Negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN (persen) Tahun 2019–2020	12
Tabel 1.4 Perbandingan Peringkat Indeks Daya Saing Indonesia dengan Beberapa Negara Lainnya.....	16
Tabel 1.5 Nilai dan Peringkat Indeks Daya Saing Indonesia Menurut Pilar Daya Saing.....	18
Tabel 1.6 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Indonesia (Persen) Tahun 2019 dan 2020	20
Tabel 2.1 Penerimaan Negara Tahun 2015-2019 (triliun rupiah)	26
Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri (triliun rupiah) ..	28
Tabel 2.3 Kebijakan Umum Perpajakan Tahun 2019	29
Tabel 2.4 Kebijakan Teknis Perpajakan Tahun 2019.....	30
Tabel 2.5 Pengeluaran APBN Tahun 2015-2019 (triliun rupiah)	31
Tabel 3.1 Produk Domestik Bruto Atas Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2015–2018	43
Tabel 3.2 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2015–2018	45
Tabel 3.3 Produk Domestik Bruto Harga Konstan 2010 (miliar rupiah) dan Pertumbuhan PDB (persen) Menurut Penggunaan, Tahun 2015-2018	48
Tabel 3.4 Produk Domestik Bruto Harga Berlaku (miliar rupiah) dan Distribusinya (persen) Menurut Pengeluaran, 2015-2018...	49
Tabel 3.5 Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Menurut Provinsi (persen) Tahun 2016-2018	58
Tabel 3.6 Produk Domestik Bruto per Kapita (ribu rupiah), Tahun 2014–2018	60
Tabel 3.7 Nilai, Struktur, Laju dan Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Triwulan I–2018	62
Tabel 3.8 Nilai, Struktur, Laju dan Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Triwulan I–2019	64
Tabel 5.1 Inflasi dan Sumbangan Inflasi Inti dan Non Inti Tahun 2016–2018	86

Tabel 5.2	Laju Inflasi Indonesia Gabungan 82 Kota Menurut Kelompok Barang Kebutuhan (2012=100) (persen), Tahun 2016–2019	88
Tabel 5.3	Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Nasional (persen), Tahun 2017 dan 2018.....	90
Tabel 5.4	Laju Inflasi 82 Kota di Indonesia (2012=100) Tahun 2015–2018	91
Tabel 6.1	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Migas dan Non-Migas (juta US\$) Tahun 2016–2019	102
Tabel 6.2	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Komoditas Penting (juta US\$) Tahun 2016–2019.....	104
Tabel 6.3	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (juta US\$) Tahun 2016–2019	105
Tabel 6.4	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan (juta US\$) Tahun 2016–2019	107
Tabel 6.5	Nilai Impor Indonesia Menurut Migas dan Non-Migas (juta US\$) Tahun 2016–2019	109
Tabel 6.6	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang Ekonomi (juta US\$) Tahun 2016–2019	110
Tabel 6.7	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (juta US\$) Tahun 2016–2019	111
Tabel 6.8	Nilai Impor Indonesia Menurut Negara Asal (juta US\$) Tahun 2016–2019	113
Tabel 6.9	Neraca Perdagangan Indonesia (juta US\$) Tahun 2016–2019	114
Tabel 7.1	Perkembangan Uang Beredar (miliar rupiah) Tahun 2017 – Maret 2019 ¹	121
Tabel 7.2	Perkembangan Uang Primer (miliar rupiah) Tahun 2017 – Maret 2019 ¹	124
Tabel 7.3	Perkembangan Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah di Bank Indonesia Tahun 2017–Maret 2019 ¹	127
Tabel 7.4	Perkembangan Suku Bunga PUAB, SBI, BI Rate, dan Volume SBI Tahun 2017-Maret 2019 ¹	130
Tabel 8.1	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor (miliar rupiah) Tahun 2016– 2018	136
Tabel 8.2	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Pulau (miliar rupiah) Tahun 2016– 2018	138
Tabel 8.3	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor (juta US \$) Tahun 2016– 2018	140

Tabel 8.4	Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang Disetujui Pemerintah Menurut Pulau (juta US\$) Tahun 2016– 2018	142
Tabel 8.5	Transaksi dan Indeks Saham di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015–2018	144
Tabel 8.6	Jumlah dan Nilai Perdagangan Saham yang Dilakukan oleh Investor Asing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015–2018 .	146
Tabel 9.1	Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Melalui 19 Pintu Masuk Utama (orang) Tahun 2013– 2019 ¹	153
Tabel 9.2	Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Kebangsaan Tahun 2014–2018	155
Tabel 9.3	Banyaknya Usaha, Kamar, dan Tempat Usaha pada Usaha Akomodasi Dirinci Menurut Klasifikasi Akomodasi Tahun 2016 dan 2018.....	156
Tabel 9.4	Banyaknya Usaha, Kamar, dan Tempat Tidur pada Hotel Berbintang Dirinci Menurut Provinsi Tahun 2016 dan 2018.....	157
Tabel 9.5	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Menurut Provinsi (persen) Tahun 2014–2018	159
Tabel 9.6	Rata-Rata Lama Menginap Tamu pada Hotel Berbintang Menurut Provinsi (hari) Tahun 2014–2018	160
Tabel 10.1	Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015–2019	166
Tabel 10.2	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin, 2015–2019	168
Tabel 10.3	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2015–2019.....	170
Tabel 10.4	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Provinsi, 2015–2019	172
Tabel 10.5	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2015–2019	174
Tabel 10.6	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2015–2019.....	175
Tabel 10.7	Rata-Rata UMP (ribu rupiah) dan Pertumbuhan Rata-Rata UMP (persen), 2008–2019	177
Tabel 10.8	Distribusi Pekerja Menurut Upah dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2016–2019.....	178
Tabel 10.9	Distribusi Pekerja Menurut Upah dan Jenis Kelamin (persen), 2016–2019	180
Tabel 10.10	Elastisitas Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha, 2016–2018	181
Tabel 10.11	Produktivitas Menurut Provinsi (juta rupiah per penduduk yang bekerja), 2014–2017	183
Tabel 10.12	Produktivitas Menurut Kategori Lapangan Usaha (juta rupiah per penduduk yang bekerja), 2015–2018	184

Tabel 10.13 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2015–2019	186
---	-----

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara Maju, dan Negara Berkembang, dan ASEAN (persen), 2014–2018	3
Gambar 1.2	Perkembangan Laju Inflasi Dunia, Negara Maju, dan Negara Berkembang, serta ASEAN (persen), 2014–2018	8
Gambar 1.3	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara Maju dan Negara Berkembang, serta ASEAN (persen), Tahun 2019 dan 2020	10
Gambar 1.4	Proyeksi Inflasi Dunia, Negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN (persen), Tahun 2019 dan 2020	14
Gambar 1.5	Perbandingan Peringkat Indeks Daya Saing Indonesia dengan Beberapa Negara Berkembang di kawasan ASEAN Tahun 2018	17
Gambar 2.1	Kontribusi Penerimaan Negara Tahun 2015-2019.....	27
Gambar 2.2	Belanja Negara Berdasarkan Fungsi, 2019 (triliun rupiah)...	32
Gambar 2.3	Anggaran Subsidi Tahun 2015-2019 (triliun rupiah).....	34
Gambar 2.4	Rasio Hutang Negara terhadap Produk Domestik Bruto Tahun 2015-2019 (persen).....	35
Gambar 2.5	Pembiayaan Utang Negara Tahun 2015-2019 (triliun rupiah)	36
Gambar 3.1	Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015–2018	51
Gambar 3.2	Kontribusi PDB Menurut Penggunaan (persen) Tahun 2018	52
Gambar 3.3	Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan (Persen) Tahun 2015-2018.....	52
Gambar 3.4	Kontribusi Investasi terhadap PDB (Persen) Tahun 2015-2018	53
Gambar 3.5	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (Persen) Tahun 2015-2018.....	54
Gambar 3.6	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (Persen) Tahun 2015-2018.....	54
Gambar 3.7	Pertumbuhan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa (Persen) Tahun 2015-2018	55
Gambar 3.8	Kontribusi Ekspor dan Impor Barang dan Jasa (Persen) Tahun 2015-2018.....	55
Gambar 3.9	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (Persen) Tahun 2016-2018.....	56
Gambar 3.10	Kontribusi Ekonomi Menurut Wilayah (Persen) Tahun 2018	57
Gambar 4.1	Jumlah Rumah Tangga Perikanan, Tahun 2013-2016.....	68
Gambar 4.2	Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Tahun 2015-2018.....	70
Gambar 4.3	Pertumbuhan PDB (Persen), 2015-2018**	71
Gambar 4.4	Distribusi PDB Perikanan (Persen) Tahun 2015-2018**	72
Gambar 4.5	Distribusi PDB Seri 2010 ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2018**	74
Gambar 4.6	Target dan Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kapital) Tahun 2015-2018*	75
Gambar 4.7	Volume Produksi Perikanan di Indonesia (Juta Ton) Tahun 2015-2018*	77

Gambar 4.8	Volume dan Nilai Ekspor dan Impor Produk Perikanan di Indonesia Tahun 2015-2018*	78
Gambar 4.9	Luas Kawasan Konservasi Perairan (Juta ha), 2015-2018** ..	79
Gambar 5.1	Laju Inflasi Indonesia Tahun 2017– Maret 2018.....	89
Gambar 5.2	Laju Inflasi Negara ASEAN (persen) Tahun 2016-2018	95
Gambar 6.1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Indonesia Tahun 2016–2018	100
Gambar 6.2	Pertumbuhan Nilai Impor Indonesia Tahun 2016-2018.....	108
Gambar 6.3	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang Ekonomi Triwulan I Tahun 2019	111
Gambar 7.1	Jumlah Uang Beredar (miliar rupiah) Tahun 2014–2019*	120
Gambar 7.2	Perkembangan Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah di Bank Indonesia Tahun 2018 – Maret 2019	125
Gambar 7.3	Perkembangan PUAB Rupiah Pagi, dan BI <i>Rate</i> , Tahun 2018 – Maret 2019.....	129
Gambar 8.1	Nilai Investasi PMDN yang Terealisasi Menurut Sektor (persen) Triwulan I 2019	137
Gambar 8.2	Nilai Investasi PMDN yang Terealisasi Menurut Pulau (persen) Triwulan I 2019	139
Gambar 8.3	Nilai Investasi PMA yang Terealisasi Menurut Sektor (persen) Triwulan I 2019	141
Gambar 8.4	Nilai Investasi PMA yang Terealisasi Menurut Pulau (persen) Triwulan I 2019	143
Gambar 8.5	Jumlah dan Nilai Transaksi Saham di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015–2018.....	145
Gambar 9.1	Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Melalui Bandara (orang) Tahun 2019	152
Gambar 9.2	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada Hotel Berbintang di 10 Provinsi Terbesar (persen) Tahun 2018	158
Gambar 9.3	Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Indonesia pada Hotel Berbintang di 10 Provinsi Terbesar (hari) Tahun 2018	161
Gambar 10.1	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2015–2018	187

PENJELASAN UMUM

Tanda-tanda yang digunakan dalam publikasi ini, adalah sebagai berikut :

Data belum tersedia : ...

Data tidak tersedia : -

Data dapat diabaikan : 0

Tanda desimal : ,

<https://www.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS

1. Daya saing menurut *World Economic Forum* (WEF) adalah daya saing suatu negara/ekonomi dengan pendekatan makro. Indeks daya saing diukur dari 12 pilar dan dikelompokkan ke dalam tiga kelompok faktor, yaitu persyaratan dasar, penopang efisiensi, dan inovasi dan kecanggihan bisnis.
2. Penghitungan PDB atas dasar harga konstan yang sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000, sejak tahun 2015 menggunakan tahun dasar 2010. Penghitungan PDB dengan tahun dasar baru tersebut telah dihitung mundur sampai dengan tahun 2010.
3. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.
4. Penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) sejak Juni 2008 sampai Desember 2013 mencakup 66 kota di seluruh Indonesia, meliputi 774 komoditas barang dan jasa, dan menggunakan tahun 2007 sebagai tahun dasar. Sejak Januari 2014 sampai sekarang, data IHK mencakup 82 kota di seluruh Indonesia, meliputi 859 komoditas barang dan jasa, dan menggunakan tahun 2012 sebagai tahun dasar. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
5. Uang Kartal: adalah uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah.
6. Uang Giral: Simpanan rupiah milik penduduk pada sistem moneter yang terdiri atas rekening giro, kiriman uang (*transfer*) dan kewajiban segera lainnya antara lain simpanan berjangka yang telah jatuh waktu.
7. Uang Kuasi: Simpanan rupiah milik penduduk pada sistem moneter yang untuk sementara waktu kehilangan fungsinya sebagai alat tukar. Uang kuasi terdiri dari deposito berjangka, tabungan dalam rupiah dan valuta asing, dan giro dalam valuta asing.
8. M1 : adalah uang beredar dalam arti sempit yaitu meliputi uang kartal dan uang giral.
M2 : adalah uang beredar dalam arti luas yaitu meliputi uang kartal, uang giral ditambah dengan uang kuasi.
9. Pencatatan Statistik Ekspor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang tertentu (PEBT), dan pencatatan Statistik Impor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), yang diterima BPS dari kantor-kantor Bea dan Cukai.
10. Sistem pengolahan adalah *Carry over* yaitu dokumen dari satu bulan tertentu penerimaannya ditutup setelah satu bulan pada bulan berikutnya,

dokumen yang datang sesudah tanggal penutupan dianggap sebagai transaksi bulan berikutnya.

11. Beberapa Klasifikasi jenis/kelompok barang yang digunakan dalam statistik Ekspor dan Impor adalah:
 - a. *Harmonized System* (HS), untuk keperluan pengenaan tarif.
 - b. *Standard International Trade Classification* (SITC), penyusunannya ditekankan untuk keperluan Statistik Ekonomi.
 - c. *International Standard Industrial Classification* (ISIC), untuk mengelompokkan lapangan usaha yang ada dalam kegiatan ekonomi atau asal lapangan usaha suatu komoditi dihasilkan.
 - d. *Broad Economic Category* (BEC), untuk mengetahui penggunaan akhir dari suatu barang yaitu barang konsumsi, bahan baku dan penolong, dan barang modal.
12. Sejak September 2007, Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) digabung (*merger*) menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).
13. Tamu Asing adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh suatu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi.
14. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel adalah banyaknya malam kamar yang dihuni dibagi dengan banyaknya malam yang tersedia dikalikan 100 persen.
15. Rata-rata lamanya tamu menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya tamu yang datang menginap ke akomodasi.
16. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun lebih.
17. Pekerja adalah seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau membantu memperoleh pendapatan/keuntungan, paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu yang lalu, kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
18. Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
19. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase angkatan kerja (pekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.
20. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

21. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu negara atau wilayah. TKK diukur sebagai persentase orang yang bekerja terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.
22. Produktivitas pekerja menurut provinsi diukur dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk yang bekerja di setiap provinsi.
23. Produktivitas pekerja menurut kategori lapangan usaha diukur dengan membagi PDB pada masing-masing kategori lapangan usaha dengan jumlah penduduk yang bekerja di setiap kategori lapangan usaha.
24. Penduduk yang bekerja menurut sektor formal/informal, ditentukan berdasarkan status dalam pekerjaan utama, yaitu;
 - a. Sektor Formal: Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai.
 - b. Sektor informal : Berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar.
25. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

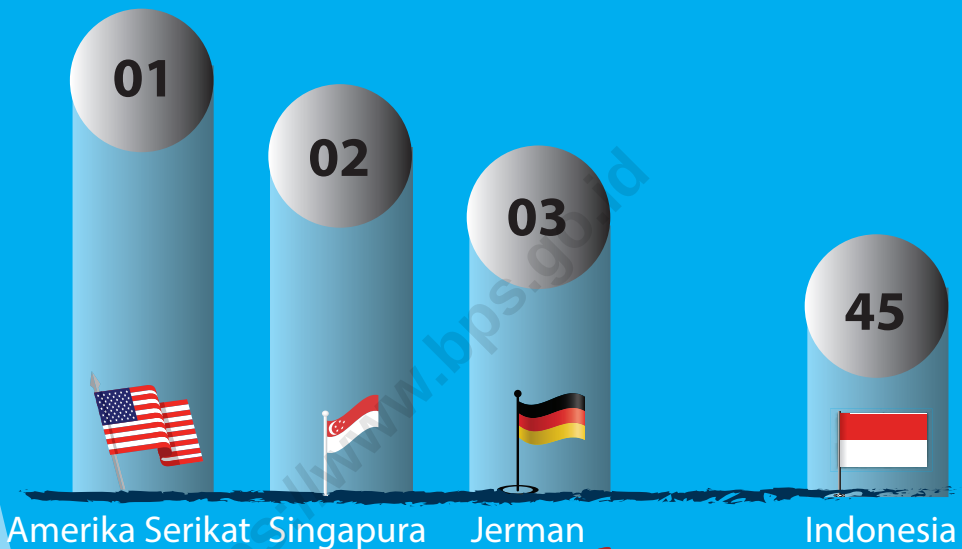
SINGKATAN

ADB	:	<i>Asian Development Bank</i>
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	:	<i>Association South East Asia Nation</i>
BEI	:	Bursa Efek Indonesia
BI	:	Bank Indonesia
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLU	:	Badan Layanan Umum
bps	:	<i>basis points</i>
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
CPO	:	<i>Crude Palm Oil</i>
FFR	:	<i>Federal Fund Rate</i>
GCI	:	<i>Global Competitiveness Index</i>
IHK	:	Indek Harga Konsumen
IHSG	:	Indek Harga Saham Gabungan
IMF	:	<i>International Monetary Fund</i>
KPBU	:	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNPR	:	Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMI	:	<i>Purchasing Managers Index</i>
PMTB	:	Pembentukan Modal Tetap Bruto
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SITC	:	<i>Standard International Trade Classification</i>
TKK	:	Tingkat Kesempatan Kerja
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPK	:	Tingkat Penghunian Kamar
UMK	:	Usaha Mikro Kecil
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil Menengah
UMP	:	Upah Minimum Provinsi
WEF	:	<i>World Economic Forum</i>
WEO	:	<i>World Economic Outlook</i>
Wisman	:	Wisatawan Manacanegara

Tinjauan Perekonomian Dunia dan Indonesia

1

Peringkat Daya Saing Global 4.0
2018



Indonesia

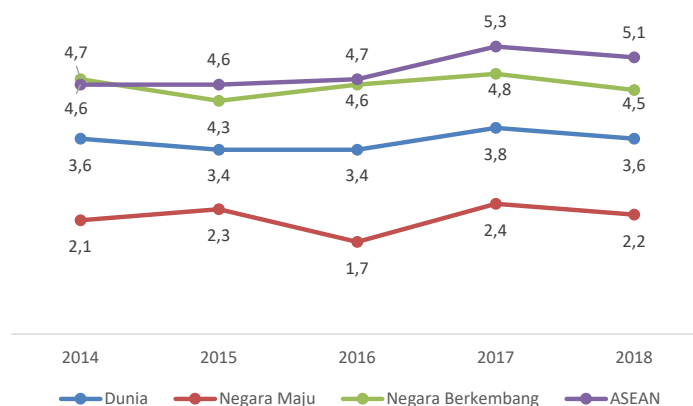


Pertumbuhan Ekonomi Global Kembali Melambat

Ekonomi dunia berhasil tumbuh pada 2017 setelah mengalami perlambatan sejak 2015. Namun pada semester kedua 2018 lalu, gejala ekonomi kembali melanda dan menekan kinerja perekonomian global. Faktor-faktor yang mengganggu kinerja ekonomi pada 2018 antara lain pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melemah akibat perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, sektor otomotif di Jerman yang terganggu akibat pengenalan konsep standar emisi baru, investasi di Italia yang menurun, permintaan eksternal dari negara-negara berkembang di Asia melambat, tekanan makroekonomi di Argentina dan Turki, kebijakan kredit yang semakin ketat di Tiongkok, serta pengetatan finansial sebagai akibat dari normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global pada 2018 menurun hanya 3,6 persen. Padahal sebelumnya pada rilis WEO April 2018, akselerasi ekonomi yang terjadi pada 2017 diperkirakan mampu memacu percepatan ekonomi tahun 2018 di level 3,9 persen. Ekonomi yang melambat pada 2018 diperkirakan terus berlanjut hingga awal 2019 dan berdampak pada penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 (IMF, 2019).

Perlambatan ekonomi dunia pada 2018 terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang, dengan persentase pertumbuhan yang lebih tinggi pada negara berkembang. Negara maju menunjukkan fluktuasi tren pertumbuhan ekonomi selama 2014-2018, dari 2,1 persen pada 2014 menjadi 2,2 persen pada 2018. Begitu pula dengan negara berkembang yang mengalami naik turun pertumbuhan ekonomi, dari 4,7 persen pada 2014 menjadi 4,5 persen pada 2018. Untuk negara-negara di kawasan ASEAN, secara umum angka pertumbuhan ekonomi berada di atas angka pertumbuhan ekonomi dunia, negara maju, dan

Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN (persen) Tahun 2014 - 2018



Sumber : IMF dan ADB (2019)

negara berkembang. Rata-rata pertumbuhan ekonomi negara ASEAN mencatatkan tren positif dari 4,6 persen pada 2014 menjadi 5,1 persen pada 2018.

Tabel 1.1 menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia selama kurun waktu lima tahun terakhir. Ekonomi di negara maju melambat pada 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada awal 2018, IMF memproyeksikan ekonomi negara maju tahun 2018 tumbuh 2,5 persen. Hal ini berarti proyeksi awal tahun 2018 sedikit melenceng dengan kondisi yang terjadi pada keseluruhan 2018. Perlambatan ini disebabkan beberapa faktor antara lain kebijakan fiskal dan moneter yang kurang akomodatif di Amerika Serikat, ketidakpastian *Brexit* di Inggris dan Uni Eropa, serta konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok (ADB, 2019). Pada negara-negara maju di kawasan Eropa, pertumbuhan ekonomi menurun dari 2,4 persen pada 2017 menjadi 1,8 persen pada 2018. Pada kelompok negara-negara maju, hanya negara Amerika Serikat dan Australia yang

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN (persen), 2014-2018

Kelompok Negara	2014	2015	2016	2017	2018
A. Dunia ¹⁾	3,6	3,4	3,4	3,8	3,6
B. Negara-negara maju ¹⁾	2,1	2,3	1,7	2,4	2,2
Amerika Serikat	2,5	2,9	1,6	2,2	2,9
Jepang	0,4	1,2	1,6	1,9	0,8
Inggris	3,1	2,3	1,9	1,8	1,4
Korea	3,3	2,8	2,9	3,1	2,7
Kanada	2,9	1,0	1,4	3,0	1,8
Australia	2,6	2,5	2,8	2,4	2,8
Kawasan Eropa	1,4	2,1	2,0	2,4	1,8
Jerman	1,9	1,5	1,9	2,5	1,5
Perancis	0,9	1,1	1,2	1,8	1,5
Italia	0,1	1,0	0,9	1,5	0,9
Spanyol	1,4	3,4	3,3	3,1	0,8
Belanda	1,4	2,0	2,2	2,9	2,5
C. Negara-negara berkembang ¹⁾	4,7	4,3	4,6	4,8	4,5
Sub-Sahara Afrika	5,1	3,4	1,4	2,8	3,0
Asia	6,8	6,8	6,5	6,5	6,4
Tiongkok	7,3	6,9	6,7	6,9	6,6
India	7,4	8,2	7,1	6,7	7,1
Amerika Latin dan Karibia	1,3	0,3	-0,6	1,3	1,0
Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan	2,8	2,5	4,9	2,6	1,8
Eropa	3,9	4,7	3,2	5,8	3,6
Negara-negara Persemakmuran	1,0	-2,0	0,4	2,1	2,8
D. Negara-negara ASEAN ²⁾	4,6	4,6	4,7	5,3	5,1
Malaysia	6,0	5,0	4,2	5,9	4,7
Filipina	6,2	6,1	6,9	6,7	6,2
Singapura	3,6	2,2	2,4	3,9	3,2
Thailand	0,9	3,0	3,3	4,0	4,1
Indonesia ³⁾	5,0	4,9	5,0	5,1	5,2
Vietnam	6,0	6,7	6,2	6,8	7,1

Catatan : 1) *World Economic Outlook* (WEO) April 2019

2) *Asian Development Outlook* (ADO) 2019

3) Indikator Ekonomi BPS

Sumber : IMF, ADB, BPS

mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama. Hal ini diakibatkan oleh melemahnya sentimen bisnis dan konsumen yang mengakibatkan penurunan ekspor dan permintaan domestik, gangguan pada sektor otomotif di Jerman akibat pengenalan standar emisi baru pada kendaraan berbahan bakar diesel, ketidakpastian kebijakan fiskal, serta protes jalanan yang mengganggu penjualan ritel dan membebani konsumsi di Perancis (IMF, 2019).

Di Jepang, stimulus fiskal yang berkurang, permintaan eksternal yang melemah, dan dampak bencana alam yang terjadi pada triwulan III 2018 telah mengganggu kinerja ekonomi di negara tersebut dan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi 2018 hanya setengah dari laju pertumbuhan 2017. Namun, tidak semua negara maju mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Amerika Serikat dan Australia mampu menunjukkan tren positif dalam pertumbuhan ekonomi saat negara maju lainnya mengalami perlambatan. Ekonomi Amerika Serikat tetap bertahan ditopang dari pasar tenaga kerja dan pertumbuhan konsumsi yang kuat (IMF, 2019).

Pada negara berkembang, laju pertumbuhan ekonomi melambat pada 2018 sebesar 4,5 persen, lebih rendah dibandingkan proyeksi IMF awal tahun 2018 sebesar 4,9 persen. Kondisi ini lebih banyak dipengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok seiring memburuknya hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Hal ini berimbas pada aktivitas perdagangan luar negeri dengan negara mitra di Asia dan Eropa. Disamping itu, kondisi pasar keuangan global juga turut berkontribusi terhadap perlambatan ekonomi di negara berkembang.

Ekonomi negara-negara berkembang Asia pada 2018 tetap kuat meski melambat dibandingkan tahun 2017. Pertumbuhan yang melambat tahun 2018 disebabkan pertumbuhan yang melemah di Tiongkok, resesi yang terjadi di Turki, akumulasi kinerja ekonomi yang melemah pada akhir 2018, dan kontraksi yang semakin dalam di Iran. Tiongkok mencatatkan pelemahan pertumbuhan dari 6,9 persen pada 2017 menjadi 6,6 persen pada 2018. Ekonomi di Tiongkok melemah akibat pengetatan peraturan di pasar keuangan, kinerja ekspor dan investasi yang melemah. Disamping itu, intermediasi keuangan juga dibatasi sehingga memperlambat investasi domestik (IMF, 2019). Sebaliknya, India berhasil mencatatkan pertumbuhan positif di tahun 2018 dengan kenaikan laju pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, begitu pula dengan kawasan Sub-Sahara Afrika dan Negara-negara Persemakmuran.

Ekonomi di kawasan Asia Tenggara diperkirakan akan bertahan di angka 5 persen. Konsumsi yang menguat didorong kenaikan pendapatan, inflasi yang stabil dan remitan yang kuat mendukung pertumbuhan di Indonesia dan Thailand. Di sisi lain, mata uang rupiah terdepresiasi terhadap US\$ dolar akibat krisis ekonomi di Argentina dan Turki tahun 2018. Ekonomi global yang melemah, perdagangan yang melambat, dan harga komoditas yang melunak menyebabkan prospek ekspor kian meredup bagi negara-negara yang menggantungkan ekonominya dari sisi perdagangan luar negeri (BI, 2019).

Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN berada pada posisi yang cukup solid sebesar 5,1 persen, namun melemah dibandingkan tahun 2017. Capaian pada 2018 ini sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi ADB pada awal 2018 lalu sebesar 5,2 persen. Pertumbuhan ekonomi di Vietnam melaju di angka 7,1 persen didorong ekspor dan permintaan domestik yang menguat. Sebaliknya, pelemahan laju pertumbuhan ekonomi di Malaysia dari 5,9 persen pada 2017 menjadi 4,7 persen pada 2018 disebabkan ekspor dan permintaan domestik yang melemah. Permintaan domestik yang kuat mengimbangi pertumbuhan ekspor yang lemah sehingga Indonesia dan Thailand tetap mampu menunjukkan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi pada 2018 dibandingkan 2017. Sementara itu, permintaan eksternal yang melemah telah mereduksi laju pertumbuhan ekonomi di Singapura dari 3,9 persen pada 2017 menjadi 3,2 persen pada 2018.

Ekonomi yang melambat berdampak pada penurunan aktivitas perdagangan global. Hal ini sangat jelas terlihat dari impor negara maju yang terus tertekan. *Purchasing Managers Index* (PMI) yang menurun di berbagai negara dunia juga turut mencerminkan kinerja perdagangan yang tertekan. Volume perdagangan dunia menurun disebabkan ketegangan hubungan dagang yang meningkat. Aktivitas ekonomi yang menurun berkontribusi pada penurunan sebagian besar harga komoditas global pada 2018 (BI, 2019).

Ekspor melonjak pada paruh pertama 2018, namun pada paruh kedua tren perdagangan berbalik arah dimana aktivitas pabrik menurun dan beberapa negara besar mengalami gangguan pasokan. Permintaan domestik yang kuat mengimbangi perlambatan permintaan eksternal. Sebagai negara yang banyak menggantungkan ekonominya dari sektor perdagangan, negara-negara di Asia Tenggara masih mampu mencapai perkembangan ekonomi dengan ditopang konsumsi rumah tangga (ADB, 2019).

Indonesia berhasil mencatatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi pada 2018 saat ekonomi global melambat. Pertumbuhan positif ini ditopang oleh investasi dan konsumsi domestik yang menguat. Permintaan domestik didorong untuk mengimbangi kinerja ekspor yang lemah sehingga pertumbuhan ekonomi tetap menunjukkan tren positif. Oleh sebab itu, Indonesia kini bergerak ke arah pemanfaatan industri 4.0 guna mewujudkan potensi pertumbuhan nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 sebesar 5,2 persen merupakan yang tercepat sejak 2013. Hal ini ditopang oleh investasi domestik dan konsumsi domestik yang lebih kuat. Investasi yang menguat didorong oleh kebutuhan pembangunan proyek infrastruktur publik transportasi dan energi. Investasi swasta di sektor pertanian dan perkebunan menunjukkan geliat pemulihan pada 2018 setelah sempat melambat pada 2017. Hal ini merupakan dampak dari program Biodiesel 20 yang dikeluarkan oleh pemerintah dimana seluruh kendaraan diesel dan alat berat disyaratkan untuk menggunakan campuran *biofuel* setidaknya 20 persen (BI, 2019).

Laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat tercermin dari kesejahteraan rumah tangga yang meningkat ditinjau dari akses perumahan yang lebih

berkualitas. Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi tahun lalu digerakkan oleh hampir seluruh sektor-sektor ekonomi. Pertanian, Pertambangan, Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan, dan Jasa Lainnya. Sektor pertambangan menorehkan peningkatan yang cukup signifikan akibat pengaruh dari kenaikan harga batu bara dan kuota produksi. Sektor teknologi informasi dan komunikasi, transportasi dan perdagangan berhasil melakukan ekspansi pada 2018.

Di Indonesia, impor melesat cukup tajam pada 2018 sehingga neraca perdagangan luar negeri yang tadinya surplus pada 2017, menjadi sedikit defisit pada 2018. Ekspor masih menunjukkan kinerja dengan ditopang peningkatan pendapatan sektor pariwisata, layanan telekomunikasi, dan remitan dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pendapatan pemerintah didorong pula dari keberhasilan *tax amnesty* dan harga komoditas yang lebih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang positif berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Daya beli masyarakat terjaga sejalan dengan inflasi yang tetap rendah dan terkendali. Belanja pemerintah dalam rangka menghadapi tiga kegiatan besar pada 2018 juga memberi andil besar dalam perekonomian, seperti Asian Games, pertemuan tahunan IMF-*World Bank*, dan pemilihan legislatif (BI, 2019).

Dari sisi lapangan usaha, ekonomi Indonesia masih ditopang dari pertumbuhan lapangan usaha Perdagangan seiring impor yang tumbuh kuat. Belanja pemerintah untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat juga mendorong lapangan usaha Administrasi Pemerintahan dan Jasa Pendidikan tumbuh signifikan. Lapangan usaha konstruksi juga tumbuh kuat sejalan pembangunan infrastruktur yang masih berlangsung. Sementara itu, lapangan usaha industri pengolahan sebagai kontributor utama perekonomian nasional masih mencatatkan pertumbuhan yang cenderung stabil (BI, 2019).

Ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai momentum positif pada 2018 ditopang oleh permintaan domestik yang solid. Permintaan domestik terdiri dari konsumsi swasta (konsumsi rumah tangga dan konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga), konsumsi pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto. Konsumsi rumah tangga tumbuh seiring peningkatan pendapatan masyarakat dan terjaganya kepercayaan masyarakat sebagai konsumen. Pendapatan yang tinggi mendorong inflasi yang rendah. Naiknya pendapatan masyarakat berimbas pada perubahan gaya hidup masyarakat yang mulai beralih kepada kebutuhan "*leisure*". Hal ini tercermin dari kenaikan signifikan pada lapangan usaha Transportasi dan Komunikasi, serta Restoran dan Hotel (BI, 2019).

Konsumsi LNRPT juga semakin meningkat seiring penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh wilayah. Konsumsi pemerintah menguat dipengaruhi belanja untuk pegawai dan belanja barang untuk kegiatan Pilkada dan kegiatan internasional lainnya. PMTB tumbuh positif ditopang dari peningkatan investasi nonbangunan, yaitu kinerja investasi mesin dan perlengkapan. Pemerintah menggaungkan pembangunan infrastruktur

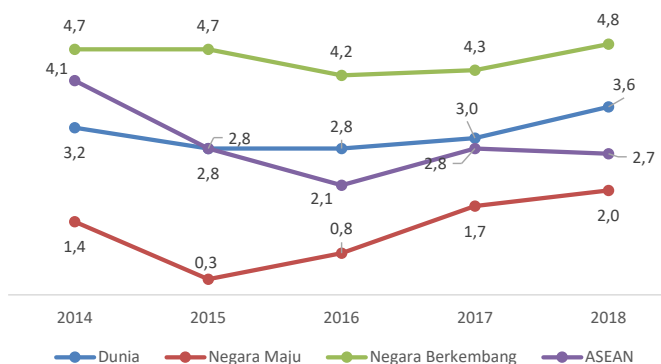
listrik berupa proyek 35.0000 megawatt dan jaringan telekomunikasi serat optik nasional yang mempercepat peningkatan investasi. Investasi kendaraan juga meningkat seiring peningkatan sektor pertambangan (BI, 2019).

Inflasi Dunia Meningkat

Prospek inflasi sebagian besar mencerminkan prospek pertumbuhan dan harga komoditas. Oleh sebab itu, menjadi hal penting untuk menjaga inflasi berada pada level aman guna mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Laju inflasi dunia mengalami peningkatan sejak 2016 dan pada 2018 berada pada level 3,6 persen. Capaian inflasi dunia tahun 2018 sedikit lebih tinggi dibandingkan proyeksi awal tahun 2018 oleh IMF sebesar 3,5 persen. Peningkatan laju inflasi dunia diikuti kenaikan laju inflasi di negara maju dan berkembang. Inflasi negara maju sempat menurun pada 2015, kemudian naik lagi hingga 2018 di level 2,0 persen atau tepat sesuai prediksi IMF pada awal tahun. Laju inflasi di negara maju tetap rendah seiring penurunan harga komoditas yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas harga di negara maju lebih terjaga.

Negara berkembang menunjukkan tren laju inflasi yang lebih halus, dari 4,7 persen pada 2014 menjadi 4,8 persen pada 2018. Pada *range* ini, inflasi masih dianggap aman yaitu di bawah 10 persen. Laju inflasi negara berkembang tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 4,6 persen. Untuk negara-negara ASEAN, terjadi penurunan laju inflasi yang cukup signifikan dari 4,1 persen pada 2014 menjadi 2,7 persen pada 2018. Laju inflasi ini lebih rendah dibandingkan proyeksi ADB pada awal 2018 sebesar 3,0 persen.

Gambar 1.2
Perkembangan Laju inflasi Dunia, Negara Maju, dan Negara Berkembang, Serta ASEAN (persen) Tahun 2014 - 2018



Sumber : IMF dan ADB (2018)

Jika ditinjau dari anggota negara maju, tampak bahwa Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan rata-rata negara maju di kawasan Eropa mencatatkan laju inflasi yang meningkat pada 2018. Sementara itu, Inggris dan Korea menunjukkan

Tabel 1.2 Laju Inflasi Dunia, Negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN (persen), 2014-2018

Kelompok Negara	2014	2015	2016	2017	2018
A. Dunia ¹⁾	3,2	2,8	2,8	3,0	3,6
B. Negara-negara maju ¹⁾	1,4	0,3	0,8	1,7	2,0
Amerika Serikat	1,6	0,1	1,3	2,1	2,4
Jepang	2,8	0,8	-0,1	0,5	1,0
Inggris	1,5	0,0	0,7	2,7	2,5
Korea	1,3	0,7	1,0	1,9	1,5
Kanada	1,9	1,1	1,4	1,6	2,2
Australia	2,5	1,5	1,3	2,0	2,0
Kawasan Eropa	0,4	0,2	0,2	1,5	1,8
Jerman	0,8	0,7	0,4	1,7	1,9
Perancis	0,6	0,1	0,3	1,2	2,1
Italia	0,2	0,1	-0,1	1,3	1,2
Spanyol	-0,2	-0,5	-0,2	2,0	1,7
Belanda	0,3	0,2	0,1	1,3	1,6
C. Negara-negara berkembang ¹⁾	4,7	4,7	4,2	4,3	4,8
Sub-Sahara Afrika	6,4	7,0	11,2	11,0	8,5
Asia	3,4	2,7	2,8	2,4	2,6
Tiongkok	2,0	1,4	2,0	1,6	2,1
India	5,8	4,9	4,5	3,6	3,5
Amerika Latin dan Karibia	4,9	5,5	5,6	6,0	6,2
Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan	6,7	5,4	4,7	6,4	10,4
Eropa	4,1	3,2	3,2	6,2	8,7
Negara-negara Persemakmuran	8,1	15,5	8,3	5,5	4,5
D. Negara-negara ASEAN ²⁾	4,1	2,8	2,1	2,8	2,7
Malaysia	3,1	2,1	2,1	3,8	1,0
Filipina	4,1	1,4	1,8	2,9	5,2
Singapura	1,0	-0,5	-0,5	0,6	0,4
Thailand	1,9	-0,9	0,2	0,7	1,1
Indonesia ³⁾	8,4	3,4	3,0	3,6	3,1
Vietnam	4,1	0,6	2,7	3,5	3,5

Catatan : 1) *World Economic Outlook* (WEO) April 2019

2) *Asian Development Outlook* (ADO) 2019

3) Indikator Ekonomi BPS

Sumber : IMF, ADB, BPS

hal yang sebaliknya dimana inflasi turun pada 2018. Inflasi di Amerika Serikat pada 2018 meningkat sejalan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Pertumbuhan yang melambat di kawasan Eropa membuat inflasi tetap terkendali dan cenderung meningkat.

Laju inflasi di negara-negara berkembang secara rata-rata menunjukkan peningkatan, seperti di negara berkembang kawasan Asia, Amerika Latin dan Karibia, negara-negara di kawasan Timur Tengah, dan negara Eropa berkembang. Bahkan untuk negara berkembang di Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan, inflasi pada 2018 melaju sangat tinggi hingga di atas 10 persen. Hal ini dipengaruhi ketegangan geopolitik di kawasan tersebut dan memicu kenaikan harga barang. Namun, beberapa negara berkembang justru mengalami penurunan inflasi pada 2018 dibandingkan 2017 seperti Sub-Sahara Afrika dan Negara-negara

Persemakmuran. Inflasi di Sub-Sahara Afrika berhasil ditekan ke level 8,5 persen pada 2018 setelah berada di atas 11 persen sejak 2016 lalu.

Ekonomi yang melambat di kawasan negara ASEAN sejalan dengan perlambatan laju inflasi di kawasan ini. Laju inflasi di Malaysia pada 2018 tercatat merosot cukup tajam sebesar 1,0 persen dari 3,8 persen pada 2017. Singapura dengan laju inflasi yang sudah sangat rendah juga mengalami perlambatan laju inflasi dengan turun di level 0,4 persen pada 2018. Begitu pula dengan laju inflasi di Indonesia yang lebih rendah di level 3,1 persen pada 2018.

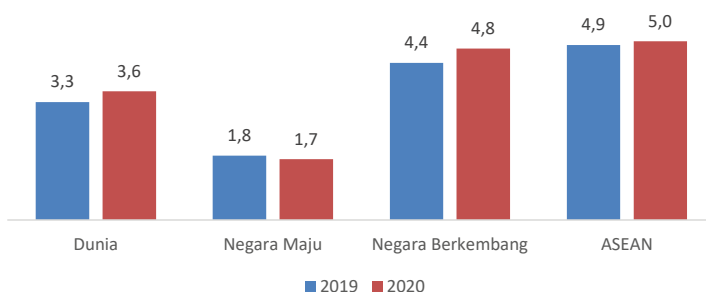
Inflasi di Indonesia tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2017, namun defisit transaksi berjalan semakin lebar karena impor meningkat untuk proyek infrastruktur besar. Meskipun melambat, laju inflasi Indonesia cukup terkendali dan sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia pada awal 2018 yaitu sebesar $3,5 \pm 1$ persen. Perlambatan laju inflasi disebabkan persediaan makanan yang cukup, hasil dari pertanian berkelanjutan dan harga bahan bakar dan listrik yang stabil hasil subsidi pemerintah.

Ekonomi dan Inflasi Ke Depan Lebih Terkendali

Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2019 akan diawali dengan kestabilan ekonomi dari akhir 2018 yang melambat, kemudian mulai pulih secara bertahap setelah pertengahan tahun 2019. Apabila perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dapat diselesaikan, kepercayaan bisnis dan sentimen finansial akan meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kegagalan dalam menyelesaikan hambatan tarif akan menyebabkan biaya yang lebih tinggi pada konsumen dan modal impor barang yang lebih tinggi.

Ekonomi global diperkirakan mengalami perlambatan dari 3,6 persen pada 2018 menjadi 3,3 persen pada 2019. Hal ini disebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang terjadi tahun 2018 dan di awal 2019 sudah dimulai dengan ekonomi yang lemah. Seluruh negara berupaya untuk mengurangi risiko perlambatan ekonomi. Negara-negara dengan ekonomi terbesar berusaha mencapai target pertumbuhan ekonomi dengan menyusun kebijakan yang lebih

Gambar 1.3
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara Maju dan Negara Berkembang, Serta ASEAN (persen) Tahun 2019 dan 2020



Sumber : IMF, ADB

akomodatif. Bank-bank sentral seperti *Federal Reserve* AS akan melakukan jeda kenaikan suku bunga dan kenaikan sisa tahun ini untuk mengurangi dampak risiko global. Bank Sentral Eropa, Bank Jepang, dan Bank Inggris bersama-sama menerapkan kebijakan yang lebih akomodatif. Tiongkok mengatasi dampak negatif dari perang dagang dengan fokus pada stimulus fiskal dan moneter. Guna meredam dampak ekspansif akibat ketegangan perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok, tahun 2019 diadakan negosiasi perjanjian perdagangan antara kedua negara tersebut. Dengan demikian, diharapkan pasar negara berkembang akan hidup dengan kembalinya aliran portofolio dan penguatan mata uang setiap negara terhadap US dolar (ADB, 2019).

Pada paruh kedua 2019 diperkirakan pertumbuhan ekonomi mulai menguat dengan didukung stimulus kebijakan di Tiongkok, peningkatan pada sentimen pasar keuangan global, hambatan pertumbuhan di kawasan Eropa yang melemah, dan stabilisasi ekonomi di negara berkembang termasuk Argentina dan Turki. Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut hingga 2020 dengan target pertumbuhan ekonomi global meningkat di angka 3,6 persen (IMF, 2019).

Pertumbuhan ekonomi negara maju diperkirakan akan terus melambat hingga 2020 sebagai dampak stimulus fiskal AS dan pertumbuhan produktivitas yang rendah. Sementara itu untuk negara berkembang, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih stabil pada kisaran 4-5 persen dengan variasi yang cukup besar antar negara sebagai akibat harga komoditas yang lemah dan konflik yang terjadi di beberapa negara (IMF, 2019).

Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi juga diprediksi masih akan berlangsung di negara-negara ASEAN pada 2019. Hal ini disebabkan investasi dan prospek ekspor masih lemah seiring perlambatan aktivitas perdagangan dunia dan berimbas pada penurunan siklus perdagangan elektronik global. Namun pada 2020 mendatang, akselerasi pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN diperkirakan akan melaju seiring peningkatan investasi, konsumsi, sektor pariwisata, dan ekspor yang kuat (ADB, 2019).

Proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi dapat dilihat dari Tabel 1.3. Sejalan dengan perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi global pada 2019, ekonomi anggota negara-negara maju juga diperkirakan melambat dibandingkan 2018. Faktor eksternal seperti ketidakpastian kebijakan fiskal di Amerika Serikat dan Brexit akan memengaruhi perlambatan pertumbuhan bukan hanya di kawasan negara maju, tetapi juga negara-negara lain termasuk Asia. Di Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi diperkirakan terus merosot menjadi 2,3 persen pada 2019 dan 1,9 persen pada 2020 seiring stimulus fiskal yang semakin longgar. Ekonomi Jepang diperkirakan naik menjadi 1,0 persen pada 2019 dengan dukungan dari kebijakan fiskal untuk mengurangi dampak kenaikan tarif pajak konsumen. Inggris, Korea, Kanada, Australia, dan negara maju kawasan Eropa diperkirakan mengalami fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi dengan perlambatan di tahun 2019 dan meningkat pada 2020.

Tabel 1.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Dunia, Negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN (persen) Tahun 2019 dan 2020

Kelompok Negara	Pertumbuhan Ekonomi		Inflasi	
	2019	2020	2019	2020
A. Dunia ¹⁾	3,3	3,6	3,6	3,6
B. Negara-negara maju ¹⁾	1,8	1,7	1,6	2,1
Amerika Serikat	2,3	1,9	2,0	2,7
Jepang	1,0	0,5	1,1	1,5
Inggris	1,2	1,4	1,8	2,0
Korea	2,6	2,8	1,4	1,6
Kanada	1,5	1,9	1,7	1,9
Australia	2,1	2,8	2,0	2,3
Kawasan Eropa	1,3	1,5	1,3	1,6
Jerman	0,8	1,4	1,3	1,7
Perancis	1,3	1,4	1,3	1,5
Italia	0,1	0,9	0,8	1,2
Spanyol	2,1	1,9	1,2	1,6
Belanda	1,8	1,7	2,3	1,6
C. Negara-negara berkembang ¹⁾	4,4	4,8	4,9	4,7
Sub-Sahara Afrika	3,5	3,7	8,1	7,4
Asia	6,3	6,3	2,8	3,1
Tiongkok	6,3	6,1	2,3	2,5
India	7,3	7,5	3,9	4,2
Amerika Latin dan Karibia	1,4	2,4	6,5	5,1
Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan	1,5	3,2	9,7	9,3
Eropa	0,8	2,8	9,0	7,5
Negara-negara Persemakmuran	2,2	2,3	5,7	5,0
D. Negara-negara ASEAN ²⁾	4,9	5,0	2,6	2,7
Malaysia	4,5	4,7	2,0	2,7
Filipina	6,4	6,4	3,8	3,5
Singapura	2,6	2,6	0,7	0,9
Thailand	3,9	3,7	1,0	1,0
Indonesia	5,2	5,3	3,2	3,3
Vietnam	6,8	6,7	3,5	3,8

Catatan : 1) *World Economic Outlook (WEO)* April 20192) *Asian Development Outlook (ADO)* 2019

Sumber : IMF, ADB

Ekonomi negara berkembang diperkirakan sedikit melemah dari 4,5 persen pada 2018 menjadi 4,4 persen pada 2019. Namun seiring peningkatan stimulus ekonomi di Tiongkok dan berkurangnya ketegangan yang terjadi di Argentina dan Turki, tahun 2020 ekonomi negara berkembang diperkirakan naik ke level 4,8 persen. Konflik perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat apabila masih berlangsung dan bahkan memburuk tentu dapat merusak investasi dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang di Asia.

Pertumbuhan ekonomi negara Sub-Sahara Afrika, Amerika Latin dan Karibia diperkirakan akan terus naik hingga 2020. Di Sub-Sahara Afrika, pertumbuhan ekonomi dipicu harga minyak yang melemah. Untuk negara-negara di kawasan Asia, pertumbuhan ekonomi diperkirakan menurun dari 6,4 persen pada 2018 menjadi 6,3 persen pada 2019-2020. Hal ini dipengaruhi perlambatan ekonomi di Tiongkok dan Indonesia, terlebih sebagai akibat perang dagang antara Amerika

Serikat dan Tiongkok. Negara-negara Timur Tengah diperkirakan mengalami penurunan prospek pertumbuhan tahun 2019 yang dipengaruhi pertumbuhan PDB minyak yang menurun di Arab Saudi, penyesuaian makroekonomi di Pakistan, sanksi oleh Amerika Serikat kepada Iran, serta ketegangan dan konflik politik di beberapa negara seperti Irak, Siria, dan Yaman. Sementara itu, harga minyak yang melemah merupakan beban bagi prospek pertumbuhan Rusia yang diperkirakan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Negara-negara Persemakmuran pada 2019 dan 2020 (ADB, 2019).

Pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada 2019 diperkirakan melambat seiring penurunan ekonomi di Tiongkok dan perdagangan manufaktur. Perlambatan kinerja perdagangan dunia menekan investasi dan prospek ekspor di kawasan ASEAN, termasuk perdagangan elektronik. Produsen dan pengguna industri manufaktur besar seperti Malaysia, Singapura, Tiongkok dan Vietnam mengalami penurunan ekspor pada akhir 2018 dan awal 2019 setelah kenaikan tarif pada tahun 2018. Penurunan ekspor terjadi karena negara-negara tersebut memasok produk industri manufaktur ke raksasa ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok sehingga perlambatan ekonomi di kedua ini membawa dampak luas bagi negara-negara lain.

Ketidakpastian kebijakan perdagangan, harga bahan bakar global yang terus melemah akan memberikan tekanan pada ekspor. Ekspor diperkirakan akan tumbuh lebih lambat akibat melemahnya pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang Indonesia dan menurunnya harga komoditas global seperti batu bara, karet, dan minyak sawit. Pada saat yang bersamaan, impor juga diperkirakan akan tumbuh melambat seiring penurunan harga minyak dunia dan permintaan barang modal dengan selesainya beberapa proyek infrastruktur besar. Meskipun sama-sama menurun, diperkirakan pertumbuhan impor masih akan lebih besar dari ekspor.

Pemerintah kiranya perlu menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan meningkatkan iklim bisnis dan investasi. Risiko eksternal utama yang mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan yaitu ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sementara untuk risiko internal, bencana alam dan aturan baru terkait pembatasan nontarif pada impor menyebabkan ketidakpastian bisnis bagi investor dan pelaku usaha.

Pada 2020, ekonomi Asia Tenggara diperkirakan berangsur membaik dan tumbuh lebih cepat dibandingkan 2019. Hal ini dipengaruhi prospek pariwisata, investasi, ekspor, dan permintaan domestik yang semakin menguat. Percepatan investasi domestik dan konsumsi yang kuat akan mendorong pertumbuhan di beberapa negara ASEAN seperti Filipina dan Indonesia.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan telah mendorong kinerja ekspor dan ekonomi Indonesia melemah. Namun, permintaan domestik yang masih kuat diharapkan dapat menekan efek dari kondisi tersebut. Pemerintah terus berupaya menyusun kebijakan fiskal dan moneter

untuk mendorong pertumbuhan. Untuk merangsang peningkatan investasi swasta, reformasi pada aspek tata kelola perlu dibenahi, seperti merampingkan administrasi pajak dan menyederhanakan pengajuan izin bisnis. Konsumsi rumah tangga meningkat seiring semakin banyaknya pekerja formal. Pada paruh pertama 2019, konsumsi diperkirakan akan melonjak seiring penyelenggaraan Pemilihan Umum pada April 2019 dan peningkatan kredit perbankan oleh rumah tangga.

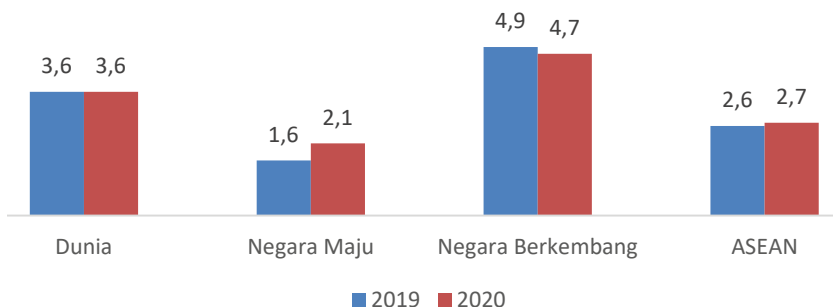
Industri manufaktur 2019 dan 2020 masih akan diperkuat dari industri sepatu dan pakaian. Sektor jasa diperkuat dari kinerja perdagangan besar dan eceran, akomodasi dan penyediaan makan minum, serta teknologi, informasi dan komunikasi. Sektor transportasi dan pergudangan akan diperkuat dari peningkatan logistik transportasi, aturan bea cukai dan pergudangan.

Untuk inflasi, stabilitas harga dunia diperkirakan tetap stabil sehingga laju inflasi tetap berada di kisaran 3,6 persen hingga 2020. Untuk negara maju, inflasi diperkirakan akan menurun pada 2019 seiring penurunan harga komoditas. Inflasi di Jepang diperkirakan akan meningkat seiring kenaikan tarif pajak (IMF, 2019).

Inflasi di negara berkembang diperkirakan sedikit mengalami kenaikan dari 4,8 persen pada 2018 menjadi 4,9 persen pada 2019. Hal ini sebagai akibat dari perkembangan aktivitas ekonomi termasuk dorongan inflasi yang bersumber dari tarif pajak pertambahan nilai yang lebih tinggi di Rusia dan naiknya tekanan harga secara bertahap di India karena permintaan yang kuat dan sedikit peningkatan pada inflasi makanan dari basis yang rendah.

Seiring ekonomi negara Asia yang melambat, inflasi diperkirakan meningkat hingga dua tahun ke depan. Risiko yang masih menjadi ancaman perkiraan ke depan yaitu konflik dagang yang terus menerus terjadi. Ketidakpastian aktivitas perdagangan merupakan hambatan dalam konsumsi dan investasi. Perlambatan ekonomi di Tiongkok juga menjadi ancaman gangguan potensial, termasuk negara-negara di kawasan ASEAN. Bencana alam merupakan faktor lain yang tidak dapat dianggap sepele karena menelan korban dalam jumlah besar dan memengaruhi pembangunan dan kemakmuran wilayah tersebut (ADB, 2019).

Gambar 1.4
Proyeksi Inflasi Dunia, Negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN
(persen) Tahun 2019 dan 2020



Sumber : IMF, ADB

Inflasi di negara-negara ASEAN tahun 2019 sebesar 2,6 persen diperkirakan sedikit menurun dibandingkan tahun 2018, lalu kembali di angka 2,7 persen pada 2020. Hal ini dipengaruhi perlambatan ekonomi dan rendahnya harga minyak dunia, bahkan ketika beberapa negara menaikkan harga yang diatur (*administered prices*) (ADB, 2019).

Berdasarkan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada 2019 dan 2020 yang akan naik tipis, inflasi Indonesia diperkirakan cenderung tidak berubah pada kisaran 3,2 persen pada 2019 dan 3,3 persen pada 2020. Karena penurunan harga minyak dunia, kemungkinan harga bahan bakar nasional yang diatur pemerintah tidak akan berubah. Guna menjaga harga tetap terkendali, pemerintah menyusun formula harga baru untuk bahan bakar yang tidak disubsidi.

Daya Saing Industri 4.0

Berbicara seputar perekonomian suatu negara, rasanya tidak lepas dari bagaimana negara tersebut memiliki daya saing dibandingkan negara lain. Sejak 2019, WEF memperkenalkan Indeks Daya Saing Global 4.0. Indeks ini dibangun dengan konsep baru yang mengintegrasikan pilar-pilar yang mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang seiring revolusi industri 4.0. Indeks Daya Saing Global 4.0 menekankan peran modal manusia, inovasi, ketahanan dan kecerdasan, sebagai pendorong sekaligus cerminan keberhasilan revolusi industri 4.0. Metode baru ini juga memasukkan penggunaan teknologi yang lebih baik sebagai pelengkap pilar-pilar daya saing lainnya (WEF, 2019).

Indeks Daya Saing Global 4.0 atau *Global Competitiveness Index* (GCI) 4.0 terdiri dari 12 pilar dengan 98 indikator dengan rentang skor 0-100. Untuk meningkatkan daya saing, sebuah negara tidak bisa hanya mengalami kemajuan pada salah satu pilar, namun kinerja seluruh pilar harus meningkat bersama-sama. Hal ini berarti, tidak ada pilar yang dapat diabaikan untuk mewujudkan peningkatan produktivitas yang signifikan. Disamping itu, dengan menggerakkan seluruh pilar akan meningkatkan ketahanan suatu negara terhadap guncangan ekonomi yang terjadi.

Tabel 1.4 menunjukkan hasil Indeks Daya Saing Global yang dihitung oleh WEF, dimana tahun 2016/2017 dan 2017/2018 diukur dengan konsep lama sementara 2018 diukur dengan konsep baru GCI 4.0 dan tahun 2017 dilakukan *backcasting* dengan metode baru. Dengan konsep lama, Swiss berhasil mempertahankan keunggulan daya saing negaranya di posisi teratas selama sembilan tahun berturut-turut. Namun dengan konsep baru GCI 4.0, posisi Swiss sebagai peringkat teratas berhasil digeser oleh Amerika Serikat. Hal ini disebabkan Amerika Serikat merupakan negara paling kompetitif dengan pencapaian yang memuaskan di hampir setiap pilar daya saing. Amerika Serikat menduduki peringkat 1 atau 2 teratas untuk setiap pilar pasar dan ekosistem inovasi. Skor daya saing 4.0 Amerika Serikat tahun 2018 sebesar 85,6. Skor ini menunjukkan ada selisih sekitar 14 poin dari batas atas 100 yang berarti sebagai negara dengan daya saing tertinggi, Amerika Serikat masih memiliki beberapa ruang untuk perbaikan.

Tabel 1.4 Perbandingan Peringkat Indeks Daya Saing Indonesia dengan Beberapa Negara Lainnya

Negara	2016/2017 ¹	2017/2018 ¹	2017 ²	2018 ²
Swiss	1	1	4	4
Swedia	6	7	9	9
Singapura	2	3	2	2
Amerika Serikat	3	2	1	1
Jerman	5	5	3	3
Jepang	8	9	8	5
Finlandia	10	10	12	11
Belanda	4	4	5	6
Norwegia	11	11	14	16
Denmark	12	12	11	10
Kanada	15	14	10	12
Hongkong SAR	9	6	7	7
Inggris Raya	7	8	6	8
Tiongkok	28	27	28	28
India	39	40	63	58
Afrika Selatan	47	61	62	67
Brazil	81	80	69	72
Turki	55	53	58	61
Meksiko	51	51	44	46
Rusia	43	38	45	43
Indonesia	41	36	47	45
Malaysia	25	23	26	25
Thailand	34	32	40	38
Vietnam	60	55	74	77
Filipina	57	56	68	56
Kamboja	89	94	109	110

Catatan : ¹ 2015/2016 (140 negara), 2016/2017 (138 negara), 2017/2018 (137 negara)

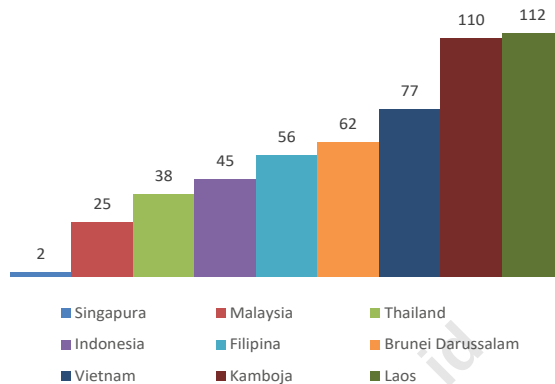
² Tahun 2018 GCI konsep baru yaitu GCI 4.0 (140 negara), Tahun 2017 *backcast* (135 negara)

Sumber : *The Global Competitiveness Report* 2016/2017, 2017/2018, 2018

Pengukuran *backcasting* GCI 4.0 tahun 2017 mencatat Amerika Serikat menduduki peringkat pertama, disusul Singapura, Jerman dan Swiss. Tahun 2018, tidak ada perubahan peringkat pada posisi empat teratas. Hal ini berarti keempat negara ini mampu mempertahankan daya saingnya dari 2017-2018 menggunakan konsep GCI 4.0. Jepang berhasil naik tiga peringkat dari peringkat 8 pada 2017 menjadi peringkat 5 pada 2018. Beberapa negara juga berhasil menaikkan peringkat daya saingnya pada 2018 dibandingkan 2017, seperti Finlandia, Denmark, India, Rusia, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Indonesia berhasil menaikkan peringkat daya saingnya dari posisi 47 dari 135 negara pada 2017 menjadi peringkat 45 dari 140 negara. Hal ini merupakan sebuah pencapaian dari akselerasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai negara berkembang di Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan keempat GCI 4.0 di kawasan ASEAN setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand (Gambar 1.5). Dibandingkan dengan negara tetangga Singapura di peringkat kedua dunia, Indonesia masih jauh tertinggal. Singapura berhasil mencatatkan skor

Gambar 1.5
Perbandingan Peringkat Indeks Daya Saing Indonesia dengan Beberapa
Negara Berkembang di Kawasan ASEAN Tahun 2018



Sumber : *The Global Competitiveness Report 2018*

daya saing yang tinggi pada pilar institusi, infrastruktur, stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, dan kesehatan. Malaysia sebagai negara tetangga juga berhasil menempati peringkat 25 dengan keunggulan di pilar stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, dan kesehatan. Sementara itu, Thailand menduduki peringkat 38 dengan skor daya saing yang unggul di pilar stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, dan kesehatan. Oleh sebab itu, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk mengejar ketertinggalan daya saingnya baik di tataran regional maupun global.

Hasil GCI 4.0 pada 2018 menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 45. Indonesia memperoleh keuntungan dari ukuran pasar yang sangat besar dan berhasil menduduki peringkat 8 dunia. Hal ini sangat wajar mengingat jumlah penduduk Indonesia pada 2018 berdasarkan Proyeksi Penduduk 2015-2045 mencapai 264,16 juta jiwa. Disamping itu, pilar dinamisme bisnis berada di posisi 30 dan merupakan pertanda baik bagi masa depan Indonesia. Pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim usaha di Indonesia salah satunya dengan meningkatkan kemudahan berusaha (*ease of doing business*). Namun di sisi lain, Indonesia perlu bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan di pilar inovasi, pasar tenaga kerja, serta institusi.

Pada kelompok pilar Lingkungan Pendukung, pilar stabilitas makroekonomi mencatatkan skor yang tertinggi (89,7) dibandingkan pilar lainnya. Pada kelompok pilar Sumber Daya Manusia, skor pilar kesehatan (71,7) lebih tinggi dibandingkan pilar lainnya. Pada kelompok pilar pasar, pilar ukuran pasar menunjukkan skor tertinggi (81,6). Sementara pada kelompok pilar ekosistem inovasi, skor pilar dinamisme bisnis (69,0) lebih tinggi dibandingkan pilar lainnya.

Secara peringkat, Indonesia memperoleh rekor terburuk pada pilar kesehatan dengan menduduki peringkat 95. Hal ini dipengaruhi Angka Harapan Hidup di Indonesia yang jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lainnya. Pilar

Tabel 1.5 Nilai dan Peringkat Indeks Daya Saing Indonesia Menurut Pilar Daya Saing

Pilar Daya Saing	2017-2018		Pilar Daya Saing	2018 ¹	
	Nilai	Peringkat		Nilai	Peringkat
Persyaratan Dasar	5,0	46	Lingkungan Pendukung		
Institusi	4,3	47	Institusi	57,9	48
Infrastruktur	4,5	52	Infrastruktur	66,8	71
Makroekonomi	5,7	26	Adopsi TIK	61,1	50
Kesehatan dan Pendidikan Dasar	5,4	94	Stabilitas Makroekonomi	89,7	51
Penopang Efisiensi	4,5	41	Sumber Daya Manusia		
Pendidikan Tinggi	4,5	64	Kesehatan	71,7	95
Efisiensi Pasar Barang	4,6	43	Kemampuan	64,1	62
Efisiensi Pasar Tenaga Kerja	3,9	96	Pasar		
Pasar Keuangan	4,5	37	Pasar produk	58,5	51
Kesiapan Teknologi	3,9	80	Pasar Tenaga Kerja	57,8	82
Besaran Pasar	5,7	9	Sistem Finansial	63,9	52
Inovasi dan Kecanggihan Bisnis	4,3	31	Ukuran Pasar	81,6	8
Kecanggihan Bisnis	4,6	32	Ekosistem Inovasi		
Inovasi	4,0	31	Dinamisme Bisnis	69,0	30
			Kemampuan Inovasi	37,1	68
Indeks Daya Saing	4,7	36	Indeks Daya Saing 4.0	64,9	45

Catatan : ¹ Tahun 2018 GCI mengacu pada konsep baru yaitu GCI 4.0

Sumber : *The Global Competitiveness Report 2017/2018 dan 2018*

pasar tenaga kerja Indonesia juga berada di urutan 82 dengan skor 57,8. Hal ini disebabkan Indonesia mengalami penurunan skor pada indikator pembentuk pilar pasar tenaga kerja antara lain kerjasama dalam hubungan atasan-bawahan, kebijakan untuk tenaga kerja aktif, kemudahan merekrut tenaga kerja asing, serta ketergantungan pada manajemen profesional.

Skor daya saing Indonesia pada pilar kemampuan inovasi merupakan yang terendah, yaitu 37,1. Sebagai negara berkembang, Industri Manufaktur merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Oleh sebab itu, penguatan inovasi di sektor industri merupakan sebuah keharusan untuk mendongkrak daya saing Indonesia. Pemanfaatan inovasi menjadi kunci untuk mengambil peluang dari perubahan sistem global di era revolusi industri generasi keempat, seperti penggunaan teknologi digital dan internet pada industri nasional.

Suatu negara akan memperoleh keuntungan dari pemanfaatan inovasi apabila diiringi dengan akselerasi kesiapan para pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi terkini. Penggunaan internet bermanfaat untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan pendapatan. Guna memberikan arah dan panduan yang komprehensif bagi pengembangan industri nasional yang berdaya saing global di masa depan sebagai strategi revolusi industri 4.0 di Indonesia, disusunlah *Making Indonesia 4.0*.

Kecerdasan dan kesiapan masa depan merupakan kunci perubahan dunia. Seiring transformasi dan disrupsi yang dibawa oleh Revolusi Industri

4.0, kemampuan adaptasi dan kecerdasan seluruh pemangku kepentingan merupakan motor yang mejadi tokoh utama kesuksesan ekonomi. Tenaga kerja dengan keterampilan yang tepat dan paham teknologi mampu menjadi subyek transformasi ekonomi. Pemerintah sebagai lembaga institusional harus mampu memainkan perannya untuk mendukung produktivitas.

Inovasi menjadi keharusan bagi negara maju dan prioritas untuk mencapai pertumbuhan di negara berkembang. Inovasi dunia saat ini masih berpusat di Jerman, Amerika Serikat, dan Swiss. Di sebagian besar negara, inovasi masih sangat terbatas diimplementasikan hanya pada beberapa sektor. Padahal, inovasi berperan penting mendorong daya saing suatu negara.

Tantangan Ekonomi Indonesia Masa Depan

WEF memandang ada tiga masalah utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yaitu kesenjangan yang meningkat, investasi yang lemah, dan proteksionisme perdagangan. Bagi negara berkembang, diperlukan kebijakan yang lebih ketat untuk mengurangi dampak buruk dari ancaman berupa konflik, krisis, dan ketegangan geopolitik yang meningkat, seperti ketidakseimbangan keuangan dan makroekonomi yang terjadi di Turki dan Argentina, pelemahan sentimen, dan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Optimisme perekonomian Indonesia ke depan didukung oleh akselerasi pembangunan infrastruktur guna mendorong konektivitas kawasan ekonomi dan pariwisata, efisiensi logistik, dan meningkatkan produktivitas perekonomian, perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Sektor industri dan pariwisata juga terus digenjot untuk memperkuat struktur perekonomian dan menurunkan defisit transaksi berjalan. Ekonomi digital diharapkan menjadi salah satu solusi bagi pengembangan UMKM dan inklusi keuangan (BI, 2019).

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 sebesar 5,0-5,4 persen dengan didukung permintaan domestik yang masih kuat dari sisi konsumsi dan investasi. Konsumsi swasta yang meliputi konsumsi rumah tangga dan konsumsi Lembaga Non Profi yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tumbuh kuat dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi 2019. Konsumsi rumah tangga tetap kuat, tercermin dari daya beli masyarakat yang terjaga seiring kenaikan pendapatan masyarakat yang ditopang inflasi yang rendah, serta bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Sementara itu, konsumsi LNPRM naik seiring kebutuhan penyelenggaraan Pemilu 2019. Investasi berupa Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) melaju sejalan pembangunan proyek infrastruktur yang masih berlanjut, terutama investasi nonbangunan. Aliran masuk modal asing diperkirakan mengalami surplus seiring perbaikan iklim usaha. Dari faktor eksternal, defisit transaksi berjalan dan peningkatan aliran masuk modal asing telah mendukung ketahanan eksternal. Defisit transaksi berjalan ditekan melalui pengendalian impor, salah satunya dengan Program Biodesel 20 (B20). Ekspor manufaktur dan sektor pariwisata terus didorong untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional (BI, 2019).

Tabel 1.6 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Indonesia (Persen) Tahun 2019 dan 2020

Indikator	2019	2020
Pertumbuhan Ekonomi ¹⁾	5,0-5,4	5,1-5,5
Pertumbuhan Ekonomi ²⁾	5,2	5,2
Pertumbuhan Ekonomi ³⁾	5,2	5,3
Inflasi ¹⁾	3,5±1,0	3,0±1,0
Inflasi ²⁾	3,3	3,6
Inflasi ³⁾	3,2	3,3

Sumber : 1) Publikasi Laporan Perekonomian Indonesia 2018, Bank Indonesia
 2) Publikasi *World Economic Outlook Database* April 2019, *International Monetary Fund* (IMF)
 3) Publikasi *Asian Development Outlook* (ADO) 2019, *Asian Development Bank* (ADB)

Namun Indonesia masih harus waspada karena ekonomi domestik masih dibayangi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih dengan tren melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini tentunya berdampak pada kinerja perekonomian nasional dari sisi perdagangan. Volume perdagangan dunia dan harga komoditas diperkirakan masih berada dalam tren yang melambat sebagai imbas perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang masih terus berlanjut. Ekonomi domestik juga masih dibayangi ketidakpastian pasar keuangan global yang dapat mendorong kenaikan premi risiko investasi di negara berkembang. Kondisi ini dapat menstimulus pembalikan aliran modal dari negara berkembang dan memengaruhi likuiditas (BI, 2019).

Inflasi diperkirakan berada pada kisaran 2,5 hingga 4,5 persen pada 2019. Pemerintah terus berupaya mengeluarkan kebijakan moneter yang konsisten sehingga capaian inflasi tetap terkendali. Inflasi inti diperkirakan tetap terjaga seiring minimalnya tekanan harga global, produksi yang mencukupi permintaan domestik, dan prospek inflasi yang masih sesuai ekspektasi. Inflasi *Volatile Food* tetap terkendali sebagai hasil dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui harga pangan yang terjangkau, ketersediaan stok pangan, arus distribusi yang lancar, dan komunikasi yang efektif. Inflasi *Administered Prices* juga terjaga seiring minimnya kebijakan pemerintah untuk penyesuaian tarif dan harga komoditas strategis, seperti bahan bakar dan energi. Pada setiap daerah, inflasi diperkirakan tetap stabil dengan ditopang penguatan kerjasama antardaerah untuk memenuhi ketersediaan stok pangan. Hal ini sejalan dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2019-2021 untuk inflasi yang rendah dan stabil (BI, 2019).

Ekonomi global yang diperkirakan kembali menguat pada 2020 berimbas pada kenaikan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,1-5,5 persen dan inflasi di kisaran 2 hingga 4 persen menurut Bank Indonesia. Ekonomi nasional diperkirakan terus membaik dalam jangka menengah seiring pemulihan ekonomi global. Peningkatan produktivitas didukung oleh akselerasi pembangunan infrastruktur, modal manusia, dan perbaikan iklim investasi. Struktur ekonomi juga menguat dengan ditopang konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor neto.

Inflasi dalam jangka menengah diperkirakan masih berada dalam level yang rendah seiring peningkatan efisiensi dan produktivitas. Tren inflasi diperkirakan melambat dengan kisaran $3,0 \pm 1,0$ persen. Harga komoditas yang cenderung stabil dan perbaikan infrastruktur telah mendorong biaya transportasi dan logistik semakin rendah dan berkontribusi pada penurunan inflasi.

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen pada 2019-2020 mendatang. Inflasi diperkirakan berada di level 3,3 persen pada 2019 dan meningkat ke level 3,6 persen pada 2020. Sementara itu, proyeksi dari ADB tidak jauh berbeda dari IMF dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada 2019 dan sedikit meningkat menjadi 5,3 persen pada 2020. Percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kemudahan usaha melalui perampingan administrasi pajak dan penyederhanaan perizinan merupakan langkah untuk menarik investasi swasta. Konsumsi swasta diperkirakan tetap solid, bantuan sosial pemerintah meningkat, dan inflasi tetap rendah. Pengeluaran yang cukup besar untuk penyelenggaraan Pemilu menjadi dorongan tambahan pada paruh pertama 2019. Dari sisi lapangan usaha, laju pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian dan Industri akan mengalami percepatan pada 2020. Industri sepatu dan pakaian menjadi penopang utama industri manufaktur pada 2019 dan 2020 (ADB, 2019).

ADB memproyeksikan inflasi di level 3,2 persen pada 2019 dan naik tipis di level 3,3, persen pada 2020. Angka ini masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 2,5 hingga 4,5 persen. Risiko eksternal utama perekonomian domestik berasal dari ketegangan perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok. Sementara itu, risiko internal bisa berasal dari faktor cuaca kering dan kemarau akibat El Nino atau pembatasan tarif impor yang menyebabkan ketidakpastian investasi dan bisnis (ADB, 2019).

Industri Pengolahan merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional. Sekitar 99 persen Industri Pengolahan di Indonesia berskala mikro kecil (UMK) dan identik dengan produktivitas rendah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya transformasi dari Industri Pengolahan untuk menyerap tenaga kerja dan menghasilkan output yang lebih tinggi. UMK cenderung memiliki adopsi TIK yang rendah sehingga daya saingnya terbatas.

Pemanfaatan teknologi baru untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor potensial di Indonesia perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, menggerakkan sektor manufaktur untuk meningkatkan produktivitas dan daya serap tenaga kerja dapat menjadi salah satu solusi. Namun di sisi lain, sekitar lebih dari 99 persen usaha manufaktur di Indonesia merupakan usaha dengan skala mikro dan kecil. Usaha Mikro Kecil (UMK) identik dengan produktivitas rendah dan adaptasi teknologi yang rendah. Itulah sebabnya, UMK akan kalah bersaing dengan usaha sejenis yang mampu memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk menyederhanakan logistik dan mampu menciptakan produk baru yang lebih inovatif dan kompetitif. Pemanfaatan teknologi digital merupakan suatu keharusan untuk mampu bersaing di tengah globalisasi saat ini dengan masuknya revolusi industri 4.0 (ADB, 2019).

Guna mengatasi adopsi teknologi di Indonesia yang masih rendah, pemerintah mencanangkan program *Making Indonesia 4.0*. Program ini nantinya akan fokus pada peningkatan adopsi teknologi dan produktivitas di lima sektor manufaktur unggulan yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, mobil, elektronik, dan bahan kimia. Terdapat 10 area prioritas untuk meningkatkan kinerja dari industri-industri tersebut yaitu : 1) meningkatkan kemampuan di hulu; 2) mengoptimalkan zona industri; 3) mencakup keberlanjutan; 4) memberdayakan usaha kecil; 5) membangun infrastruktur digital; 6) meningkatkan modal manusia; 7) mengadopsi teknologi; 8) menarik minat investor asing; 9) membangun ekosistem inovasi; 10) memastikan kebijakan yang koheren (ADB, 2019).

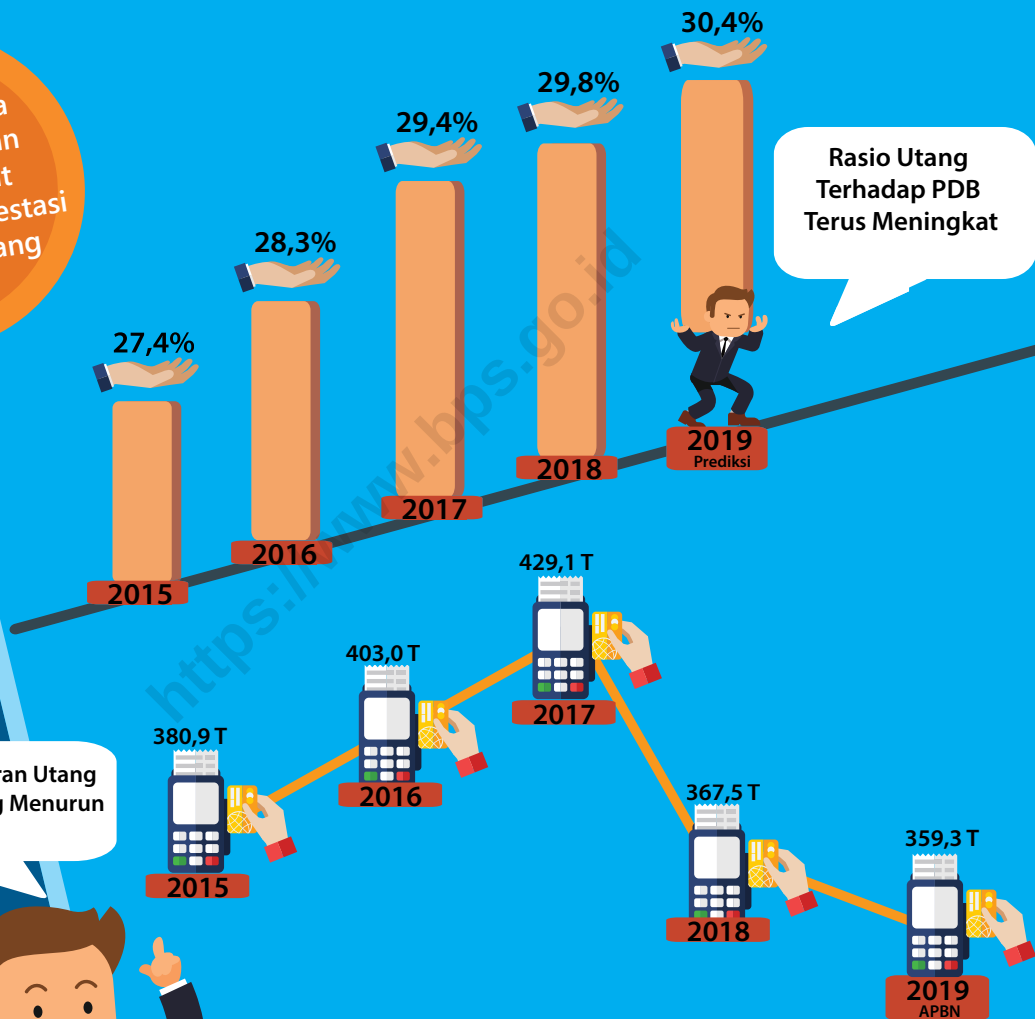
Diperlukan adanya peta jalan untuk mengimplementasikan sasaran tersebut. Peta jalan disusun untuk mengarahkan bagaimana membantu UMK tumbuh dan berkembang sehingga memperoleh manfaat dari adopsi teknologi baru. Disamping itu, UMK perlu mendapat bantuan untuk kemudahan akses kredit perbankan, investasi dalam infrastruktur digital, dan meningkatkan difusi teknologi antar perusahaan. Forum diskusi antara usaha lokal dengan usaha asing atau usaha yang telah sukses menerapkan teknologi baru perlu dibuka selebar-lebarnya sehingga informasi akan manfaat revolusi industri dapat dipahami dan diterapkan oleh UMK yang ada di Indonesia (ADB, 2019).

Arah kebijakan ke depan untuk memelihara momentum pertumbuhan yang telah dicapai perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya. Sinergi kebijakan moneter dan fiskal diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Kebijakan moneter diharapkan dapat menjaga inflasi tetap terkendali. Sementara itu, kebijakan finansial diarahkan dengan menjaga keseimbangan primer dan defisit APBN. Hal terpenting yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Empat strategi utama untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan yaitu daya saing ekonomi, kapasitas dan kapabilitas industri, ekonomi digital, dan struktur serta sumber pembiayaan. Pemerintah juga berupaya mengembangkan sektor pariwisata untuk memajukan ekonomi daerah melalui pengelolaan potensi daerah menjadi destinasi wisata (BI, 2019).

Penerimaan dan Pengeluaran Negara

2

Utang Negara untuk kegiatan yang bersifat produktif & investasi jangka panjang



Beberapa Proyek yang Bersumber dari Utang Negara


MRT Jakarta
JICA
JPY 125,2 miliar


Waduk Jatigede
Tiongkok
US\$ 332,6 juta


Jalur KA Cirebon-Kroya
SBSN
Rp. 800 miliar

Kredit

Sumber data: Informasi APBN 2019 dan LKPP 2018, Kemenkeu RI
Gambar vector: Freepik dari www.freepik.com

Indonesia sebagai negara berkembang masih sangat bergantung terhadap kondisi arus perekonomian global. Perekonomian global masih mengandung unsur ketidakpastian, meskipun demikian kabar baik datang dari membaiknya perekonomian Amerika sebagai motor utama dalam perekonomian global saat ini. Efek dari perbaikan ekonomi Amerika Serikat ini tentu adalah normalisasi pada kebijakan moneter tetapi yang patut diwaspadai adalah menguatnya mata uang US\$, yang artinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang ini semakin tinggi dan meningkatkan resiko tekanan di pasar keuangan. Disamping itu, efek dari hal ini juga adalah adanya moderasi Tiongkok dimana kedepannya dikhawatirkan akan ada perang dagang antar Amerika Serikat-Tiongkok. Selain itu, tantangan ekonomi lain yang diluar kuasa manusia adalah bencana alam atau keadaan iklim dan cuaca saat ini serta adanya ketegangan geopolitik. Melihat tantangan yang besar ini dan imbasnya terhadap perekonomian nasional, maka perlu disusun suatu strategi terutama dalam keuangan negara agar ekonomi nasional dapat berjalan stabil.

Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan hal krusial dalam memastikan perekonomian Indonesia dapat kokoh dari dampak perekonomian global sekaligus berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. APBN dibuat setiap tahun bersama DPR dan dibentuk UU nya. Adapun pada APBN 2019 ini merupakan jbaran terakhir dari RPJMN 2015-2019. Tema pada APBN 2019 adalah “Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM”. Setiap tahun postur APBN dibentuk agar sehat, adil dan mandiri, artinya dalam APBN direncanakan anggaran belanja negara yang produktif sesuai keperluan, penerimaan negara yang optimal melalui perpajakan, dan di tahun ini anggaran belanja untuk bencana alam dan pembangunan di daerah akan lebih ditekankan.

Dalam APBN 2019 ini, pemerintah juga menganggarkan pembiayaan untuk program kesejahteraan rakyat. Di bidang kesehatan pada tahun ini, pemerintah menganggarkan untuk membuat program penurunan *stunting* terintegrasi di 160 Kab/Kota; di bidang pendidikan, penajaman anggaran pendidikan dengan cara kesesuaian pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri atau lapangan pekerjaan; melaksanakan program keluarga harapan untuk bidang kesehatan dan pendidikan; menerapkan program *tax expenditure*; dan antisipasi dana penanggulangan bencana; program pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha); dan menerapkan DAU Tambahan di tingkat kelurahan.

Target ekonomi makro yang ingin dicapai pada penerapan APBN 2019 nantinya adalah ekonomi tumbuh di angka 5,3 persen. Target ini berdasarkan pertimbangan adanya penyelesaian pembangunan infrastruktur diperkirakan tetap menjadi salah satu pendorong investasi serta adanya pemilu di tahun ini yang diprediksi akan mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, organisasi sosial dan partai politik serta belanja pemerintah. Meskipun demikian, adanya pemilu juga berisiko adanya tendensi investor untuk *wait and see* setelah hasil pemilu. Untuk mendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal juga diterapkan dengan memperbaiki iklim investasi yang

berorientasi ekspor dan meningkatkan daya saing untuk memperbaiki struktur transaksi berjalan. Kemudian untuk menurunkan risiko perang dagang yang mungkin terjadi, langkah-langkah strategis terus dilakukan untuk memperbaiki struktur neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan. Selain itu, strategi pengembangan industri hulu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku.

Mengingat dampak dari perekonomian global yang berimbas pada melemahnya nilai tukar rupiah, maka pemerintah memprediksi kenaikan inflasi di angka 3,5 persen, nilai tukar terhadap US\$ di kisaran Rp. 15.000, suku bunga SPN 5,3 persen, harga minyak US\$ 70/barrel, lifting minyak di 775 ribu barrel/hari, dan *lifting* gas 1.250 ribu barrel setara minyak per hari. Pertimbangan akan ketidakpastian perekonomian global membuat ekonomi makro Indonesia harus waspada agar anggaran dan stabilitas tetap terjaga.

Pajak Sumber Utama Penerimaan Negara

Penerimaan negara merupakan sumber utama dalam pendanaan program-program pembangunan nasional. Penerimaan negara yang sudah ditargetkan pemerintah selama ini belum dapat sepenuhnya mencukupi target pengeluaran selama setahun. Untuk itu pemerintah terus menggali berbagai sumber pendapatan agar penerimaan negara dapat meningkat terus. Pemerintah selalu berharap dari penerimaan tersebut dapat digunakan seoptimal mungkin untuk memenuhi pengeluaran negara sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan dan pembangunan di dalam negeri dari utang ke negara lain.

Secara umum penerimaan negara selalu meningkat setiap tahun sejalan dengan belanja negara dan inflasi yang turut meningkat. Pada tahun 2019, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 2.165,10 triliun atau tumbuh 11,39 persen dari realisasi APBN 2018. Postur penerimaan negara terdiri dari komponen penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Pajak tetap menjadi sumber utama penerimaan negara disusul dengan penerimaan bukan pajak dan hibah. Penerimaan dari hibah adalah yang terkecil dan tidak bisa diandalkan sebagai penerimaan yang utama, karena hibah yang diterima oleh pemerintah sangat tergantung pada komitmen dan jenis kegiatan yang ditargetkan oleh pemberi hibah.

Tabel 2.1 Penerimaan Negara Tahun 2015-2019 (triliun rupiah)

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN
A. Penerimaan Negara dan Hibah	1508,00	1555,93	1666,38	1943,67	2165,10
1. Penerimaan Dalam Negeri	1496,05	1546,95	1654,75	1928,11	2164,70
1. Penerimaan Pajak	1240,42	1284,97	1343,53	1518,79	1786,40
2. Penerimaan bukan pajak	255,63	261,98	311,22	409,32	378,30
2. Hibah	11,97	8,99	11,63	15,56	0,40

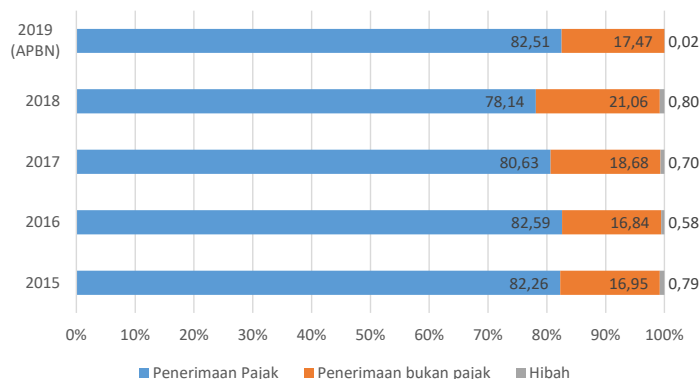
Sumber : Informasi APBN 2019, LKPP 2015, 2016, 2017 dan 2018, Kemenkeu RI

Hibah yang diterima pemerintah baik dari dalam negeri maupun luar negeri digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, atau diterushibahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan *MoU* pemberi donor dengan pemerintah Indonesia. Penerimaan dari hibah oleh pemerintah digunakan untuk membiayai program-program penanganan perubahan iklim, pengurangan emisi di perkotaan, keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan. Penerimaan hibah dalam APBN tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp 0,4 triliun atau turun 97 persen dari tahun 2018. Hibah yang diterima pada tahun 2018 adalah yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu sebesar Rp 15,56 triliun. Sebagian besar hibah bersumber dari dalam negeri dan berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2018. Selain itu, kesadaran K/L untuk melaporkan hibah langsung yang diterima juga semakin membaik.

Selanjutnya sebagai kontribusi penerimaan negara terbesar kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 378,30 triliun atau turun 7,58 persen dari realisasi APBN tahun 2018. PNBP sendiri berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan dana dan hak negara lainnya. Sumber inilah yang membuat PNPB tidak jauh berbeda setiap tahunnya. Namun pada APBN 2019, PNPB diperkirakan dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan SDA migas dan nonmigas, kenaikan pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan terutama bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu, adanya Perubahan Undang-undang tentang PNBP yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat turut memberi optimisme atas kinerja dan layanan PNBP yang semakin baik kedepannya.

Beralih ke primadona penerimaan negara, yaitu penerimaan pajak. Pajak memegang peran besar dalam pertumbuhan pendapatan negara, dimana

Gambar 2.1
Kontribusi Penerimaan Negara Tahun 2015-2019



Sumber : Informasi APBN 2019, LKPP 2015, 2016, 2017 dan 2018, Kemenkeu RI

pajak memiliki kontribusi mencapai 80 persen dari penerimaan negara. Gambar 2.1 memperlihatkan kontribusi penerimaan negara dalam lima tahun terakhir. Pada APBN tahun 2019 penerimaan pajak diperkirakan berkontribusi mencapai 82,51 persen dari pendapatan negara. Dilihat dari tren lima tahun terakhir, kontribusi penerimaan pajak cenderung meningkat setiap tahunnya. Penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp 1.786,4 triliun atau tumbuh 17,62 persen dari tahun 2018. Peningkatan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam optimalisasi potensi perpajakan, peningkatan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, pengoptimalan transparansi informasi perpajakan dan perjanjian perpajakan internasional, dan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan.

**Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri (triliun rupiah)
Tahun 2015-2019**

Rincian	2015	2016	2017	2018	2019
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN
Pajak Penghasilan (PPh)	602,31	666,21	646,79	749,98	894,44
- PPh Migas	49,67	36,10	50,32	64,70	66,15
- PPh Nonmigas	552,64	630,11	596,48	685,28	828,29
PPN dan PPnBM	423,71	412,21	480,72	537,27	655,39
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29,25	19,44	16,77	19,44	19,10
Cukai	144,64	143,53	153,29	159,59	165,50
Pajak Lainnya	5,57	8,10	6,74	6,63	8,61

Sumber : Informasi APBN 2019, LKPP 2015, 2016, 2017 dan 2018, Kemenkeu RI

Kontribusi utama penerimaan perpajakan adalah berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Pada APBN 2019, pemerintah menargetkan penerimaan PPh sebesar Rp 894,44 triliun dan PPN dan PPnBM sebesar Rp 655,39 triliun. Untuk PPh, kontribusi terbesar berasal dari penerimaan PPh Nonmigas yang ditargetkan mencapai Rp 828,29 triliun atau tumbuh 20,87 persen dari realisasi tahun 2018. Sementara untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp 19,10 triliun atau turun 1,75 persen dari tahun 2018. Pemerintah sedang berupaya mendorong konsumsi rumah tangga agar dapat meningkatkan penerimaan PPN pada tahun 2019.

Selain PPh dan PPN, pendapatan pajak dari cukai juga menjadi perhatian, dilihat tren lima tahun terakhir pendapatan cukai selalu meningkat setiap tahunnya. Penerimaan yang berasal dari cukai tidak lepas dari peran industri rokok yang sangat besar di Indonesia. Tingginya jumlah perokok di Indonesia membuat industri ini terus berkembang. Adanya dampak terhadap kesehatan masyarakat, pemerintah terus berupaya melakukan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau agar lebih tinggi. Pada APBN 2019, Pemerintah memasang target penerimaan cukai sebesar Rp 165,50 triliun atau tumbuh 3,70 persen dari 2018. Selain itu, pemerintah juga menerapkan program penertiban rokok ilegal agar dapat mendorong penerimaan pajak yang berasal dari cukai.

Mengingat lebih besarnya belanja negara dibandingkan pendapatannya membuat pemerintah terus mengupayakan peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan perpajakan di tahun 2019 dapat dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan harga komoditas utama dunia dan dampak reformasi perpajakan. Beberapa faktor teknis yang memengaruhi perkiraan tumbuhnya penerimaan perpajakan tahun 2019 antara lain meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak sebagai dampak program amnesti pajak, perbaikan dan penyempurnaan sistem teknologi dan informasi perpajakan untuk kemudahan pelaporan bagi Wajib Pajak, serta penguatan pemeriksaan dan penyempurnaan peraturan perpajakan. Disamping itu, untuk mencapai target penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2019, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menerapkan beberapa kebijakan umum di bidang perpajakan, sebagaimana terangkum dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kebijakan Umum Perpajakan Tahun 2019

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Optimalisasi penggalan potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang <i>up to date</i> dan terintegrasi.
2.	Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak untuk menciptakan ketaatan membayar pajak (<i>sustainable compliance</i>)
3.	Memberikan insentif perpajakan secara selektif tepat sasaran untuk mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri.
4.	Memengaruhi konsumsi masyarakat terutama terkait dengan Barang Kena Cukai (BKC) untuk mengurangi eksternalisasi negatif.
5.	Transparansi informasi di bidang perpajakan dengan mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEOI); dan
6.	Melakukan redistribusi pendapatan dalam upaya menurunkan <i>inequality</i> .

Sumber : Nota Keuangan 2019, Kemenkeu

Sebagai sumber penerimaan negara terbesar, pemerintah juga menerapkan kebijakan teknis perpajakan untuk mendukung kebijakan umumnya, adapun kebijakan teknis terangkum dalam tabel 2.4. Selain itu, pada bulan April 2018, Pemerintah telah mengeluarkan regulasi tentang *tax holiday* untuk mendorong investasi dan daya saing melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018. Regulasi ini bertujuan untuk memperbaiki skema insentif yang lebih memberikan kepastian dan penyederhanaan prosedur permohonan dalam pemberian fasilitas *tax holiday*. *Tax holiday* merupakan pembebasan pajak yang diberikan untuk perusahaan yang baru dibangun selama periode tertentu. Lalu, pada tahun 2019 Pemerintah juga berkomitmen memberikan kemudahan berusaha di bidang perpajakan kepada sektor informal khususnya pelaku usaha di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Serta mulai diterbitkannya Laporan Belanja Perpajakan (*tax expenditure report*) mulai tahun 2018 akan memudahkan pemerintah menunjukkan penerimaan perpajakan yang berkurang atau tidak

jadi dikumpulkan akibat adanya kebijakan seperti insentif pajak, pengurangan, pembebasan, atau kebijakan khusus lainnya di bidang perpajakan.

Tabel 2.4 Kebijakan Teknis Perpajakan Tahun 2019

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Penguatan fungsi pelayanan (<i>tax service</i>) dalam rangka mendorong terciptanya kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela.
2.	Peningkatan efektivitas pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak antara lain melalui implementasi <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEOI) dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
3.	Ekstensifikasi dan peningkatan pengawasan sebagai tindak lanjut pasca program <i>tax amnesty</i> .
4.	Peningkatan efektivitas fungsi ekstensifikasi melalui pendekatan <i>end-to-end</i> , antara lain penanganan sektor informal (UMKM) melalui pendekatan <i>Business Development Services</i> (BDS).
5.	Pelaksanaan penegakan hukum (<i>law enforcement</i>) secara berkeadilan.
6.	Melanjutkan reformasi perpajakan secara komprehensif baik menyangkut SDM, peraturan perpajakan, teknologi informasi, maupun penyempurnaan proses bisnis.

Sumber : Nota Keuangan 2019, Kemenkeu

Adanya pemilihan umum presiden dan legislatif di tahun 2019 juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi, iklim investasi, dan aktivitas ekonomi. Di tahun tersebut terjadi peningkatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk anggaran pelaksanaan pemilu serta yang dilakukan oleh para partai politik dan organisasi masyarakat untuk keperluan kampanye. Peningkatan belanja tersebut memicu peningkatan penerimaan pajak dari swasta berupa Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta peningkatan pelaporan pajak dari calon legislatif, karenanya diprediksi penerimaan perpajakan akan naik di tahun ini.

Pajak masih menjadi andalan untuk penerimaan negara, pemerintah berharap kedepannya pembiayaan APBN dapat terjaga dan berkelanjutan dengan penerimaan pajak yang pasti. Kesadaran akan kepatuhan dan kewajiban pajak juga diharapkan menjadi lebih tinggi oleh para wajib pajak. Sehingga kedepannya, ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari utang dapat berkurang.

Belanja Negara Harus Berprinsip *Value for Money*

Penerimaan yang diterima negara akan digunakan sebagai pengeluaran untuk membiayai program-program pemerintah dan pembangunan di dalam negeri. Anggaran pengeluaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai sasaran-sasaran pokok dan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang direncanakan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Jika pendapatan diharapkan besar, maka pada pengeluaran diharapkan sehemat dan seefektif mungkin untuk pembiayaan program pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah selalu berharap agar pengeluaran

negara dapat seimbang dengan penerimaannya. Namun selama ini APBN masih selalu mengalami defisit, sehingga pembiayaan pembangunan masih tergantung pada utang negara.

Belanja negara diarahkan mencapai tujuan pembangunan nasional seperti infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dalam rangka pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas. Pada APBN tahun 2019, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp 2.461,11 triliun atau tumbuh 11,20 persen dari realisasi tahun 2018. Apabila ditinjau selama lima tahun terakhir, anggaran belanja negara selalu tumbuh di tingkat moderat rata-rata kisaran 8 persen. Komponen pengeluaran yang dianggarkan di APBN terdiri dari pengeluaran untuk pemerintah pusat dan pengeluaran untuk daerah. Pengeluaran untuk pemerintah pusat mengambil porsi yang lebih besar di atas 60 persen dibanding pengeluaran untuk daerah. Anggaran untuk pemerintah pusat pada APBN 2019 mencapai Rp 1.634,34 triliun atau sekitar 66,41 persen dari total anggaran belanja Negara. Anggaran pengeluaran tersebut lebih tinggi dari anggaran pengeluaran daerah yang mencapai Rp 826,77 triliun atau 33,59 persen dari total anggaran belanja negara.

Jika dilihat lebih rinci, anggaran pengeluaran pemerintah pusat terdiri dari pengeluaran untuk kementerian/lembaga (K/L) dan untuk non kementerian/lembaga. Pengeluaran untuk K/L mengambil porsi yang cukup besar dalam pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan program dan atau kebijakan dari kementerian/lembaga. Anggaran belanja K/L pada tahun 2019 ditargetkan tumbuh 1,05 persen dari realisasi APBN 2018, yaitu sebesar Rp 855,45 triliun. Sementara anggaran belanja non K/L diperkirakan mencapai Rp 778,89 triliun pada tahun 2019, atau tumbuh 27,94 persen dari realisasi APBN 2018. Peningkatan besaran belanja ini sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mengakselerasi pencapaian target pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemenuhan kewajiban, dan pelaksanaan berbagai agenda nasional.

Sesuai dengan tema APBN tahun 2019, fokus belanja pemerintah pusat diarahkan agar lebih efektif dan produktif melalui penguatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas;

Tabel 2.5 Pengeluaran APBN Tahun 2015–2019 (triliun rupiah)

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN
B. Belanja Negara	1806,51	1864,27	2007,35	2213,12	2461,11
1. Pengeluaran Pemerintah Pusat	1183,30	1154,02	1265,36	1455,32	1634,34
1. Belanja K/L	732,10	684,20	765,13	846,56	855,45
2. Belanja Non K/L	451,20	469,81	500,22	608,76	778,89
2. Pengeluaran untuk daerah	623,14	710,26	741,99	757,79	826,77
1. Transfer ke daerah	602,37	663,58	682,23	697,93	756,77
2. Dana Desa	20,77	46,68	59,77	59,86	70,00

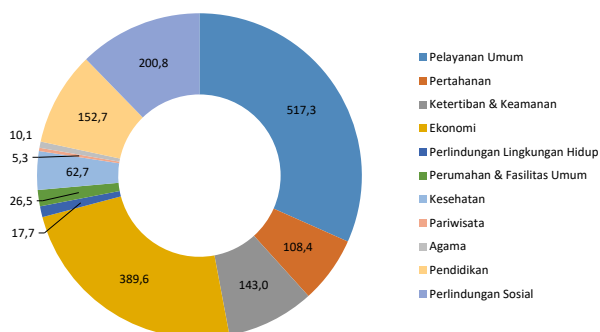
Sumber : Informasi APBN 2019, LKPP 2015, 2016, 2017 dan 2018, Kemenkeu RI

penguatan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing; meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan; melaksanakan agenda demokrasi (pemilu 2019); birokrasi yang efektif dan efisien; dan mengantisipasi ketidakpastian berupa risiko bencana serta pelestarian lingkungan.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, sejak 2014 pemerintah telah berupaya melakukan penghematan dan pemotongan belanja pemerintah untuk menekan pengeluaran negara terutama di kementerian/lembaga. Pada tahun 2019 ini pemerintah berencana akan melaksanakan penguatan pengalokasian belanja K/L melalui penguatan *value for money*, dimana setiap belanja yang dilakukan akan menghasilkan *output* yang lebih baik dan masyarakat dapat lebih merasakan dampak positif dari belanja Pemerintah tersebut. Selain itu, Pemerintah juga konsisten melakukan kebijakan efisiensi pada belanja barang dengan tetap memerhatikan terjaganya pencapaian target pembangunan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Apabila ditinjau menurut fungsinya, sebagian besar pengeluaran negara digunakan untuk fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, dan fungsi perlindungan sosial. Fungsi pelayanan umum digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan pelaksanaan pemilu 2019 yang dianggarkan sebesar Rp 517,3 triliun atau 32 persen dari total belanja negara. Sementara fungsi ekonomi digunakan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, dan kedaulatan pangan, serta pengembangan UMKM dan koperasi. Pada APBN 2019 fungsi ekonomi dianggarkan sebesar 24 persen atau Rp 389,6 triliun. Pengeluaran terbesar selanjutnya adalah pada pembiayaan fungsi perlindungan sosial yang dianggarkan sebesar Rp 200,8 triliun atau 12 persen dari total belanja negara. Adapun fungsi ini digunakan untuk menjaga konsistensi penurunan jumlah penduduk miskin terutama melalui penguatan program PKH, serta peningkatan manfaat pensiun PNS/TNI/Polri. Selain ketiga

Gambar 2.2
Belanja Negara Berdasarkan Fungsi Tahun 2019 (triliun rupiah)



Sumber : Informasi APBN 2019, Kemenkeu RI

fungsi tersebut pemerintah masih konsisten menjaga porsi anggaran untuk kesehatan sebesar 5 persen dan pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

APBN 2019 di bidang kesehatan fokus pada program penanganan *stunting* dan mengedepankan pendidikan vokasi serta menerapkan skema KPBU untuk percepatan pembangunan. Penanganan *stunting* diupayakan dengan melakukan perbaikan akses terhadap jaminan kesehatan; peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program GERMAS dan peningkatan nutrisi ibu hamil, menyusui, balita serta imunisasi; dan penguatan sinergi antara pusat dan daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

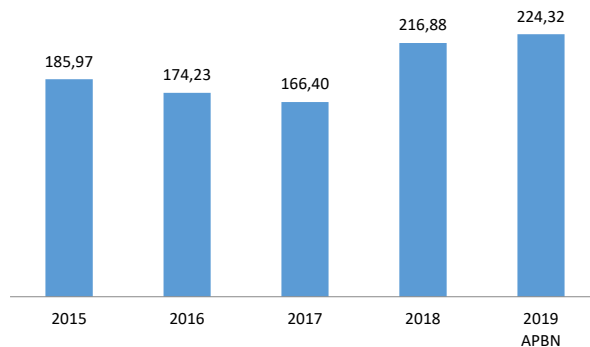
Untuk pendidikan vokasi pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 16,8 triliun dari belanja K/L dengan menetapkan kebijakan diantaranya mendorong keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri dan teknologi, peningkatan kompetensi tenaga pendidik vokasi, dan melakukan koordinasi dengan Kemenaker.

Sementara itu, untuk memenuhi percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah menerapkan skema pendanaan kreatif (*creative financing*), yaitu skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dimana penyediaan dan pembiayaan infrastruktur berdasarkan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha (swasta). Salah satu poin penting dari skema KPBU, selain mendorong swasta untuk ikut membangun infrastruktur sehingga dapat meningkatkan kualitas APBN/APBD, mengurangi tekanan pengeluaran APBN/APBD, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan akuntabilitas dari sebuah proyek infrastruktur.

Selain belanja K/L, ada belanja non K/L sebagai komponen lain dalam pengeluaran pemerintah. Pengeluaran untuk non K/L sebagian besar digunakan untuk membiayai pembayaran bunga hutang dan sisanya untuk subsidi. Nyatanya, pengeluaran untuk subsidi masih cukup besar terutama untuk subsidi energi. Pemerintah masih berusaha untuk mengurangi pembiayaan subsidi ini agar anggaran dapat dialihkan ke lainnya terutama untuk pembayaran hutang. Pemerintah masih bergantung pada subsidi untuk menjaga stabilitas perekonomian khususnya inflasi.

Pada APBN 2019, anggaran subsidi dicanangkan sebesar Rp 224,32 triliun, angka ini lebih tinggi 34,30 persen dari realisasi tahun 2018. Bahkan jika dibandingkan dengan angka realisasi tahun 2015-2017, anggaran subsidi tahun 2019 cukup tinggi. Perubahan anggaran subsidi dipengaruhi perubahan ICP (*Indonesian Crude Price*), nilai tukar rupiah, dan perubahan parameter subsidi seperti volume BBM bersubsidi, dan volume LPG tabung 3 kg, serta adanya pembayaran kurang bayar tahun sebelumnya pada tahun 2018. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi subsidi agar lebih tepat sasaran dan memberi manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan serta sebagai pengendali inflasi.

Gambar 2.3
Anggaran Subsidi Tahun 2015-2019 (triliun rupiah)



Sumber : Informasi APBN 2019 dan LKPP 2018, Kemenkeu RI

Anggaran belanja negara yang mendapat perhatian cukup tinggi lainnya adalah pengeluaran untuk daerah. Salah satu program pemerintah Jokowi-JK adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Sejak 2015, pemerintahan mulai menyediakan anggaran berupa dana desa untuk membangun fasilitas umum di desa yang dapat membuat desa menjadi lebih maju. Sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal, dana desa dikatakan cukup efektif dalam mendorong percepatan pembangunan pelayanan dasar hingga tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir RPJMN 2015-2019.

Bahkan pada APBN 2019, ada dana alokasi khusus untuk kelurahan, dimana pemerintah daerah wajib memberikan dukungan penganggaran bagi kelurahan sesuai PP Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Prinsip penggunaan anggaran pemerintah daerah sama dengan pemerintah pusat yaitu penggunaan anggaran secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip *value for money*. Transfer daerah dan dana desa diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi kesenjangan pelayanan dasar publik antar daerah.

Selama 2015-2019 pengeluaran untuk daerah terus meningkat, APBN 2019 merencanakan pengeluaran daerah sebesar Rp 826,77 triliun atau naik 9,10 persen dari realisasi 2018. Peningkatan tersebut terutama dialokasikan untuk dana desa. Pada saat pertama kali dimunculkan, anggaran dana desa disediakan dana sebesar Rp 20,77 triliun pada tahun 2015. Lalu di tahun berikutnya 2016, anggaran naik dua kali lipat menjadi Rp 46,68 triliun. Penganggaran terus ditingkatkan hingga pada APBN 2019 pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 70 triliun (17 persen dari APBN 2018) untuk pembangunan Desa.

Kementerian Keuangan menyatakan pada tahun 2019 penerima dana desa ada sebanyak 74.953 desa dan rata-rata per desa mendapatkan sekitar Rp 933,9 juta kucuran dana. Angka ini meningkat pesat jika dibandingkan

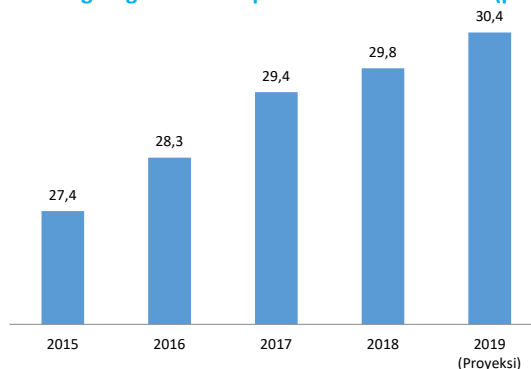
tahun 2015, dimana rata-rata setiap desa mendapatkan Rp 280 juta rupiah. Pembangunan desa diarahkan untuk pembangunan sarana prasarana, pelayanan sosial dasar, sarana ekonomi desa, pembangunan embung, pelestarian lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana alam. Disamping itu, dana desa juga dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya desa mengoptimalkan tenaga kerja setempat, bahan baku lokal, dan swakelola.

Upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan prinsip *value for money* nampaknya menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan. Pemotongan dan penghematan anggaran K/L yang dilakukan secara *massive* pada 2017 berdampak signifikan pada penyerapan anggaran belanja K/L, terutama untuk infrastruktur. Hal ini membuat indikator di bidang kesejahteraan sosial mengalami perbaikan. Perbaikan terlihat pada tingkat pengangguran berkurang, serta akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan juga terus mengalami peningkatan. APBN 2019 telah disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal dan dirancang oleh pemerintah secara lebih realistis, kredibel, dan efisien. Harapannya agar pembiayaan APBN di masa yang akan datang akan lebih pasti dan terjaga untuk mendorong perekonomian negara.

Utang Negara Meningkat

Hingga saat ini, penerimaan negara belum mampu memenuhi besaran pengeluaran negara, sehingga terjadi defisit anggaran dan pembiayaan kekurangan tersebut tergantung pada utang. Pembiayaan utang dalam postur APBN selain berperan dalam membiayai defisit anggaran juga berperan untuk pembiayaan investasi dan pemberian pinjaman kepada BUMN dan Pemda. Utang yang dilakukan pemerintah dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif dan investasi dalam jangka panjang seperti membangun infrastruktur, membiayai pendidikan dan kesehatan yang dalam jangka panjang akan menghasilkan dampak berlipat untuk generasi mendatang.

Gambar 2.4
Rasio Utang Negara terhadap PDB Tahun 2015-2019 (persen)



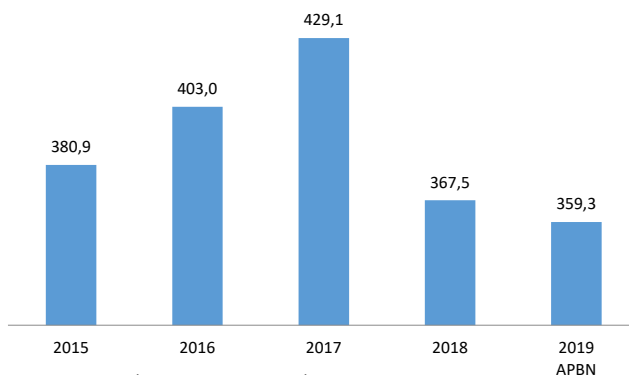
Sumber : Informasi APBN 2019 dan LKPP 2018, Kemenkeu RI

Dengan dampak dan resiko yang cukup besar tersebut, maka kebijakan pembiayaan utang dilakukan dengan prinsip (a) kehati-hatian, yaitu menjaga rasio utang terhadap PDB dan diusahakan menurun; (b) produktivitas, yaitu utang untuk mendukung pencapaian target pembangunan; (c) efisiensi, yaitu biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali dan mendukung kesinambungan fiskal; dan (d) keseimbangan untuk menjaga komposisi utang dalam batas terkendali.

Selama 2015 hingga 2019, rasio utang negara terhadap PDB mengalami peningkatan. Rasio utang pada tahun 2015 sebesar 27,4 persen dari PDB, sementara pada tahun 2019 rasio utang diproyeksikan naik 3 poin yakni sebesar 30,4 persen dari tahun 2015. Terjadinya peningkatan utang ini terjadi dikarenakan oleh meningkatnya belanja negara setiap tahunnya yang lebih agresif untuk infrastruktur, perlindungan sosial, dan dana desa. Meskipun dalam kurun waktu 2015-2019 utang pemerintah meningkat, namun tidak melanggar amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana rasio utang kurang dari 60 persen dari PDB. Adapun beberapa contoh proyek yang dibiayai melalui utang negara adalah *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta melalui pinjaman luar negeri JICA sejumlah JPY 125,2 miliar, Waduk Jatigede melalui pinjaman luar negeri dari Tiongkok sejumlah US\$ 332,6 juta, dan Jalur Kereta Api (*Double Track*) Cirebon-Kroya melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sebesar Rp 800 miliar.

Meskipun utang negara meningkat namun pembiayaan utang terlihat cenderung menurun. Pembiayaan utang mulai terlihat menurun sejak tahun 2017, dimana pada tahun tersebut kondisi perekonomian global sedang tidak stabil yang ditandai dengan adanya tren peningkatan suku bunga *The Fed* dan terjadinya depresiasi mata uang nasional terhadap Dolar Amerika Serikat. Berdasarkan pertimbangan keseimbangan fiskal dan peningkatan utang negara maka dalam APBN tahun 2019, pembiayaan utang negara dianggarkan menurun 2,23 persen dari realisasi tahun 2018. Pemerintah menganggarkan pembiayaan utang di tahun 2019 sebesar Rp 359,3 triliun. Pembiayaan

Gambar 2.5
Pembiayaan Utang Negara Tahun 2015-2019 (triliun rupiah)



Sumber : Informasi APBN 2019 dan LKPP 2018, Kemenkeu RI

utang dalam APBN tahun 2019 akan dipenuhi dari penerbitan SBN (surat berharga negara) dan penarikan pinjaman, dimana untuk penerbitan SBN masih menjadi sumber utama pembiayaan utang, namun tidak menutup kemungkinan adanya penambahan pinjaman luar negeri dalam bentuk pinjaman tunai saat kondisi pasar dipenuhi ketidakpastian.

Kondisi Ekonomi Indonesia di Tengah Tahun Pemilu

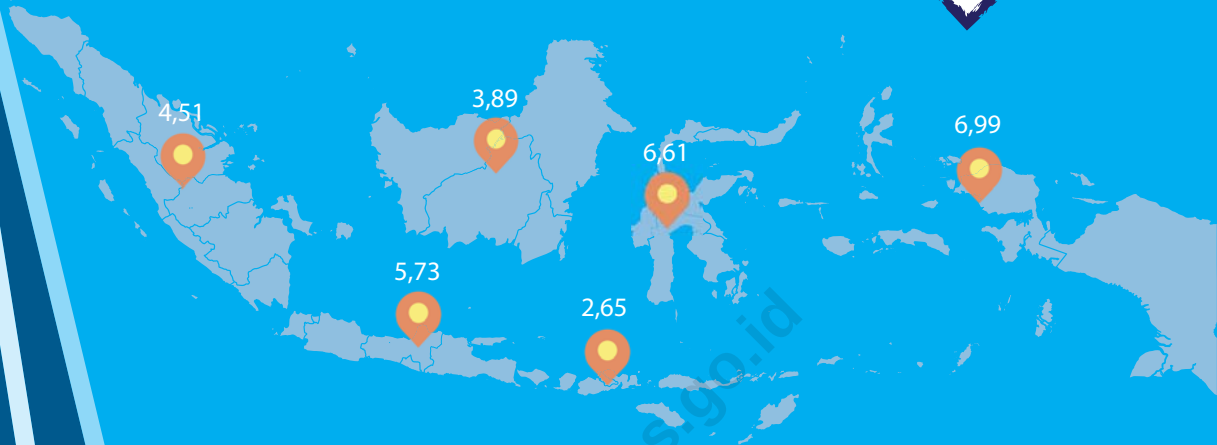
Perekonomian Indonesia tahun 2019 diperkirakan tumbuh membaik dengan pertumbuhan sebesar 5,3 persen, optimisme ini didorong oleh hasil kinerja investasi dengan fokus pembangunan infrastruktur dan meningkatkan iklim investasi di dalam negeri. Pelaksanaan agenda demokrasi (Pemilu 2019) juga memberikan dampak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat, organisasi sosial, dan partai politik. Secara umum, adanya pemilu memberikan dampak positif dalam peningkatan konsumsi namun juga berdampak negatif pada iklim investasi, dimana terdapat tendensi investor untuk *wait and see* setelah hasil Pemilu.

Kabar baiknya, sejak pertengahan 2016, perekonomian Indonesia mulai kembali pada tren peningkatan jangka panjang (*stability over growth*). Momentum ini dimanfaatkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal dengan cara memperbaiki iklim investasi yang berorientasi ekspor; meningkatkan daya saing untuk memperbaiki struktur transaksi berjalan guna mengurangi risiko perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok; serta mengembangkan industri hulu yang akan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku. Secara keseluruhan, kinerja perekonomian nasional tahun 2019 masih akan didorong oleh kinerja pertumbuhan investasi dan perdagangan internasional yang lebih baik. Penciptaan iklim investasi yang semakin baik dan percepatan pembangunan infrastruktur yang didukung oleh membaiknya volume perdagangan global diperkirakan tetap berlanjut dan mendukung kinerja ekonomi. Peningkatan kinerja investasi diharapkan mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang nantinya dapat memperbaiki tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat.

Pendorong pertumbuhan ekonomi lainnya adalah bonus demografi, dimana komposisi penduduk muda yang lebih banyak di Indonesia saat ini memberikan peluang yang sangat baik. Demografi dan generasi muda Indonesia menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi yang hebat. Hal ini bisa dilihat dari prestasi Indonesia di *Asian Games* 2018 yang lalu dan pertumbuhan *unicorn start-up* yang luar biasa dan terbesar di ASEAN. Selain perkembangan infrastruktur yang pesat, pemerintah juga telah menyiapkan percepatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi serta pengalokasian dana abadi penelitian untuk percepatan pengembangan riset sejak tahun 2019.

Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Regional

3



Pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku dan Papua menjadi pertumbuhan regional tertinggi tahun 2018



Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 menjadi yang tertinggi sejak empat tahun terakhir

Kondisi Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan ekonomi global diwarnai ketidakpastian di tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi dunia melambat dari 3,8 persen di tahun 2017 menjadi 3,7 persen di tahun 2018. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia ini merupakan imbas dari penurunan pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global. Selain itu, penyebab lainnya adalah kenaikan suku bunga *Federal Funds Rate* (FFR) yang lebih tinggi dari respon sebelumnya. Kondisi ini memicu resiko pengembalian dana modal dari negara-negara berkembang. Perang dagang yang masih berlangsung antara Tiongkok dan Amerika Serikat serta imbas konflik geopolitik seperti kesepakatan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (*Brexit*) juga turut memberi efek ketidakpastian perekonomian global. Kekuatan mata uang berbagai negara berkembang terhadap dolar AS melemah karena investor global berlomba-lomba menarik investasinya. Akibatnya, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di banyak negara berkembang menjadi terganggu.

Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018 merupakan pertumbuhan terbaik dalam 4 tahun terakhir yaitu sebesar 5,17 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi ada pada sektor jasa lainnya dengan pertumbuhan sebesar 8,99 persen di tahun 2018. Sedangkan sektor dengan pertumbuhan terendah ada pada sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai pertumbuhan sebesar 2,16 persen. Hal ini mengindikasikan gejala deindustrialisasi yang semakin terlihat. Gejala deindustrialisasi salah satunya ditandai dengan menurunnya output sektor primer, stagnasi pada sektor sekunder dan diikuti dengan peningkatan output sektor tersier pada struktur PDB suatu negara. Dengan kata lain, terjadi perpindahan pola dominasi sektoral dengan penurunan kontribusi sektor sekunder terutama sektor industri manufaktur ke sektor yang lain.

Namun demikian, kondisi perekonomian yang lebih baik ini masih memicu kontroversi. Pemerintah sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018 sebesar 5,4 persen, direvisi menjadi 5,2 persen. Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai masih dibawah target awal, bahkan masih di bawah pula dari target revisi. Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung stagnan membuat pemerintah harus memikirkan rencana agar Indonesia tidak terjebak dalam pendapatan kelas menengah (*middle income trap*). Jika hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan moneter, pertumbuhan Indonesia diestimasi tidak akan lebih dari angka 5 persen. Padahal, untuk dapat keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (*middle income trap*) diperlukan pertumbuhan ekonomi sekitar 7 persen.

PDB Menurut Lapangan Usaha

Pada tahun 2018, semua kategori lapangan usaha tercatat mengalami pertumbuhan yang positif. Apabila dilihat berdasarkan pertumbuhan pada masing-masing kategori lapangan usaha, terdapat 11 kategori lapangan usaha yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan dan 6 kategori lapangan usaha yang mengalami pelemahan laju pertumbuhan dari pertumbuhan tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan yang tinggi di tahun 2018 didominasi oleh sektor jasa. Pertumbuhan tertinggi ada pada kategori lapangan usaha R,S,T,U (Jasa Lainnya) dengan nilai pertumbuhan sebesar 8,99 persen. Sedangkan pertumbuhan tertinggi kedua dan ketiga ada pada kategori lapangan usaha M,N (Jasa Perusahaan) dan kategori Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial) dengan nilai pertumbuhan masing-masing sebesar 8,64 persen dan 7,13 persen. Naiknya pertumbuhan di sektor jasa banyak dipengaruhi oleh beberapa *event* besar yang terjadi di tahun 2018 seperti *IMF-WB Annual Meeting 2018*, *Asian Games 2018*, *Asian Para Games 2018* serta persiapan Pemilu 2019.

Sementara itu, pertumbuhan terendah di tahun 2018 ada pada kategori lapangan usaha B (Pertambangan dan Penggalian) dengan nilai pertumbuhan hanya sebesar 2,16 persen. Fenomena ini didasari dari menurunnya harga komoditas batubara hingga US\$ 92,51 per ton di akhir 2018. Turunnya harga komoditas batubara disebabkan salah satunya karena kebijakan pemerintah Tiongkok untuk mengurangi impor penggunaan bahan bakar fosil seperti batubara. Kategori lapangan usaha lain yang mengalami pertumbuhan terendah kedua dan ketiga adalah kategori lapangan usaha L (*Real Estate*) dan kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) dengan nilai pertumbuhan masing-masing sebesar 3,58 persen dan 3,91 persen.

Dilihat dari pertumbuhan di tahun sebelumnya, kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada tahun 2017, kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) hanya tumbuh sebesar 1,54 persen. Sedangkan di tahun 2018, pertumbuhan kategori ini mencapai 5,47 persen. Naiknya pertumbuhan kategori ini salah satunya disebabkan oleh kegiatan besar yang terjadi di tahun 2018 seperti *Asian Games* dan *Asian Para Games* yang diselenggarakan di Jakarta dan Palembang. PT PLN (Persero) selaku perusahaan negara yang bergerak di bidang kelistrikan menyediakan dana sebesar Rp 5,7 triliun untuk menyukseskan kedua acara tersebut, serta menyediakan pasokan listrik 500 megawatt di Jakarta dan 300 megawatt di Palembang.

Pada kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) dan kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), peningkatan pertumbuhan terjadi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 0,86 persen dan 0,27 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan

kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) di tahun 2018 sebesar 5,46 persen di tahun 2018, sedangkan pertumbuhan kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) sebesar 5,66 persen. Jika dilihat lebih rinci pada setiap triwulan, kenaikan kedua kategori tersebut terjadi di triwulan 3 dan triwulan 4 tahun 2018. Pada triwulan 3 terdapat *event* Olahraga Asia, sedangkan pada triwulan 4 terdapat *event IMF-WB Annual Meeting 2018*.

Tabel 3.1 Produk Domestik Bruto Atas Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2015–2018

Lapangan Usaha	2015	2016	2017 *	2018 **
PDB Harga Konstan Tahun 2010 (miliar rupiah) dan Pertumbuhan PDB (%)				
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.171.445,80 3,75	1.210.955,50 3,37	1.257.875,50 3,87	1.307.025,70 3,91
B. Pertambangan dan Penggalian	767.327,20 -3,42	774.593,10 0,95	779.678,40 0,66	796.505,00 2,16
C. Industri Pengolahan	1.934.533,20 4,33	2.016.876,90 4,26	2.103.466,10 4,29	2.193.266,40 4,27
D. Pengadaan Listrik dan Gas	94.894,80 0,90	100.009,90 5,39	101.551,30 1,54	107.108,60 5,47
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.369,00 7,07	7.634,60 3,60	7.986,10 4,60	8.421,80 5,46
F. Konstruksi	879.163,90 6,36	925.040,30 5,22	987.924,90 6,80	1.048.082,80 6,09
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.207.164,50 2,54	1.255.760,80 4,03	1.311.762,50 4,46	1.376.937,40 4,97
H. Transportasi dan Pergudangan	348.855,90 6,71	374.843,40 7,45	406.679,40 8,49	435.185,30 7,01
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	268.922,40 4,31	282.823,40 5,17	298.079,40 5,39	314.955,20 5,66
J. Informasi dan Komunikasi	421.769,80 9,70	459.208,10 8,88	503.420,80 9,63	538.874,60 7,04
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	347.269,00 8,58	378.279,40 8,93	398.959,30 5,47	415.579,10 4,17
L. Real Estate	266.979,60 4,11	279.500,50 4,69	289.730,40 3,66	300.106,70 3,58
M,N. Jasa Perusahaan	148.395,50 7,69	159.321,70 7,36	172.763,80 8,44	187.691,10 8,64
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	310.054,60 4,63	319.965,00 3,20	326.570,70 2,06	349.506,60 7,02
P. Jasa Pendidikan	283.020,10 7,33	293.887,60 3,84	304.762,10 3,70	321.083,60 5,36
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	97.465,80 6,69	102.490,20 5,16	109.504,10 6,84	117.314,90 7,13
R,S,T,U. Jasa lainnya	144.904,20 8,08	156.507,50 8,01	170.177,30 8,73	185.468,90 8,99
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	8.699.535,30 4,17	9.097.697,90 4,58	9.530.892,10 4,76	10.003.113,70 4,95
B. PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	282.981,80 32,55	336.915,50 19,06	381.811,50 13,33	422.202,60 10,58
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	8.982.517,10	9.434.613,40	9.912.703,60	10.425.316,30

Catatan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) dan kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) sudah diestimasi banyak pihak mengingat besarnya ketiga *event* internasional yang digelar otomatis banyak yang dihadiri oleh delegasi atlet seluruh Benua Asia sebanyak 19.963 atlet dan *event IMF-WB Annual Meeting 2018* yang dihadiri 186 rombongan delegasi dari negara anggota IMF-WB.

Hal menarik terjadi pada kategori F (Konstruksi). Konstruksi menjadi salah satu kategori yang mengalami pelemahan pertumbuhan. Kategori ini hanya tumbuh 6,09 persen di tahun 2018, pelemahan 0,71 persen dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2017 yang sebesar 6,80 persen. Ironi ini terjadi pada saat pemerintah tidak hanya memperkuat anggaran infrastruktur yang melibatkan bidang konstruksi, tetapi juga mempercepat realisasinya di tahun 2018. Indeks Tendensi Bisnis (ITB) triwulan 1 tahun 2018 mencatat nilai sebesar 92,16 untuk kategori konstruksi. Hal ini mencerminkan optimisme pelaku bisnis di kategori konstruksi sedang mengalami kelesuan. Di triwulan 2 tahun 2018, pelaku bisnis kategori konstruksi optimis kembali dengan ditandai nilai ITB mengalami kenaikan menjadi 106,04. Sayangnya, optimisme tersebut tidak berlanjut hingga triwulan 1 tahun 2019. Nilai ITB terus mengalami penurunan, dari 105,77 di triwulan III tahun 2018 menjadi 104,14 di triwulan 4 tahun 2018 dan turun lagi menjadi 98,95 di triwulan 1 tahun 2019. Beberapa pengamat ekonomi mengungkapkan beberapa hal terkait anomali yang terjadi pada kategori konstruksi ini. Pertama, proyek konstruksi pada percepatan infrastruktur yang dilakukan sekarang cenderung pada kondisi padat modal dan padat teknologi yang mengakibatkan *multiplier effect* yang terjadi masih kecil pada perekonomian. Kondisi ini lebih terasa pada kontraktor kecil. Berdasarkan data dari Gapensi (gabungan pelaksana konstruksi nasional Indonesia), jumlah kontraktor berkurang sebanyak 37 ribu perusahaan dalam jangka waktu 3 tahun terakhir. Selain karena masalah pembayaran, penyebab lainnya karena merasa kurang dilibatkan dalam proyek infrastruktur. Kedua, rendahnya pertumbuhan kategori konstruksi juga disebabkan karena masih melambatnya penjualan properti pada beberapa tahun terakhir. Ditambah lagi tahun 2018 menjelang tahun politik, investor dan pelaku bisnis di bidang konstruksi cenderung lebih memilih untuk melakukan *wait and see* dalam menjalankan usahanya.

Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) mengalami pertumbuhan sebesar 7,01 persen di tahun 2018. Pertumbuhan ini tidak sebesar tahun lalu yang pertumbuhannya mencapai 8,49 persen. Di antara semua kategori yang ada, kategori H (Transportasi dan Pergudangan) merupakan kategori yang mengalami pelemahan pertumbuhan terbesar di tahun 2018. Penyebabnya tidak lain karena kenaikan harga tiket pesawat domestik yang terjadi di triwulan 4 tahun 2018. Kenaikan harga tiket pesawat domestik pada triwulan tersebut sebesar 40 hingga 120 persen. Kenaikan harga tiket pesawat domestik juga memicu kenaikan inflasi pada triwulan tersebut dengan andil inflasi yang dihasilkan berturut-turut dari Bulan Oktober hingga Bulan Desember oleh komponen transportasi sebesar 0,05; 0,10; dan 0,24.

Tabel 3.2 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2015–2018

Lapangan Usaha	2015	2016	2017 *	2018 **
PDB Harga Berlaku (miliar rupiah) dan Distribusi PDB (%)				
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.555.207,00 13,49	1.671.597,80 13,48	1.787.285,20 13,15	1.900.348,50 12,81
B. Pertambangan dan Penggalan	881.694,10 7,65	890.868,30 7,18	1.029.554,60 7,58	1.198.987,10 8,08
C. Industri Pengolahan	2.418.891,70 18,20	2.545.203,60 18,21	2.739.711,90 17,89	2.947.299,20 17,63
D. Pengadaan Listrik dan Gas	129.833,70 1,13	142.344,40 1,15	162.339,90 1,19	176.346,10 1,19
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.546,30 0,07	8.909,40 0,07	9.439,60 0,07	10.015,50 0,07
F. Konstruksi	1.177.084,10 10,21	1.287.600,80 10,38	1.410.513,60 10,38	1.562.297,00 10,53
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.532.876,70 13,30	1.635.410,40 13,19	1.768.896,10 13,02	1.931.911,30 13,02
H. Transportasi dan Pergudangan	578.464,30 5,02	644.993,90 5,20	735.229,60 5,41	797.281,10 5,37
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	341.555,80 2,96	363.055,50 2,93	386.937,00 2,85	412.523,10 2,78
J. Informasi dan Komunikasi	406.016,50 3,52	449.188,70 3,62	513.715,80 3,78	559.054,60 3,77
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	464.399,90 4,03	520.206,80 4,19	571.185,90 4,20	616.252,80 4,15
L. Real Estate	327.601,40 2,84	350.488,20 2,83	382.474,10 2,81	406.635,50 2,74
M,N, Jasa Perusahaan	190.267,90 1,65	211.623,60 1,71	238.217,00 1,75	267.094,00 1,80
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	449.382,40 3,90	476.490,90 3,84	498.233,00 3,67	541.741,20 3,65
P. Jasa Pendidikan	387.611,40 3,36	417.344,80 3,37	446.254,50 3,28	482.134,10 3,25
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	123.191,50 1,07	132.100,50 1,07	144.621,90 1,06	157.923,00 1,06
R,S,T,U, Jasa lainnya	190.581,00 1,65	211.427,90 1,70	239.259,00 1,76	268.632,70 1,81
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	11.163.205,70 96,85	11.958.855,50 96,43	13.063.868,70 96,15	14.236.476,80 95,95
B. PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	363.127,10 3,15	442.873,00 3,57	523.343,90 3,85	600.880,70 4,05
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	11.526.332,80 100,00	12.401.728,50 100,00	13.587.212,60 100,00	14.837.357,50 100,00

Catatan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dilihat dari sisi kontribusi terhadap perekonomian nasional, kategori C (Industri Pengolahan) memberikan kontribusi tertinggi setiap tahun selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2015, kontribusi kategori C (Industri Pengolahan) sebesar 18,20 persen dari total PDB. Sedangkan pada tahun 2016 hingga tahun 2018 berturut-turut sebesar 18,21 persen; 17,89 persen dan 17,63 persen dari

total PDB nasional. Meskipun kategori ini masih menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian nasional, tetapi proporsi angkanya yang terus mengalami penurunan menyebabkan banyak pihak mengkhawatirkan telah terjadi gejala deindustrialisasi di Indonesia. Deindustrialisasi sendiri didefinisikan sebagai menurunnya proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB (Blackaby, 1979). Sedangkan menurut Rowthorn dan Coutts (2004), deindustrialisasi merupakan penurunan kontribusi sektor industri pengolahan pada perekonomian nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkisar di angka 5 persen menempatkan Indonesia sebagai negara berkembang, sedangkan untuk menjadi negara maju dibutuhkan pencapaian pertumbuhan ekonomi di angka 6 persen hingga 7 persen per tahun. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari 5 persen per tahun, deindustrialisasi menjadi tantangan tersendiri. Salah satu tumpuan Indonesia untuk menjadi negara maju adalah sektor industri pengolahan. Dengan perlambatan pertumbuhan industri pengolahan yang terjadi seperti sekarang, Indonesia akan menghadapi banyak tantangan. Deindustrialisasi menyebabkan tidak terealisasinya penyerapan tenaga kerja pertanian oleh industri dalam proses industrialisasi. Tenaga kerja pertanian banyak beralih ke sektor jasa, fenomena yang terjadi sekarang tenaga kerja tersebut tertampung di sektor jasa informal. Selain itu, pertumbuhan PDB diestimasi tidak dapat naik secara cepat karena kontribusi sektor industri pengolahan yang menurun dan pertumbuhannya mengalami perlambatan.

Kontribusi terbesar kedua ada pada kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor). Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 13,02 persen di tahun 2018. Secara riil, sektor ini hanya mengalami kenaikan pertumbuhan sekitar 0,51 persen dari tahun sebelumnya. Secara nominal, penambahan hanya terjadi sebanyak Rp 163 milyar sepanjang tahun 2018. Meskipun sedang mengalami tekanan, kontribusi yang diberikan di tahun 2018 dari sektor G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang juga berada di angka 13 persen.

Lesunya sektor perdagangan di tahun 2018 berdampak pada terjadinya defisit neraca perdagangan hingga sebesar US\$ 8,57 miliar. Defisit yang terjadi merupakan defisit terburuk yang pernah dialami Indonesia sejak tahun 1975. Penyebab dari defisit perdagangan karena nilai impor sepanjang tahun mencapai US\$ 188,63 miliar, sedangkan nilai ekspor hanya sekitar US\$ 180,06 miliar. Banyak faktor pemicu terjadinya defisit perdagangan. Kenaikan harga minyak dunia yang terjadi sepanjang tahun 2018 salah satunya. Indonesia yang telah menjadi net importir minyak dan gas (migas) terkena imbasnya. Kebutuhan migas nasional mengharuskan pemerintah harus melakukan impor sebesar 90 persen dari keseluruhan kebutuhan migas nasional. Selain itu, seiring dengan gencarnya pembangunan infrastruktur selama tahun 2018, mengharuskan Indonesia untuk mengimpor barang-barang sebagai penunjang bahan baku seperti besi, baja, mesin, peralatan listrik, dsb. Terjadinya depresiasi rupiah

terhadap US\$ selama tahun 2018 turut memberatkan kondisi perekonomian nasional mengingat impor migas dan barang-barang sebagai penunjang bahan baku tersebut ditransaksikan dengan menggunakan kurs US\$. Faktor lain yang turut berpengaruh pada perdagangan nasional adalah sentimen perang dagang yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Sentimen dari dua negara dagang terbesar di dunia ini berpengaruh kepada negara-negara tujuan ekspor komoditas andalan dari Indonesia. Ketidakpastian situasi perdagangan menyebabkan pelemahan harga beberapa komoditas unggulan seperti kelapa sawit, batubara, karet dan tembaga.

Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) menjadi kategori penyumbang kontribusi terbesar ketiga di tahun 2018. Secara nominal, kategori ini mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 1.900 triliun di tahun 2018 dari yang tahun sebelumnya hanya Rp 1.787 triliun. Akan tetapi, ketika dilihat berdasarkan besarnya kontribusi terhadap perekonomian nasional, kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) mengalami penurunan. Kontribusi kategori ini di tahun 2017 sebesar 13,15 persen dari total PDB, sedangkan kontribusi di tahun 2018 hanya sebesar 12,81 persen. Hal ini menunjukkan dominasi kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) masih kalah dengan kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor).

Namun demikian, sektor pertanian masih diyakini sebagai penggerak perekonomian Indonesia selain sektor industri dan perdagangan. Kemampuan sektor pertanian untuk meningkatkan kontribusi pada perekonomian nasional tertuang dalam Nawacita. Salah satu target yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya Indonesia menjadi lumbung pangan dunia di tahun 2045 melalui penetapan peta jalan program prioritas target swasembada 11 komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, gula dan daging sapi. Langkah awal pemerintah untuk meningkatkan produksi tiga komoditas utama melalui upaya khusus (upsus) padi-jagung-kedelai (pajale) disertai dengan bawang merah dan cabai serta program sapi indukan wajib bunting (SIWAB). Selain itu, pemerintah juga melakukan revitalisasi pabrik gula dan mendorong investasi swasta untuk membangun pabrik gula baru. Program lain yang dilakukan pemerintah dalam mendukung kedaulatan pangan juga terwujud dalam kolaborasi antara Kementerian Pertanian dengan kementerian/lembaga lain dalam hal pengembangan infrastruktur serta sarana dan prasarana pertanian.

PDB Menurut Penggunaan

Selain dilihat dari sisi lapangan usaha, perekonomian Indonesia juga dapat dilihat dari sisi penggunaan. Komponen yang dilihat dari sisi penggunaan meliputi komponen pengeluaran konsumsi domestik (konsumsi rumah tangga, konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR), dan konsumsi pemerintah), komponen pengeluaran investasi (pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori) serta ekspor dan impor.

Tabel 3.3 PDB Harga Konstan Tahun 2010 (miliar Rupiah) dan Pertumbuhan PDB (persen) Menurut Penggunaan Tahun 2015-2018

PDB Penggunaan	2015	2016	2017*	2018**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.881.630,67	5.126.307,97	5.379.752,54	5.651.230,38
	4,96	5,01	4,94	5,05
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	1.776.297,18	1.871.194,19	1.969.578,05	2.070.659,21
	5,41	5,34	5,26	5,13
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	198.732,53	205.414,01	211.908,58	221.304,69
	4,39	3,36	3,16	4,43
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	666.807,39	698.000,52	727.397,30	760.578,41
	4,81	4,68	4,21	4,56
d. Kesehatan dan Pendidikan	335.479,67	353.822,71	373.087,11	392.785,52
	5,45	5,47	5,44	5,28
e. Transportasi dan Komunikasi	1.203.217,39	1.266.170,22	1.334.365,44	1.407.370,09
	4,78	5,23	5,39	5,47
f. Restoran dan Hotel	451.792,96	476.363,73	502.241,64	531.076,82
	5,01	5,44	5,43	5,74
g. Lainnya	249.303,55	255.342,59	261.174,42	267.455,64
	2,79	2,42	2,28	2,40
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	98.799,99	105.362,27	112.664,35	122.894,11
	-0,62	6,64	6,93	9,08
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	775.397,99	774.304,53	790.789,09	828.714,25
	5,31	-0,14	2,13	4,80
a. Konsumsi Kolektif	476.826,12	477.666,90	485.042,52	505.938,54
	3,75	0,18	1,54	4,31
b. Konsumsi Individu	298.571,87	296.637,63	305.746,57	322.775,70
	7,91	-0,65	3,07	5,57
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.911.355,98	3.041.584,68	3.228.763,01	3.444.118,42
	5,01	4,47	6,15	6,67
a. Bangunan	2.165.135,15	2.277.210,01	2.419.271,82	2.551.147,84
	6,11	5,18	6,24	5,45
b. Mesin dan Perlengkapan	301.906,54	281.723,10	308.540,42	368.823,71
	0,58	-6,69	9,52	19,54
c. Kendaraan	152.887,38	171.279,91	186.458,53	202.691,98
	0,52	12,03	8,86	8,71
d. Peralatan Lainnya	44.887,43	50.685,78	55.375,99	59.907,63
	0,52	12,03	8,86	8,71
e. CBR	166.125,90	174.086,69	175.833,93	179.386,29
	3,63	4,79	1,00	2,02
f. Produk Kekayaan Intelektual	80.413,58	86.599,19	83.282,32	82.161,98
	2,28	7,69	-3,83	-1,35
5. Perubahan Inventori	112.847,91	133.400,15	126.883,56	197.369,64
	-31,01	18,21	-4,88	55,55
6. Ekspor Barang dan Jasa	2.004.466,99	1.971.182,64	2.146.803,17	2.285.871,94
	-2,12	-1,66	8,91	6,48
a. Barang	1.797.134,54	1.752.864,97	1.915.705,40	2.039.737,01
	-2,47	-2,46	9,29	6,47
a.1. Barang Non-migas	1.538.132,76	1.506.594,47	1.664.707,65	1.803.356,95
	-4,33	-2,05	10,49	8,33
a.b. Barang migas	259.001,78	246.270,51	250.997,75	236.380,06
	10,25	-4,92	1,92	-5,82
b. Jasa	207.332,45	218.317,67	231.097,77	246.134,93
	1,06	5,30	5,85	6,51

Lanjutan Tabel 3.3

PDB Penggunaan	2015	2016	2017*	2018**
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.862.938,95	1.818.133,16	1.964.602,35	2.201.127,44
	-6,25	-2,41	8,06	12,04
a. Barang	1.596.173,56	1.558.338,32	1.694.586,93	1.918.439,91
	-6,35	-2,37	8,74	13,21
a.1. Barang Non-migas	1.272.091,58	1.237.470,20	1.355.636,54	1.587.741,84
	-7,68	-2,72	9,55	17,12
a.b. Barang Migas	324.081,99	320.868,12	338.950,38	330.698,07
	-0,75	-0,99	5,64	-2,43
b. Jasa	266.765,39	259.794,84	270.015,42	282.687,53
	-5,63	-2,61	3,93	4,69
Diskrepansi Statistik	60.956,52	100.604,33	91.650,23	96.245,01
	-25,04	65,04	-8,90	5,01
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	8.982.517,10	9.434.613,40	9.912.703,60	10.425.316,30
	4,88	5,03	5,07	5,17

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3.4 PDB Harga Berlaku (miliar Rupiah) dan Distribusi PDB (persen) Menurut Penggunaan Tahun 2015-2018

PDB Penggunaan	2015	2016	2017*	2018**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.490.929,68	7.027.023,46	7.627.573,95	8.269.753,90
	56,31	56,66	56,14	55,74
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	2.495.433,44	2.759.334,95	2.981.514,12	3.238.148,46
	21,65	22,25	21,94	21,82
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	239.644,36	256.951,35	273.097,91	295.800,84
	2,08	2,07	2,01	1,99
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	849.310,41	902.678,59	980.684,24	1.059.257,39
	7,37	7,28	7,22	7,14
d. Kesehatan dan Pendidikan	433.073,01	473.136,67	515.177,70	560.009,93
	3,76	3,82	3,79	3,77
e. Transportasi dan Komunikasi	1.518.754,71	1.597.642,77	1.757.819,39	1.906.967,08
	13,18	12,88	12,94	12,85
f. Restoran dan Hotel	636.959,26	695.938,80	756.765,63	826.813,39
	5,53	5,61	5,57	5,57
g. Lainnya	317.754,50	341.340,32	362.514,97	382.756,80
	2,76	2,75	2,67	2,58
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	130.950,57	144.499,38	160.594,43	180.781,69
	1,14	1,17	1,18	1,22
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.123.749,88	1.181.613,14	1.234.554,34	1.332.534,47
	9,75	9,53	9,09	8,98
a. Konsumsi Kolektif	691.754,84	731.393,32	762.155,34	817.916,46
	6,00	5,90	5,61	5,51
b. Konsumsi Individu	431.995,03	450.219,82	472.399,00	514.618,01
	3,75	3,63	3,48	3,47
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3.782.011,86	4.040.201,81	4.370.574,77	4.790.606,99
	32,81	32,58	32,17	32,29
a. Bangunan	2.844.114,60	3.037.239,85	3.283.435,90	3.568.149,04
	24,67	24,49	24,17	24,05
b. Mesin dan Perlengkapan	377.471,63	364.798,08	405.943,79	498.444,70
	3,27	2,94	2,99	3,36
c. Kendaraan	173.850,61	208.133,13	233.934,30	258.974,15
	1,51	1,68	1,72	1,75
d. Peralatan Lainnya	59.036,09	68.916,16	77.498,95	85.899,17
	0,51	0,56	0,57	0,58

Lanjutan Tabel 3.4

PDB Penggunaan	2015	2016	2017*	2018**
e. CBR	225.515,52	246.681,32	254.661,99	262.701,92
	1,96	1,99	1,87	1,77
f. Produk Kekayaan Intelektual	102.023,40	114.433,26	115.099,84	116.438,01
	0,89	0,92	0,85	0,78
5. Perubahan Inventori	144.178,93	158.867,11	210.636,31	338.633,58
	1,25	1,28	1,55	2,28
6. Ekspor Barang dan Jasa	2.438.992,68	2.367.365,19	2.743.062,47	3.110.754,98
	21,16	19,09	20,19	20,97
a. Barang	2.131.563,35	2.039.591,36	2.386.700,49	2.709.250,93
	18,49	16,45	17,57	18,26
a.1. Barang Non-migas	1.884.921,19	1.865.994,39	2.177.008,70	2.462.469,71
	16,35	15,05	16,02	16,60
a.b. Barang migas	246.642,17	173.596,98	209.691,79	246.781,22
	2,14	1,40	1,54	1,66
b. Jasa	307.429,33	327.773,83	356.361,98	401.504,05
	2,67	2,64	2,62	2,71
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2.394.879,30	2.273.528,02	2.605.237,45	3.272.523,12
	20,78	18,33	19,17	22,06
a. Barang	1.963.460,32	1.851.967,23	2.154.432,48	2.757.150,29
	17,03	14,93	15,86	18,58
a.1. Barang Non-migas	1.625.135,50	1.596.401,80	1.820.684,03	2.320.999,44
	14,10	12,87	13,40	15,64
a.b. Barang Migas	338.324,81	255.565,43	333.748,45	436.150,84
	2,94	2,06	2,46	2,94
b. Jasa	431.418,98	421.560,79	450.804,97	515.372,84
	3,74	3,40	3,32	3,47
Diskrepansi Statistik	-189.601,50	-244.313,57	-154.546,22	86.815,01
	-1,64	-1,97	-1,15	0,59
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	11.526.332,80	12.401.728,50	13.587.212,60	14.837.357,50
	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

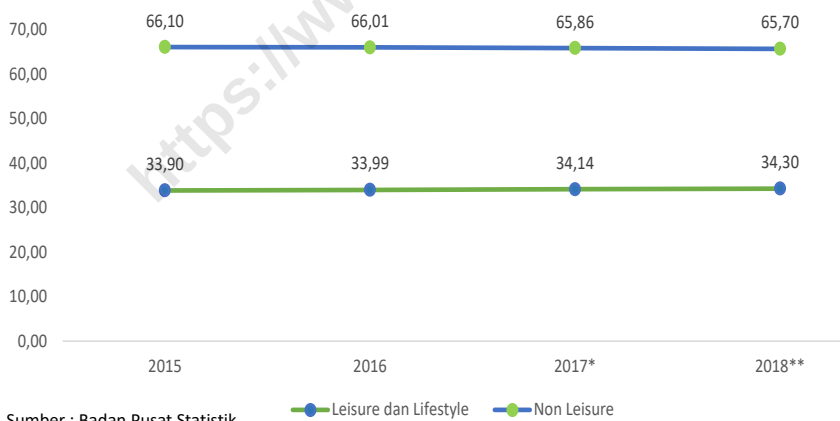
Sumber : Badan Pusat Statistik

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga meliputi sub komponen makanan dan minuman selain restoran; pakaian alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel; dan lainnya. Secara keseluruhan, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh stabil selama 4 tahun terakhir. Pertumbuhan komponen ini di tahun 2018 sebesar 5,05 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu yang tumbuh sebesar 4,94 persen. Pertumbuhan yang stabil dipicu dari inflasi nasional yang stabil dan terkendali. Inflasi nasional pada tahun 2015 hingga tahun 2018 berturut-turut sebesar 3,35 persen; 3,01 persen; 3,61 persen dan 3,13 persen.

Pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang stabil ini menggeser pola konsumsi masyarakat dari yang sebelumnya didominasi *good-based consumption* (sandang-pangan-papan), sekarang menjadi konsumsi yang bersifat *experienced-based consumption* (pengalaman). Pola konsumsi masyarakat sekarang dapat dibedakan menjadi konsumsi *leisure* dan *lifestyle* serta konsumsi yang bersifat non *leisure* (Linda

Nazareth, 2007). Konsumsi yang bersifat *leisure* meliputi sub komponen transportasi dan komunikasi serta sub komponen restoran dan hotel. Tujuan dari konsumsi ini adalah untuk mendapatkan kesenangan dan pengalaman. Berkembangnya tren *leisure* dan *lifestyle* dipengaruhi oleh semakin besarnya proporsi kelas menengah di Indonesia dan semakin terjangkau biaya yang dikeluarkan untuk mengkonsumsi aktivitas *leisure*. Hal ini diperkuat dengan kemajuan teknologi digital terkait layanan *recreation, entertainment, sports and tourism (REST)* yang semakin memudahkan masyarakat. Sedangkan untuk konsumsi yang bersifat *non leisure* meliputi sub komponen makanan dan minuman selain restoran; pakaian alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; dan lainnya. Berdasarkan data tahun 2015-2018, pertumbuhan konsumsi *non leisure* masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi *leisure*. Pertumbuhan konsumsi *non leisure* mencapai lebih dari 60 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan konsumsi *leisure* hanya sebesar 30 persen per tahun. Akan tetapi, pergeseran proporsi konsumsi dari *non leisure* ke *leisure* semakin terlihat. Hal ini ditunjukkan dengan proporsi pertumbuhan konsumsi *leisure* yang terus meningkat dengan diiringi proporsi pertumbuhan konsumsi *non leisure* yang terus menurun (Gambar 3.1).

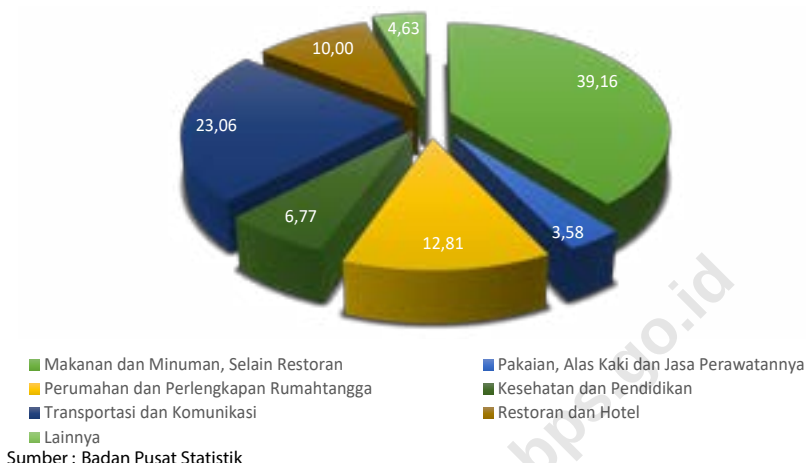
Gambar 3.1
Pertumbuhan Konsumsi *Leisure* dan *Non-Leisure* (Persen) Tahun 2015–2018



Dilihat secara nominal, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia. Selama 4 tahun terakhir, kontribusi komponen ini mencapai lebih dari 50 persen dari perekonomian. Apabila dilihat berdasarkan sub komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, dominasi terbesar ada pada pengeluaran makanan dan minuman selain restoran dengan proporsi sebesar 39,16 persen dari konsumsi rumah tangga di tahun 2018. Pengeluaran konsumsi rumah tangga terbesar kedua adalah pengeluaran untuk transportasi dan komunikasi dengan proporsi sebesar 23,06 persen. Setelahnya, pengeluaran konsumsi perumahan dan perlengkapan rumah tangga menjadi sub komponen pengeluaran

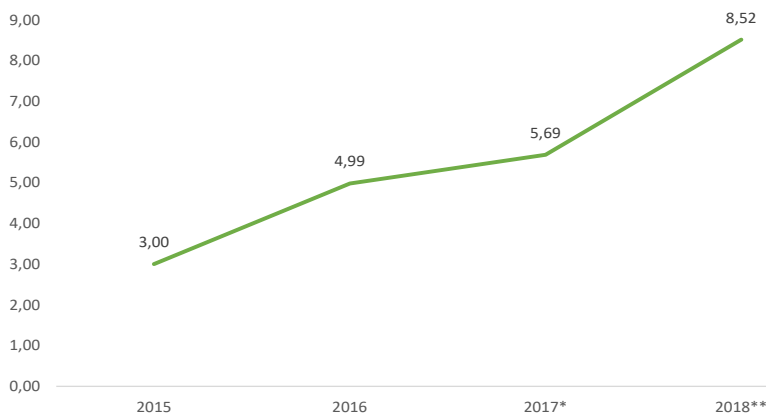
konsumsi rumah tangga terbesar ketiga dengan proporsi sebesar 12,81 persen. Sedangkan kontribusi sub komponen lainnya berkisar antara 10 persen hingga 4 persen (Gambar 3.2).

Gambar 3.2
Kontribusi Sub Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (persen)
Tahun 2018



Perekonomian Indonesia dilihat dari sisi investasi tercermin dalam dua komponen, yaitu komponen pembentukan modal tetap domestik bruto dan komponen perubahan inventori. Selama empat tahun terakhir, investasi mencatatkan pertumbuhan yang terus meningkat. Pada tahun 2015, pertumbuhan investasi hanya sebesar 3 persen. Sedangkan tiga tahun kemudian di tahun 2018, investasi tumbuh hampir 3 kali lipat menjadi sebesar 8,52 persen.

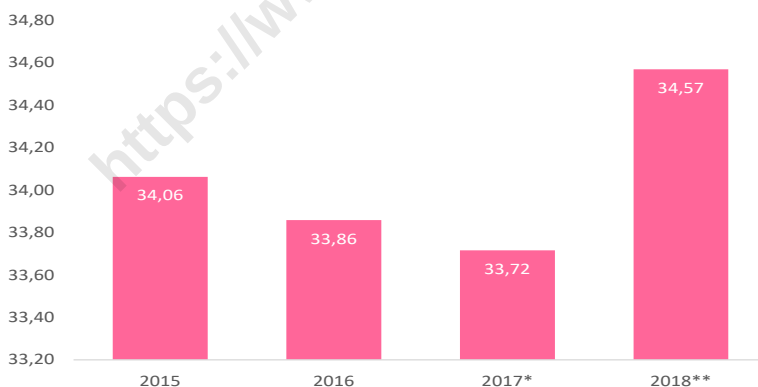
Gambar 3.3
Pertumbuhan Investasi (Persen) Tahun 2015–2018



Kontribusi investasi pada perekonomian nasional mengalami kondisi yang relatif stabil dimana pada tahun 2015 kontribusi investasi tercatat 34,06 persen. Sumbangan investasi terhadap PDB di tahun 2016 hanya sebesar 33,86 persen dan di tahun 2017 kontribusi investasi sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu hanya mencapai 33,72 persen. Selanjutnya, sumbangan investasi terhadap PDB pada tahun 2018, mencapai 34,57 persen.

Investasi yang sudah berjalan dengan baik diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang baik tidak hanya bergantung pada besarnya konsumsi, tetapi juga pada kemampuan investasi dan produksi. Meskipun demikian, investasi mengalami kondisi yang cukup berat di tahun 2018. Perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat menjadikan iklim investasi kurang mendukung terutama di negara-negara berkembang. Kondisi ini ditambah dengan suku bunga acuan *The Fed* yang naik hingga 4 kali yang menjadikan pasar modal Amerika Serikat goyah. Kondisi perekonomian dunia yang melambat turut mendukung beratnya iklim investasi yang terjadi. Selain itu, perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok berdampak pada penurunan harga komoditas dan berpengaruh langsung pada investasi di Indonesia mengingat posisi Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia.

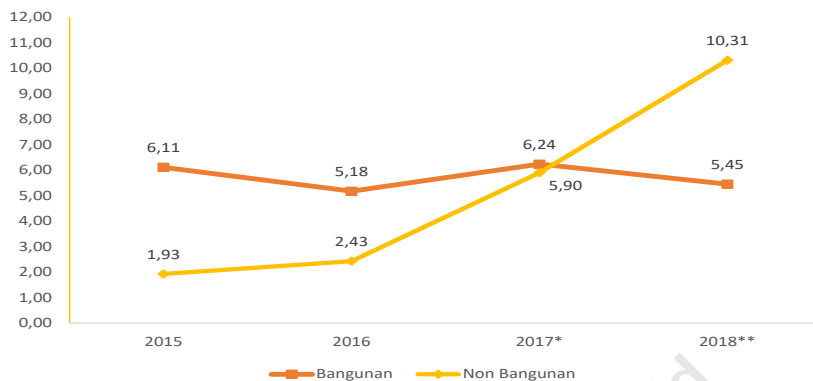
Gambar 3.4
Kontribusi Investasi terhadap PDB (persen) Tahun 2015-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) terdiri dari sub komponen bangunan; mesin dan perlengkapan; kendaraan; peralatan lainnya; CBR dan produk kekayaan intelektual. PMTB dapat dibedakan ke dalam PMTB bangunan dan PMTB non bangunan. Pertumbuhan PMTB bangunan cenderung mengalami penurunan selama 4 tahun terakhir. Kondisi berbeda terjadi pada PMTB non bangunan yang mengalami kenaikan dalam periode waktu yang sama. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan PMTB bangunan lebih banyak didukung oleh proyek investasi dari pihak swasta. Sedangkan pertumbuhan PMTB non bangunan ditopang dari banyaknya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah yang juga dibantu oleh pihak swasta. Pertumbuhan PMTB

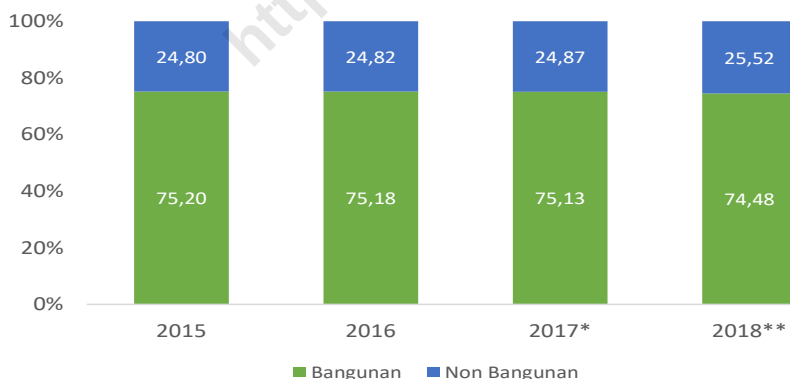
Gambar 3.5
Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (persen)
Tahun 2015-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik

non bangunan juga didukung oleh kemajuan yang dicapai dari perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Dilihat dari kontribusi sub komponennya per tahun, PMTB bangunan masih berkontribusi terhadap total PMTB sebesar 75,48 persen di tahun 2018. Kondisi ini menurun selama 4 tahun terakhir. Dari data tersebut dapat dinyatakan pergeseran dominasi dari PMTB bangunan ke PMTB non bangunan, meski proporsi kontribusi PMTB bangunan masih 3 kali lipat lebih besar dari PMTB non bangunan.

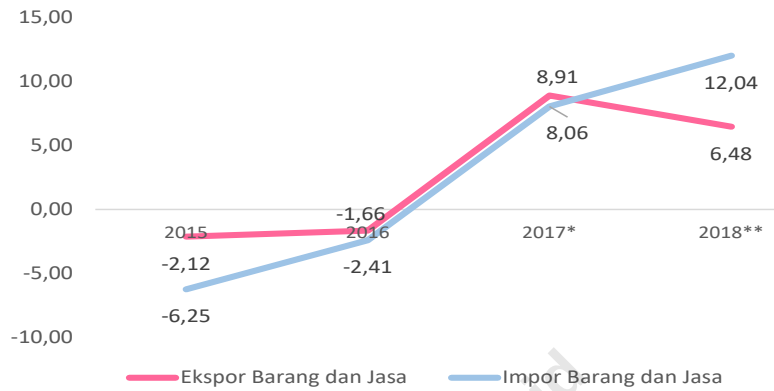
Gambar 3.6
Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (persen)
Tahun 2015-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik

Perekonomian nasional tidak terlepas dari keterkaitan perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor. Hingga tahun 2017, kinerja ekspor nasional mengalami kenaikan pertumbuhan di atas pertumbuhan impor. Akan tetapi, pertumbuhan ekspor dan impor mengalami kondisi pertumbuhan yang berbeda di tahun 2018. Nilai riil ekspor mengalami penurunan, sedangkan nilai riil impor mengalami kenaikan. Hal inilah yang memicu terjadinya defisit neraca perdagangan nasional yang terendah sejak tahun 1975. Jika dilihat berdasarkan

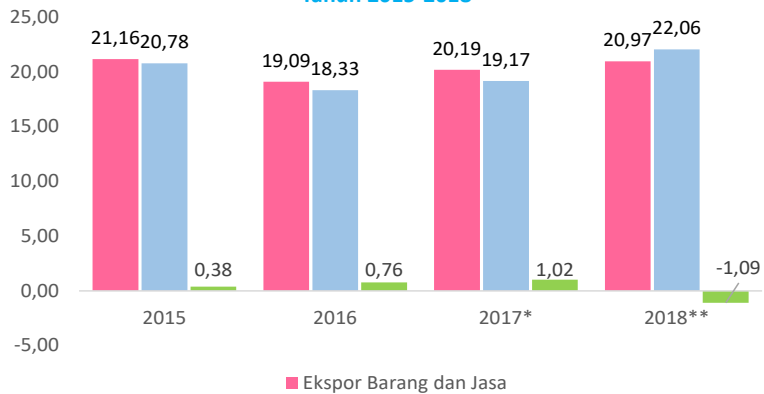
**Gambar 3.7 Pertumbuhan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa (persen)
Tahun 2015-2018**



Sumber : Badan Pusat Statistik

sub komponen penyusunnya, pemicu dari defisit neraca perdagangan di tahun 2018 disebabkan oleh merosotnya nilai ekspor barang non migas dan meningkatnya impor barang non migas yang terjadi. Selain itu, penyebab lainnya adalah lebih banyak impor migas yang dilakukan dibandingkan dengan ekspor komoditas yang sama. Dilihat dari besarnya nilai kontribusi terhadap perekonomian nasional setiap tahun, komponen ekspor dan impor dihitung berdasarkan selisih dari ekspor dikurangi dengan impor (ekspor neto). Dari Gambar 3.8 dapat dilihat jika ekspor neto berkontribusi cukup kecil terhadap perekonomian. Kondisi ekspor dan impor selama ini masih didominasi oleh barang non migas.

**Gambar 3.8 Kontribusi Ekspor dan Impor Barang dan Jasa (persen)
Tahun 2015-2018**

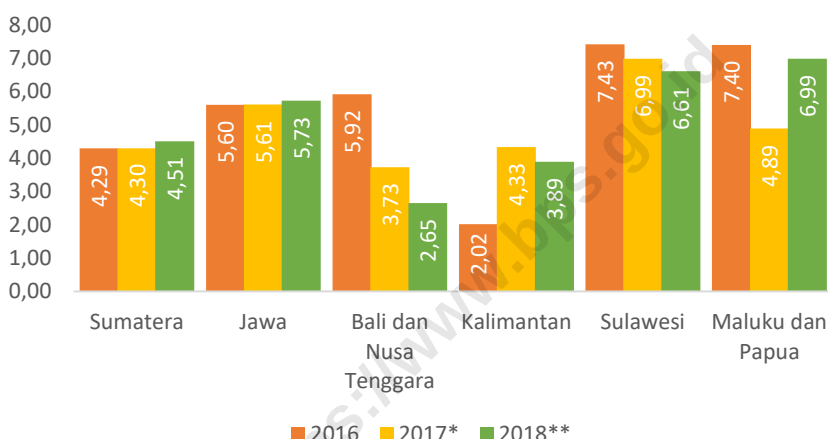


Sumber : Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan Ekonomi Spasial

Pertumbuhan ekonomi nasional yang terjadi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi setiap wilayah. Di tahun 2018, stabilnya pertumbuhan ekonomi ditopang oleh semakin bertumbuhnya perekonomian di kawasan Sumatera, Jawa serta Maluku dan Papua. Pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut berturut-turut sebesar 4,51 persen; 5,73 persen dan 6,99 persen. Sedangkan di wilayah lainnya seperti Bali dan Nusa Tenggara; Kalimantan serta Sulawesi mengalami perlambatan pertumbuhan. Pertumbuhan yang terjadi di ketiga wilayah tersebut di tahun 2018 masing-masing sebesar 2,65 persen; 3,89 persen dan 6,61 persen.

Gambar 3.9 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (persen) Tahun 2016-2018



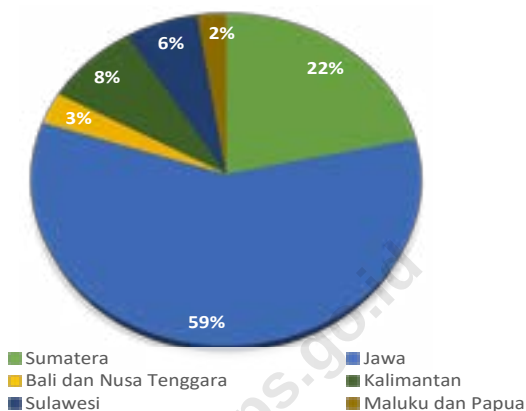
Sumber : Badan Pusat Statistik

Dilihat berdasarkan kontribusi per wilayah, Pulau Jawa masih mendominasi perekonomian nasional dengan kontribusi di tahun 2018 sebesar 59 persen. Sedangkan Pulau Sumatera menjadi terbesar kedua dengan kontribusi sekitar 22 persen menjadi penopang perekonomian setelah Pulau Jawa. Sedangkan wilayah yang lainnya berkontribusi kurang dari 10 persen di tahun 2018. Pulau Kalimantan dengan besar kontribusi 8 persen, diikuti dengan Pulau Sulawesi dengan besar kontribusi 6 persen dan sisanya adalah Pulau Bali dan Nusa Tenggara serta Pulau Maluku dan Papua dengan kontribusi masing-masing sebesar 3 persen dan 2 persen.

Pertumbuhan dan kontribusi setiap wilayah yang terbentuk dipengaruhi oleh kondisi perekonomian provinsi yang ada di dalamnya. Di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Selatan mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di wilayah yang sama. Hal ini tidak terlepas dari adanya penyelenggaraan *Asian Games* dan *Asian Para Games* di tahun 2018 dimana Kota Palembang ditunjuk menjadi salah satu tuan rumah. Lain halnya dengan Provinsi Riau. Provinsi Riau mengalami pertumbuhan paling rendah di wilayah Sumatera di tahun 2018, meskipun apabila dilihat berdasarkan kontribusi perekonomiannya provinsi ini masih menjadi yang

teratas di wilayah tersebut. Sektor pertambangan yang mengalami kelesuan menjadi penyebabnya. Selain itu, kenaikan harga CPO di pasar dunia membuat industri pengolahan dan perdagangan CPO menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi.

Gambar 3.10 Kontribusi Ekonomi Menurut Wilayah (persen) Tahun 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik

Kontribusi perekonomian di Pulau Jawa masih didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta di tahun 2018. Penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games menjadi salah satu motor penggerak perekonomian di provinsi tersebut. Akan tetapi, pertumbuhan tertinggi di wilayah Jawa ada di Provinsi DI Yogyakarta. Pembangunan bandara baru *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) dan beberapa pembangunan infrastruktur penunjangnya turut mendorong perekonomian di Provinsi DI Yogyakarta. Meskipun demikian, kontribusi ekonomi Provinsi DI Yogyakarta masih merupakan yang terkecil jika dibandingkan dengan kontribusi provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa.

Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Provinsi Bali masih menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi dan kontribusi ekonomi terbesar di wilayah tersebut. Selain dari kemajuan pariwisata yang telah lama dicapai, kenaikan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali juga didukung oleh adanya acara IMF-WB *Annual Meeting* 2018. Acara tersebut merupakan acara tahunan dari Bank Dunia yang mendatangkan 186 delegasi dari 189 negara anggota IMF-WB serta 33 ribu peserta dari berbagai kalangan. Investasi yang ditanamkan demi terselenggaranya acara ini diestimasi sebesar Rp 202,5 triliun dan melibatkan 14 BUMN untuk mengerjakan 19 proyek infrastruktur. Provinsi NTB menjadi provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Kondisi ini disebabkan karena melemahnya sektor pertambangan di provinsi tersebut. Selain itu, dampak bencana alam berupa gempa bumi yang terjadi di Bulan Agustus 2018 dengan total kerugian diperkirakan sebesar Rp 12 triliun. Sementara itu, Provinsi NTT mengandalkan sektor pariwisatanya yang masih berkembang. Masih kurangnya perhatian pemerintah pusat dan daerah serta ancaman kemiskinan dan gizi buruk

Tabel 3.5 Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Menurut Provinsi (persen)
Tahun 2016-2018

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi			Kontribusi Ekonomi		
	2016	2017*	2018**	2016	2017*	2018**
Aceh	3,30	4,19	4,59	1,08	1,06	1,04
Sumatera Utara	5,18	5,12	5,18	4,96	4,95	4,95
Sumatera Barat	5,27	5,29	5,15	1,55	1,55	1,54
Riau	2,23	2,71	2,26	5,39	5,10	5,04
Jambi	4,37	4,64	4,71	1,36	1,38	1,39
Sumatera Selatan	5,04	5,51	6,03	2,80	2,78	2,80
Bengkulu	5,29	4,99	4,97	0,44	0,44	0,44
Lampung	5,15	5,17	5,24	2,21	2,23	2,23
Kep. Bangka Belitung	4,11	4,51	4,41	0,51	0,51	0,49
Kep. Riau	5,02	2,01	4,51	1,71	1,66	1,66
DKI Jakarta	5,88	6,22	6,13	17,19	17,43	17,34
Jawa Barat	5,66	5,29	5,71	13,06	12,92	13,09
Jawa Tengah	5,27	5,27	5,28	8,63	8,59	8,47
DI Yogyakarta	5,05	5,26	6,20	0,87	0,86	0,87
Jawa Timur	5,57	5,45	5,51	14,67	14,61	14,61
Banten	5,28	5,71	5,84	4,09	4,08	4,10
Bali	6,32	5,59	6,34	1,54	1,56	1,56
Nusa Tenggara Barat	5,82	0,11	-4,57	0,92	0,90	0,83
Nusa Tenggara Timur	5,17	5,16	5,02	0,66	0,66	0,66
Kalimantan Barat	5,20	5,17	5,05	1,27	1,28	1,29
Kalimantan Tengah	6,36	6,74	5,62	0,89	0,91	0,93
Kalimantan Selatan	4,40	5,29	5,12	1,16	1,15	1,15
Kalimantan Timur	-0,36	3,13	2,64	4,02	4,29	4,26
Kalimantan Utara	3,75	6,59	6,04	0,52	0,56	0,57
Sulawesi Utara	6,17	6,32	5,99	0,79	0,80	0,80
Sulawesi Tengah	9,98	7,14	6,22	0,95	0,97	1,01
Sulawesi Selatan	7,42	7,23	7,04	3,00	3,03	3,09
Sulawesi Tenggara	6,51	6,81	6,37	0,77	0,78	0,79
Gorontalo	6,52	6,74	6,50	0,25	0,25	0,25
Sulawesi Barat	6,01	6,67	6,18	0,28	0,29	0,29
Maluku	5,73	5,81	5,95	0,29	0,29	0,29
Maluku Utara	5,77	7,67	7,92	0,23	0,23	0,24
Papua Barat	4,52	4,01	6,23	0,53	0,52	0,53
Papua	9,14	4,64	7,33	1,39	1,39	1,41

Catatan : *angka sementara, **angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

yang terjadi di provinsi tersebut turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Dengan lambatnya kondisi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi NTT menjadikan provinsi ini berkontribusi rendah terhadap perekonomian wilayah.

Wilayah Kalimantan terkenal dengan sektor pertambangannya. Selain Provinsi Riau dan NTB, Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami dampak kelesuan dari sektor ekonomi utamanya yaitu pertambangan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur menjadi yang terendah di tahun 2018 di wilayah Kalimantan. Meskipun demikian, Provinsi Kalimantan Timur tetaplah menjadi provinsi yang berkontribusi paling besar terhadap perekonomian wilayah Kalimantan. Berbeda dengan Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Kalimantan di tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dipacu oleh banyaknya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah untuk membangun provinsi tersebut. Hingga tahun 2018, perekonomian Provinsi Kalimantan Utara masih berkontribusi paling sedikit di antara provinsi-provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi di semua provinsi di wilayah Sulawesi pada tahun 2018. Hal tersebut terjadi karena telah selesainya pembangunan infrastruktur berskala besar di wilayah tersebut. Selain itu, dampak dari bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala juga memberikan efek kejutan dalam perekonomian wilayah. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menopang perekonomian wilayah tersebut juga mengalami penurunan. Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dan yang memberikan kontribusi paling besar dalam perekonomian wilayah juga mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda dengan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi. Bahkan, Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi terendah dalam 3 tahun terakhir di tahun 2018.

Berbeda dengan wilayah Sulawesi, semua provinsi di wilayah Maluku dan Papua mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Pertumbuhan yang terjadi disebabkan karena sedang berkembangnya pembangunan infrastruktur besar-besaran oleh pemerintah dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan di kawasan Indonesia bagian timur. Selain itu, meningkatnya ekspor dari sektor pertambangan turut membantu pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Provinsi Maluku Utara mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2018. Hal tersebut merupakan indikator yang bagus mengingat kontribusi provinsi tersebut dalam perekonomian wilayah Maluku dan Papua masih menjadi yang terendah dalam 3 tahun terakhir. Sementara itu, Provinsi Papua sebagai provinsi yang mengandalkan sektor pertambangan masih menjadi kontributor perekonomian terbesar di wilayah Maluku dan Papua selama 3 tahun terakhir.

PDB Per Kapita

PDB per kapita atau yang biasa disebut dengan pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara pendapatan nasional (PDB) dengan jumlah penduduk di suatu negara pada tahun tertentu. Pendapatan per kapita digunakan sebagai indikator makro untuk melihat kemakmuran suatu wilayah. Semakin tinggi pendapatan per kapita di suatu wilayah, maka wilayah tersebut semakin makmur.

Bank Dunia mengkategorikan perekonomian suatu negara berdasarkan tingkat pendapatan per kapitanya. Berdasarkan kategori tersebut, suatu negara dikatakan sebagai negara maju apabila pendapatan per kapitanya sebesar lebih dari US\$ 11.906. Selanjutnya, suatu negara dikatakan negara dengan pendapatan menengah atas jika memiliki pendapatan per kapita antara US\$ 3.856 hingga US\$ 11.905 dan dikatakan negara dengan pendapatan menengah bawah jika memiliki pendapatan per kapita US\$ 976 hingga US\$ 3.855. Pendapatan selain kategori tersebut dimasukkan sebagai negara dengan pendapatan rendah. Pada tahun 2018, pendapatan per kapita Indonesia mencapai US\$ 3.927. Dari data tersebut, maka Indonesia berada dalam kategori negara dengan pendapatan menengah atas.

Pada tahun 2018, pendapatan per kapita riil Indonesia mencapai Rp 39,40 juta dan pendapatan per kapita nominal Indonesia mencapai Rp 55,99 juta. Angka pendapatan per kapita di tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, pertumbuhan pendapatan riil Indonesia yang sebesar 4,4 persen berada di atas pertumbuhan pendapatan riil dunia yang besarnya hanya 2,2 persen. Meskipun demikian, hal ini tidak serta merta menjadikan Indonesia langsung bisa menjadi negara maju. Indonesia perlu banyak upaya untuk keluar dari negara dengan kategori pendapatan menengah dan menghindari jebakan *middle income trap* sebelum tahun 2045.

Tabel 3.6 Produk Domestik Bruto per Kapita (ribu rupiah) Tahun 2014–2018

PDB per Kapita	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010
2014	41 915,9	33 965,4
2015	45 119,6	35 161,9
2016	47 937,7	36 468,6
2017*	51 881,2	37 850,5
2018**	55 986,9	39 338,6

Catatan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Naiknya pendapatan per kapita yang terjadi di Indonesia masih menyisakan banyak tantangan. Pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih banyak ditopang dari Pulau Jawa serta kontribusi terbesar bersumber dari wilayah yang sama

menjadikan majunya perekonomian Indonesia belum tersebar secara merata. Diperlukan upaya yang besar dari pemerintah untuk pemerataan dan inklusifitas ekonomi agar tidak bertumpu hanya pada *Java centris*.

Capaian Triwulan I Tahun 2019

Kondisi perekonomian Indonesia di triwulan I tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan kondisi di tahun sebelumnya. Dilihat berdasarkan harga berlaku, struktur PDB nasional masih didominasi oleh kategori industri pengolahan; kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; serta kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. Besar kontribusi pada triwulan I tahun 2019 dari ketiga kategori tersebut lebih besar dibandingkan kontribusi pada perekonomian selama tahun 2018. Pada kategori industri pengolahan, kontribusi di triwulan I sebesar 20,07 persen dari total PDB. Sedangkan pada kategori perdagangan besar dan eceran dan kategori pertanian masing-masing berkontribusi sebesar 13,2 persen dan 12,65 persen dari total PDB. Ketika dilihat berdasarkan laju pertumbuhannya, ketiga kategori tersebut tumbuh dengan nilai positif. Hal ini dapat diartikan bahwa ketiga kategori tersebut berkembang dengan baik di awal tahun 2019.

Laju pertumbuhan di triwulan I tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang negatif dibandingkan dengan kondisi triwulan IV tahun 2018. Dengan kata lain, perekonomian di triwulan I tahun 2019 tidak mengalami pertumbuhan dari triwulan sebelumnya. Dilihat berdasarkan kategorinya, terdapat 8 dari 17 kategori yang mengalami pertumbuhan negatif. Sebagian besar kategori yang mengalami pertumbuhan negatif adalah sektor jasa, diantaranya kategori transportasi dan pergudangan; administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Apabila dilihat berdasarkan laju pertumbuhan dengan triwulan I tahun 2018, perekonomian nasional di triwulan I tahun 2019 tumbuh sebesar 5,07 persen. Laju pertumbuhan yang tinggi berasal dari sektor jasa, seperti informasi dan komunikasi; jasa perusahaan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa sektor jasa di Indonesia mengalami perkembangan dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya, akan tetapi perkembangan yang telah dicapai tersebut mengalami sedikit penurunan dari triwulan terakhir di tahun sebelumnya. Dilihat berdasarkan sumber pertumbuhan *year on year* (antar tahun pada triwulan yang sama), sektor industri menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Selain itu, sektor konstruksi dan perdagangan besar dan eceran juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di triwulan I dengan nilai sebesar 0,59 persen dan 0,70 persen.

Kategori industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Dominasi dari kedua kategori tersebut pada perekonomian nasional di triwulan I tahun 2019 sangat besar. Selain itu, laju pertumbuhan yang positif dan semakin meningkat

serta menjadi sumber pertumbuhan terbesar mengindikasikan kuatnya kedua kategori tersebut dalam perekonomian nasional. Faktor pendorongnya adalah meningkatnya permintaan pasar akan kebutuhan domestik menjelang Bulan Ramadhan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, persiapan untuk kelangsungan pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan pada triwulan II tahun 2019 juga turut mendorong permintaan pasar.

Kondisi perekonomian Indonesia di triwulan I tahun 2019 dilihat dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan komponen pembentukan modal tetap domestik bruto. Struktur PDB untuk komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah sebesar 56,82 persen, sedangkan untuk komponen pembentukan modal tetap domestik bruto sebesar 32,17 persen. Sedangkan untuk bagian ekspor neto, komponen ekspor masih lebih kecil dari komponen impor. Hal ini mengindikasikan masih berlanjutnya defisit neraca perdagangan yang terjadi.

Tabel 3.7 Nilai, Struktur, Laju dan Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Triwulan I–2019

Lapangan Usaha	Nilai PDB (triliun rupiah)		Struktur PDB (Persen)	Laju Pertumbuhan (persen)		Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2019 (yoy) (persen)
	Harga Berlaku	Harga Konstan		Tw I 2019 to TW IV 2018	Tw I 2019 to TW I 2018	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	478,40	322,30	12,65	14,10	1,81	0,23
Pertambangan dan Penggalian	293,90	199,90	7,77	-0,25	2,32	0,18
Industri Pengolahan	759,00	555,30	20,07	0,37	3,86	0,83
Pengadaan Listrik dan Gas	44,10	26,70	1,17	-0,37	4,12	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,60	2,20	0,07	-0,15	8,95	0,01
Konstruksi	406,90	265,90	10,76	-4,30	5,91	0,59
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	499,30	350,70	13,20	1,27	5,26	0,70
Transportasi dan Pergudangan	208,90	110,50	5,52	-0,56	5,25	0,22
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	106,90	81,20	2,83	0,68	5,87	0,18
Informasi dan Komunikasi	148,10	142,00	3,92	2,77	9,03	0,47
Jasa Keuangan dan Asuransi	164,30	109,20	4,34	3,33	7,33	0,30
Real Estate	107,80	78,00	2,85	2,52	5,49	0,16
Jasa Perusahaan	72,10	49,70	1,91	2,44	10,36	0,19
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	134,80	87,80	3,56	-9,49	6,45	0,21
Jasa Pendidikan	119,40	79,30	3,16	-10,78	5,62	0,17
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	41,40	30,70	1,09	-1,26	8,61	0,10
Jasa lainnya	72,30	48,90	1,91	2,21	9,99	0,18
NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	3660,20	2540,30	96,77	0,99	4,91	4,76
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	122,20	84,70	3,23	-31,44	9,97	0,31
PRODUK DOMESTIK BRUTO	3782,40	2625,00	100,00	-0,52	5,07	5,07

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik

Dilihat berdasarkan laju pertumbuhan pada komponen pengeluaran, triwulan I tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang negatif atau tidak mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2018. Komponen yang mempunyai pertumbuhan negatif terbesar ada pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dengan laju pertumbuhan sebesar -45,78 persen. Konsumsi pemerintah yang menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi indikasi bahwa pola pengeluaran pemerintah masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya dengan mengeluarkan APBN di triwulan 3 dan 4. Hal yang sama juga terjadi dengan kondisi investasi yang diwakili oleh komponen PMTB dimana komponen ini tumbuh negatif dengan nilai sebesar 5,74 persen. Banyak investor yang memilih untuk menunggu bagaimana kondisi geopolitik Indonesia pasca pemilu presiden dan anggota legislatif yang diadakan di triwulan 2 tahun 2019 untuk berinvestasi ke depannya, baik investor asing maupun investor dalam negeri. Meskipun demikian, komponen konsumsi pemerintah dan PMTB mengalami pertumbuhan yang positif dibandingkan dengan kondisi triwulan yang sama di tahun sebelumnya.

Berbeda halnya dengan komponen konsumsi pemerintah dan komponen PMTB, komponen pengeluaran konsumsi LNPRT tumbuh positif sebesar 6,58 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2018. Bahkan, laju pertumbuhan komponen ini mencapai 116,93 persen dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Naiknya konsumsi LNPRT lebih disebabkan karena menggeliatnya aktivitas partai politik menghadapi pemilu, seperti kampanye, rapat antar petinggi partai, menjalin komunikasi dengan sesama partai pendukung, dsb. Meskipun kenaikan komponen ini drastis, tetapi komponen ini hanya berperan sebesar 0,20 persen pada sumber pertumbuhan ekonomi di triwulan I tahun 2019.

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya tumbuh sebesar 0,04 persen di triwulan I tahun 2019 jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2018. Sementara itu, laju pertumbuhan komponen ini mencapai 5,01 persen dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan *year on year* yang dicapai komponen ini masih dibawah laju pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa konsumsi masyarakat mengalami perlambatan. Penyebabnya karena naiknya beberapa harga kebutuhan makanan disertai dengan kenaikan harga tiket pesawat terbang. Meskipun demikian, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga ini masih menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar di triwulan I tahun 2019 dari sisi penggunaan.

Komponen ekspor dan impor mencatatkan laju pertumbuhan negatif, begitu juga dengan posisi kedua komponen tersebut sebagai pertumbuhan ekonomi di triwulan I tahun 2019. Dibandingkan triwulan IV tahun 2018, pertumbuhan ekspor dan impor tercatat negatif masing-masing sebesar 7,04 persen dan 17,34 persen. Jika dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2018, pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing sebesar -2,08 persen

Tabel 3.8 Nilai, Struktur, Laju dan Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Triwulan I–2019

Komponen Pengeluaran	Nilai PDB (triliun rupiah)		Struktur PDB (Persen)	Laju Pertumbuhan (persen)		Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2019 (yoy) (persen)
	Harga Berlaku	Harga Konstan		Tw I 2019 to TW IV 2018	Tw I 2019 to TW I 2018	
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2149,30	1442,30	56,82	0,04	5,01	2,75
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	51,30	34,30	1,36	6,58	116,93	0,20
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	240,30	153,70	6,35	-45,78	5,21	0,30
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	1216,60	861,80	32,17	-5,74	5,03	1,65
5 Perubahan Inventori	109,40	61,50	2,89	-	-	-
6 Ekspor Barang dan Jasa	699,00	543,00	18,48	-7,04	-2,08	-0,46
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	708,70	482,90	18,74	-17,34	-7,75	-1,62
Diskrepansi Statistik ¹	25,20	11,30	0,67	-	-	-
Produk Domestik Bruto (PDB)	3782,40	2625,00	100,00	-0,52	5,07	5,07

Catatan : ¹ Selisih PDB Lapangan Usaha dan Pengeluaran
Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik

dan -7,75 persen. Pertumbuhan impor lebih rendah daripada pertumbuhan ekspor. Kondisi ekspor migas dan komoditas unggulan di sektor pertanian masih mengalami penurunan ditambah dengan rendahnya ekspor di industri pengolahan. Sementara itu, impor migas dan bahan baku strategis masih banyak dibutuhkan. Hal ini mengindikasikan masih berlanjutnya defisit neraca perdagangan yang telah terjadi sejak tahun 2018.

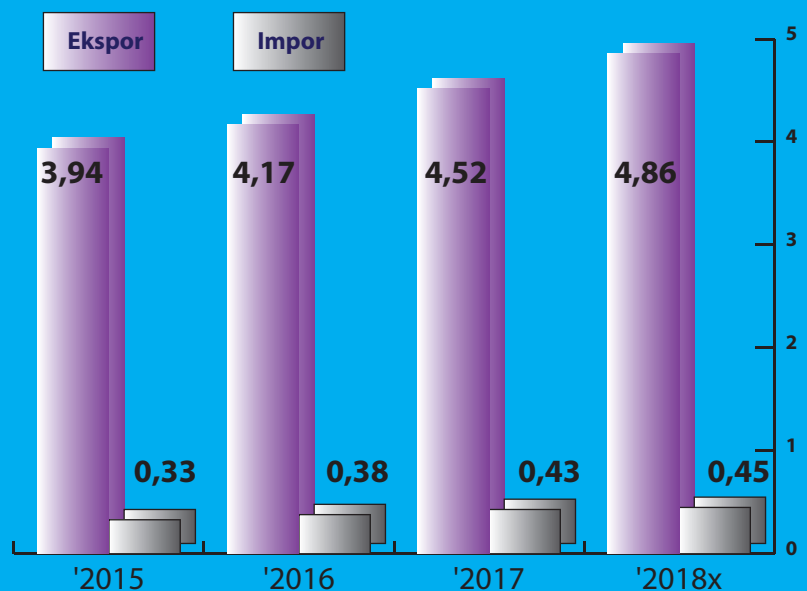
Perkembangan Ekonomi Maritim

4

Kontribusi PDB Perikanan Indonesia meningkat setiap tahun



Surplus Neraca Perdagangan Luar Negeri Produk Perikanan (miliar US\$) terus meningkat



Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari dua per tiga wilayah Indonesia merupakan perairan. Dengan total luas wilayah sebesar 7,81 juta km², Indonesia memiliki 5,80 juta km² wilayah perairan yang terdiri dari 3,25 juta km² lautan dan 2,55 juta km² perairan yang masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 50.875 km² atau sekitar 18 persen dari luas total terumbu karang dunia dan 65 persen dari luas total terumbu karang di *Coral Triangle*. Begitu luasnya kawasan perairan dan sumber daya laut di dalamnya merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, tak heran bila banyak pihak yang berlomba-lomba untuk menguasai atau memperoleh keuntungan dari sumber daya bahari negeri ini (kkp.go.id).

Potensi sumber daya hayati laut Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan sebagai penyangga pembangunan nasional baik dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, industri farmasi, dan ekosistem laut. Namun dalam prakteknya, pengelolaan sumber daya laut khususnya usaha perikanan tangkap belum mengacu pada estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, serta belum meratanya tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia. Selain sumber daya hayati, laut juga menyimpan segudang sumber daya non hayati dengan beragam potensi yang menunggu untuk dikelola, seperti industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, dan pemasangan pipa dan kabel bawah laut.

Potensi dan keberlangsungan kehidupan laut telah menjadi fokus perhatian pemerintah dalam prioritas pembangunan nasional. Salah satunya tampak pada penyelenggaraan *Our Ocean Conference* akhir 2018 di Bali yang dihadiri oleh 8 kepala negara dan lebih dari 1.900 delegasi dengan mengusung tiga topik utama, yaitu perikanan berkelanjutan, perubahan iklim, dan keamanan laut. Ketiga topik ini dianggap krusial mengingat sektor kelautan merupakan tulang punggung kehidupan dunia.

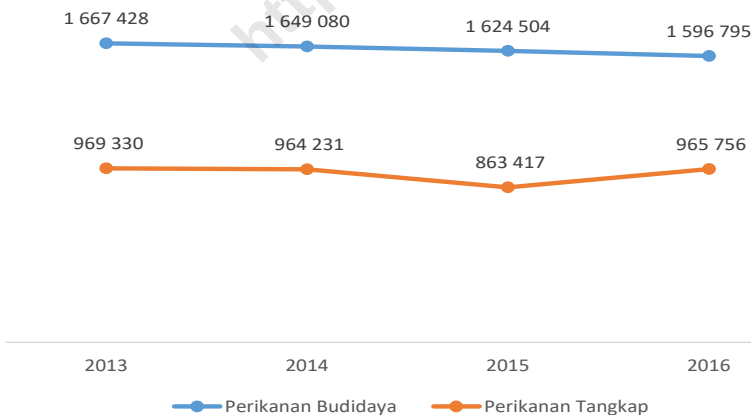
Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan merupakan amanah dari implementasi kesepakatan global dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tujuan 14 yaitu Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintah pun telah menyusun rencana tindak lanjut sesuai target yang tertuang dalam TPB tujuan 14 antara lain restorasi ekosistem pesisir, pengolahan air limbah/sungai perkotaan sebelum masuk ke laut, mengatasi *IUU Fishing*, menargetkan kawasan konservasi laut seluas 30 juta ha pada tahun 2030, mengganti alat tangkap yang merusak dengan alat tangkap ramah lingkungan, dan menerapkan teknologi modern untuk industri perikanan. Perubahan iklim dan keamanan laut merupakan aspek yang bersifat global karena membutuhkan komitmen antar negara dalam mengurangi dan mengantisipasi dampak perubahan iklim yang semakin meresahkan serta menegaskan kedaulatan maritim.

Capaian kinerja sektor kelautan dapat dilihat dari beberapa indikator makro seperti PDB perikanan, produksi perikanan, ekspor impor perikanan, Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI), dan tingkat konsumsi ikan (kkp.go.id). Tak lepas dari itu semua, sumber daya manusia yang berkualitas menjadi tonggak penting untuk mengelola segala potensi kelautan yang ada. Penciptaan SDM handal di bidang maritim dan kelautan merupakan aspek krusial untuk mendorong sektor kelautan semakin maju dan berkontribusi lebih besar terhadap kesejahteraan rakyat.

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Meningkat Pada 2016

Jumlah rumah tangga perikanan menunjukkan tren yang menurun dari 2013 hingga 2016, baik rumah tangga perikanan tangkap maupun rumah tangga budidaya. Namun pada 2016, tercatat adanya peningkatan terutama pada jumlah rumah tangga perikanan tangkap. Tahun 2016, jumlah rumah tangga perikanan tangkap meningkat hampir 12 persen dibandingkan 2015. Sebaliknya, yang terjadi pada jumlah rumah tangga perikanan budidaya kembali mengalami penurunan. Penurunan tersebut tercatat sebesar 1,71 persen. Salah satu faktor yang mungkin memengaruhi fenomena meningkatnya jumlah rumah tangga perikanan tangkap yaitu dampak dari Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Sekitar 25 kementerian/lembaga dikerahkan untuk bersinergi mengembangkan industri perikanan nusantara, terutama kaitannya dengan menjamin kesejahteraan nelayan dan pembudidaya (ekonomi.bisnis.com).

Gambar 4.1
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tahun 2013-2016



Sumber : www.bps.go.id yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jumlah rumah tangga perikanan yang meningkat memberi pengaruh terhadap peningkatan produksi perikanan dan kinerja ekspor perikanan. Salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan jumlah rumah tangga perikanan yaitu terkait kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Pemerintah berupaya keras

untuk mengangkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Hal ini tampak dari bantuan pemerintah dari sisi sarana produksi, permodalan, asuransi nelayan, dan penyuluhan. Bantuan teknis juga diberikan dalam bentuk pemberian kapal penangkap ikan dan alat tangkap ramah lingkungan, paket usaha budidaya ikan dan rumput laut, kebutuhan bibit rumput laut, paket pakan mandiri, Keramba Jaring Apung, dan lainnya.

Tak dapat dipungkiri, banyak yang memerkirakan jumlah rumah tangga perikanan ke depan akan semakin tergerus seiring transformasi industri menuju 4.0. Kesejahteraan pelaku usaha perikanan yang masih belum menjanjikan membuat pelaku usaha perikanan beralih ke lapangan usaha lain yang memberi nilai ekonomi lebih tinggi. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya besar untuk tetap mempertahankan eksistensi jumlah pelaku usaha perikanan dengan cara menggiatkan investasi pro nelayan kecil, seperti pemberian kredit usaha, perahu, alat penangkap ikan yang aman, serta subsidi bahan bakar.

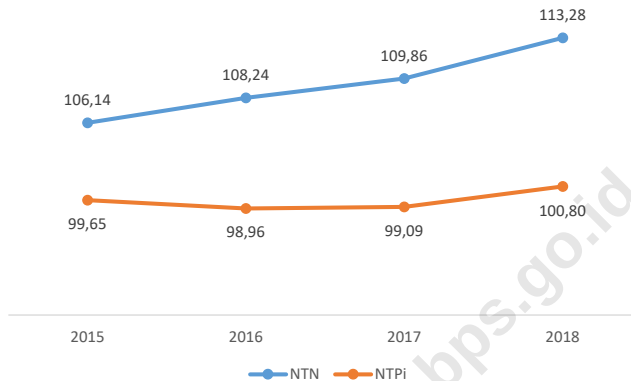
Nilai Tukar Pelaku Usaha Perikanan Terus Membaik

Memaknai Indonesia sebagai poros maritim rasanya belum lengkap tanpa melihat kesejahteraan pelaku usaha perikanan, seperti nelayan dan pembudidaya ikan. Tingkat kesejahteraan dapat diukur dari Nilai Tukar Nelayan atau Nilai Tukar Pembudidaya Ikan, rata-rata pendapatan, dan peningkatan kelompok/pelaku usaha yang memperoleh penyuluhan (KKP, 2016). Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah perbandingan indeks harga yang diterima nelayan (IT) dan indeks harga yang dibayar nelayan (IB). IT menunjukkan pergerakan harga komoditas yang dihasilkan dari kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan dibandingkan dengan tahun dasar. Sementara itu, IB menunjukkan pergerakan harga kebutuhan yang dikeluarkan oleh nelayan seperti konsumsi rumah tangga dan biaya produksi dan penambahan barang modal dibandingkan tahun dasar. NTN menjadi indikator proksi untuk melihat kesejahteraan nelayan karena indikator ini menggambarkan kemampuan tukar hasil usaha nelayan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksi. NTN bernilai lebih dari 100 berarti harga hasil produksi lebih tinggi daripada harga input produksi dan konsumsi sehingga pendapatan nelayan lebih besar dari pengeluarannya. Sebaliknya, NTN bernilai kurang dari 100 mengindikasikan bahwa harga produksi lebih rendah dibandingkan harga konsumsi sehingga pendapatan nelayan lebih kecil dibandingkan pengeluarannya. NTN yang bernilai tepat 100 berarti kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga pendapatan sebanding dengan pengeluaran.

Gambar 4.2 menunjukkan nilai NTN yang sudah di atas 100 dan meningkat lebih cepat dibandingkan NTPI. Pertumbuhan NTN yang bernilai positif menunjukkan bahwa kenaikan harga hasil tangkapan ikan lebih besar dibandingkan kenaikan harga konsumsi sehingga nelayan mengalami surplus. Selama ini, nelayan mengeluarkan konsumsi untuk biaya bensin transportasi kapal, biaya sewa kapal, dan kebutuhan produksi lainnya. Fluktuasi harga bahan

bakar akan sangat memengaruhi besar konsumsi yang harus dikeluarkan oleh nelayan dalam proses produksinya, sehingga untuk tetap mempertahankan pendapatan nelayan agar tetap surplus perlu adanya campur tangan pemerintah dalam mendukung ketersediaan bahan bakar yang terjangkau bagi nelayan kecil (statistik.kkp.go.id).

Gambar 4.2
Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), 2015-2018



Sumber : www.bps.go.id yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan

NTN menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahun. Pada 2018, NTN sebesar 113,28 berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 112. Hal ini menggambarkan bahwa secara nasional, nelayan di Indonesia mengalami surplus usaha. Peningkatan NTN tidak lepas dari kenaikan volume dan produksi perikanan tangkap, serta kestabilan biaya yang dikeluarkan nelayan. Pemerintah juga turut andil dalam menjaga inflasi dan pembangunan infrastruktur untuk memudahkan akses nelayan terhadap BBM, cold storage, dan pasar. Renstra KKP 2015-2019 menyebutkan target NTN tahun 2019 sebesar 113. Target ini sudah berhasil dicapai pada 2018. Namun capaian ini bukan berarti berhenti untuk terus mendorong perbaikan kehidupan nelayan, karena jika ditinjau menurut provinsi masih terdapat beberapa provinsi dengan NTN di bawah 100 (KKP, 2019). Hal ini menunjukkan masih ada pekerjaan rumah bagi stakeholder terkait dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan nelayan.

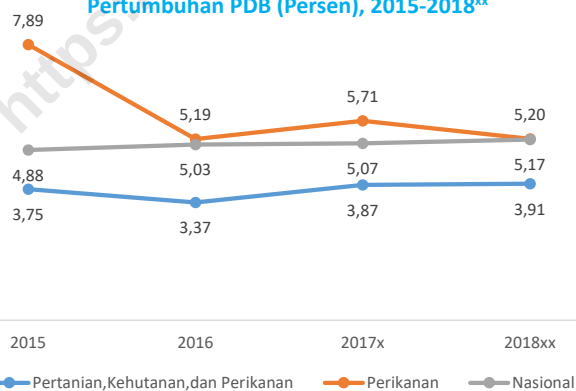
Secara nilai, tampak bahwa pergerakan NTPi masih cukup jauh di bawah NTN. NTPi tahun 2018 sebesar 100,80 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan sebesar 102,75. Hal ini dipengaruhi peningkatan keuntungan pembudidaya ikan diiringi dengan peningkatan biaya rumah tangga yang dikeluarkan rumah tangga usaha sehingga margin keuntungan tidak dapat diserap optimal. Peningkatan harga komoditas ikan hasil budidaya berkontribusi terhadap capaian kenaikan pendapatan yang diterima pembudidaya. Kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada pembudidaya seperti pakan

mandiri, bioflok, benih dan induk unggul berhasil meningkatkan harga jual ikan budidaya. Harga pakan dan kebutuhan rumah tangga yang melambung menjadi kendala kenaikan NTPi. Pemerintah berusaha dengan rencana aksi berupa pengembangan pakan mandiri, pengembangan teknik bioflok, dan pengembangan marikultur (KKP, 2019).

NTPi menjadi alat ukur untuk melihat kemampuan tukar hasil usaha pembudidaya ikan terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksi. Hingga tahun 2017, NTPi masih bernilai di bawah 100 yang berarti kesejahteraan pembudidaya ikan belum terjamin. Baru pada tahun 2018, NTPi merangkak naik di atas 100. Pergerakan nilai tukar pembudidaya ikan yang masih lambat dapat disebabkan harga pakan yang masih cukup tinggi. Harga pakan merupakan komponen utama pada biaya produksi usaha budidaya ikan sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan, pemerintah perlu memberikan bantuan dan stimulan ekonomi untuk meningkatkan daya beli pembudidaya ikan. Faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar antara lain hasil produksi perikanan, harga jual komoditas perikanan, biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi, biaya untuk kebutuhan sehari-hari, serta harga ikan yang tidak mudah dikontrol dan dipengaruhi kondisi pasar (KKP, 2016).

PDB Perikanan Tumbuh Di Atas PDB Nasional

Gambar 4.3
Pertumbuhan PDB (Persen), 2015-2018^{xx}



Catatan : * Angka sangat sementara

^{xx} Angka Sangat Sementara

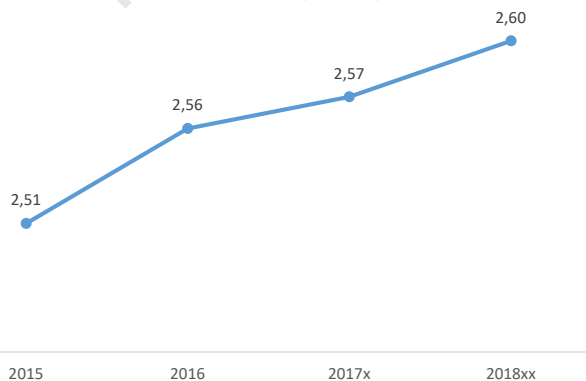
Sumber : www.bps.go.id

Pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2015-2018, begitu pula dengan pertumbuhan lapangan usaha kategori A yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tercatat mengalami pertumbuhan dari 3,75 persen pada 2015 menjadi 3,91 persen tahun 2018. Sebagai subkategori dari lapangan usaha tersebut, Perikanan menunjukkan pertumbuhan di

atas pertumbuhan ekonomi nasional dan lapangan usaha kategori A. Hal ini dipengaruhi lebih tingginya pertumbuhan harga produk perikanan dibandingkan harga produk pertanian, kehutanan, dan perikanan secara keseluruhan. Namun demikian, pertumbuhan PDB Perikanan mengalami fluktuasi selama 2015-2018. Pada 2015, pertumbuhan PDB Perikanan sempat bertengger di angka 7,89 persen, terpuruk pada 2016 akibat faktor cuaca, dan kembali bangkit pada 2017. Tahun 2018, secara nilai PDB Perikanan atas dasar harga konstan meningkat Rp 11,79 triliun. Namun secara pertumbuhan, tampak bahwa PDB perikanan tahun 2018 menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan PDB perikanan tahun 2018 juga meleset dari target yang ditetapkan KKP sebesar 11 persen. Menteri Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa kemungkinan hal ini disebabkan banyak pelaku usaha perikanan tidak melaporkan jumlah produk ekspor perikanan secara tepat atau *undervalue* (ekonomi.kompas.com). Selain *illegal fishing*, *unreported fishing* masih menjadi hambatan yang mengakibatkan minimnya data kontribusi perikanan yang masuk. Hal ini didasarkan pada selisih neraca ekspor-impor perikanan dengan negara mitra dagang, dimana otoritas negara mitra mencatat nilai impor perikanan dari Indonesia lebih tinggi dibandingkan catatan nilai ekspor di Indonesia (beritasatu.com). Investasi untuk perikanan tangkap juga belum dimanfaatkan secara maksimal (KKP, 2019). Disamping itu, penurunan produksi rumput laut karena intensitas hujan yang tinggi, penurunan permintaan rumput laut dari negara pengimpor utama seperti Tiongkok, serta faktor penyakit dan cuaca pada awal tahun 2018 menyebabkan perlambatan kinerja sektor perikanan (ekonomi.bisnis.com).

Gambar 4.4
Distribusi PDB Perikanan (Persen), 2015-2018^{xx}



Catatan : * Angka sangat sementara

xx Angka Sangat Sementara

Sumber : www.bps.go.id

Renstra KKP 2015-2019 menargetkan PDB perikanan tumbuh 11 persen pada tahun 2019. Jika dilihat dari capaian tahun 2018, perlu kerja keras dari semua pihak untuk mencapai target ini. Guna meningkatkan pertumbuhan PDB perikanan terhadap ekonomi nasional, pemerintah menyusun rencana aksi yang fokus pada peningkatan produksi perikanan, perbaikan iklim investasi, perbaikan *supply chain* produk perikanan, dan bantuan sarana prasarana bagi pelaku usaha perikanan (KKP, 2019).

Secara pertumbuhan PDB Perikanan mengalami fluktuasi, sedangkan kontribusi subsektor ini terhadap perekonomian nasional meningkat perlahan setiap tahunnya. Pada 2015, kontribusi PDB Perikanan terhadap ekonomi nasional sebesar 2,51 persen dan menjadi 2,60 persen pada 2018. Peran subsektor Perikanan yang terus meningkat setiap tahun menandakan bahwa subsektor ini berpeluang menjadi andalan di masa depan. Bahkan di triwulan I 2019 sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 12,65 persen terhadap PDB nasional dimana 2,70 persennya ada sumbangan dari subsektor Perikanan.

Tahun 2019, pemerintah menetapkan delapan sektor industri andalan, yaitu industri otomotif, tekstil dan produk tekstil, produk kimia, elektronik, makanan dan minuman, permesinan, furnitur dan perikanan (ekonomi.bisnis.com). Subkategori Perikanan nasional sendiri hingga saat ini masih didominasi oleh perikanan budidaya. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya menjadikan perikanan budidaya sebagai program prioritas nasional dalam rangka mendorong perekonomian nasional.

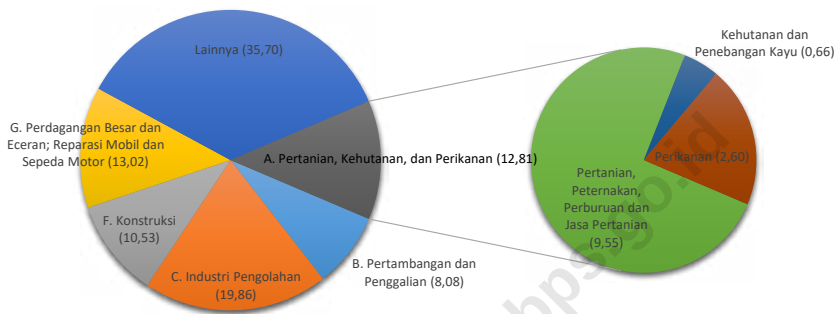
Tahun 2019, program prioritas KKP adalah menggerakkan perikanan budidaya melalui : 1) dukungan pengembangan minapadi di enam provinsi; 2) dukungan pengembangan budidaya lele bioflok di sepuluh provinsi; 3) dukungan eskavator di delapan provinsi; 4) pengelolaan irigasi tambak partisipatif di sepuluh provinsi; 5) dukungan kebun bibit rumput laut hasil kultur jaringan di empat provinsi; 6) bantuan mesin pakan mandiri di sepuluh provinsi; 7) bantuan benih berkualitas di setiap provinsi; 8) bantuan induk unggul di setiap provinsi; 9) pembangunan sarana prasarana pembenihan di empat provinsi; 10) pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di tiga lokasi; dan lain-lain (kkp.go.id). Untuk sektor perikanan tangkap, KKP berusaha mencari titik ekspor baru, seperti di wilayah Timur Indonesia. Hal ini tentu perlu didukung dengan penyediaan sistem logistik dan peningkatan kapal penangkap ikan di wilayah tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari rencana aksi untuk meningkatkan surplus neraca perdagangan nonmigas dan menekan defisit neraca perdagangan (antaranews.com).

Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap Ekonomi Nasional

Perekonomian nasional ditopang oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu kategori C, G, dan A. Lapangan usaha kategori A (Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan) memberikan kontribusi terbesar ketiga sebesar 12,81 persen terhadap perekonomian nasional tahun 2018. Hal ini tidak lepas dari penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha kategori A yang cukup besar atau sekitar sepertiga dari jumlah penduduk berkeja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih bersifat padat karya.

Gambar 4.5
Distribusi PDB Seri 2010 ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018^{xx}



Catatan : ^{xx} Angka Sangat Sementara
Sumber : www.bps.go.id

Dari kontribusi sebesar 12,81 persen dari kategori A, Subkategori Perikanan memberikan kontribusi sebesar 2,60 persen. Angka ini masih jauh lebih rendah jika dibandingkan negara-negara tetangga seperti Jepang dan Thailand (ekonomi.bisnis.com). Rendahnya kontribusi Subkategori Perikanan disebabkan pembangunan infrastruktur kemaritiman yang belum optimal dan merata sehingga biaya logistik tinggi (merdeka.com). Disamping itu, program investasi untuk penangkapan ikan belum dimanfaatkan secara maksimal pada 2018 (KKP, 2019).

Beberapa upaya untuk memaksimalkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional yaitu: 1) meningkatkan alokasi dana riset dan penelitian pada lembaga-lembaga berwenang untuk memaksimalkan potensi kelautan; 2) meningkatkan peran perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang mencetak SDM berkualitas di sektor perikanan dengan membuka jurusan yang mendukung industri maritim; 3) pembangunan berbasis Usaha Mikro Kecil untuk memproduksi dan mengolah hasil perikanan pada sentra produksi perikanan; dan 4) mendukung ketersediaan sarana dan prasarana perikanan yang terjangkau bagi pelaku usaha perikanan skala kecil (finance.detik.com).

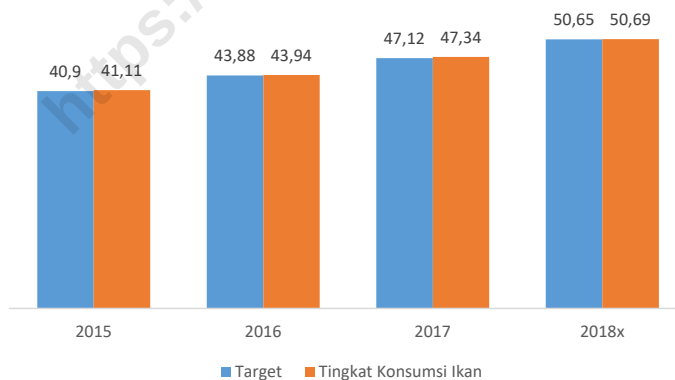
Upaya lain untuk turut mendukung subsektor Perikanan yaitu dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Tingkat konsumsi ikan dapat menjadi salah satu indikator ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan. Ikan merupakan salah satu sumber bahan pangan yang kaya akan

protein dengan harga murah dan mudah didapat. Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus penghasil ikan terbesar di dunia memiliki ketersediaan stok ikan nasional yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi ikan nasional. Kekayaan ikan nasional sangat beragam mulai dari berbagai jenis ikan tangkap dan ikan budidaya.

Konsumsi Ikan Per Kapita Mencapai Target

Selama 2015-2018 tercatat konsumsi ikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Tahun 2018, konsumsi ikan nasional mencapai 50,69 kg/kapita atau meningkat 23,30 persen dibandingkan konsumsi ikan tahun 2015 sebesar 41,11 kg/kapita. Kenaikan konsumsi ikan setiap tahun disebabkan beberapa faktor antara lain : 1) pergeseran pola konsumsi masyarakat dari daging merah ke ikan; 2) kesadaran masyarakat akan manfaat konsumsi ikan; 3) meningkatnya upaya sosialisasi memasyarakatkan gemar makan ikan; 4) kemudahan memperoleh produk olahan ikan; 5) penyediaan sarana dan prasarana pemasaran produk perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019). Meskipun demikian, konsumsi ikan nasional ternyata masih kalah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia (70 kg/kapita/tahun), Singapura (80 kg/kapita/tahun), dan Jepang (100 kg/kapita/tahun) (republika.co.id).

Gambar 4.6
Target dan Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kapita), 2015-2018*



Catatan : ** Angka Sangat Sementara

Sumber : SUSENAS-BPS yang diolah Ditjen PDSPKP (https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/2019/2019.02.12%20Diskusi%20Media%20Pers_KSP.pdf)

Peningkatan konsumsi ikan per tahun menunjukkan semakin banyak masyarakat yang sadar pentingnya mengonsumsi ikan bagi kesehatan. Protein yang terkandung dalam ikan bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan protein bagi manusia terutama pada masa pertumbuhan balita. Konsumsi ikan yang semakin meningkat mendukung program prioritas nasional yang sangat intens dikerjakan yaitu mengurangi angka *stunting* di Indonesia. *Stunting* atau

tumbuh pendek merupakan permasalahan kesehatan yang erat kaitannya dengan masalah pangan dan gizi. Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa satu dari tiga anak balita mengalami *stunting* atau terlalu pendek. Hampir 9 juta anak balita di Indonesia terlalu pendek untuk usianya. Tingkat konsumsi ikan yang semakin bertambah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan gizi anak dan mengatasi *stunting* di Indonesia (<https://kkp.go.id>). Oleh sebab itu, tahun 2019 pemerintah menargetkan konsumsi ikan nasional bertambah di angka 54,49 kg per kapita.

Tak lama lagi Indonesia akan memasuki masa besar yaitu Bonus Demografi yang ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan mempersiapkan kelompok usia produktif yang sehat dan cerdas menjadi generasi unggul. Salah satunya dengan memastikan asupan gizi dan protein yang cukup melalui gerakan gemar makan ikan. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah dan seluruh elemen terkait untuk lebih menggairahkan sektor perikanan dalam memenuhi permintaan stok ikan yang semakin besar.

Produksi Perikanan Indonesia Kian Melaju

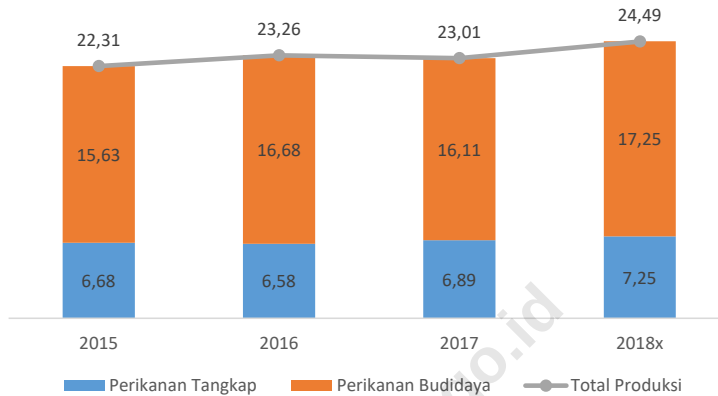
Seiring peningkatan konsumsi ikan di masyarakat, produksi perikanan nasional dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan target konsumsi ikan nasional sebesar 54,49 kg/kapita/tahun dan proyeksi jumlah penduduk sebesar 266,91 juta jiwa pada 2019, maka dibutuhkan sekitar 14,54 juta ton stok ikan. Tahun 2018, KKP menargetkan total volume produksi perikanan sebesar 33,53 juta ton, dengan target produksi perikanan tangkap sebesar 9,46 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 24,08 juta ton. Jika dilihat realisasi tahun 2018, volume produksi perikanan secara keseluruhan sebesar 24,49 juta ton belum mencapai target yang diharapkan, begitu pula untuk realisasi volume produksi perikanan tangkap dan budidaya. Namun jika dilihat dari tren produksi yang terus meningkat, sektor perikanan akan mampu tumbuh lebih cepat dengan pengoptimalan di beberapa titik. Tahun 2018, produksi perikanan nasional berhasil tumbuh 6,43 persen dibandingkan tahun 2017. Pertumbuhan ini berasal dari produksi perikanan tangkap yang naik 5,22 persen dan perikanan budidaya naik 7,08 persen.

Subsektor perikanan tangkap dibagi menjadi dua, yaitu perikanan tangkap di laut dan perikanan tangkap di Perairan Umum Daratan (PUD). Produksi perikanan tangkap di laut lebih dominan dibandingkan perikanan tangkap di PUD. Pada 2018, produksi perikanan tangkap di laut mencapai 6,72 juta ton dan produksi perikanan tangkap di PUD sebesar 0,53 juta ton.

Perikanan budidaya masih didominasi dari hasil rumput laut yang berkontribusi sekitar 60 persen terhadap total produksi perikanan budidaya. Perikanan budidaya mengalami peningkatan produksi sebagai hasil dari program bioflok, penyediaan benih unggul, gerakan pakan mandiri, faktor cuaca, pengembangan teknologi budidaya, serta nilai ekonomis dan pangsap

pasar yang cukup tinggi pada beberapa komoditas (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019).

Gambar 4.7
Volume Produksi Perikanan di Indonesia (Juta Ton), 2015-2018*



Catatan : ** Angka Sangat Sementara

Sumber : Data tahun 2015-2016 dari Kelautan dan Perikanan Dalam Angka dan Validasi Nasional 2017 pada <https://kkp.go.id/infografis-detail/1937-laporan-pencapaian-dan-evaluasi-program-4-tahun-kkp-pada-pemerintahan-kabinet-kerja>
Data tahun 2017 dari Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2018 diunduh dari <https://kkp.go.id/setjen/satudata/page/1453-kelautan-dan-perikanan-dalam-angka>
Data tahun 2018 dari Laporan Kinerja KKP 2018

Gambar 4.7 menunjukkan produksi perikanan nasional masih didominasi oleh perikanan budidaya. Pemerintah hendaknya meningkatkan gairah sektor perikanan tangkap seiring stok ikan lestari yang juga terus meningkat. Keberhasilan *IUU Fishing* telah berkontribusi dalam meningkatnya stok perikanan tangkap. Suntikan bantuan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap seperti pembiayaan dari perbankan untuk mendukung permodalan akan sangat membantu usaha perikanan tangkap (wartaekonomi.co.id). Selain itu, faktor iklim sangat berpengaruh pada perikanan tangkap terutama pada saat musim dingin dan laut pasang yang dapat membahayakan para nelayan sehingga pada saat cuaca buruk banyak nelayan yang tidak melaut, biasanya sekitar bulan Desember hingga Maret.

Tahun 2019, Renstra KKP 2015-2019 mencatat target produksi perikanan di angka 39,97 juta ton, sementara pada RPJMN 2015-2019 dipatok 24,86 juta ton. Jika merujuk pada target Renstra KKP 2015-2019, diperlukan kerja keras dari semua elemen terkait untuk mewujudkan target tersebut. Produksi perikanan tangkap tahun 2019 ditargetkan sebesar 10,47 juta ton. Untuk memacu pertumbuhan produksi perikanan tangkap, pemerintah perlu mengoptimalkan bantuan sarana penangkapan ikan, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan, dan pengawasan pendataan produksi perikanan di pusat-pusat pendataan (KKP, 2019).

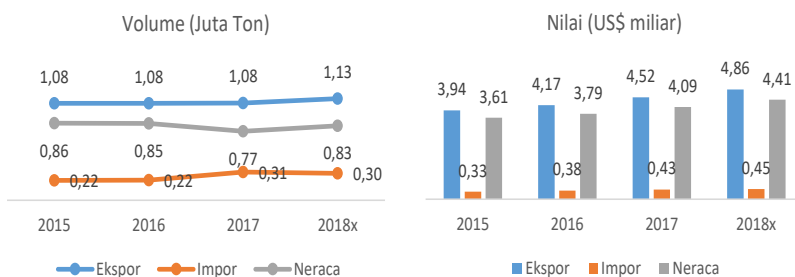
Surplus Neraca Perdagangan Luar Negeri Produk Perikanan

Volume ekspor produk perikanan Indonesia mengalami peningkatan selama periode 2015-2018 meskipun lambat. Tahun 2015, tercatat volume ekspor perikanan sebesar 1,08 juta ton dan bergerak menjadi 1,13 juta ton pada 2018. Peningkatan volume ekspor perikanan diikuti pula oleh impor perikanan dari 0,22 juta ton menjadi 0,30 juta ton. Volume ekspor yang lebih tinggi dibandingkan volume impor mengakibatkan volume neraca perdagangan produk perikanan mengalami surplus, namun pergerakannya mengalami pelemahan dari 0,86 juta ton pada 2015 menjadi 0,83 juta ton pada tahun 2018.

Peningkatan volume ekspor dan impor produk perikanan diikuti dengan kenaikan nilai ekspor dan impornya. Pada tahun 2018, nilai ekspor dan impor perikanan masing-masing naik sebesar US\$ 0,92 miliar dan US\$ 0,12 miliar dibandingkan tahun 2015. Kenaikan nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan nilai impor menyebabkan nilai neraca perdagangan perikanan mengalami surplus setiap tahun selama periode 2015-2018 yaitu dari US\$ 3,61 miliar tahun 2015 menjadi US\$ 4,41 miliar tahun 2018.

KKP pada tahun 2018 menargetkan nilai ekspor perikanan sebesar US\$ 5 miliar, namun realisasinya baru mencapai US\$ 4,86 miliar. Berdasarkan Renstra KKP 2015-2019, untuk tahun 2019 nilai ekspor produk perikanan ditargetkan sebesar US\$ 9,50 miliar. Target yang dipatok tahun 2019 cukup tinggi. Untuk dapat mencapai target tersebut perlu didukung kebijakan-kebijakan dan perlu ada kerja keras dari seluruh elemen untuk mengejar target tersebut, mengingat capaian tahun 2018 baru setengah dari yang ditargetkan tahun 2019.

Gambar 4.8
Volume dan Nilai Ekspor dan Impor Produk Perikanan di Indonesia, 2015-2018*



Catatan : * Angka Sementara

Sumber : BPS (terdiri dari 480 produk kode HS 8 digit 2017) diunduh dari https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/2019/2019.02.12%20Diskusi%20Media%20Pers_KSP.pdf

Pemerintah kiranya perlu mengupayakan untuk peningkatan kinerja ekspor perikanan dengan beberapa cara, yaitu: 1) partisipasi aktif pada pameran *seafood* internasional, serta promosi dagang dan penjajakan di pasar potensial

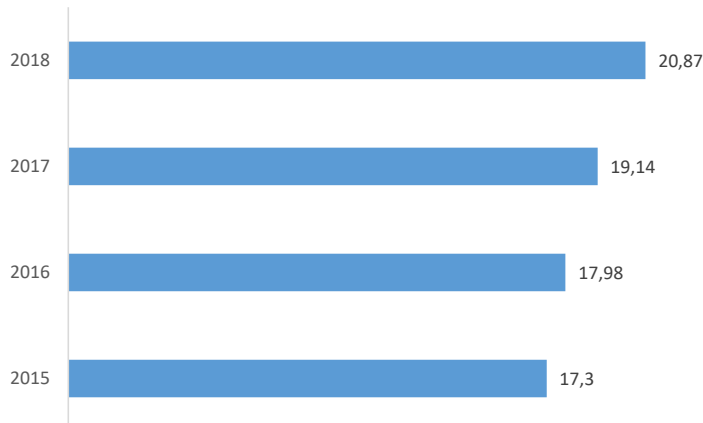
seperti Timur Tengah dan Afrika; 2) perundingan dengan negara-negara mitra untuk mengurangi hambatan tarif dan nontariff, terutama dengan negara-negara tujuan ekspor utama seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa; 3) kerjasama KKP dengan pemerintah negara-negara dunia; 4) peningkatan mutu produk perikanan terutama komoditas ekspor (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019).

Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan

Kawasan Konservasi memegang peranan penting dalam pengelolaan ruang laut. Pengelolaan kawasan konservasi bertujuan untuk memaksimalkan pendayagunaan sumber daya kelautan namun tetap menjaga kelestarian wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Luas kawasan konservasi tercatat mengalami peningkatan setiap tahun. Tahun 2018, luas kawasan konservasi meningkat 3,57 juta ha dibandingkan tahun 2015. Luas kawasan konservasi tahun 2018 mencapai 20,87 juta ha mampu melewati target yang ditetapkan sebesar 19,30 juta ha. Salah satu sebab yang berhasil mendukung capaian target ini yaitu pengembangan kawasan konservasi baru di beberapa lokasi seperti Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019).

Renstra KKP 2015-2019 menetapkan target luas kawasan konservasi tahun 2019 sebesar 20,00 juta ha. Target ini sudah bisa dicapai pada 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh untuk menjaga dan memelihara kedaulatan kelautan nusantara. Kawasan konservasi yang bertambah menunjukkan eksistensi pengawasan kelautan dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan potensi sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan memerhatikan kelestarian lingkungan. Kawasan

Gambar 4.9
Luas Kawasan Konservasi Perairan (Juta ha), 2015-2018



Sumber : https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/2019/2019.02.12%20Diskusi%20Media%20Pers_KSP.pdf

konservasi perairan yang dikelola secara efektif dan efisien membawa peran dan manfaat antara lain : 1) meningkatkan ketersediaan stok sumber daya perikanan; 2) membangkitkan potensi wisata bahari; 3) melindungi plasma nutfah; 4) sebagai lokasi penelitian dan pengembangan konservasi kelautan; 5) pemberdayaan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir; dan 6) membuka aksesibilitas. Pada akhirnya, pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan berkontribusi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak akibat peran dan manfaat yang ditimbulkan dari kegiatan perikanan dan pariwisata (Sangaji, 2018).

Isu Strategis Pembangunan Subsektor Perikanan

Ada tiga isu penting yang masih menjadi hambatan bagi pembangunan perikanan berkelanjutan di Indonesia, yaitu terkait pengelolaan perikanan, penegakan hukum, dan pelaku usaha perikanan. Pada poin pertama, pengelolaan perikanan yang belum optimal ditandai dengan belum meratanya tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di seluruh wilayah Indonesia pada subsektor perikanan tangkap. Gejala *overfishing* ditunjukkan pada wilayah perairan bagian Barat, sementara *underfishing* terjadi di wilayah bagian Timur Indonesia. Pada subsektor perikanan budidaya, kebutuhan nasional benih dan pakan sering tidak tercukupi sehingga masih bergantung dari impor. Pada poin kedua terkait penegakan hukum, *IUU Fishing* telah memberikan kontribusi dengan berkurangnya pencurian ikan secara ilegal dan meningkatkan produksi perikanan nasional. Namun hingga saat ini, masih ditemukan adanya kapal asing yang secara ilegal menangkap ikan di kawasan Indonesia tanpa izin. Hal ini menunjukkan perlu adanya pengawasan yang lebih optimal dengan mekanisme yang lebih efektif dan efisien dalam memberantas *illegal fishing*. Pada perikanan budidaya, peraturan tata ruang masih banyak yang dilanggar dan belum mendapat sanksi tegas dari pemerintah. Pada poin ketiga, masih banyak ditemukan pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya yang belum menggunakan alat tangkap ikan atau metode budidaya ikan yang berkelanjutan dan dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan, dan manusia. Disamping itu, pelaku usaha perikanan belum memiliki skala usaha yang layak sehingga cenderung mengejar kuantitas produksi dan belum memperhatikan daya dukung ekosistemnya (bappenas.go.id).

Perikanan berkelanjutan akan membawa dampak yang signifikan terutama bagi pencapaian TPB. Pengelolaan perikanan berkelanjutan mendukung TPB pada beberapa tujuan yaitu bagi peningkatan ketahanan pangan (TPB tujuan 1), peningkatan status gizi dan mengurangi kelaparan (TPB tujuan 2), serta mendorong ekosistem kelautan (TPB tujuan 14). Tak heran bila sektor perikanan terus digenjut oleh pemerintah karena dapat menyokong pembangunan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Produksi perikanan yang semakin bertambah dan diiringi dengan peningkatan nilai tambah akan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Peningkatan kesempatan kerja berarti menekan angka pengangguran dan berkontribusi menurunkan angka kemiskinan. Disamping itu, konsumsi ikan yang semakin tinggi dan menjangkau masyarakat lebih luas juga merupakan salah satu

bentuk antisipasi dan solusi bagi masalah *stunting* di Indonesia. Dari segi aspek lingkungan, pengelolaan wilayah perairan dan kelautan Indonesia juga mendapat perhatian. Dengan menjaga ekosistem kelautan berarti turut memelihara sumber daya di dalamnya dan berpotensi meningkatkan produksi perikanan. Pemerintah kiranya perlu menerapkan strategi yang tepat guna mengingat masih banyak nelayan kecil di Indonesia. (bali.tribunnews.com).

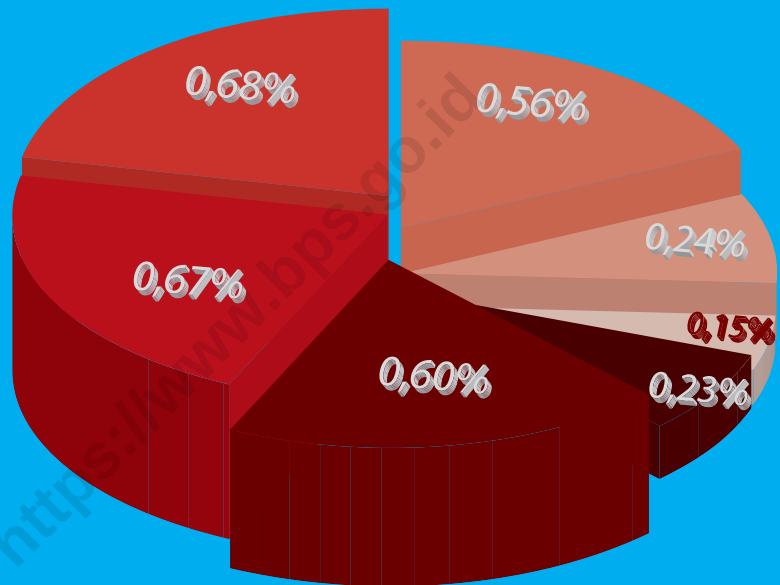
Ekosistem kelautan telah menjadi bagian penting dari pembangunan nasional. Hal ini terbukti dari masuknya ekosistem kelautan ke dalam TPB dan dijadikan acuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Menurut Bappenas, terdapat dua aspek penting pada ekosistem kelautan yaitu pengelolaan perikanan dan penciptaan ekosistem kelautan yang sehat dan produktif (sumatra.bisnis.com). Aspek pertama, pengelolaan perikanan menggambarkan pemanfaatan perikanan lestari untuk pangan. Hal ini digambarkan dari pengelolaan kawasan konservasi perairan dan aktivitas produksi perikanan di WPP. Pengelolaan perikanan secara berkelanjutan merupakan upaya mendukung ketahanan pangan nasional melalui penyediaan sumber pangan yang berprotein tinggi. Menjaga ekosistem laut juga berarti memelihara sumber daya kelautan tetap tersedia dan lestari. Pemanfaatan sains dan teknologi berbasis hasil riset di bidang kelautan perlu dikembangkan untuk mendukung transformasi usaha perikanan yang lebih produktif bagi sektor bisnis.

Aspek kedua, penciptaan ekosistem kelautan yang sehat dan produktif menggambarkan perlindungan konservasi perairan. Perubahan iklim yang terjadi saat ini merupakan dampak dari pencemaran laut dan kerusakan ekosistem laut yang berimbas pada ketersediaan stok ikan. Oleh sebab itu, riset dan sains berperan untuk meminimalisir dan memitigasi dampak perubahan iklim. Aspek pendanaan juga semakin diperluas guna mendukung pemeliharaan konservasi perikanan. Pencemaran ekosistem laut saat ini banyak diakibatkan sampah plastik yang memengaruhi kehidupan biota laut dan pada akhirnya mengakibatkan penurunan produksi ikan. Belum adanya payung hukum yang mengatur penanganan sampah plastik di laut menyebabkan solusi untuk permasalahan ini belum berjalan optimal. Polusi ekosistem laut juga berdampak pada aktivitas pendukung ekonomi kelautan seperti industri pariwisata yang mengandalkan keindahan, kebersihan, dan kenyamanan laut dan pesisir. Tak dipungkiri, penerapan inovasi dengan teknologi yang lebih efektif dan ramah lingkungan dipercaya mampu mendukung perikanan berkelanjutan.

Inflasi dan Daya Beli Masyarakat

5

Bahan Makanan menjadi penyumbang inflasi terbesar pada 2018 sebesar 0,68 persen



Bahan Makanan



Makanan Jadi, Minuman, Rokok&Tembakau



Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar



Sandang



Kesehatan



Pendidikan, Rekreasi&Olahraga



Transportasi, Komunikasi&Jasa Keuangan



Inflasi dalam arti yang sederhana adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas dan mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang berkaitan erat dengan daya beli masyarakat. Inflasi menyebabkan daya beli suatu mata uang akan menjadi lebih rendah atau menurun dan pengaruhnya adalah kemampuan masyarakat berpendapatan tetap semakin berkurang dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa sehari-hari. Karena dampak inflasi bisa menjadi serius untuk pertumbuhan ekonomi, maka inflasi menjadi perhatian penting bagi pemerintah.

Inflasi bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif, dimana jika inflasi bernilai negatif maka harga barang dan jasa sedang mengalami penurunan atau biasa disebut terjadi deflasi. Inflasi dan deflasi dinyatakan dalam satuan persentase. Ada empat golongan inflasi, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga barang dan jasa berada di bawah 10 persen, inflasi sedang antara 10 - 30 persen, inflasi berat antara 30 - 100 persen dan hiperinflasi jika kenaikan harga berada di atas 100 persen. Di Indonesia, inflasi berada di bawah 10 persen dan masih dianggap inflasi yang relatif wajar.

Berdasarkan ilmu makroekonomi, ada tiga teori mengenai inflasi yaitu teori kuantitas, teori Keynes dan teori strukturalis. Di Indonesia sendiri pengukuran inflasi didasarkan pada Indeks Harga Konsumen (IHK), dimana IHK disusun berdasarkan dari harga dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Data harga konsumen yang digunakan untuk menyusun IHK dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran berdasarkan *The Classification of Individual Consumption of Purpose* (COICOP), yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan; rekreasi dan olah raga; serta transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Penghitungan IHK mulai Januari 2014 hingga sekarang mencakup 859 komoditas barang dan jasa yang dilaksanakan di 82 kota terpilih dan menggunakan tahun dasar 2012.

Inflasi Inti dan Non Inti

Pengelompokan Inflasi selain berdasarkan COICOP juga bisa dikelompokkan berdasarkan disagregasi inflasi. Dimana dengan disagregasi inflasi ini bisa dihasilkan suatu indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang fundamental. Disagregasi inflasi dibagi menjadi dua, yaitu inflasi inti dan inflasi non inti. Inflasi inti merupakan komponen inflasi yang cenderung menetap (*persistent*) di dalam pergerakan inflasi, dimana inflasi inti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor fundamental seperti interaksi permintaan dan penawaran; ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen; serta lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga komoditi internasional dan inflasi mitra dagang.

Inflasi non inti merupakan komponen inflasi yang volatilitasnya cenderung tinggi karena pengaruh dari faktor non fundamental. Faktor non fundamental

terdiri dari komponen bergejolak dan komponen harga yang diatur pemerintah. Komponen bergejolak dipengaruhi oleh kejutan (*shock*) dalam kelompok bahan makanan seperti kondisi saat panen, gangguan alam atau perkembangan harga komoditas pangan internasional. Sedangkan komponen harga yang diatur pemerintah dipengaruhi oleh kejutan (*shock*) dalam kebijakan harga pemerintah seperti harga BBM bersubsidi, tarif dasar listrik, tarif angkutan, dan lain lain.

Inflasi inti menjadi kelompok penyumbang tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2016-2018. Sumbangan inflasi inti di tahun 2018 sebesar 1,87 persen. Inflasi inti cukup dominan karena jumlah komoditas yang dicakup dalam kelompok ini mencapai 751 komoditas atau sekitar 65 persen dari komoditas Indeks Harga Konsumen (IHK). Disamping itu juga karena didukung dengan menguatnya daya beli masyarakat. Sedangkan pada komponen inflasi non inti, komponen bergejolak dan harga diatur pemerintah masing-masing memberikan andil sebesar 0,59 persen dan 0,67 persen.

Selama kurun waktu 2016-2018, angka inflasi inti di Indonesia berfluktuatif namun secara umum inflasi inti masih cukup terkendali dilihat dari angka yang cenderung stabil. Pada tahun 2016, angka inflasi inti tahunan sebesar 3,07 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 2,95 persen. Sedangkan di tahun 2018, angka inflasi inti tahunan kembali pada level 3,07 persen. Inflasi inti tahun 2018 dipengaruhi berbagai perkembangan positif seperti meningkatnya permintaan sejalan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi dan karena minimalnya dampak dari merosotnya nilai tukar terhadap inflasi. Selain itu juga karena ekspektasi inflasi yang semakin tinggi dan minimalnya dampak lanjutan kebijakan *administered prices*.

Tidak berbeda dengan yang terjadi pada inflasi inti, inflasi non inti baik pada komponen bergejolak maupun harga diatur pemerintah menunjukkan data yang fluktuatif juga. Inflasi non inti pada komponen bergejolak berada di angka 5,92 persen pada tahun 2016 dan turun menjadi sebesar 0,71 persen di tahun 2017. Di tahun 2018, terjadi peningkatan lagi dengan besaran inflasi bergejolak di angka 3,39 persen. Naiknya inflasi bergejolak ini disebabkan karena pasokan pangan yang terjaga dan pengaruh penurunan harga pangan global. Untuk mengendalikan inflasi bergejolak ini pemerintah melakukan transfer barang-barang bergejolak seperti produk pangan antar daerah, melalui kerja sama antar daerah, di mana yang ada surplus, segera bisa dipasok ke daerah yang kekurangan. Pada tahun 2017, kelompok pengeluaran bahan makanan hanya memberikan sumbangan

Tabel 5.1 Inflasi dan Sumbangan Inflasi Inti dan Non Inti Tahun 2016–2018

Tahun	Inflasi Inti		Bergejolak		Harga Diatur Pemerintah	
	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan
2016	3,07	1,88	5,92	1,12	0,21	0,02
2017	2,95	1,82	0,71	0,12	8,70	1,67
2018	3,07	1,87	3,39	0,59	3,36	0,67

Sumber : Badan Pusat Statistik

pada inflasi umum sebesar 0,25 persen dan pada tahun 2018 memberikan sumbangan sebesar 0,68 persen.

Inflasi non inti pada komponen harga diatur pemerintah pada tahun 2016 hanya sebesar 0,21 persen, kemudian naik tajam di tahun 2017 hingga 8,70 persen. Tahun 2018 komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 3,36 persen terjadi penurunan dibandingkan tahun lalu. Selama tahun 2018, kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memberikan sumbangan pada inflasi umum sebesar 0,60 persen. Sementara pada tahun 2017 kelompok pengeluaran yang sama sudah menyumbang hingga 1,24 persen. Penurunan inflasi pada komponen harga yang diatur pemerintah sejalan dengan minimalnya kebijakan terkait tarif harga barang dan jasa yang diatur pemerintah. Komoditas bensin memberikan sumbangan terbesar pada inflasi umum tahun 2018 yakni sebesar 0,26 persen. Selain itu, komoditas beras dan rokok kretek filter masing-masing menyumbang sebesar 0,13 persen. Komoditas ini menjadi komoditas penyumbang inflasi umum terbesar kedua setelah komoditas bensin (BRS Perkembangan IHK/Inflasi Januari 2019).

Perkembangan Inflasi Nasional Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Tidak semua inflasi berdampak negatif terhadap perekonomian. Jika terjadi inflasi ringan yaitu inflasi di bawah sepuluh persen justru akan mendorong perekonomian menjadi lebih baik yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan nasional yang berimbas pada meningkatnya investasi dan tabungan oleh masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang tidak terkendali menyebabkan hiperinflasi tentu berdampak negatif. Inflasi seperti ini akan menimbulkan peningkatan harga yang cepat, penurunan daya beli masyarakat, berkurangnya investasi serta memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Laju inflasi Indonesia selama tahun 2018 tercatat sebesar 3,13 persen, atau mengalami penurunan jika dibandingkan laju inflasi tahun 2017 yang mencapai sebesar 3,61 persen. Laju inflasi tahun 2018 masih berada di bawah prediksi Bank Indonesia yang mengestimasi angka inflasi tahun 2018 sebesar 3,5 persen. Penyebab yang mempengaruhi inflasi 2018 secara umum karena (kenaikan harga) bensin, beras, rokok kretek filter.

Inflasi *month to month* selama tahun 2018 berada di bawah 1 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada awal dan penghujung tahun yaitu Bulan Januari dan Desember dengan nilai inflasi sama yaitu sebesar 0,62 persen. Inflasi yang terjadi pada Bulan Januari penyebabnya lebih banyak disumbang oleh kelompok bahan makanan sebesar 2,34 persen, utamanya harga beras, dimana kenaikan harga beras memicu inflasi di hampir semua wilayah IHK. Andil bahan makanan terhadap laju inflasi mencapai 0,48 persen. Hal yang sama yang terjadi pada inflasi Bulan Desember tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 1,45 persen dengan andil 0,29 persen. Dipicu oleh kenaikan harga telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah dan beras, seiring meningkatnya kebutuhan menjelang Natal dan tahun baru.

Selain mengalami inflasi, deflasi juga terjadi sebanyak 2 kali selama tahun 2018 yaitu pada Bulan Agustus dan September masing-masing sebesar 0,05 persen dan 0,18 persen. Pengaruh terbesar deflasi pada Agustus ada pada kelompok bahan makanan, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan serta ditambah kelompok sandang. Faktor utama yang mendorong terjadinya deflasi pada bulan September adalah pada kelompok bahan makanan dan transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Memasuki tahun 2019 pada bulan Januari terjadi inflasi sebesar 0,32 persen, dimana kelompok bahan makanan masih menjadi penyumbang terbesar dengan angka inflasi mencapai 0,92 persen diikuti kelompok sandang dengan angka inflasi 0,47 persen. Pada bulan Februari 2019 terjadi deflasi sebesar 0,08 persen dan di bulan Maret 2019 terjadi inflasi 0,11 persen. Kelompok bahan makanan di bulan Februari - Maret mengalami deflasi masing-masing 1,11 persen dan 0,01 persen.

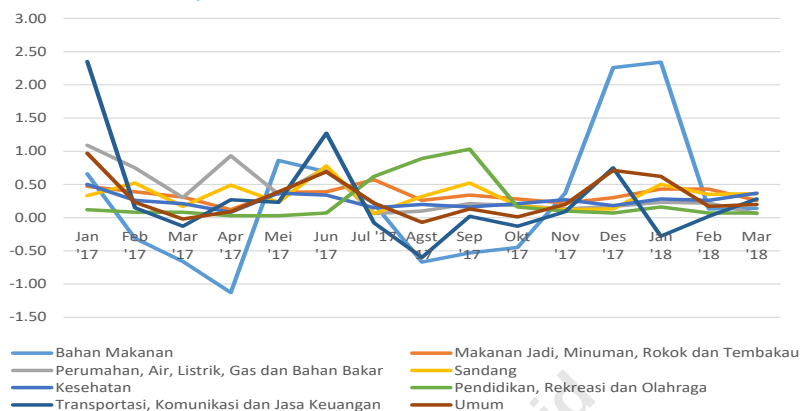
Tabel 5.2 Laju Inflasi Indonesia Gabungan 82 Kota Menurut Kelompok Barang Kebutuhan (2012=100) (persen), Tahun 2016–2019

Tahun/Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan O.R	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	Umum
2016	5,69	5,38	1,90	3,05	3,92	2,73	-0,72	3,02
2017	1,26	4,10	5,14	3,92	2,99	3,33	4,23	3,61
2018	3,41	3,91	2,43	3,59	3,14	3,15	3,16	3,13
Januari	2,34	0,43	0,23	0,50	0,28	0,16	-0,28	0,62
Februari	0,13	0,43	0,22	0,35	0,26	0,07	0,02	0,17
Maret	0,14	0,26	0,06	0,36	0,37	0,07	0,28	0,20
April	-0,26	0,24	0,16	0,29	0,22	0,04	0,19	0,10
Mei	0,21	0,31	0,19	0,33	0,21	0,09	0,18	0,21
Juni	0,88	0,40	0,13	0,36	0,27	0,07	1,50	0,59
Juli	0,86	0,45	0,16	0,29	0,27	0,83	-0,65	0,28
Agustus	-1,10	0,35	0,25	-0,07	0,20	1,03	-0,15	-0,05
September	-1,62	0,29	0,21	0,27	0,41	0,54	-0,05	-0,18
Oktober	0,15	0,27	0,42	0,54	0,06	0,09	0,26	0,28
November	0,24	0,20	0,25	0,23	0,36	0,05	0,56	0,27
Desember	1,45	0,22	0,13	0,08	0,20	0,10	1,28	0,62
2019								
Januari	0,92	0,27	0,28	0,47	0,27	0,24	-0,16	0,32
Februari	-1,11	0,31	0,25	0,27	0,36	0,11	0,05	-0,08
Maret	-0,01	0,21	0,11	0,23	0,24	0,06	0,10	0,11

Sumber : www.bps.go.id

Jika dilihat berdasarkan kelompok barang kebutuhan, kelompok bahan makanan pada bulan Januari 2018 merupakan kelompok dengan nilai inflasi tertinggi yaitu sebesar 2,34 persen. Sementara selama tahun 2018 kelompok bahan makanan sempat mengalami tiga kali deflasi, yaitu pada Bulan April, Agustus dan September dengan deflasi terbesar terjadi di Bulan September sebesar -1,62 persen. Deflasi Bulan September ini disebabkan karena penurunan harga yang terjadi pada komoditas daging ayam ras, bawang merah, dan ikan merah segar.

Gambar 5.1
Laju Inflasi Indonesia Tahun 2017–Maret 2018



Sumber: www.bps.go.id

Jika dilihat dari sisi andil atau sumbangan, pada tahun 2017 kelompok yang memberikan andil besar adalah perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 1,24 persen, diikuti kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,80 persen. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau menempati urutan ketiga penyumbang terbesar inflasi tahun 2017 yaitu mencapai 0,69 persen.

Kelompok bahan makanan, menjadi komponen yang paling berpengaruh terhadap laju inflasi tahun 2018 dengan menyumbang sebesar 0,68 persen. Angka tersebut jauh berbeda dengan tahun sebelumnya dimana kelompok bahan makanan hanya memberikan andil inflasi sebesar 0,25 persen. Peran utama dalam kelompok bahan makanan yang mendorong inflasi 2018 berasal dari komoditas beras dengan andil sebesar 0,13 persen, disusul oleh daging ayam ras dengan andil 0,12 persen, dan ikan segar dengan andil 0,1 persen.

Harga beras sempat menjadi momok pada kuartal I tahun 2018 karena sejak awal tahun, stok beras sempat menipis yang berakibat pada kenaikan harga beras. Tingginya harga beras pada saat itu membuat pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras dari Vietnam, Thailand, India, dan Pakistan. Kombinasi kenaikan harga dan tingkat konsumsinya yang tinggi membuat komoditas beras menduduki posisi kedua dalam andil inflasi tahun 2018.

Penyumbang inflasi terbesar kedua adalah makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Andil yang diberikan oleh kelompok ini sebesar 0,67 persen pada tahun 2018. Tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya, kelompok tersebut memberikan andil sebesar 0,69 persen di tahun 2017. Inflasi pada sektor ini didorong oleh peningkatan harga rokok kretek filter, rokok kretek, nasi dengan lauk, mie dan rokok putih.

Kelompok komoditas yang cukup dominan sumbangannya terhadap inflasi tahun 2018 ini adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar.

Tabel 5.3 Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Nasional (persen) Tahun 2017 dan 2018

Kelompok	Sumbangan terhadap Inflasi	
	2017	2018
Umum	3,61	3,13
Bahan Makanan	0,25	0,68
Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	0,69	0,67
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	1,24	0,60
Sandang	0,25	0,23
Kesehatan	0,13	0,15
Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	0,25	0,24
Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	0,80	0,56

Sumber : Berita Resmi Statistik (BRS)

Bensin memiliki andil sebesar 0,26 persen, dipicu oleh kenaikan harga beberapa jenis bensin pada 2018 akibat harga minyak mentah dunia yang meningkat. Saat ini, bensin non subsidi masih digolongkan sebagai komoditas di dalam kelompok administered prices atau harga yang diatur pemerintah. Mulai 2019, Badan Pusat Statistik akan memasukkan bensin non subsidi ke dalam kelompok inflasi inti

Variasi Inflasi Antar Wilayah Di Indonesia

Inflasi yang terjadi di 82 kota sangat berpengaruh besar terhadap inflasi nasional. Kondisi inflasi di daerah cukup bervariasi, ada yang disebabkan karena faktor alam, faktor produksi hingga kebijakan kenaikan tarif yang diatur pemerintah. Bervariasinya kondisi inflasi yang terjadi di daerah, maka dibentuklah Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sejak tahun 2008. Jumlah TPID hingga kini masih terus bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Sampai tahun 2018 masih tersisa 10 daerah yang belum membentuk TPID, diantaranya di beberapa daerah di Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat. Tujuan pemerintah membentuk TPID adalah untuk mengendalikan inflasi daerah agar terkendali, tetap stabil dan rendah. TPID bertugas membantu para pemangku kebijakan dengan merekomendasikan pengendalian harga di masing-masing daerah dalam hal perumusan kebijakan.

Laju inflasi yang terjadi di 82 kota pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 39 kota mengalami inflasi di atas angka nasional, dimana inflasi tertinggi terjadi di Kota Tual dengan angka inflasi mencapai 9,41 persen. Dan pada tahun 2017 ada satu kota yang mengalami deflasi yaitu Kota Ambon (0,05 persen). Sejalan dengan inflasi nasional di tahun 2018, dari 82 kota hanya terdapat 32 kota dengan angka inflasi di atas atau sama dengan angka inflasi nasional dan 50 kota lainnya mengalami inflasi di bawah angka inflasi nasional. Inflasi terendah terjadi di Kota Meulaboh (0,96 persen) dan inflasi tertinggi di Kota Jayapura (6,70 persen).

Pada tahun 2018, inflasi tahunan yang terjadi di 23 kota di Pulau Sumatera

memperlihatkan bahwa sebagian besar kota mengalami penurunan inflasi dan hanya 4 kota yang mengalami kenaikan inflasi jika dibandingkan dengan tahun 2017. Dari 23 kota di pulau Sumatera, hanya 2 kota saja yang memiliki inflasi di atas inflasi nasional, yaitu Kota Pangkal Pinang dan Kota Batam dengan nilai inflasi masing-masing sebesar 3,45 persen dan 3,65 persen. Sementara 21 kota lainnya memiliki inflasi di bawah inflasi nasional dengan kisaran nilai inflasi antara 0,96 persen hingga 3,02 persen. Tingginya angka inflasi di Kota Batam disebabkan kenaikan komoditas bawang merah dan bayam serta kenaikan tarif angkutan udara. Batam bukan daerah penghasil, tetapi kota Batam merupakan kota industri dan pariwisata. Meski begitu, pemerintah daerah tetap berupaya menekan angka

Tabel 5.4 Laju Inflasi 82 Kota di Indonesia (2012=100) Tahun 2015-2018

Kota	2015	2016	2017	2018
1. Meulaboh	0,58	3,77	4,76	0,96
2. Banda Aceh	1,27	3,13	4,86	1,93
3. Lhokseumawe	2,44	5,60	2,87	2,05
4. Sibolga	3,34	7,39	3,08	2,86
5. Pematang Siantar	3,36	4,76	3,10	2,15
6. Medan	3,32	6,60	3,18	1,00
7. Padang Sidempuan	1,66	4,28	3,82	2,22
8. Padang	0,85	5,02	2,11	2,55
9. Bukittinggi	2,79	3,93	1,37	2,99
10. Tembilahan	2,06	2,58	4,27	2,64
11. Pekanbaru	2,71	4,19	4,07	2,54
12. Dumai	2,63	3,98	4,85	1,85
13. Bungo	1,29	3,11	4,25	2,46
14. Jambi	1,37	4,54	2,68	3,02
15. Palembang	3,05	3,68	2,85	2,78
16. Lubuklinggau	3,47	2,74	3,94	2,42
17. Bengkulu	3,25	5,00	3,56	2,35
18. Bandar Lampung	4,65	2,75	3,14	2,92
19. Metro	2,67	2,92	2,32	1,64
20. Tanjung Pandan	0,88	4,92	3,97	2,72
21. Pangkal Pinang	4,66	7,78	2,66	3,45
22. Batam	4,73	3,61	4,13	3,65
23. Tanjung Pinang	2,46	3,06	3,37	2,36
24. Jakarta	3,30	2,37	3,72	3,27
25. Bogor	2,70	3,60	4,59	3,69
26. Sukabumi	2,20	2,57	4,10	2,95
27. Bandung	3,93	2,93	3,46	3,76
28. Cirebon	1,56	1,87	4,36	2,80
29. Bekasi	2,22	2,47	3,01	4,23
30. Depok	1,87	2,60	3,93	2,86
31. Tasikmalaya	3,53	2,75	3,88	2,30
32. Cilacap	2,63	2,77	4,41	3,21
33. Purwokerto	2,52	2,42	3,91	2,98
34. Kudus	3,28	2,32	4,17	3,11
35. Surakarta	2,56	2,15	3,10	2,45
36. Semarang	2,56	2,32	3,64	2,76

Lanjutan Tabel 5.4.

Kota	2015	2016	2017	2018
37. Tegal	3,95	2,71	4,03	3,08
38. Yogyakarta	3,09	2,29	4,20	2,66
39. Jember	2,31	1,93	3,52	2,95
40. Banyuwangi	2,15	1,91	3,17	2,04
41. Sumenep	2,62	2,19	3,40	2,82
42. Kediri	1,71	1,30	3,44	1,97
43. Malang	3,32	2,62	3,75	2,98
44. Probolinggo	2,11	1,53	3,18	2,18
45. Madiun	2,75	2,25	4,78	2,71
46. Surabaya	3,43	3,22	4,37	3,03
47. Tangerang	4,28	2,65	3,50	3,46
48. Cilegon	3,94	4,22	5,24	2,73
49. Serang	4,67	3,26	5,17	3,78
50. Singaraja	2,97	4,57	3,38	1,88
51. Denpasar	2,70	2,94	3,31	3,40
52. Mataram	3,25	2,47	3,59	3,15
53. Bima	4,11	3,11	4,08	3,22
54. Maumere	3,89	3,62	1,70	2,00
55. Kupang	5,07	2,31	2,05	3,23
56. Pontianak	6,17	3,88	3,86	3,99
57. Singkawang	4,00	2,58	5,23	3,18
58. Sampit	5,72	2,46	3,29	6,02
59. Palangka Raya	4,20	1,91	3,11	3,68
60. Tanjung	6,69	2,18	2,40	2,60
61. Banjarmasin	5,03	3,68	3,82	2,63
62. Balikpapan	6,26	4,13	2,45	3,13
63. Samarinda	4,24	2,83	3,69	3,32
64. Tarakan	3,42	4,31	2,77	5,00
65. Manado	5,56	0,35	2,44	3,83
66. Palu	4,17	1,49	4,33	6,46
67. Bulukumba	2,17	1,48	4,66	3,85
68. Watampone	0,97	1,50	5,54	4,69
69. Makassar	5,18	3,18	4,48	3,48
70. Parepare	1,58	2,11	3,43	1,96
71. Palopo	3,38	2,74	3,95	4,19
72. Kendari	1,64	3,07	2,96	2,55
73. Bau-Bau	3,95	1,71	3,00	2,92
74. Gorontalo	4,30	1,30	4,34	2,15
75. Mamuju	5,07	2,23	3,79	1,80
76. Ambon	5,92	3,28	-0,05	3,53
77. Tual	8,58	2,97	9,41	1,62
78. Ternate	4,52	1,91	1,97	4,12
79. Manokwari	2,77	5,75	1,78	6,02
80. Sorong	6,17	2,95	1,33	4,95
81. Merauke	5,76	0,82	1,25	5,42
82. Jayapura	2,79	4,13	2,41	6,70
Indonesia	3,35	3,02	3,61	3,13

Sumber : www.bps.go.id

inflasi tersebut, misalnya dengan melakukan kerjasama dengan daerah penghasil seperti Jambi atau Sumatera Barat. Kerjasama tersebut berupa transportasi laut untuk satu rute khusus membawa hasil pertanian. Selain itu, rute pelayaran hasil pertanian dari Jambi juga tidak langsung ke Batam melainkan ke Natuna terlebih dahulu. Sehingga begitu sampai di Batam, hasil pertanian yang dibawa akan busuk. Tidak jauh berbeda dengan Kota Batam kenaikan harga di Kota Pangkal Pinang juga banyak dipengaruhi oleh kelompok bahan makanan.

Sementara kondisi inflasi di kota-kota Pulau Jawa tidak jauh berbeda dengan kondisi kota-kota inflasi di Sumatera, Pada tahun 2018 sebagian besar kota mengalami penurunan angka inflasi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 26 kota di Pulau Jawa, hanya Kota Bandung yang mengalami kenaikan inflasi di tahun 2018, dimana pada tahun 2017 sebesar 3,46 persen naik menjadi 3,76 persen di tahun 2018. Jika dibandingkan dengan angka nasional, terdapat 7 kota dari 26 kota di Pulau Jawa yang mempunyai nilai inflasi di atas angka nasional, namun tidak ada yang mengalami deflasi. Inflasi terendah terjadi di Kota Kediri dengan inflasi 1,97 persen dan tertinggi di Kota Bekasi sebesar 4,23 persen.

Kota-kota di Pulau Kalimantan ada sebanyak 9 kota dan 6 diantaranya mempunyai angka inflasi di atas angka inflasi nasional dan selebihnya dibawah inflasi nasional, yaitu Kota Tanjung, Kota Banjarmasin dan Kota Balikpapan. Sedangkan jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2017, hanya 3 kota yang mengalami penurunan sedangkan 6 kota lainnya mengalami kenaikan. Tahun 2018 Kota Singkawang mengalami penurunan angka inflasi terbesar di Pulau Kalimantan dibandingkan tahun sebelumnya dari 5,23 persen menjadi 3,18 persen atau turun 2,05 persen.

Dari 11 kota inflasi di Pulau Sulawesi, terdapat 6 kota yang mempunyai angka inflasi di atas angka nasional dan 5 kota lainnya angka inflasinya di bawah inflasi nasional. Sementara dari 11 kota inflasi tersebut hanya 3 kota yang mengalami kenaikan inflasi dari tahun sebelumnya yaitu Kota Manado (1,39 persen), Kota Palu (2,13 persen) dan Kota Palopo (0,24 persen). Kota Palu sekaligus merupakan kota dengan inflasi tertinggi di Pulau Sulawesi selama tahun 2018, yaitu sebesar 6,46 persen. Tingginya inflasi di Kota Palu salah satunya karena dampak dari bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi pada bulan September 2018. Dari bencana alam tersebut mengakibatkan kenaikan harga pada beberapa komoditas kelompok pengeluaran, seperti nasi dan lauk pauk, tarif angkutan udara ke Kota Palu dan juga harga semen.

Inflasi yang terjadi di kota-kota di Pulau Maluku dan Papua pada tahun 2018 mengalami nilai inflasi di atas angka inflasi nasional kecuali Kota Tual dengan angka inflasi di bawah angka nasional. Kota Tual tercatat sebagai kota dengan nilai inflasi terendah dengan nilai inflasi sebesar 1,62 persen dan juga kota dengan penurunan inflasi tertinggi di Indonesia dengan penurunan nilai sebesar 7,79 persen pada tahun 2018. Penurunan inflasi Kota Tual ini berkat kerja keras Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) setempat, dimana tahun sebelumnya Kota Tual memiliki predikat sebagai kota dengan inflasi tertinggi di Indonesia. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi Kota Tual diantaranya

adalah sayur bayam, ketela rambat, kangkung, embal gepe, dan cabai rawit.

Inflasi, Daya Beli, Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kebutuhan hidup yang beragam menjadi fenomena tersendiri dalam upaya memenuhi kebutuhan. Harga berbagai kebutuhan yang semakin meroket menjadi kendala bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Gambaran tentang peningkatan harga atau yang biasa disebut dengan inflasi ini harus selalu dikontrol oleh pemerintah supaya senantiasa dalam kondisi yang stabil. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dalam menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah mempunyai target atau sasaran inflasi yang harus dicapai.

Hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi sangat erat, dimana inflasi yang terlalu rendah hingga terjadi deflasi, akan menekan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga sebaliknya bila inflasi terlalu tinggi, terjadi penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi. Eratnya hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi ini, menjadi sebab pemerintah untuk lebih fokus terhadap konsumsi rumah tangga dibandingkan fokus mengandalkan investasi yang bisa memperbanyak impor. Menjaga dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mendorong level konsumsi perlu menjadi salah satu prioritas kebijakan nasional. Sejalan dengan itu, meningkatkan daya beli bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan dana bantuan sosial (bansos) dan transfer ke daerah dikarenakan kelompok masyarakat bawah justru mendapatkan banyak program pemerintah, sehingga menyebabkan konsumsi relatif meningkat.

Tahun 2018 inflasi Indonesia masih berada dalam target dan sasaran prediksi pemerintah, tetapi lebih rendah jika dibandingkan inflasi tahun 2017. Ini menunjukkan pemerintah berhasil mencapai sasaran atau target inflasi yang telah ditentukan. Realisasi inflasi tahun 2018 tersebut melengkapi pencapaian sasaran inflasi dalam empat tahun berturut-turut. Penurunan inflasi 2018 bersumber dari penurunan inflasi *administered price* di tengah kenaikan inflasi inti dan inflasi *volatile food*. Pencapaian sasaran inflasi 2018 tidak terlepas dari koordinasi pengendalian inflasi yang erat bersama dengan Pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Selama kurun waktu 2018 telah terjadi dua kali deflasi yaitu pada bulan Agustus (0,05) dan September (0,18). Angka tersebut berbanding terbalik dibandingkan Juli 2018 yang mengalami inflasi sebesar 0,28 persen. Namun angka deflasi tersebut masih cukup kondusif dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus berupaya menjaga agar seluruh komponen ekonomi dalam negeri terjaga. Pemerintah juga senantiasa menjaga agar pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah tidak terlalu memicu inflasi impor (*imported inflation*) Indonesia.

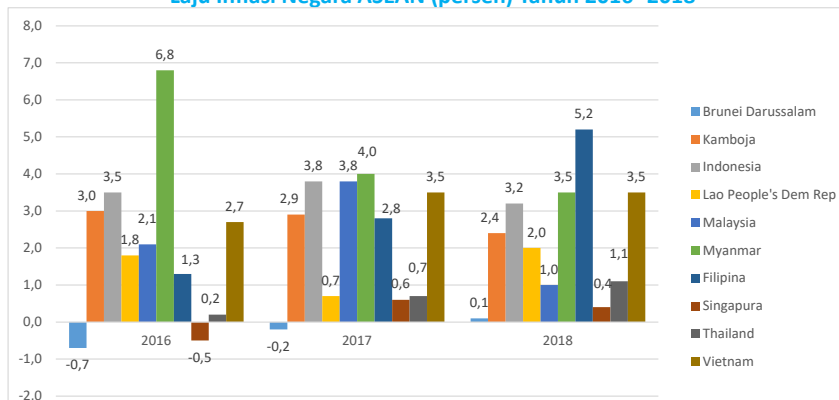
Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17 persen. Angka ini meleset dari target yang ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 5,4 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,07 persen, maka ekonomi di 2018 masih lebih tinggi. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut dipengaruhi berbagai hal, antara lain harga komoditas yang mengalami penurunan dan tren pelemahan ekonomi dunia. Di tengah harga komoditas dan ekonomi global yang tidak pasti, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan meski ada faktor eksternal yang memengaruhi.

Inflasi Indonesia Di Tengah Negara ASEAN

Kondisi perekonomian suatu negara dapat dilihat dari tingkat inflasinya. Jika terjadi Inflasi yang terlalu rendah akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sedangkan bila inflasi terlalu tinggi juga akan menurunkan daya beli masyarakat. Kebijakan dari masing-masing negara ASEAN yang tidak sama juga akan membawa dampak ekonomi yang berbeda-beda dan akan menyebabkan beragamnya tingkat inflasi di negara-negara ASEAN dari waktu ke waktu.

Selama kurun waktu 2016-2018, hampir semua negara-negara ASEAN mengalami inflasi pada setiap tahunnya kecuali Brunei Darussalam dan Singapura. Brunei Darussalam sempat mengalami deflasi pada tahun 2016 dan 2017 yaitu masing-masing sebesar 0,7 persen dan 0,2 persen, sedangkan Singapura mengalami deflasi pada tahun 2016 sebesar 0,5 persen. Dalam kurun waktu yang sama, Negara Filipina merupakan negara yang mengalami peningkatan inflasi cukup tinggi di ASEAN. Pada tahun 2016, inflasi Filipina berada di angka 1,3 persen dan pada tahun 2017 naik menjadi 2,8 persen. Sedangkan di tahun 2018, inflasi Filipina melesit hingga 5,2 persen. Angka inflasi Filipina itu tercatat yang tertinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Kenaikan harga minyak global dan kerugian panen setelah terpaan topan beberapa waktu menjadi penyebab melesatnya inflasi Filipina tersebut.

Gambar 5.2
Laju Inflasi Negara ASEAN (persen) Tahun 2016–2018



Sumber : *World Economic Outlook* (IMF) dan Indikator Ekonomi

Sementara untuk posisi inflasi Indonesia tahun 2018 berada di tingkatan keempat tertinggi diantara negara-negara ASEAN setelah Filipina, Myanmar, dan Vietnam dengan nilai inflasi sebesar 3,2 persen. Namun jika dibandingkan dengan negara Thailand dan Singapura, inflasi Indonesia masih lebih tinggi. Inflasi Thailand sebesar 1,1 persen dan Singapura hanya sebesar 0,4 persen. Sejauh ini, kinerja ekonomi Indonesia di antara negara tetangganya agak sulit dideskripsikan. Dari sisi kurs, transaksi berjalan, dan *yield*, Indonesia di posisi terbawah. Sementara di sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia memang cukup lumayan tapi kalah juga dari Filipina.

<https://www.bps.go.id>

Neraca Perdagangan

6

Ekspor 2018

3 434,5



Hasil Sektor
Pertanian

130 088,4



Hasil Sektor
Industri

29 281,5



Hasil Sektor
Tambang

5,8



Hasil Sektor
Lainnya

17 404,9



Migas

(Juta US \$)

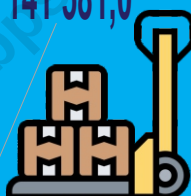
Impor 2018

17 181,4



Barang Konsumsi

141 581,0



Bahan Baku

29 948,8



Barang Modal

(Juta US \$)

Perkembangan Impor di Indonesia 2016 - 2019

(Juta US \$)

NON MIGAS

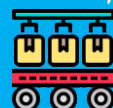
116 913,3



132 669,3



158 842,4



35 907,1



MIGAS

18 739,5



2016

24 316,2



2017

29 868,8



2018

4 761,3



2019

Jan-Mar

Kredit

Gambar vector: Freepik dari www.freepik.com

Kegiatan perdagangan tidak hanya dilakukan di dalam negeri tetapi juga antar negara yang disebut perdagangan internasional atau kegiatan ekspor-impor. Kegiatan perdagangan antar negara (ekspor-impor) didasari kondisi bahwa setiap negara memiliki karakteristik sumber daya alam yang berbeda. Jika suatu negara di dalam negerinya memiliki komoditas yang melimpah atau berlebih dan negara lain membutuhkan maka komoditi tersebut akan dijual keluar negaranya, atau sebaliknya jika negara membutuhkan suatu komoditi yang tidak dimiliki atau tidak mampu mencukupi kebutuhan di dalam negerinya maka akan dilakukan impor yaitu memasukkan komoditi dari luar negeri. Ekpor barang atau komoditas dapat menambah atau menjadi masukan devisa bagi negara tersebut serta dapat memperluas pasar untuk menambah keuntungan dan memungkinkan transfer teknologi modern.

Semua negara di dunia tidak terlepas dari aktivitas perdagangan, termasuk Indonesia. Kegiatan ekspor dan impor di Indonesia banyak dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal antara lain kondisi perekonomian dunia, kondisi keuangan global dan inflasi yang terjadi di luar Negara Indonesia, termasuk kebijakan-kebijakan perdagangan dan kebijakan luar negeri yang diberlakukan oleh negara tujuan ekspor atau negara asal impor. Tentunya hal tersebut menjadi kendala dan hambatan bagi perdagangan internasional Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir ini Indonesia menghadapi berbagai masalah dalam kegiatan ekspor, terutama isu-isu negatif dan kebijakan-kebijakan dari negara tujuan ekspor. Untuk itu pemerintah harus mampu mengantisipasi permasalahan yang terjadi antara lain dengan membuat kebijakan-kebijakan dan peraturan pemerintah yang mampu meningkatkan ekspor Indonesia dan mulai membuka pasar tujuan ekspor yang baru. Sedangkan dari sisi impor, pemerintah tetap membatasi dan menjaga impor hanya untuk komoditas tertentu saja agar Indonesia tidak menjadi pasar tujuan ekspor negara-negara lain.

Pada tahun 2018 harga komoditas dan perekonomian global semakin membaik dan momen ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kinerja ekspor yang membawa dampak positif bagi pertumbuhan nilai ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga kondisi yang terjadi didalam negeri Indonesia dapat juga memengaruhi kinerja perdagangan internasional. Kondisi di dalam negeri yang terjadi di tahun 2018 adalah banyak terjadi bencana alam yang membuat perekonomian sempat mengalami stagnan. Intinya pemerintah harus bisa mengantisipasi segala kondisi yang terjadi di dalam negeri dengan kebijakan dan peraturan pemerintah, begitu pula yang akan terjadi pada tahun 2019 yang merupakan tahun politik. Tahun 2019 Indonesia akan disibukkan dengan pemilihan umum, ditengah kampanye Pilpres dan Pilleg.

Perkembangan Ekspor

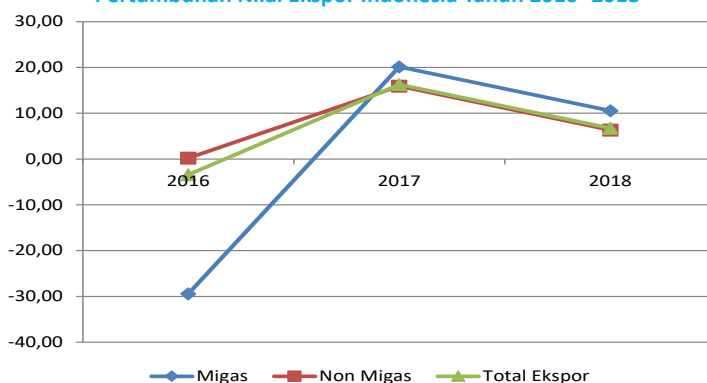
Faktor eksternal yang terjadi di sepanjang tahun 2016 berimbas pada kinerja ekspor Indonesia, yang belum mampu bertahan ditengah kondisi gejolak

ekonomi dunia. Perlambatan ekonomi terjadi di banyak negara tak terkecuali negara-negara besar di dunia yang berakibat pada kondisi perekonomian global yang stagnan. Ekspor sebagai salah satu penghasil devisa Negara pada tahun 2016 hanya mampu mencapai Rp 135,65 miliar merupakan kinerja ekspor yang terendah dalam 4 tahun terakhir. Nilai ekspor tersebut jika dibandingkan tahun lalu mengalami penurunan sekitar 2,97 persen, penurunan tersebut disebabkan ekspor migas yang mengalami penurunan cukup tinggi sebesar 29,44 persen, sedangkan ekspor non migas mengalami peningkatan hanya sebesar 0,22 persen.

Kinerja ekspor Indonesia di tahun 2017 cukup baik yang ditunjukkan dengan pertumbuhan yang positif sebesar 16,28 persen dibanding nilai ekspor tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut ditunjang oleh kenaikan ekspor migas dan non migas masing-masing tumbuh sebesar 20,09 persen dan 15,89 persen. Capaian pertumbuhan ekspor Indonesia di tahun 2017 sudah melebihi dari target yang ditetapkan Kemendag yaitu sebesar 5,6 persen untuk ekspor non migas.

Berdasarkan pengalaman yang terjadi di tahun 2017 maka Kementerian Perdagangan yang sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekspor di tahun 2018 antara 5-7 persen. Namun dengan melihat perkembangan yang terjadi di awal tahun 2018 dan beberapa bulan berikutnya membuat kemendag melakukan revisi target pertumbuhan ekspor menjadi 11 persen di tahun 2018. Menteri Perdagangan menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mendorong pencapaian target pertumbuhan yakni pulihnya ekonomi global yang sedang terjadi, perbaikan harga komoditas di pasar internasional (seperti batu bara) dan pembukaan pasar nontradisional di Afrika dan Asia Selatan. Namun apa yang sudah ditargetkan pemerintah mengenai ekspor di tahun 2018 tidak tercapai, sampai akhir tahun 2018 kinerja ekspor Indonesia hanya mampu tumbuh sebesar 6,76 persen didukung dengan ekspor migas yang tumbuh sebesar 10,59 persen dan ekspor non migas tumbuh sebesar 6,36 persen.

Gambar 6.1
Pertumbuhan Nilai Ekspor Indonesia Tahun 2016–2018



Sumber : Indikator Ekonomi April 2019, BPS

Walaupun target ekspor yang telah ditetapkan pemerintah tidak tercapai di tahun 2018, tetapi nilai ekspor tetap tumbuh positif. Kinerja ekspor Indonesia cukup kuat dan stabil ditengah kondisi Indonesia di tahun 2018 yang penuh bencana. Sepanjang tahun 2018, lebih dari lima bencana alam besar menimpa Indonesia, diawali dengan gempa bumi di lebak banten, lalu gempa bumi di Lombok, tsunami, dan likuifaksi di Palu dan Donggala, letusan gunung anak Krakatau dan longsor di Brebes, yang menelan cukup banyak korban. Sejumlah bencana alam tersebut membuat perekonomian daerah bencana sementara mati dan mulai kembali bangkit perekonomian daerah bencana pasca bencana berlalu. Kondisi tersebut sempat memengaruhi perekonomian di dalam negeri, namun tidak berlangsung lama.

Berdasarkan pengalaman yang terjadi di tahun 2018 maka kemendag pada tahun 2019 dalam menargetkan pertumbuhan ekspor disesuaikan dengan pertumbuhan ekspor yang terjadi atau secara realisasi ekspor tumbuh berapa persen maka untuk tahun 2019 diatas atau lebih tinggi dari pertumbuhan yang terjadi di tahun 2018 maka ditetapkanlah sebesar 7,5 persen disesuaikan dengan pertumbuhan ekspor yang terjadi di tahun 2018. Target tersebut disesuaikan dengan realita dari kondisi perekonomian dunia yang terjadi, dimana memasuki tahun 2019, kondisi perekonomian dunia masih belum stabil, sebagian besar negara mengalami perlambatan ekonomi efek perang dagang AS-Tiongkok. Sampai dengan triwulan I 2019 hanya Amerika Serikat yang pertumbuhannya tetap meningkat dan perekonomian Tiongkok tumbuh stabil. Sebagian besar negara berhati-hati dengan menahan tingkat suku bunganya. Di sisi lain harga komoditas internasional bergerak turun, sedangkan harga minyak mentah justru mengalami peningkatan. Untuk tahun 2019, Kemendag menetapkan 5 unggulan ekspor Indonesia yang harapannya kinerja komoditas tersebut dapat menggenjot nilai ekspor di tahun 2019. Lima komoditi ekspor prioritas Indonesia yakni; makanan dan minuman; tekstil dan pakaian; otomotif; elektronik; dan kimia.

Kegiatan ekspor mempunyai andil yang sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi karena sebagai penghasil devisa negara. Ekspor unggulan yang masih menjadi andalan Indonesia adalah ekspor sektor non migas. Sumbangan ekspor non migas di tahun 2016 sudah menembus angka 90 persen tepatnya 90,97 persen dari total nilai ekspor dengan ekspor non migas mencapai nilai US\$ 132,08 miliar. Nilai ekspor non migas di tahun 2017 dan 2018 tercatat masing-masing sebesar US\$ 153,08 miliar (90,68 persen) dan US\$ 162,84 miliar (90,36 persen).

Ekspor non migas sendiri terdiri dari ekspor sektor industri, sektor pertanian, dan sektor pertambangan dan lainnya. Kinerja ekspor sektor industri menyumbang sekitar US\$ 110,50 miliar atau sekitar 83,66 persen dari total ekspor non migas di tahun 2016. Selanjutnya ekspor sektor pertanian serta sektor pertambangan dan lainnya masing-masing menyumbang ekspor non migas sebesar US\$ 3,41 miliar dan US\$ 18,17 miliar. Nilai ekspor sektor industri menunjukkan peningkatan dari tahun 2017-2018, begitu pula nilai ekspor sektor pertambangan dan lainnya juga

**Tabel 6.1 Nilai Ekspor Indonesia Menurut Migas dan Non-Migas (juta US\$)
Tahun 2016–2019**

Ekspor	2016	2017	2018	2019 (Jan-Mar)
Migas	13 105,5	15744,4	17 171,7	3 485,5
Minyak Mentah	5 196,7	5 354,9	5 120,5	349,3
Hasil Minyak	872,0	1 718,6	1 692,3	304,6
Gas	7 036,8	8 670,9	10 592,0	2 831,6
Non Migas	13 2080,7	153083,8	162 841,0	37 120,2
Sektor Pertanian	3 407,0	3 671,0	3 431,0	784,8
Sektor Industri	11 0504,1	125 103,2	130 118,1	29 969,8
Sektor Tambang dan Lainnya	18 169,6	24 309,6	29 291,9	6 365,6
Jumlah	145 186,2	168 828,2	180 012,7	40 605,7

Sumber : Indikator Ekonomi April 2018, BPS

mengalami pertumbuhan. Kecuali nilai ekspor sektor pertanian, pada tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya namun di tahun 2018 nilai ekspor sektor pertanian mengalami penurunan.

Sektor migas perkembangannya masih sangat jauh dibawah sektor non migas, kontribusi ekspor migas terhadap total nilai ekspor dalam 3 tahun terakhir (2016-2018) kontribusinya selalu dibawah 10 persen dari total nilai ekspor. Nilai ekspor migas di tahun 2016 hanya mencapai US\$ 13,10 miliar saja, selanjutnya di tahun 2017 dan 2018 ekspor migas Indonesia masing-masing mencapai US\$ 15,73 miliar dan US\$ 17,37 miliar. Jika dilihat nilai ekspor migas Indonesia setiap tahun menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Peranan migas terhadap ekspor Indonesia tidak bisa menyaingi ekspor non migas, karena migas termasuk kategori sumber daya alam tak terbarukan. Oleh karena itu perlu dilakukan penghematan tidak boleh dilakukan eksploitasi secara besar-besaran karena komoditas tersebut harus bisa digunakan untuk kebutuhan generasi yang akan datang. Saat ini kebutuhan didalam negeri produk migas masih cukup besar bahkan belum seluruhnya dapat terpenuhi sehingga Indonesia masih harus mengimpor produk migas dari luar negeri.

Ekspor migas terdiri dari minyak mentah, hasil minyak dan gas, dari ke tiga komoditas tersebut yang menyumbang tertinggi adalah komoditas gas dengan nilai ekspor mencapai US\$ 8,67 miliar pada tahun 2017. Nilai ekspor tersebut menunjukkan peningkatan sekitar 23,22 persen dibanding tahun 2016. Pada tahun 2018 nilai ekspor migas mengalami kenaikan yang didukung oleh kenaikan ekspor gas yang cukup signifikan yaitu mencapai 22,16 persen dengan nilai ekspor mencapai US\$ 10,59 miliar. Namun pendukung ekspor migas yang lainnya yaitu minyak mentah dan hasil minyak mengalami penurunan nilai ekspornya, masing-masing hanya mencapai US\$ 5,12 miliar dan US\$ 1,69 miliar.

Kinerja ekspor di tiga bulan pertama tahun 2019 sudah mencapai US\$ 40,61 miliar dan jika dibandingkan dengan triwulan I 2018 menunjukkan

penurunan sekitar 7,63 persen. Hasil ekspor di tiga bulan pertama ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melihat nilai ekspor migas dan non migas di triwulan-triwulan berikutnya yang mampu menaikkan nilai ekspor Indonesia agar target ekspor yang sudah ditetapkan pemerintah di tahun 2019 dapat tercapai.

1. Ekspor Komoditas Penting

Ekspor non migas diharapkan ke depannya dapat terus meningkat dan berkembang sehingga mampu memberikan devisa yang besar bagi negara. Untuk itu perlu di kembangkan inovasi dan keanekaragaman produk serta kualitas komoditas yang di ekspor agar mampu bersaing dengan produk dari luar. Nilai ekspor komoditas pertanian pada tahun 2017 cukup baik menunjukkan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didukung oleh beberapa komoditi unggulan dari sektor pertanian. Salah satu komoditas unggulan yang menjadi primadona sektor pertanian sampai saat ini adalah kopi dengan nilai ekspor mencapai US\$ 1,18 miliar pada tahun 2017 terjadi kenaikan sekitar 17,83 persen. Selanjutnya, komoditas Tanaman Obat, Aromatik dan Rempah-rempah asal Indonesia juga banyak diminati oleh Negara luar, dimana nilai ekspor komoditi tersebut mencapai US\$ 0,50 miliar pada tahun 2017 atau naik sekitar 25,72 persen dari tahun sebelumnya. Namun nilai ekspor komoditas hasil pertanian pada tahun 2018 hampir semua mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 kecuali untuk komoditas kakao yang mengalami peningkatan 35,51 persen. Ekspor sektor pertanian di tiga bulan pertama 2019 mencapai US\$ 784,8 juta dengan komoditas penyumbang tertinggi adalah kopi US\$ 194,6 juta dan diikuti oleh ekspor tanaman obat-obatan, aromatik, dan rempah-rempah sebesar US\$ 135,1 juta.

Ekspor sektor industri menjadi andalan bagi nilai ekspor Indonesia, sepanjang tahun 2016-2018 kinerjanya menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Komoditas penyumbang terbesar ekspor hasil industri adalah minyak kelapa sawit, dengan nilai ekspor mencapai US\$ 20,34 miliar pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 27,48 persen, namun mengalami penurunan nilai ekspor di tahun 2018 sebesar 12,01 persen menjadi US\$ 17,90 miliar. Penurunan nilai ekspor kelapa sawit di tahun 2018 dikarenakan adanya hambatan perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara. Hambatan tersebut datang dari Negara-negara Uni Eropa yang mengeluarkan resolusi Parlemen Eropa yang menuding sawit sebagai penyebab deforestasi. Negara India yang sejak awal tahun 2018 mulai memberlakukan kenaikan bea masuk impor untuk minyak nabati. Selain itu juga ada hambatan yang datang dari Negara Amerika yang melancarkan tuduhan *antidumping* biodiesel dan Negara Tiongkok yang memperketat pengawasan terhadap minyak nabati yang diimpor.

Komoditas selanjutnya di sektor industri adalah nilai ekspor hasil industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil mencapai US\$ 6,75 miliar dan komoditas hasil industri logam dasar nilai ekspornya mencapai US\$ 8,76 miliar, keduanya mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya masing-

**Tabel 6.2 Nilai Ekspor Indonesia Menurut Komoditas Penting (juta US\$)
Tahun 2016–2019**

Komoditas Ekspor	2016	2017	2018	2019 (Jan-Mar)
Ekspor Hasil Pertanian	3 407,0	3 671,0	3 431,0	784,8
Kopi	997,5	1 175,4	806,9	194,6
Tanaman Obat, Aromatik, dan Rempah-rempah	498,5	626,7	601,2	135,1
Buah-buahan	343,9	362,0	297,8	78,3
Biji Kakao	79,7	53,5	72,5	9,3
Ikan Segar/Dingin Hasil Tangkap	128,1	111,9	105,8	30,5
Hasil Pertanian Lainnya	1 359,3	1 341,5	1 546,8	337,0
Ekspor Hasil Industri	110 504,1	125 103,2	130 118,1	29 969,8
Minyak Kelapa Sawit	15 955,6	20 340,9	17 898,8	3 824,9
Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	6 136,2	6 752,1	7 322,5	1 903,6
Alat-alat Listrik	4 615,0	4 967,4	5 071,0	1 165,4
Karet Remah	3 177,1	4 958,3	3 836,7	762,0
Hasil Industri Logam Dasar	5 988,9	8 760,3	11 922,8	3 197,6
Hasil Industri Lainnya	74 631,4	79 324,2	84 066,3	19 116,3
Ekspor Hasil Tambang (Tidak Termasuk Migas)	18 164,7	24 303,8	29 286,0	6 363,9
Batu Bara	12 794,2	17 877,0	20 631,4	4 862,0
Bijih Tembaga	3 385,0	3 439,6	4 186,7	399,4
Hasil Tambang Lainnya	1 985,5	2 987,2	1 123,7	1 102,5

Sumber : Indikator Ekonomi April 2019, BPS

masing tumbuh sebesar 10,04 persen dan 46,26 persen. Pada tahun 2018 kedua komoditi tersebut kembali mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 8,45 persen dan 36,10 persen. Komoditi unggulan sektor industri di triwulan pertama tahun 2019 masing-masing menyumbang nilai ekspor sebesar US\$ 3,82 miliar, US\$ 1,90 miliar dan US\$ 3,20 miliar.

Hasil tambang (tidak termasuk migas) Indonesia yang masih bisa dieksploitasi dan mendapat banyak permintaan dari luar negeri adalah batu bara, dimana kontribusi batu bara terhadap total nilai ekspor hasil tambang sudah diatas 70 persen. Pada tahun 2016 nilai ekspor hasil tambang yaitu batu bara mencapai US\$ 12,79 miliar dan tahun 2017, nilai ekspor batu bara tercatat sebesar US\$ 17,87 miliar atau meningkat sebesar 39,65 persen. Permintaan komoditas batubara Indonesia masih cukup besar, dimana pada tahun 2018 nilai ekspornya mencapai US\$ 20,63 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 15,41persen. Selanjutnya nilai ekspor komoditas bijih tembaga dan hasil tambang lainnya pada tahun 2017 masing-masing tercatat US\$ 3,44 miliar dan US\$ 2,99 miliar keduanya mengalami kenaikan. Komoditas bijih tembaga tahun 2018 nilai ekspornya mencapai US\$ 4,19 miliar atau naik 21,72 persen, namun nilai ekspor komoditas hasil tambang lainnya mengalami penurunan hanya mencapai US\$ 1,12 miliar.

Nilai ekspor barang tambang Indonesia di triwulan I 2019 mencapai US\$ 6,36 miliar, dimana nilai ekspor komoditas batu bara mencapai US\$ 4,86 miliar atau sekitar 76,40 persen dari total ekspor hasil tambang dan ekspor bijih tembaga mencapai US\$ 0,40 miliar. Pemerintah harus bisa mengendalikan

harga dan jumlah barang yang diekspor khususnya untuk hasil tambang (tidak termasuk migas), karena komoditas tersebut termasuk sumber daya alam yang tak terbarukan yang sewaktu-waktu cadangan di dalam bumi dapat menipis dan habis.

Perkembangan nilai ekspor Indonesia menurut golongan barang SITC pada tahun 2017 dibanding tahun 2016 menunjukkan peningkatan kecuali untuk golongan barang hasil industri lainnya (SITC 8) yang mengalami penurunan. Ekspor golongan barang SITC di tahun 2018 hampir semuanya mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 kecuali untuk golongan barang minyak/lemak nabati dan hewani (SITC 4) yang mengalami penurunan sebesar 12,06 persen. Penyumbang terbesar nilai ekspor menurut golongan barang SITC di tahun 2018 masih golongan SITC 3, diikuti golongan SITC 6, SITC 7 dan SITC 8. Keempat golongan barang SITC tersebut mengalami kenaikan ekspor di tahun 2018 masing-masing sebesar 13,10 persen, 17,80 persen, 4,75 persen, dan 2,94 persen.

Perkembangan nilai ekspor menurut golongan barang SITC di triwulan I 2019 semuanya masih di bawah US\$ 10 miliar, dimana yang memberikan masukan tertinggi bagi Negara adalah golongan SITC 3 (bahan bakar, bahan penyemir, dsb) yaitu mencapai US\$ 9,14 miliar. Golongan barang SITC yang lain nilai ekspornya masih di bawah US\$ 6,50 miliar, yakni golongan barang SITC 6 (US\$ 6,41 miliar) dan untuk golongan barang SITC lainnya nilai ekspornya masih dibawah US\$ 6 miliar. Nilai ekspor yang dicapai di triwulan I tahun 2019 menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan kemendag untuk menggenjot kinerja ekspor kedepannya sampai akhir tahun 2019, golongan barang SITC yang mana yang akan menjadi prioritas utama untuk pengembangan nilai ekspornya. Inovasi produk dan kebijakan baru harus dilakukan pemerintah untuk dapat terus meningkatkan komoditas ekspor dan memperluas pangsa pasar ekspor.

**Tabel 6.3 Nilai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (juta US\$)
Tahun 2016-2019**

SITC	Golongan Barang	2016	2017	2018	2019 (Jan-Mar)
0	Bahan Makanan Binatang Hidup	11 639	12 827	13 105	2 905
1	Minuman dan Tembakau	1 141	1 275	1 332	318
2	Bahan Mentah	12 435	16 328	17 628	3 338
3	Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb	27 887	36 881	42 008	9 142
4	Minyak/Lemak Nabati & Hewani	17 490	21 978	19 327	4 100
5	Bahan Kimia/Chemical	11 035	12 700	14 210	3 160
6	Hasil Industri Menurut Bahan	20 115	22 356	26 336	6 409
7	Mesin dan Alat Pengangkutan	20 929	21 588	22 613	4 987
8	Hasil Industri Lainnya	21 128	20 958	21 574	5 419
9	Bahan & Transaksi Khusus Lainnya	1 387	1 937	2 082	828
		145 186	168 828	180 215	40 606

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap total

Sumber : Indikator Ekonomi April 2019, BPS

2. Ekspor Menurut Negara Tujuan

Barang-barang komoditas Indonesia banyak di ekspor ke luar negeri khususnya ke kawasan ASEAN sebagai negara yang terdekat dari Indonesia. Nilai ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN pada tahun 2017 mencapai US\$ 39,27 miliar menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan positif ke kawasan ASEAN didukung oleh ekspor Indonesia ke negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Di tengah kondisi bencana alam yang menimpa Indonesia di sepanjang tahun 2018 membuat kegiatan ekspor Indonesia ke negara di kawasan ASEAN mengalami penurunan sebesar 9,70 persen atau hanya mencapai nilai US\$ 35,46 miliar. Pada tahun 2017 sekitar 23,26 persen dari total nilai ekspor Indonesia berasal dari negara-negara di ASEAN dan nilai ekspor ke kawasan tersebut mengalami kenaikan sebesar 16,07 persen. Pasar ekspor ke kawasan ASEAN yang mampu menyerap banyak ekspor Indonesia adalah Singapura. Nilai ekspor Indonesia ke Singapura sempat menurun sekitar 6,11 persen di tahun 2016 dan pada tahun 2017 nilai ekspor Indonesia ke Singapura kembali naik yakni mencapai US\$ 12,77 miliar atau naik sekitar 7,64 persen. Ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN di triwulan I 2018 sudah mencapai US\$ 10,21 miliar dimana kontribusi terbesar ekspor Negara ASEAN adalah Singapura dengan nilai ekspor mencapai US\$ 3,32 miliar disusul Malaysia dan Thailand masing-masing sebesar US\$ 2,31 miliar dan US\$ 1,74 miliar.

Negara Amerika Serikat sampai saat ini masih menjadi tujuan utama ekspor Indonesia selain Tiongkok, dan Jepang. Oleh sebab itu, perkembangan ekonomi pada ketiga negara ini sangat memengaruhi kinerja perdagangan luar negeri Indonesia. Dari ketiga negara tujuan ekspor utama Indonesia tahun 2016 nilainya mencapai US\$ 49,03 miliar dan di tahun 2017 nilai ekspor ke tiga negara mencapai US\$ 58,68 miliar atau meningkat sekitar 19,67 persen. Kondisi ekonomi global yang terjadi di tahun 2018 berdampak pada perdagangan luar negeri Indonesia, akibat perang dagang antara Amerika Serikat–Tiongkok berdampak pada permintaan komoditas dari Amerika yang mengalami penurunan dari US\$ 17,79 miliar menjadi US\$ 17,67 miliar atau turun sebesar 0,69 persen. Hal yang sama juga terjadi dengan nilai ekspor ke Negara Jepang yang juga menurun sekitar 8,37 persen atau hanya mencapai US\$ 16,31 miliar. Sebaliknya ekspor Indonesia ke Tiongkok kembali mengalami kenaikan dari tahun lalu sebesar 5,69 persen menjadi US\$ 24,40 miliar. Pada triwulan pertama 2019, kontribusi ketiga negara ini mencapai sepertiga dari nilai ekspor keseluruhan, atau terserap sekitar US\$ 12,81 miliar.

Nilai ekspor Indonesia ke negara-negara di Kawasan Uni Eropa sepanjang tahun 2016-2018 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, nilai ekspor Indonesia ke wilayah tersebut hanya mencapai US\$ 14,45 miliar lalu meningkat menjadi 16,34 miliar (2017) dan 17,02 miliar (2018). Salah satu negara di kawasan Uni Eropa yaitu Inggris pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 4,14 persen dengan nilai ekspor sebesar US\$ 1,59 miliar dan sebaliknya di tahun 2017 mengalami penurunan

nilai ekspor sebesar 11,59 persen dengan nilai ekspor hanya sebesar US\$ 1,41 miliar. Ekspor Indonesia ke kawasan Uni Eropa tahun 2017 sebesar US\$ 16,34 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 13,02 persen. Negara di kawasan Uni Eropa yang banyak menyerap ekspor Indonesia adalah ke Belanda dimana pada tahun 2017 tercatat sebesar US\$ 4,04 miliar. Selanjutnya di triwulan I-2018 nilai ekspor Indonesia ke kawasan Uni Eropa mencapai US\$ 4,30 miliar.

Untuk keberlangsungan kegiatan ekspor ke depannya Indonesia mulai melirik tujuan pasar yang baru di luar kawasan yang selama ini sudah menjadi mitra dagang. Negara tujuan ekspor yang dianggap potensial saat ini, seperti ke wilayah Afrika, Korea Selatan. Potensi perdagangan yang dapat dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara di Afrika melalui perjanjian-perjanjian pasar bebas (FTA) bilateral antara Indonesia dengan negara terkait dan melalui even pameran perdagangan. Negara Afrika di tahun 2017 mampu menyerap ekspor Indonesia sebesar US\$ 4,89 miliar lebih tinggi dibandingkan ekspor

**Tabel 6.4 Nilai Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan (juta US\$)
Tahun 2016-2019**

Negara Tujuan	2016	2017	2018	2019 (Jan-Mar)
1. ASEAN	33 830,3 (23,14)	39 266,4 (23,26)	35 458,8 (21,78)	8 275,7 (22,29)
(Malaysia)	7 121,7 (4,87)	8 441,1 (5,00)	7 895,8 (4,85)	1 752,3 (4,72)
(Thailand)	5 394,1 (3,69)	6 473,7 (3,83)	5 718,2 (3,51)	1 393,9 (3,76)
(Singapura)	11 861,0 (8,11)	12 724,9 (7,54)	8 998,0 (5,53)	2 016,1 (5,43)
2. Tiongkok	16 790,8 (11,49)	23 083,1 (13,67)	24 396,7 (14,98)	5 236,2 (14,11)
3. Jepang	16 098,6 (11,01)	17 798,8 (10,54)	16 308,6 (10,02)	3 404,2 (9,17)
4. Asia Lainnya	32 095,2 (21,96)	39 289,3 (23,27)	37 585,3 (23,09)	8 882,3 (23,93)
5. Amerika Serikat	16 141,4 (11,04)	17 794,5 (10,54)	17 671,2 (10,85)	4 164,8 (11,22)
6. Amerika Lainnya	3 946,8 (2,70)	4 384,5 (2,60)	4 500,4 (2,76)	4 370,2 (11,77)
7. Australia dan Oceania lainnya	3 687,6 (2,52)	3 036,3 (1,80)	2 914,5 (1,79)	612,6 (1,65)
8. Afrika	4 186,1 (2,86)	4 887,7 (2,90)	4 782,6 (2,94)	1 221,8 (3,29)
9. Uni Eropa	14 454,8 (9,89)	16 336,4 (9,68)	17 025,5 (10,46)	3 631,0 (9,78)
(Inggris)	1 590,4 (1,09)	1 406,1 (0,83)	1 465,3 (0,90)	337,5 (0,91)
(Belanda)	3 254,9 (2,23)	4 037,8 (2,39)	3 838,1 (2,36)	811,9 (2,19)
(Jerman)	2 638,7 (1,81)	2 668,2 (1,58)	2 709,3 (1,66)	581,9 (1,57)
10. Eropa Lainnya	3 954,5 (2,71)	2 951,2 (1,75)	2 166,1 (1,33)	648,9 (1,75)
	146 (100,00)	168 828,2 (100,00)	162 810,2 (100,00)	37 120,2 (100,00)

Sumber : Indikator Ekonomi Mei 2019, BPS

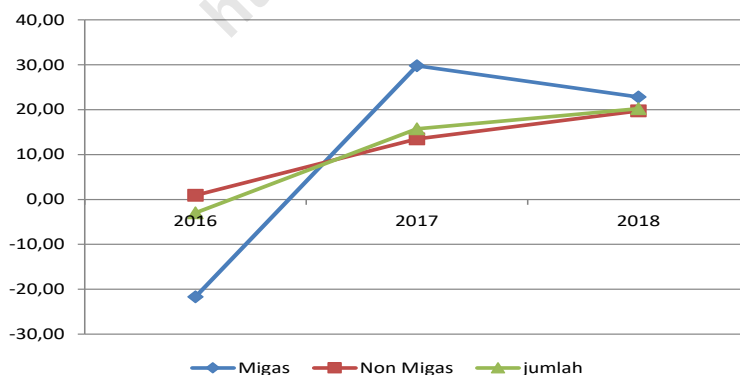
ke Australia. Selanjutnya, ekspor Indonesia di tahun 2018 ke kawasan Afrika mengalami sedikit penurunan sekitar 2,15 persen yaitu mencapai US\$ 4,78 miliar.

Agar target ekspor di tahun 2019 dapat tercapai Kemendag sejak tahun lalu sudah melakukan usaha dengan membuka akses pasar, baik secara formal melalui perjanjian maupun informal. Kemudian, setiap kali kunjungan ke luar negeri maupun mitra dagang di luar negeri, Kemendag selalu melakukan misi dagang dengan mengajak pengusaha untuk melakukan forum bisnis dengan memperkenalkan produk ekspor Indonesia. Selain itu, sesuai arahan Presiden, Kementerian Perindustrian juga memperhatikan industri manufaktur karena industri dan investasi mampu meningkatkan ekspor. Karena itu perlakuan terhadap manufaktur berorientasi ekspor betul-betul mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Perkembangan Impor

Indonesia sampai saat ini melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kekosongan atau kekurangan komoditas tertentu didalam negeri yang tidak dapat mencukupi kebutuhan atau barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan atau diproduksi di dalam negeri. Namun demikian impor yang dilakukan harus tetap dijaga dan diawasi agar komoditas atau barang yang diimpor tersebut tidak berdampak negatif di dalam negeri bahkan dapat merusak atau merugikan produksi di dalam negeri yang menyebabkan harga komoditas tersebut dapat merugikan produsen di dalam negeri.

Gambar 6.2
Pertumbuhan Nilai Impor Indonesia Tahun 2016-2018



Sumber : Indikator Ekonomi Mei 2019, BPS

Sementara itu, perkembangan total nilai impor Indonesia di tahun 2017 menunjukkan peningkatan sebesar 15,73 persen dibanding nilai impor tahun lalu. Hal ini dipengaruhi kenaikan impor migas sebesar 29,76 persen dan impor non migas sebesar 13,48 persen. Tumbuhnya nilai impor di tahun 2017

terjadi karena dampak dari membaiknya harga komoditas di pasar global. Hal tersebut harus diwaspadai terutama impor migas berarti kebutuhan di dalam negeri semakin meningkat sedangkan produksi di dalam negeri tidak mampu memenuhi. Karena dengan semakin tinggi nilai impor yang tidak diimbangi dengan nilai ekspor yang tinggi akan membuat neraca perdagangan Indonesia akan mengalami defisit yang sangat tinggi sekali.

Memasuki tahun 2018 nilai impor Indonesia kembali menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 20,21 persen dibanding nilai impor tahun lalu. Kenaikan tersebut disumbang oleh kenaikan impor migas dan non migas masing-masing tumbuh sebesar 22,84 persen dan 19,73 persen. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan impor di tahun 2018 sekitar 11,5 persen. Ternyata kebijakan pemerintah dalam pembatasan impor belum mampu menurunkan nilai impor bahkan pertumbuhan nilai impor melebihi dari angka yang diproyeksikan. Pemerintah belum mampu mengendalikan impor di tahun 2018 karena kondisi di dalam negeri yang mengalami banyak bencana alam, membuat perekonomian di dalam negeri sempat stagnan sehingga pemerintah membutuhkan pasokan dari luar untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri pasca bencana.

Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan impor tahun 2019 menjadi 7,1 persen dan target pertumbuhan impor non migas yang tertuang di RKP 2019 adalah antara 9,8 persen sampai 12,7 persen. Impor Indonesia sampai dengan triwulan I 2019 dibanding triwulan yang sama tahun lalu menunjukkan penurunan sebesar 7,48 persen. Penurunan ini ditopang oleh penurunan impor migas sebesar 29,28 persen dan impor non migas sebesar 3,54 persen. Semoga kebijakan pemerintah dalam pembatasan impor khususnya impor bahan makanan mampu menurunkan nilai impor di tahun ini sampai akhir tahun sehingga target dan proyeksi pertumbuhan impor yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai. Walaupun dilakukan impor sebaiknya diarahkan untuk industri yang beorientasi ekspor, bukan untuk industri yang memasarkan produknya di dalam negeri. Walaupun demikian, tetap diperlukan pengendalian nilai impor agar nilai impor tidak lebih mendominasi dibandingkan nilai ekspor.

**Tabel 6.5 Nilai Impor Indonesia Menurut Migas dan Non Migas (juta US\$)
Tahun 2016-2019**

Impor	2016	2017	2018	2019 (Jan-Mar)
Migas	18 739,5	24 316,2	29 868,9	4 761,4
Non Migas	116 913,3	132 669,3	158,842,3	35 907,1
jumlah	135 652,8	156 985,5	188,711,2	40 668,5

Sumber : Indikator Ekonomi Mei 2019, BPS

Nilai impor Indonesia pada tahun 2016 mencapai sebesar US\$ 135,65 miliar yang terdiri dari impor non migas sebesar US\$ 116,91 miliar dan migas

sebesar US\$ 18,74 miliar. Jika dilihat kontribusinya sebagian besar barang-barang yang di impor oleh Indonesia adalah non migas. Pada tahun 2017 sekitar 84,51 persen impor Indonesia adalah non migas dengan nilai mencapai US\$ 132,67 miliar, sisanya sekitar 15,49 persen impor migas dengan nilai mencapai US\$ 24,32 miliar. Nilai impor Indonesia tahun 2018 mencapai US\$ 188,71 miliar, dimana sekitar US\$ 158,84 miliar adalah impor non migas dan US\$ 29,87 miliar impor migas.

Indonesia masih melakukan kegiatan impor, di tahun 2019 triwulan I total nilai impor tercatat sebesar US\$ 40,67 miliar. Sebagian besar impor Indonesia adalah non migas (88,29 persen) sebesar US\$ 40,67 miliar dan impor migas (11,71 persen) dengan nilai sebesar US\$ 4,76 miliar. Jika dilihat nilai impor di triwulan I 2019 lebih rendah dibanding dengan tahun lalu, semoga kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor dapat berhasil. Berbagai kebijakan yang bisa mengurangi nilai impor tersebut, yakni kenaikan pajak impor (PPH 22), implementasi persyaratan untuk menggunakan bahan bakar campuran biodiesel (B20) dapat menekan impor migas dan rencana menunda impor barang modal untuk beberapa proyek infrastruktur.

1. Impor Menurut Golongan Barang Ekonomi

Apabila dilihat dari besaran nilai impor, sebagian besar impor Indonesia menurut golongan barang ekonomi menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Ditinjau dari golongan barang ekonomi, impor Indonesia tahun 2016 didominasi oleh bahan baku dengan nilai impor mencapai US\$ 100,95 miliar dengan kontribusi sebesar 74,41 persen. Urutan ke dua adalah barang modal sebesar US\$ 22,36 miliar (16,48 persen), dan barang konsumsi dengan nilai impor mencapai US\$ 12,35 miliar berkontribusi sebesar 9,10 persen dari total nilai impor.

**Tabel 6.6 Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang Ekonomi (Juta US\$)
Tahun 2016-2019**

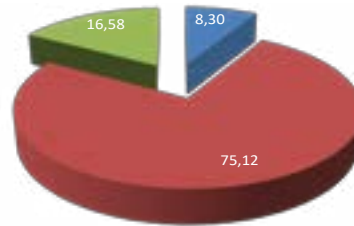
Impor	2016	2017	2018	2019 (Jan-Mar)
Barang Konsumsi	12 351,7	14 075,1	17 181,3	3 377,1
Bahan Baku	100 945,7	117 851,3	141 581,0	30 548,4
Barang Modal	22 355,4	25 059,1	29 948,7	6 743,0
Jumlah	135 652,8	156 985,5	188 711,0	40 668,5

Sumber : Indikator Ekonomi Mei 2019, BPS

Nilai impor menurut golongan barang ekonomi semuanya mengalami kenaikan. Nilai impor barang konsumsi tahun 2018 mencapai US\$ 17,18 miliar, bahan baku mencapai US\$ 141,58 dan barang modal mencapai US\$ 29,95 miliar, masing-masing mengalami kenaikan sebesar 22,07 persen, 20,13 persen dan 19,51 persen dibanding impor tahun 2017. Lonjakan impor bahan baku dan barang modal terus menjadi perhatian pemerintah agar impor tersebut tidak mengalami pertumbuhan yang tinggi sekali, pemerintah berusaha dapat menekan impor melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) akan mengidentifikasi produk-produk impor yang masuk ke pasar domestik

supaya berstandar SNI. Saat ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendukung industri nasional.

Gambar 6.3
Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang Ekonomi Triwulan I Tahun 2019



Sumber : Indikator Ekonomi Mei 2019, BPS

Golongan barang ekonomi untuk impor di triwulan I 2019 masih didominasi oleh bahan baku mencapai US\$ 30,55 miliar atau sekitar 75,12 persen dari total nilai impor. Selanjutnya, sumbangan impor bahan modal sekitar 16,58 persen dari total impor dan sisanya 8,30 persen merupakan impor dari bahan baku. Capaian nilai impor barang ekonomi di triwulan I 2019 menjadi bahan bagi pemerintah untuk terus melakukan pengetatan impor khususnya untuk bahan baku dan barang modal.

Dari tahun ke tahun (2016-2018) impor Indonesia menunjukkan kenaikan atau pertumbuhan yang positif, dimana kenaikan tersebut diikuti pula oleh 10 golongan barang SITC yang diimpor semuanya menunjukkan kenaikan pula setiap tahunnya. Hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah ke depannya agar impor dapat ditekan. Pada tahun 2017, kenaikan tertinggi di golongan barang SITC 3 sebesar 32,49 persen, golongan barang selanjutnya adalah SITC 1 mengalami kenaikan sebesar 25,27 persen, dan SITC 2 sebesar 23,10 persen.

Tabel 6.7 Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (Juta US\$)
Tahun 2016-2019

SITC	Golongan Barang	2016	2017	2018	2019 (Jan-Mar)
0	Bahan Makanan Binatang Hidup	13 746	14 688	16 428	3 501
1	Minuman dan Tembakau	653	818	948	192
2	Bahan Mentah	7 078	8 713	9 944	2 383
3	Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb	19 241	25 492	31 579	5 079
4	Minyak/Lemak Nabati & Hewani	153	161	174	45
5	Bahan Kimia/Chemical	19 987	22 539	26 684	6 286
6	Hasil Industri Menurut Bahan	22 642	25 765	30 970	7 501
7	Mesin dan Alat Pengangkutan	43 901	49 261	59 886	13 111
8	Hasil Industri Lainnya	7 419	8 519	9 969	2 238
9	Bahan & Transaksi Khusus Lainnya	833	1 029	2 132	332
		135 653	156 986	188 711	406 68

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap total

Sumber : Indikator Ekonomi April 2019, BPS

Nilai impor tertinggi pada tahun 2018 berdasarkan golongan barang SITC adalah mesin dan alat pengangkutan (SITC 7) merupakan kelompok yang paling mendominasi impor Indonesia tahun 2017 dengan kontribusi 31,73 persen, disusul golongan bahan bakar, bahan penyemir dan sebagainya (SITC 3) sebesar 16,73 persen, golongan hasil industri menurut bahan (SITC 6) sebesar 16,41 persen, dan golongan bahan kimia (SITC 5) sebesar 14,14 persen.

Usaha pemerintah untuk mengurangi atau menekan impor terus dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan, seperti menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) impor. Selanjutnya, perkembangan nilai impor golongan SITC sampai dengan triwulan I-2019 yang tertinggi masih pada golongan mesin dan alat pengangkutan (SITC 7) dengan nilai impor mencapai US\$ 13,11 miliar. Golongan barang SITC yang lain nilai eksportnya masih dibawah US\$ 7,50 miliar, antara lain golongan barang SITC 6 (US\$ 7,50 miliar), SITC 5 (US\$ 6,28 miliar) dan golongan SITC 3 (US\$ 5,08 miliar). Kinerja nilai impor yang dicapai di triwulan I tahun 2019, menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk triwulan kedepannya sampai akhir tahun 2019.

2. Impor Menurut Negara Asal

Indonesia sampai saat ini masih mengimpor komoditas tertentu yang belum dapat dipenuhi oleh produk dari dalam negeri. Indonesia banyak mengimpor barang dari negara tetangga yaitu dari kawasan ASEAN untuk mengisi pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Pada tahun 2017 nilai impor dari kawasan ASEAN mencapai US\$ 39,34 miliar atau meningkat sebesar 13,40 persen. Impor dari Negara-negara di kawasan ASEAN di tahun 2018 mengalami penurunan hingga 19,79 persen atau hanya sebesar US\$ 31,56 miliar. Negara di kawasan ASEAN yang nilai impornya mengalami peningkatan di tahun 2018 adalah yang berasal dari Negara Thailand yaitu naik sekitar 16,92 persen dengan nilai impor mencapai US\$ 10,85 miliar.

Sebagai negara asal utama impor, Indonesia banyak mengimpor barang dari Negara Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Impor Indonesia dari ketiga negara tersebut pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang positif. Nilai impor Indonesia dari Negara Tiongkok mencapai US\$ 35,77 miliar atau naik sebesar 16,12 persen, sedangkan dari Negara Jepang dan Amerika Serikat masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 17,37 persen dan 11,18 persen. Melalui perdagangan bebas, pasar dunia semakin terbuka lebar bagi Tiongkok menyuplai barang dan jasa ke negara lain, termasuk ke Indonesia. Tak mengherankan jika produk impor asal Negeri Tirai Bambu (Tiongkok) makin mendominasi pasar tanah air. Kontribusi nilai impor dari Tiongkok terus menunjukkan tren yang meningkat. Tiongkok sebagai negara asal impor barang dan jasa yang masuk ke Indonesia pada tahun 2018 nilai impornya mencapai US\$ 45,25 miliar atau seperempat lebih dari total nilai impor tahun 2018 atau tepatnya 28,49 persen. Nilai impor dari beberapa negara pengimpor mengalami penurunan di tahun 2018 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya antara lain impor dari Negara Afrika, Australia dan oceania lainnya, Asia lainnya dan Negara Eropa lainnya.

**Tabel 6.8 Nilai Impor Indonesia Menurut Negara Asal (Juta US\$)
Tahun 2016-2019**

Negara Asal	2016	2017	2018	2019 (Jan-Mar)
1. ASEAN	34 697,0	39 344,9	31 558,5	6 887,6
	(25,58)	(25,06)	(19,87)	(19,18)
(Thailand)	7 200,9	8 858,2	6 166,9	1 478,2
	(5,31)	(5,64)	(3,88)	(4,12)
(Malaysia)	8 666,9	9 281,6	10 851,9	2 424,1
	(6,39)	(5,91)	(6,83)	(6,75)
(Singapura)	14 548,3	16 888,5	9 581,7	1 749,5
	(10,72)	(10,76)	(6,03)	(4,87)
2. Tiongkok	30 800,5	35 766,8	45 251,1	10 419,6
	(22,71)	(22,78)	(28,49)	(29,02)
3. Jepang	12 984,8	15 240,0	17 943,5	3 967,6
	(9,57)	(9,71)	(11,30)	(11,05)
4. Asia Lainnya	20 357,0	25 187,5	22 504,7	5 217,7
	(15,01)	(16,04)	(14,17)	(14,53)
5. Amerika Serikat	7 298,4	8 121,6	9 108,0	1 954,7
	(5,38)	(5,17)	(5,73)	(5,44)
6. Amerika Lainnya	5 793,9	5 495,1	5 943,8	1 671,3
	(4,27)	(3,50)	(3,74)	(4,65)
7. Australia & Oceania	5 957,7	6 943,4	6 182,2	1 228,5
	(4,39)	(4,42)	(3,89)	(3,42)
8. Afrika	3 492,9	4 184,1	2 205,0	532,2
	(2,57)	(2,67)	(1,39)	(1,48)
9. Uni Eropa	10 742,2	12 508,5	14 052,9	3 007,0
	(7,92)	(7,97)	(8,85)	(8,37)
(Jerman)	3 159,5	3 538,1	3 961,3	860,0
	(2,33)	(2,25)	(2,49)	(2,40)
(Italia)	1 387,2	1 570,3	1 839,7	407,8
	(1,02)	(1,00)	(1,16)	(1,14)
(Perancis)	1 362,0	1 585,4	1 648,9	326,7
	(1,00)	(1,01)	(1,04)	(0,91)
10. Eropa Lainnya	3 528,6	4 193,6	4 102,5	1 020,9
	(2,60)	(2,67)	(2,58)	(2,84)
Jumlah	135 652,8	156 985,6	158 842,4	35 907,2
	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Sumber : Indikator Ekonomi Mei 2019. BPS

Neraca Perdagangan Indonesia

Kondisi neraca perdagangan Indonesia selama periode 2016-2017 menunjukkan perkembangan yang positif. Secara keseluruhan neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2016 mengalami surplus sebesar US\$ 9,53 miliar dan performa menggembirakan dari kinerja perdagangan luar negeri terjadi di tahun 2017 yang mencatatkan surplus sebesar US\$ 11,85 miliar. Surplus perdagangan Indonesia tidak berlangsung lama di tahun 2018 neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar US\$ 8,50 miliar.

Pemerintah selalu berupaya sedapat mungkin dapat mengendalikan dan mengontrol impor agar nilai impor tidak terus melambung. Pengendalian impor terutama di komoditas non migas sehingga neraca perdagangan non migas bias mengalami surplus. Neraca perdagangan non migas di tahun 2016 tercatat surplus sebesar US\$ 15,17 miliar dan pada tahun 2017 terjadi surplus sebesar US\$ 20,49 miliar atau terjadi kenaikan surplus sebesar 35,07 persen.

Namun, di tahun 2018 surplus dari neraca perdagangan non migas hanya mencapai US\$ 3,97 miliar jauh dibanding surplus perdagangan tahun 2017.

Keberhasilan neraca perdagangan non migas tidak diimbangi dengan neraca perdagangan migas atau terjadi sebaliknya. Kondisi tersebut disebabkan karena migas sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan masih menjadi dilema sampai saat ini, karena ekspor migas Indonesia tidak sebanding dengan nilai impor migas Indonesia. Kebutuhan migas didalam negeri masih cukup tinggi membuat Indonesia masih harus mengimpor dari luar negeri. Kondisi tersebut membuat neraca perdagangan migas Indonesia selalu mengalami defisit dan setiap tahun defisit neraca perdagangan migas menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 neraca perdagangan migas Indonesia mengalami defisit sebesar US\$ 5,63 miliar dan meningkat menjadi US\$ 8,66 miliar di tahun 2017. Penurunan neraca perdagangan migas Indonesia terus terjadi hingga tahun 2018 sehingga mengalami defisit mencapai US\$ 12,46 miliar.

Tabel 6.9 Neraca Perdagangan Indonesia (Juta US\$) Tahun 2016-2019

Tahun	2016	2017	2018	2019 (Jan-Mar)
Migas	-5 634,4	-8 661,8	-12 464,0	-1 275,9
Non Migas	15 167,7	20 487,0	3 967,8	1 213,1
jumlah	9 533,3	11 825,2	-8 496,2	-62,8

Sumber : Indikator Ekonomi Mei 2018, BPS

Sampai saat ini pemerintah belum mampu membuat neraca perdagangan migas bisa menjadi penerimaan devisa bagi negara. Untuk mengimbangi agar neraca perdagangan Indonesia tidak mengalami defisit yang sangat besar maka usaha pemerintah adalah dengan menggerakkan ekspor non migas dengan terus memperhatikan produk-produk unggulan ekspor. Selain itu melakukan inovasi produk dan ke depannya pemerintah berupaya mencari pangsa pasar baru yang membutuhkan produk-produk Indonesia, dengan cara melakukan pameran-pameran produk-produk unggulan Indonesia.

Neraca perdagangan Indonesia di triwulan I 2019 secara total menunjukkan defisit sebesar US\$ 0,06 miliar. Namun jika dilihat berdasarkan migas dan non migas, neraca perdagangan non migas Indonesia di triwulan I 2019 memberikan nilai surplus sebesar US\$ 1,21 miliar sedangkan neraca perdagangan migas mengalami defisit yang nilainya lebih besar dari surplus perdagangan non migas yaitu mencapai US\$ 1,27 miliar. Neraca perdagangan yang tumbuh positif merupakan modal potensial yang akan mendorong kinerja ekonomi nasional. Melalui peningkatan komoditi ekspor yang bernilai tambah tinggi, permintaan ekspor akan semakin meningkat dan pada akhirnya menggerakkan roda perekonomian nasional.

Pemerintah berupaya mendorong terus agar neraca perdagangan bisa selalu surplus dengan peningkatan daya saing produk ekspor, strategi

pengembangan ekspor dengan memperluas pasar-pasar baru dan diversifikasi produk dan perundingan-perundingan perdagangan internasional. Daya saing terus ditingkatkan dengan memfasilitasi pengembangan produk dan penyediaan informasi pasar, produk unggulan ekspor dan strategi pengembangan ekspor. Selain itu, evaluasi akan dilakukan pada negara tujuan ekspor, produk-produk baru yang diekspor, serta reposisi perwakilan-perwakilan perdagangan di luar negeri.

<https://www.bps.go.id>



Sektor Moneter

7



Secara umum
Jumlah uang beredar
cenderung mengalami
peningkatan

Pada tahun 2019,
Jumlah uang beredar
mencapai

5745,06 Triliun
Rupiah



pertumbuhan tahunan (yoy)

6,29 %

Rp 1457,15 Triliun

Sepanjang tahun 2018, **uang beredar**
mencapai **peredaran tertinggi**
pada bulan **Desember**

Uang Giral
831,78T
3,43% [yoy]

Uang Kartal
625,34T
6,61% [yoy]

Meningkatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia dan terciptanya stabilitas ekonomi nasional merupakan tujuan penerapan kebijakan moneter. Menurut Bank Indonesia, kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan dengan target akhir yang ingin dicapai adalah menjaga dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, eksekutor dari pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia adalah Bank Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia), peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dipandang dari dua dimensi. Dimensi pertama adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua berkaitan dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tersebut, menurut pasal 7, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

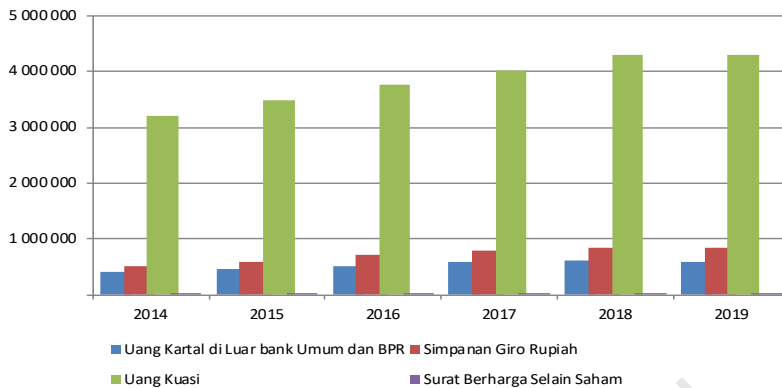
Pada tahun 2018, keadaan perekonomian di Indonesia dinilai cukup baik dengan stabilitas yang tetap terjaga. Hal ini tercermin dari inflasi yang terjaga, defisit transaksi berjalan yang terkendali, dan sistem keuangan yang tetap stabil. Bank Indonesia memandang terdapat tiga pelajaran penting yang dapat dipetik dari perjalanan perekonomian 2018. Pertama, stabilitas dan ketahanan perekonomian perlu terus diperkuat. Kedua, daya saing dan produktivitas harus terus ditingkatkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ke tingkat yang lebih tinggi. Ketiga, sinergi kebijakan antar otoritas menjadi kunci dalam upaya untuk memperkuat struktur ekonomi nasional.

Sejak awal Februari 2018, kondisi perekonomian domestik masih tetap terkendali. Menguatnya nilai tukar rupiah dan terjaganya stabilitas sistem keuangan menopang stabilitas perekonomian nasional yang berkelanjutan. Terjaganya stabilitas sistem keuangan di tengah meningkatnya tekanan global terjadi karena intermediasi perbankan dan risiko kredit yang dikelola dengan baik. Memasuki tahun 2019, sistem keuangan diperkirakan akan tetap stabil. Pemerintah bersama-sama dengan seluruh stakeholder terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus bersinergi dalam menjaga kestabilan sistem keuangan nasional.

Perkembangan Uang Beredar (M2)

Uang beredar adalah kewajiban sistem moneter yaitu Bank Sentral, Bank Umum (Konvensional dan syariah), dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR (Konvensional dan syariah) terhadap sektor swasta domestik. Uang beredar dapat didefinisikan menjadi dua, yaitu uang beredar dalam arti sempit (M1)

Gambar 7.1
Jumlah Uang Beredar (miliar rupiah) Tahun 2014–2019*



Catatan : * Angka sampai dengan Bulan Maret
Sumber: SEKI Edisi April 2019, Bank Indonesia

dan uang beredar dalam arti luas (M2). Dalam arti sempit, uang beredar meliputi uang kartal dan uang giral. Sedangkan dalam arti luas (sering disebut sebagai likuiditas perekonomian), uang beredar meliputi M1, uang kuasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Gambar 7.1 menunjukkan bahwa jumlah uang yang beredar di masyarakat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, likuiditas perekonomian (M2) juga mengalami pertumbuhan setiap tahun. Pada awal tahun 2019, likuiditas perekonomian tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,51 persen (yoy) atau meningkat sebesar Rp 294,73 triliun. Akan tetapi, dibandingkan dengan bulan sebelumnya, pertumbuhan likuiditas perekonomian pada awal tahun mengalami penurunan sebesar 1,97 persen dari Rp 5.760,05 triliun pada Desember 2018 menjadi Rp 5.646,42 triliun pada Januari 2019.

Komponen uang beredar juga mengalami peningkatan setiap tahun (Gambar 7.1). Pertumbuhan uang kartal pada awal tahun 2019 adalah sebesar 9,14 persen (yoy) sedangkan uang kuasi mengalami pertumbuhan sebesar 6,04 persen (yoy). Sementara itu, komponen uang giral hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,28 persen atau meningkat Rp 2,22 triliun dari tahun 2018.

Apabila dilihat dari distribusi setiap komponen uang beredar, komponen uang kuasi menyumbang sebesar 75,24 persen pada awal tahun 2019. Lalu diikuti oleh komponen uang giral sebesar 14,11 persen, uang kartal sebesar 10,29 persen, dan surat berharga lainnya sebesar 0,36 persen. Pada awal tahun 2019, peredaran uang kuasi tercatat sebesar Rp 4.248,58 triliun diikuti uang giral dan uang kartal yaitu sebesar Rp 796,83 triliun dan Rp 580,74 triliun. Sementara surat berharga lainnya menyumbang sebesar Rp 20,27 triliun.

Pada tahun 2018 distribusi komponen uang beredar didominasi oleh komponen uang kuasi sebesar 74,35 persen. Lalu diikuti oleh komponen

**Tabel 7.1 Perkembangan Uang Beredar (miliar rupiah)
Tahun 2017– 2019¹**

Akhir Periode	M2					Jumlah
	M1			Uang Kuasi	Surat Berharga Selain Saham	
	Uang Kartal	Uang Giral	Jumlah			
2017						
Januari	470 250	721 249	1 191 500	3 731 093	14 289	4 936 882
Februari	462 413	733 624	1 196 037	3 732 699	14 184	4 942 920
Maret	468 942	746 915	1 215 857	3 783 893	17 894	5 017 644
April	483 042	762 885	1 245 927	3 771 124	16 729	5 033 780
Mei	485 124	790 769	1 275 893	3 833 507	16 971	5 126 370
Juni	561 821	780 030	1 341 851	3 866 025	17 289	5 225 166
Juli	517 810	775 425	1 293 235	3 866 731	18 113	5 178 079
Agustus	527 098	747 705	1 274 803	3 925 677	19 167	5 219 648
September	523 360	781 014	1 304 374	3 930 659	19 106	5 254 139
Oktober	519 861	805 901	1 325 762	3 939 212	19 345	5 284 320
November	537 298	800 846	1 338 143	3 964 507	18 782	5 321 432
Desember	586 576	804 231	1 390 807	4 009 996	18 362	5 419 165
2018						
Januari	532 131	794 611	1 326 742	4 006 565	18 378	5 351 685
Februari	531 209	820 049	1 351 258	3 983 463	16 929	5 351 650
Maret	549 216	811 919	1 361 135	4 018 929	15 761	5 395 826
April	549 587	822 989	1 372 576	4 020 982	15 530	5 409 089
Mei	580 625	824 002	1 404 627	4 015 794	14 661	5 435 083
Juni	605 973	846 382	1 452 354	4 066 586	15 209	5 534 150
Juli	583 306	800 197	1 383 503	4 107 208	17 082	5 507 792
Agustus	587 788	796 477	1 384 265	4 128 708	16 479	5 529 452
September	590 805	820 868	1 411 673	4 177 276	17 831	5 606 780
Oktober	581 592	828 986	1 410 578	4 237 684	19 251	5 667 512
November	586 236	819 028	1 405 264	4 246 310	19 401	5 670 975
Desember	625 370	831 779	1 457 150	4 282 364	20 533	5 760 046
2019						
Januari	580 743	796 829	1 377 572	4 248 576	20 273	5 646 421
Februari	571 120	815 894	1 387 014	4 264 672	19 776	5 671 462
Maret*	583 395	843 027	1 426 422	4 299 148	19 492	5 745 062

Catatan : ¹ Akhir periode

Sumber : SEKI Edisi April 2019, Bank Indonesia

uang giral sebesar 14,44 persen, uang kartal sebesar 10,86 persen, dan surat berharga lainnya sebesar 0,36 persen. Sementara itu, di tahun 2017 jumlah uang beredar disumbang oleh kompenen uang kuasi sebesar 74,00 persen, uang giral sebesar 14,84 persen, uang giral 10,82 persen, dan surat berharga lainnya sebesar 0,34 persen.

Sepanjang tahun 2018, jumlah uang yang beredar cenderung terus mengalami peningkatan setiap bulannya. Hanya ada 2 bulan dimana jumlah uang yang beredar mengalami penurunan, yaitu pada bulan Februari dan bulan Juli. Pada bulan Februari 2018, jumlah uang yang beredar menurun sebesar Rp 34 miliar. Sedangkan pada bulan Juli, peredaran uang berkurang sebesar Rp 26,36 triliun atau menurun sebesar 0,48 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan komponen uang beredar berupa uang kartal dan uang giral yang masing-masing mengalami

penurunan sebesar 3,74 persen dan 5,46 persen. Namun, jumlah tersebut jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada 2017 (yoy), uang beredar mengalami pertumbuhan sebesar 6,3 persen.

Pada tahun 2018, jumlah uang beredar mengalami puncak peredaran tertinggi pada bulan Desember yaitu mencapai Rp 5.760,05 triliun rupiah. Pada bulan tersebut, laju pertumbuhan uang beredar meningkat sebesar 1,57 persen dari bulan sebelumnya (*mom*). Apabila dilihat pertumbuhan tahunan, jumlah uang beredar pada bulan Desember 2018 tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 6,29 persen (yoy). Selama tahun 2018, laju pertumbuhan uang beredar tertinggi (yoy) terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 8,40 persen. Akan tetapi, uang beredar di bulan Januari 2018 mengalami penurunan 1,25 persen dibandingkan Desember 2017, yaitu turun sebesar Rp 67 triliun yang merupakan penurunan terbesar sepanjang tahun 2018.

Apabila dilakukan analisis berdasarkan komponen penyusunnya, uang beredar M1 terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh otoritas moneter sebagai pembayaran yang sah. Sedangkan uang giral merupakan simpanan milik sektor swasta domestik pada BI dan Bank umum yang setiap saat dapat ditarik untuk ditukarkan dengan uang kartal sebesar nilai nominalnya.

Uang kartal dan uang giral secara umum terus mengalami pertumbuhan setiap bulan (2018) jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2017 (yoy). Puncak tertinggi pertumbuhan uang kartal terjadi pada bulan Mei sebesar 19,69 persen (yoy). Sedangkan puncak peredaran uang giral terjadi pada awal tahun 2018 sebesar 10,17 persen (yoy). Selanjutnya, laju pertumbuhan terendah terjadi pada bulan Desember (6,61 persen) untuk uang giral dan terjadi pada bulan November (2,27 persen) untuk uang kartal.

Uang kuasi adalah simpanan milik sektor swasta domestik pada bank umum dan BPR yang dapat memenuhi fungsi-fungsi uang, baik sebagai satuan hitung, alat penyimpan kekayaan, maupun alat pembayaran namun untuk sementara waktu kehilangan fungsinya sebagai alat tukar. Pada tahun 2018, uang kuasi secara umum terus mengalami pertumbuhan tahunan. Laju pertumbuhan uang kuasi tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 7,58 persen (yoy) dan terendah pada bulan Mei sebesar 4,76 persen (yoy). Sementara di awal tahun 2019, uang kuasi mengalami penurunan dari Rp 4.282,36 triliun pada Desember 2018 menjadi Rp 4.248,58 triliun pada Januari 2019.

Di awal tahun 2019, likuiditas perekonomian sampai bulan Maret mengalami pertumbuhan setiap bulannya. Pertumbuhan likuiditas perekonomian secara berturut-turut adalah sebesar 5,51 persen (yoy) pada bulan Januari, 5,98 persen (yoy) pada bulan Februari, dan 6,47 persen (yoy) pada bulan Maret. Sementara pada awal tahun, pertumbuhan uang beredar mengalami penurunan sebesar 1,97 persen jika dibandingkan dengan bulan Desember 2018 (*mom*). Perlambatan laju pertumbuhan uang beredar disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan seluruh komponen uang beredar yang terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi.

Pada awal tahun 2019, likuiditas perekonomian tumbuh melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan pada bulan sebelumnya (yoy). Pada bulan Januari posisi M2 adalah Rp 5.646,42 triliun atau tumbuh 5,5 persen (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan Desember yang tercatat sebesar 6,29 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh penurunan aktiva luar negeri bersih serta kontraksi operasi keuangan pemerintah.

Penurunan aktiva luar negeri bersih terutama didorong oleh perlambatan tagihan kepada non residen yang disebabkan oleh penurunan cadangan devisa pada awal tahun 2019. Sementara operasi keuangan pemerintah mengalami kontraksi yang tercermin dari penurunan tagihan bersih kepada pemerintah pusat, yaitu dari 3,3 persen (yoy) menjadi -14,1 persen (yoy) pada Januari 2019 (Bank Indonesia, 2019).

Peredaran Uang Primer Dan Komponennya

Uang primer merupakan kewajiban Bank Sentral kepada bank umum, BPR, dan sektor swasta (tidak termasuk Pemerintah Pusat dan Luar Negeri). Uang primer terdiri dari beberapa komponen, yaitu berupa uang kartal (di luar bank umum dan BPR) dan kas bank umum dan BPR; saldo giro positif bank umum pada BI; dan giro sektor swasta di Bank Indonesia.

Pada tahun 2018, peredaran uang primer di Indonesia cukup berfluktuatif. Pada awal tahun 2018, peredaran uang primer tercatat sebesar Rp 1.026,40 triliun. Sedangkan pada bulan selanjutnya berkurang sekitar Rp 4,27 triliun menjadi Rp 1.022,13 triliun. Kemudian pada bulan selanjutnya mengalami peningkatan dan akhirnya menurun kembali di bulan Juli. Laju pertumbuhan bulanan (*mom*) uang primer mengalami perlambatan terbesar pada bulan Juli, yaitu sebesar 10,72 persen atau berkurang sebesar Rp 120,17 triliun. Penurunan jumlah peredaran uang primer tersebut terjadi karena melambatnya laju pertumbuhan komponen uang kartal di luar bank umum dan BPR sebesar 3,74 persen dan melambatnya laju pertumbuhan komponen kas umum sebesar 18,90 persen.

Salah satu komponen uang primer yang beredar di masyarakat adalah uang kartal. Uang kartal lebih dikenal oleh masyarakat sebagai uang kertas dan uang logam yang digunakan sebagai alat pembayaran. Sepanjang tahun 2018, uang kartal (di luar bank umum dan BPR) yang diedarkan cenderung mengalami peningkatan. Pertumbuhan uang kartal tersebut mengalami puncak pada bulan Mei yaitu sebesar 19,69 persen (yoy). Sedangkan pertumbuhan uang kartal bulanan (*mom*) mengalami puncaknya pada akhir tahun 2018 yaitu sebesar 6,68 persen.

Komponen uang primer lainnya adalah kas bank umum dan BPR. Sepanjang tahun 2018, peredaran kas bank umum dan BPR cukup berfluktuatif dimana puncak peredaran terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar Rp 131,74 triliun. Pada bulan tersebut laju pertumbuhan peredaran kas umum dan BPR

**Tabel 7.2 Perkembangan Uang Primer (Miliar Rupiah),
Tahun 2017–Maret 2019¹**

Akhir Periode	Uang Kartal Yang Diedarkan		Giro Bank	Giro Perusahaan & Perorangan	SBI	Jumlah
	Uang Kartal	Kas Bank				
2017						
Januari	470 250	94 046	284 260	31	102 405	950 992
Februari	462 413	90 765	286 147	23	109 049	948 398
Maret	468 942	93 807	290 976	30	111 725	965 480
April	483 042	88 055	303 926	190	110 127	985 340
Mei	485 124	104 230	298 125	34	116 590	1 004 103
Juni	561 821	157 692	307 224	742	107 620	1 135 099
Juli	517 810	99 677	301 738	32	78 985	998 242
Agustus	527 098	97 984	300 495	99	79 937	1 005 613
September	523 360	91 050	308 257	179	82 215	1 005 060
Oktober	519 861	92 364	316 455	109	84 598	1 013 388
November	537 298	97 877	309 449	186	85 751	1 030 560
Desember	586 576	108 250	306 361	478	84 127	1 085 796
2018						
Januari	532 131	90 171	316 896	172	87 033	1 026 404
Februari	531 209	87 629	314 156	176	88 966	1 022 135
Maret	549 216	89 235	315 159	279	85 883	1 039 772
April	549 587	92 651	314 123	370	82 162	1 038 894
Mei	580 625	131 735	316 219	1 316	79 573	1 109 468
Juni	605 973	121 893	312 581	718	79 323	1 120 488
Juli	583 306	98 850	317 724	441	-	1 000 321
Agustus	587 788	101 199	316 254	196	-	1 005 437
September	590 805	89 053	315 917	321	-	996 096
Oktober	581 592	92 046	317 958	391	-	991 987
November	586 236	95 322	314 089	395	-	996 042
Desember	625 370	123 797	319 653	734	-	1 069 554
2019						
Januari	580 743	92 777	332 730	99	-	1 006 349
Februari	571 120	93 424	317 461	99	-	982 104
Maret	584 066	90 139	319 302	99	-	993 606

Catatan :¹ Akhir periode

Sumber : Sumber : SEKI Edisi April 2019, Bank Indonesia

merupakan laju terbesar sepanjang tahun dengan laju pertumbuhan sebesar 26,39 persen (yoy). Selanjutnya pada bulan Juni terjadi perlambatan laju pertumbuhan sebesar 22,70 persen (yoy).

Komponen selanjutnya adalah saldo giro positif bank umum pada BI. Saldo giro positif bank umum pada BI merupakan penempatan bank umum dalam bentuk giro rupiah pada BI yang digunakan dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM). Pada tahun 2018, saldo giro positif tercatat pada posisi Rp 312 triliun sampai Rp 319 triliun. Pada akhir tahun 2018, saldo giro positif berada pada posisi Rp 319,65 triliun. Selanjutnya mengalami peningkatan pada awal tahun 2019 dengan saldo tercatat sebesar Rp 332,73 triliun.

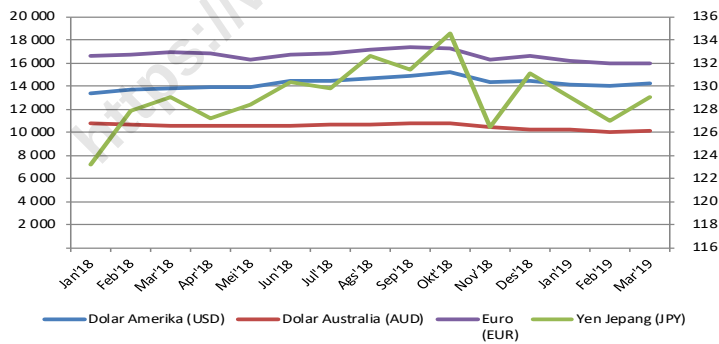
Memasuki awal tahun 2019, uang primer yang diedarkan mengalami

penurunan dari Rp 1.069,55 triliun (pada Desember 2018) menjadi Rp 1.006,35 triliun (pada Januari 2019). Apabila dilihat pertumbuhannya, pada bulan Januari hingga Maret 2019, jumlah uang primer yang beredar terus mengalami perlambatan. Pada Januari 2019, uang primer yang beredar mengalami perlambatan sebesar 1,95 persen. Selanjutnya, pada bulan Februari dan Maret terus melambat dengan laju perlambatan masing-masing 3,92 persen dan 4,44 persen. Komponen uang kartal adalah komponen penyumbang tertinggi pada peredaran uang primer selama tahun 2018 sampai memasuki tahun 2019.

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Gambar 7.2 menunjukkan perkembangan kurs rupiah terhadap beberapa mata uang utama seperti dolar Amerika (USD), dolar Australia (AUD), Euro (EUR), dan Yen Jepang (JPY). Pada gambar tersebut terlihat perkembangan nilai tukar mata uang rupiah dengan beberapa mata uang negara utama. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Sepanjang tahun 2018 cenderung melemah. Pada gambar terlihat penurunan yang tajam pada bulan November 2018. Pada bulan tersebut nilai tukar rupiah menguat dari Rp 15.227 menjadi Rp 14.339.

Gambar 7.2
Perkembangan Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap
Rupiah di Bank Indonesia Tahun 2018 - Maret 2019



Sumber: SEKI Edisi April 2019, Bank Indonesia (data diolah)

Sedangkan nilai tukar terhadap mata uang dolar Australia cenderung mengalami fluktuasi. Pada awal tahun, nilai tukar terhadap AUD mengalami penguatan, lalu pada bulan selanjutnya mulai melemah dan menguat kembali pada akhir tahun 2018. Kondisi nilai tukar rupiah terhadap mata uang Yen sepanjang 2018 cenderung dalam kondisi yang stabil sedangkan nilai tukar terhadap mata uang Euro cenderung berfluktuasi sepanjang tahun.

Secara keseluruhan, pada tahun 2018 nilai tukar rupiah tercatat mengalami depresiasi. Akan tetapi, volatilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga. Menurut Bank Indonesia, nilai tukar rupiah secara keseluruhan tahun 2018 tercatat mengalami depresiasi sebesar 6,05 persen atau secara *point to*

point sebesar 5,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati risiko ketidakpastian pasar keuangan global dengan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya dengan tetap mendorong berjalannya mekanisme pasar, dan mendukung upaya-upaya pengembangan pasar keuangan (Bank Indonesia, *Tinjauan Kebijakan Moneter* 2018).

Memasuki tahun 2019, nilai tukar rupiah dalam tren yang menguat (gambar 7.2). Penguatan nilai tukar rupiah didorong oleh aliran masuk modal asing yang disebabkan oleh perekonomian domestik yang kondusif serta ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit mereda. Meredanya ketidakpastian pasar keuangan global memberikan pengaruh kepada menurunnya ketidakpastian dan risiko di negara berkembang sehingga memengaruhi aliran modal ke negara berkembang pada awal tahun 2019.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika pada tahun 2018 terus mengalami depresiasi sampai bulan Oktober. Pada awal tahun, nilai tukar rupiah tercatat Rp 13.413 mengalami penguatan dibandingkan bulan Desember 2017. Selanjutnya, mulai Februari 2018 nilai tukar rupiah kembali mengalami depresiasi bahkan pada bulan Juni 2018 nilai tukar rupiah sudah menembus lebih dari Rp 14.000 per US\$ 1. Pada bulan Oktober nilai tukar rupiah kembali terdepresiasi hingga Rp 15.227 per US\$ 1.

Menurut Bank Indonesia, tekanan terhadap rupiah terjadi karena meningkatnya ekspektasi terhadap FFR (*Federal Fund Rate*) dan ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi tersebut menyebabkan aliran masuk modal asing ke negara berkembang berkurang, termasuk ke Indonesia. Tekanan terhadap rupiah terbesar terjadi pada bulan Oktober dimana mata uang rupiah mencapai Rp 15.227 per 1 USD.

Selain itu, tekanan terhadap rupiah juga bersumber dari peningkatan tensi perdagangan antara AS dan Tiongkok. Hal tersebut berdampak pada kenaikan premi risiko negara berkembang dan berdampak langsung pada depresiasi nilai tukar negara berkembang termasuk rupiah. Menurut Bank Indonesia, kenaikan premi risiko dipengaruhi oleh isu-isu geopolitik yang kemudian memengaruhi nilai tukar rupiah pada periode Februari-Oktober 2018. Isu-isu tersebut antara lain eskalasi ketegangan di semenanjung Korea dan Timur Tengah, dinamika perundingan Brexit antara Inggris dan Uni Eropa serta krisis yang terjadi di beberapa negara seperti Italia, Turki, dan Argentina.

Sebagai reaksi dari kondisi tersebut dan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah maka Bank Indonesia menempuh kebijakan yang *pre-emptive*, *front loading*, dan *ahead of the curve*. Kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik dan meningkatkan aliran masuk modal asing. Seiring dengan diterapkannya kebijakan tersebut, tekanan terhadap rupiah mulai terkendali dan menurun pada November sampai Desember 2018. Pada bulan November, nilai tukar rupiah tercatat Rp 14.339 dan pada bulan Desember sebesar Rp 14.481 per US\$. Pada periode tersebut tercatat penguatan rupiah mencapai 4,70 persen.

Penguatan nilai tukar rupiah pada akhir tahun 2018 dipengaruhi oleh ketidakpastian global yang berkurang serta tensi hubungan perdagangan AS dan Tiongkok yang mereda. Pada Desember 2018, AS dan Tiongkok mencapai suatu kesepakatan untuk menghindari tambahan pengenaan tarif selama 90 hari yang berdampak pada ketidakpastian global yang menurun sehingga turut mendorong apresiasi nilai rupiah. Selain itu, penguatan rupiah juga dipengaruhi aliran masuk modal asing akibat perekonomian domestik yang kondusif yang tercermin dari inflasi yang rendah dan terkendali serta posisi cadangan devisa pada akhir tahun 2018 yang meningkat (Bank Indonesia).

Tabel 7.3 Perkembangan Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah di Bank Indonesia Tahun 2017–Maret 2019¹

Akhir Periode	Dolar Amerika (USD)	Dolar Australia (AUD)	Yen Jepang (JPY)	Euro EUR
2017				
Januari	13 343	10 100	118	14 290
Februari	13 347	10 255	119	14 127
Maret	13 321	10 186	119	14 228
April	13 327	9 956	120	14 486
Mei	13 321	9 930	120	14 886
Juni	13 319	10 051	120	14 875
Juli	13 323	10 636	121	15 641
Agustus	13 351	10 547	121	15 857
September	13 492	10 578	120	15 895
Oktober	13 572	10 431	120	15 792
November	13 514	10 252	121	16 038
Desember	13 548	10 557	120	16 174
2018				
Januari	13 413	10 808	123	16 641
Februari	13 707	10 683	128	16 758
Maret	13 756	10 528	129	16 954
April	13 877	10 503	127	16 834
Mei	13 951	10 546	128	16 265
Juni	14 404	10 582	130	16 667
Juli	14 413	10 692	130	16 875
Agustus	14 711	10 665	133	17 157
September	14 929	10 771	131	17 389
Oktober	15 227	10 792	135	17 279
November	14 339	10 493	126	16 336
Desember	14 481	10 211	131	16 560
2019				
Januari	14 072	10 211	129	16 176
Februari	14 062	10 040	127	15 999
Maret	14 244	10 098	129	15 995

Catatan : ¹ Akhir periode

Sumber : Sumber : SEKI Edisi April 2019, Bank Indonesia

Penguatan rupiah terus berlanjut hingga memasuki tahun 2019. Hingga Maret 2019, rupiah menguat 1,05 persen secara *point to point*. Kondisi tersebut didukung oleh aliran masuk modal asing yang besar ke pasar keuangan domestik. Aliran masuk modal asing terutama terjadi di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Ke depan, sejalan prospek sektor eksternal yang membaik, Bank

Indonesia memandang nilai tukar rupiah akan bergerak stabil sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan mekanisme pasar yang tetap terjaga dengan baik. Untuk mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar dan memperkuat pembiayaan domestik, Bank Indonesia terus mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, khususnya di pasar uang dan valas.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia sepanjang tahun 2018 berfluktuasi dan cenderung menguat pada akhir tahun. Pada triwulan I, nilai tukar mengalami apresiasi dari Rp 10.808 per dolar AUD di awal tahun menjadi Rp 10.528 di bulan Maret. Selanjutnya, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi pada triwulan II. Pelemahan nilai tukar rupiah terus terjadi hingga memasuki awal triwulan IV. Pada bulan Oktober 2018, nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia mencapai puncak tertinggi sepanjang tahun 2018 yaitu mencapai Rp 10.792 per dolar Australia. Selanjutnya, pada bulan November dan Desember, nilai tukar terus mengalami apresiasi. Penguatan nilai tukar terus terjadi hingga memasuki tahun 2019 dan mencapai nilai terendah pada bulan Februari 2019 sebesar Rp 10.040 per dolar Australia.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap Yen Jepang dalam kondisi yang cenderung stabil sepanjang tahun 2018. Pada awal tahun, nilai tukar cenderung melemah. Kondisi tersebut terus terjadi hingga bulan Oktober. Pada periode selanjutnya nilai tukar terhadap Yen kemudian mulai menguat dari Rp 135 (Oktober) hingga Rp 131 pada akhir tahun 2018 dan terus menguat hingga Rp 127 di bulan Februari 2019.

Selanjutnya, nilai tukar rupiah terhadap Euro mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2018. Nilai tukar memiliki kecenderungan untuk menguat pada akhir tahun 2018 sampai memasuki awal tahun 2019. Pada awal tahun 2018, nilai tukar rupiah terhadap Euro mengalami depresiasi hingga mencapai nilai tertinggi di bulan September sebesar Rp 17.389 per EUR. Nilai tukar rupiah mulai mengalami apresiasi pada bulan Oktober 2018 (Rp 17.279 per EUR) dan berlanjut hingga bulan Maret 2019 dengan level Rp 15.995 per EUR.

Pergerakan Suku Bunga

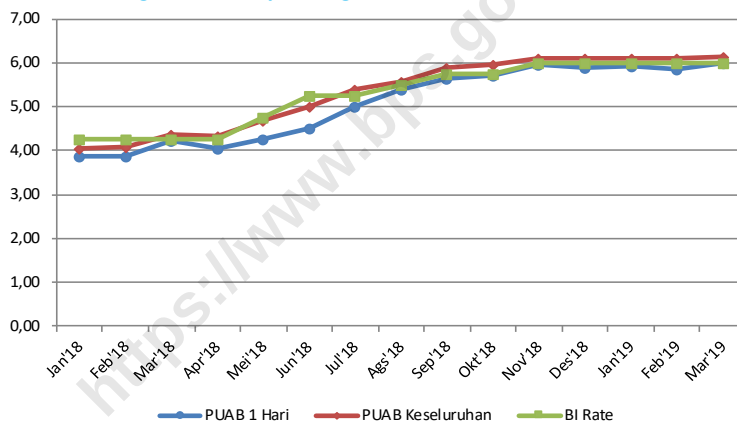
Suku bunga atau *BI Rate* adalah suatu kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Sejak Agustus 2016, Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru untuk menggantikan *BI rate* yaitu *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate*. Suku bunga kebijakan baru atau *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* digunakan karena dinilai dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan, dan sektor riil.

Arah suku bunga kebijakan moneter tahun 2018 diletakkan dalam kerangka menentukan kebijakan moneter yang optimal untuk negara dengan perekonomian terbuka. Formulasi suku bunga kebijakan secara independen ditempuh dengan mempertimbangkan dua elemen penting yaitu aliran modal asing yang bergerak bebas dan nilai tukar yang tetap fleksibel. Dengan

kebijakan ini, maka suku bunga diarahkan agar menghasilkan *interest rate differential* yang memadai dan memberikan daya tarik bagi penanaman modal asing di aset pasar keuangan domestik. Selain itu, suku bunga kebijakan juga terus konsisten dengan upaya menjaga inflasi sesuai sasaran. Sementara itu, kebijakan nilai tukar diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar di sekitar level fundamental sehingga dapat mendukung perekonomian eksternal.

Pada awal tahun 2018, Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan (BI7DRR) sebesar 4,25 persen. Pada bulan Mei, BI mulai menaikkan BI7DRR menjadi 4,75 persen yang diputuskan dengan mempertimbangkan tekanan eksternal yang semakin kuat. Kemudian untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi global yang semakin tinggi yang dipicu kenaikan FFR diperkirakan lebih agresif, harga minyak yang meningkat, dan ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok, pada Juni 2018 BI7DRR kembali naik menjadi 5,25 persen.

Gambar 7.3
Perkembangan PUAB Rupiah Pagi dan BI Rate, Tahun 2018–Maret 2019



Sumber : Sumber : SEKI Edisi April 2019, Bank Indonesia (data diolah)

Bank Indonesia kembali menaikkan BI7DRR di bulan Agustus 2018 menjadi 5.50 persen. Kemudian pada bulan September 2018, BI7DRR kembali dinaikkan menjadi 5,75 persen. Selanjutnya, menjelang akhir tahun 2018 hingga awal tahun 2019, yaitu sejak bulan November 2018 hingga bulan Maret 2019, *BI Rate* stabil pada level 6,00 persen (Lihat gambar 7.3). Hal tersebut dilakukan sebagai reaksi dari ketidakpastian ekonomi global yang masih terjadi.

Dipertahankannya *BI 7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) tersebut merupakan keputusan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya menurunkan defisit neraca berjalan pada batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. BI juga terus menempuh strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas baik di pasar rupiah maupun di pasar valas sehingga dapat mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan dalam negeri.

Pada gambar 7.3 terlihat bahwa ketiga grafik memiliki pola yang mirip dimana *BI Rate* atau yang dikenal dengan BI7DRR terus mengalami peningkatan

yang stabil. Meningkatnya BI7DRR juga diikuti dengan meningkatnya suku bunga pada PUAB. Hal tersebut terjadi seiring dengan diterapkannya transmisi kebijakan moneter melalui jalur peningkatan suku bunga (BI7DRR).

Sementara itu, transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga masih terus berlangsung sepanjang tahun 2018. Transmisi kebijakan tersebut terutama berlangsung pada Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Hal ini terlihat dari suku bunga PUAB O/N yang bergerak sejalan dan mendekati BI7DRR. Peningkatan suku bunga PUAB juga didukung oleh tingkat volatilitas PUAB O/N yang terjaga serta kondisi likuiditas yang masih memadai.

Peningkatan suku bunga PUAB O/N terjadi baik pada sesi pagi maupun pada sesi sore. Awal tahun 2018, tingkat suku bunga PUAB pagi 3,89 persen dan sore berada pada level 3,84 persen. Selanjutnya, tingkat suku bunga PUAB

Tabel 7.4 Perkembangan Suku Bunga PUAB, SBI, BI Rate, dan Volume SBI, Tahun 2017–Maret 2019

Akhir Periode	Pasar Uang Antar Bank Rupiah Pagi		Pasar Uang Antar Bank Rupiah Sore		BI Rate ²	SBI 9 Bulan	Volume SBI ¹ (Milyar Rp)
	1 Hari	Keseluruhan	1 Hari	Keseluruhan			
2017 Januari	4,14	4,64	4,10	4,34	4,75	-	33 242
Februari	4,31	4,55	4,24	4,29	4,75	-	29 387
Maret	4,37	4,80	4,31	4,54	4,75	-	27 572
April	4,38	4,74	4,34	4,47	4,75	-	18 507
Mei	4,35	4,73	4,26	4,50	4,75	-	11 792
Juni	4,93	5,44	4,43	5,25	4,75	-	7 557
Juli	4,30	4,51	4,26	4,55	4,75	-	2 797
Agustus	4,09	4,25	4,05	4,20	4,50	-	1 487
September	3,90	4,20	3,86	3,95	4,25	-	-
Oktober	3,90	4,17	3,94	4,02	4,25	-	-
November	3,90	4,10	3,90	3,96	4,25	-	-
Desember	3,87	4,41	-	4,39	4,25	-	-
2018 Januari	3,89	4,06	3,84	3,89	4,25	-	-
Februari	3,89	4,09	3,85	3,97	4,25	-	-
Maret	4,22	4,38	4,28	4,42	4,25	-	-
April	4,05	4,34	4,20	4,29	4,25	-	-
Mei	4,28	4,68	4,28	4,69	4,75	-	-
Juni	4,50	5,01	4,57	4,96	5,25	-	-
Juli	4,99	5,40	4,99	5,17	5,25	6,05	4 180
Agustus	5,40	5,56	5,35	5,50	5,50	6,35	8 623
September	5,66	5,88	5,63	5,88	5,75	-	8 623
Oktober	5,70	5,96	5,57	5,76	5,75	-	8 623
November	5,95	6,11	5,83	5,99	6,00	-	8 623
Desember	5,88	6,09	5,78	6,03	6,00	-	8 623
2019 Januari	5,92	6,12	5,82	5,90	6,00	-	8 623
Februari	5,85	6,10	5,72	5,79	6,00	-	8 623
Maret	5,98	6,13	5,92	6,06	6,00	-	8 623

Catatan : ¹ Akhir periode

² Mulai Agustus 2016 suku bunga acuan berubah menjadi BI 7-day RR Rate

Sumber : SEKI Edisi April 2019, Bank Indonesia

terus mengalami peningkatan hingga bulan November 2018 menjadi 5,95 persen PUAB pagi hari dan 5,83 persen PUAB sore hari. Sepanjang tahun 2018, tingkat suku bunga PUAB mengalami puncak tertinggi pada bulan November dengan level suku bunga sebesar 5,95 persen pada sesi pagi dan 5,83 persen pada sesi sore. (Lihat tabel 7.4)

Memasuki tahun 2019, tingkat suku bunga PUAB hingga triwulan I berada pada 5,98 persen pada PUAB pagi dan 5,92 persen pada PUAB sore. Secara umum, pada awal tahun, pasar uang (PUAB) cenderung stabil di tengah minimnya tekanan likuiditas di awal tahun 2019. Hal tersebut menurut Bank Indonesia tercermin dari semakin kecilnya jarak atau selisih antara PUAB dengan BI7DRR yang menyempit menjadi 13 bps. Pada triwulan I 2019, volatilitas suku bunga PUAB juga masih terkendali dan terjaga. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pasokan likuiditas masih memadai.

Salah satu kebijakan yang dilakukan untuk tetap menjaga agar suku bunga PUAB O/N tidak terlalu melebar dari BI7DRR adalah dengan menjaga ketersediaan kebutuhan likuiditas perbankan secara seimbang sehingga terbentuk suku bunga yang wajar dan stabil. Usaha tersebut ditempuh melalui pelaksanaan Operasi Moneter (OM). Operasi Pasar Terbuka (OPT) merupakan salah satu kebijakan yang dilaksanakan dengan salah satu instrumennya yaitu penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pada tabel 7.4 terlihat bahwa volume SBI sepanjang tahun 2018 berada pada level Rp 4,18 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sampai level Rp 8,62 triliun. Peningkatan volume SBI terjadi mulai triwulan III 2018 tepatnya pada bulan Agustus dan terus stabil hingga memasuki tahun 2019. Hingga Maret 2019, volume SBI masih stabil pada level yang sama yaitu Rp 8,62 triliun.

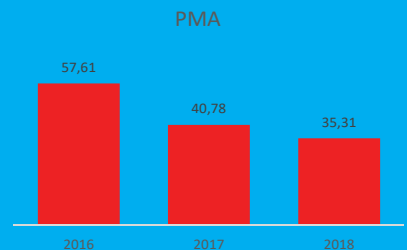
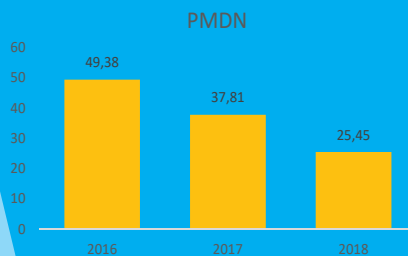
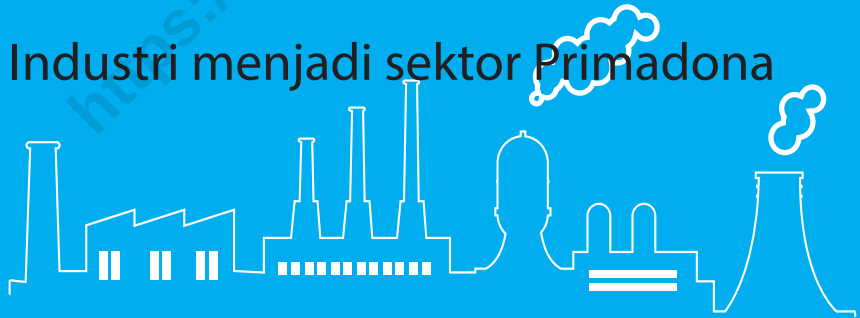
Investasi dan Perdagangan Saham

8

Kontribusi Investasi di dominasi Pulau Jawa



Industri menjadi sektor Primadona



Kredit

Gambar vector: Freepik dari www.freepik.com

Pasar Indonesia bisa dikatakan sebagai surganya para investor baik itu lokal ataupun mancanegara. Hal ini dikarenakan, negara Indonesia menjadi salah satu pasar paling potensial di kawasan Asia, dimana pada tahun 2018 perkembangan investasi di Indonesia meningkat. Indonesia masih masuk ke dalam kategori negara berkembang di dunia, hal ini pula yang mendorong banyaknya terjadi invansi yang dilakukan baik itu oleh investor dalam negeri ataupun perusahaan asing yang ingin memperluas jaringan pemasaran produk atau jasa yang mereka miliki ke Indonesia.

Ada beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan realisasi investasi pada tahun 2018. Gejolak kurs rupiah dan perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok telah berdampak pada perlambatan laju investasi. Selain itu, memasuki tahun politik yang akan berlanjut sampai tahun depan. Di tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, investasi kelihatannya cenderung melambat dan para investor bersifat menunggu.

Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang membaik dengan struktur lebih kuat. Sepanjang 2018, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,17 persen dan merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir. Perbaikan kinerja ekonomi tersebut didukung struktur yang lebih kuat seiring dengan meningkatnya kinerja investasi dan ekspor. Kenaikan kinerja investasi itu sejalan dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan tetap tingginya investasi nonbangunan sebagai antisipasi peningkatan permintaan ke depan.

Dalam rangka meningkatkan investasi BKPM melalui pemerintah akan memastikan bahwa berbagai kemudahan dan penyederhanaan prosedur bagi kegiatan investasi yang sudah dikeluarkan Pemerintah, baik melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri/Lembaga terkait, berjalan dengan baik yang dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Untuk itu Pemerintah akan selalu membuka diri terhadap berbagai usaha-usaha perbaikan/penyempurnaan apabila para pelaku usaha masih menemui kendala dan hambatan di lapangan.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

BKPM mencatat, kinerja perekonomian Indonesia dalam 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan, dimana investasi domestik yang terealisasi sepanjang tahun 2017 mencapai Rp 262,35 triliun terjadi kenaikan 21,33 persen dibanding tahun 2016 yang baru mencapai Rp 216,23 triliun. Peningkatan nilai investasi domestik juga diikuti dengan meningkatnya jumlah proyek yang menyerap nilai investasi tersebut, jumlah proyek yang terserap meningkat dari 7.511 proyek pada tahun 2016 naik menjadi 8.838 proyek pada tahun 2017 atau meningkat sebesar (17,67 persen).

Jumlah investasi yang dialirkan oleh masyarakat ataupun perusahaan domestik sepanjang tahun 2018 mencapai Rp 328,35 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 25,25 persen. Begitupula dengan jumlah proyek yang mampu menyerap nilai investasi di tahun 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 22,37 persen menjadi 10.815 proyek.

Sektor yang masih menjadi primadona dan diincar oleh para investor domestik adalah sektor Industri. Selama tiga tahun terakhir dari 2016 hingga akhir 2018 memperlihatkan realisasi nilai investasi PMDN yang mampu terserap di sektor ini terjadi penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 investasi yang terserap di sektor industri sebesar Rp 106,83 triliun (49,38 persen), turun pada tahun 2017 menjadi Rp 99,19 triliun (37,81 persen), pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan 15,67 persen menjadi Rp 83,64 triliun (25,25 persen). Penurunan nilai investasi tidak diikuti dengan besarnya jumlah proyek yang justru mengalami peningkatan pada sektor industri, pada tahun 2016 jumlah proyek yang menyerap investasi domestik di sektor industri sebanyak 3.541 proyek, naik menjadi 4.513 proyek di tahun 2017, dan kembali meningkat menjadi 5.080 proyek pada tahun 2018.

Sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi berada pada peringkat kedua sektor yang cukup diminati investor domestik setelah sektor industri. Pada tahun 2018 sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi mampu

Tabel 8.1 Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor (miliar rupiah) Tahun 2016–2018

Sektor	2016		2017		2018	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	668	21 671,0 (10,02)	681	22 947.1 (8,75)	800	34 326,9 (10,45)
Pertambangan	134	6 033,6 (2,79)	218	20 635.1 (7,87)	325	33 100,0 (10,07)
Industri	3 541	106 783,7 (49,38)	4 513	99 187.4 (37,81)	5 080	83 644,4 (25,45)
Listrik, Gas dan Air	472	22 794,5 (10,54)	434	25 427.5 (9,69)	560	37 264,9 (11,34)
Konstruksi	365	14 039,1 (6,49)	283	30 334.3 (11,56)	401	44 979,7 (13,69)
Perdagangan dan Reparasi Hotel & Restoran	1 392	6 073,3 (2,81)	1 517	8 509.6 (3,24)	2 090	15 526,1 (4,72)
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	364	26 769,6 (12,38)	313	34 473.5 (13,14)	384	58 739,8 (17,88)
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	324	9 192,8 (4,25)	459	17 246.6 (6,57)	561	15 471,1 (4,71)
Jasa Lainnya	251	2 873,2 (1,33)	420	3 589.4 (1,37)	614	5 551,3 (1,69)
Jumlah	7 511	216 230,9 (100,00)	8 838	262 350.5 (100,00)	10 815	328 604,9 (100,00)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

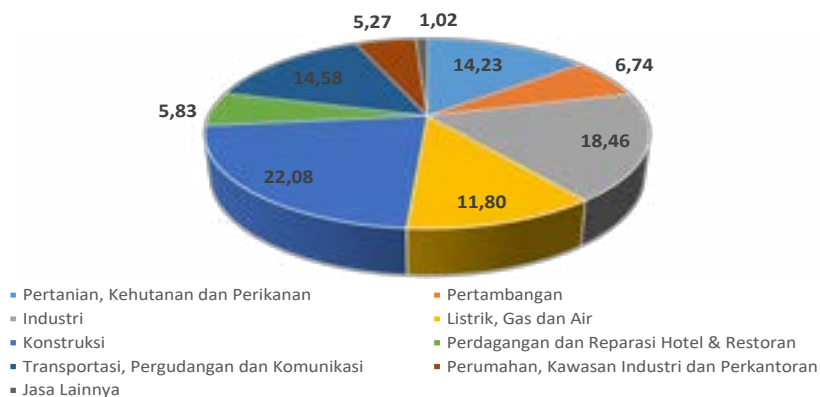
menyerap investasi sebanyak Rp 58,74 triliun (17,88 persen) atau meningkat 70,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, sektor yang cukup diminati investor domestik adalah konstruksi. Pada tahun 2018 sektor tersebut mampu menyerap investasi sebesar Rp 44,98 triliun (13,69 persen).

Indonesia sebagai negara agraris, dimana sebagian besar penduduk masih banyak yang bekerja disektor pertanian. Namun sektor pertanian belum mampu menjadi magnet bagi investor domestik untuk berinvestasi. Meskipun demikian pada tahun 2018 investasi domestik yang terserap di sektor pertanian terjadi peningkatan sebesar 49,59 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 sektor pertanian mampu menyerap investasi sebesar Rp 22,95 triliun meningkat menjadi Rp 34,33 triliun (10,45 persen) pada tahun 2018, dengan jumlah proyek sebanyak 800.

Pada tahun 2018, semua sektor menunjukkan peningkatan jumlah proyeknya, begitu pula dengan nilai investasinya. Kecuali sektor industri dan sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Jumlah proyek sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran terjadi peningkatan dari 459 proyek menjadi 561 proyek, sedangkan nilai investasinya justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu dari Rp 17,25 triliun menjadi Rp 15,47 triliun.

Pada Triwulan I tahun 2019 ada 6.313 proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah direalisasikan dengan nilai investasi Rp 87,20 triliun. Terjadi pergeseran, dimana sektor Konstruksi menjadi yang paling banyak diminati investor dibanding sektor Industri. Investasi PMDN yang terserap pada Tw I 2019 di Sektor Konstruksi sudah mencapai 22,08 persen, sedangkan sektor Industri baru menyerap sebesar 18,46 persen. Selanjutnya Sektor Transpor, Pergudangan, dan Komunikasi mampu menyerap investasi domestik sebesar 14,58 persen.

Gambar 8.1
Nilai Investasi PMDN Yang Terealisasi Menurut Sektor (persen) Triwulan I 2019



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Melihat kemajuan investasi dalam negeri, tampaknya perlu dipertahankan *treatment* yang telah berjalan dengan baik. Selain itu perlu ditingkatkan pula upaya-upaya untuk menjaga eksistensi perusahaan-perusahaan yang sudah ada, agar mereka tetap betah dan dapat menjalankan kegiatan usahanya di lokasi-lokasi tersebut dengan rasa aman. Salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi investasi bodong yang sering merugikan masyarakat.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tengah mempersiapkan paket kebijakan ekonomi jilid XIII. Dalam racikan paket kebijakan yang tengah digodok tersebut, pemerintah akan fokus memperpendek prosedur investasi yang harus dilalui pemodal. Selama ini deregulasi baru pada tingkat penyederhanaan izin investasi, izin usaha, logistik, ekspor, impor, masuk ke setiap sektor per sektor termasuk di daerah.

Sementara itu, untuk mendukung peningkatan investasi di luar Pulau Jawa ini diperlukan kerjasama dari semua pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah pusat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) provinsi di kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk lebih memberikan kemudahan bagi para investor.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diberi tugas oleh pemerintah terus berusaha untuk mendorong pergeseran investasi dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa. Namun BKPM belum mampu mengajak investor domestik untuk berinvestasi keluar Pulau Jawa. Hal tersebut terlihat dalam 3 tahun terakhir investasi yang terserap di Pulau Jawa terus mengalami peningkatan. Nilai investasi yang terserap di Pulau Jawa pada tahun 2017 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp 166,00 triliun

Tabel 8.2 Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Pulau (miliar rupiah) Tahun 2016–2018

Pulau	2016		2017		2018	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Sumatera	1 415	39 823,6 (18,42)	1 693	46 464,0 (17,71)	2 293	57 820,4 (17,60)
Jawa	4 336	126 354,0 (58,43)	5 555	165 999,9 (63,27)	6 350	176 952,9 (53,85)
Bali dan Nusa Tenggara	156	2 647,3 (1,22)	223	7 087,9 (2,70)	357	9 930,0 (3,02)
Kalimantan	832	33 588,4 (15,53)	850	30 234,1 (11,52)	1 087	56 957,0 (17,33)
Sulawesi	687	13 566,3 (6,27)	459	10 084,6 (3,83)	634	23 499,4 (7,15)
maluku dan Papua	85	251,3 (0,12)	58	2 480,0 (0,95)	94	3 445,2 (1,05)
Jumlah	7 511	216 230,9 (100,00)	8 838	262 350,5 (100,00)	10 815	328 604,9 (100,00)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

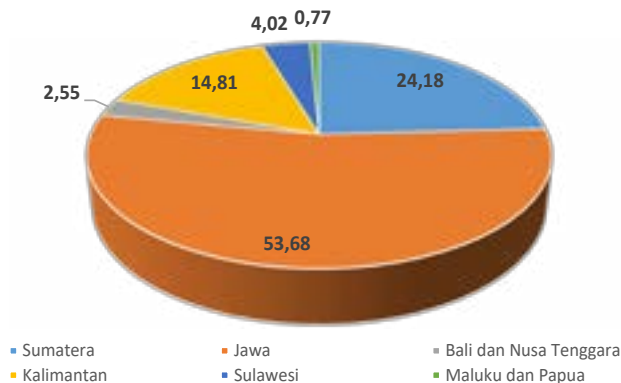
atau mengalami kenaikan sebesar 31,38 persen dibanding tahun 2016. Hingga tahun 2018 Pulau Jawa masih menjadi primadona para investor domestik, dan semakin menunjukkan kinerjanya, dimana mampu menyerap investasi domestik sebesar Rp 176,95 triliun atau terjadi peningkatan sebesar 6,60 persen dari tahun 2017 atau menyerap sekitar 53,85 persen dari total PMDN.

Menengok perkembangan nilai investasi domestik di pulau-pulau lainnya, pada tahun 2017 Kalimantan mengalami penurunan nilai investasi yaitu dari Rp 33,59 triliun menjadi Rp 30,23 triliun atau turun 9,99 persen, sementara jumlah proyek mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dari 832 proyek menjadi 850 proyek. Pulau Sulawesi juga mengalami penurunan baik nilai investasi maupun jumlah proyek, untuk nilai investasi turun sebesar 25,66 persen dari Rp 13,57 triliun menjadi Rp 10,08 triliun. Jumlah proyek di pulau Sulawesi turun sebesar 33,19 persen dari 687 proyek menjadi 459 proyek. Pulau Kalimantan dan Sulawesi di tahun 2018 mampu menarik investasi domestik masing-masing Rp 56,96 triliun dan Rp 23,50 triliun.

Nilai investasi domestik yang terserap di Pulau Sumatera tahun 2017 mencapai Rp 46,46 triliun menempatkan Sumatera sebagai posisi ke dua setelah Pulau Jawa, menunjukkan peningkatan sebesar 16,67 persen. Demikian pula dengan jumlah proyek juga mengalami peningkatan sebesar 19,65 persen yaitu dari 1.415 proyek (2016) menjadi 1.693 proyek (2017). Selanjutnya, investasi yang terkumpul di tahun 2018 mencapai Rp 57,82 triliun, menunjukkan peningkatan sebesar 24,44 persen, dengan jumlah 2.293 proyek.

Pada Triwulan I tahun 2019 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah direalisasikan berdasarkan wilayah, Pulau Jawa masih menempati urutan pertama dengan nilai investasi Rp 46,81 triliun atau 53,68 persen dari total investasi. Sementara Pulau Sumatera dengan total investasi sebesar Rp. 21,08 Triliun (24,18 persen) dari total investasi menempati urutan kedua sebagai wilayah tujuan investasi.

Gambar 8.2
Nilai Investasi PMDN Yang Terealisasi Menurut Pulau (persen) Triwulan I 2019



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Penanaman Modal Asing (PMA)

Investasi asing yang masuk ke Indonesia dalam bentuk penanaman modal dapat bersifat positif dan negatif bagi pembangunan. Investasi akan bersifat positif jika investasi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu dapat menggerakkan atau meningkatkan sektor-sektor yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, investasi asing dapat bersifat negatif apabila terjadi penambahan/peningkatan permintaan konsumsi, dalam bentuk peningkatan impor, dimana pertumbuhan impor lebih pesat daripada pertumbuhan ekspor yang disebabkan oleh adanya PMA, maka akan terjadi defisit neraca perdagangan. Dalam hal ini berarti, kehadiran PMA memberi lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif terhadap negara tuan rumah.

Perkembangan investasi asing yang masuk ke Indonesia menunjukkan pergerakan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia pada tahun 2016 tercatat sebanyak US\$ 28,96 miliar yang tersebar di 25.321 proyek. Nilai investasi asing di tahun 2017 lebih tinggi atau naik sebesar 11,31 persen jika dibanding tahun 2016 yaitu mencapai US\$ 32,24 miliar dan tersebar di 26.257 proyek. Pada tahun 2018 investasi asing yang masuk di Indonesia mengalami penurunan nilai investasi menjadi US\$ 29,31 miliar atau turun sekitar 9,69 persen, demikian pula dengan jumlah proyek mengalami penurunan sebesar 16,32 persen yaitu

**Tabel 8.3 Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)
Menurut Sektor (Juta US\$) Tahun 2016–2018**

Sektor	2016		2017		2018	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 182	1 759,6 (6,07)	969	1 700,2 (5,27)	847	1 788,7 (6,10)
Pertambangan	1 130	2 742,4 (9,47)	729	4 375,9 (13,57)	606	3 038,6 (10,37)
Industri	9 563	16 687,6 (57,61)	9 059	13 148,7 (40,78)	7 843	10 347,6 (35,31)
Listrik, Gas dan Air	748	2 139,6 (7,39)	587	4 241,4 (13,16)	515	4 383,8 (14,96)
Konstruksi	437	186,9 (0,65)	460	224,7 (0,70)	301	248,1 (0,85)
Perdagangan dan Reparasi Hotel & Restoran	7 566	1 558,2 (5,38)	9 083	2 383,7 (7,39)	7 247	1 478,2 (5,04)
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	620	750,2 (2,59)	670	1 899,6 (5,89)	578	3 027,2 (10,33)
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1 151	2 321,5 (8,02)	984	2 873,9 (8,91)	941	4 302,7 (14,68)
Jasa Lainnya	2 924	818,2 (2,82)	3 716	1 391,9 (4,32)	3 094	692,9 (2,36)
Jumlah	25 321	28 964,1 (100,00)	26 257	32 239,8 (100,00)	21 972	29 307,9 (100,00)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

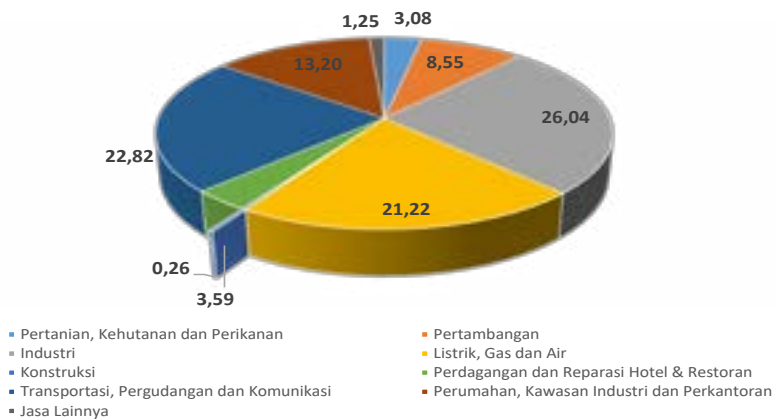
dari 26.257 proyek pada tahun 2017 menurun menjadi 21.972 proyek pada tahun 2018.

Berdasarkan sektor, dalam 3 tahun terakhir terlihat bahwa sektor industri masih menjadi sektor yang sangat diminati oleh para investor asing yang menganggap bahwa sektor tersebut mampu memberikan keuntungan. Sektor lain yang cukup diminati oleh investor asing adalah sektor pertambangan, sektor listrik, gas dan air, dan sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran.

Investasi asing yang masuk ke Indonesia di sektor industri dalam 3 tahun terakhir menunjukkan penurunan, namun masih yang tertinggi dalam menyerap investasi asing. Tahun 2016 investasi asing yang terserap di sektor industri mencapai 57,61 atau sekitar US\$ 16,69 miliar turun menjadi US\$ 10,35 miliar atau hanya 35,31 persen dari total investasi asing yang masuk.

Sektor pertambangan pada tahun 2018 hanya mampu menyerap investasi asing sebesar US\$ 3,04 miliar dengan jumlah proyek sebanyak 606 proyek, atau turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 4,38 miliar dengan jumlah proyek sekitar 729 proyek atau turun sekitar 30,56 persen. Selanjutnya, sektor yang cukup menjanjikan keuntungan bagi investor adalah sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran, dimana pada tahun 2017 investasi asing yang terserap tercatat sebesar US\$ 2,87 miliar atau sekitar 8,91 persen dari total investasi asing yang masuk. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 85,34 persen investasi asing untuk sektor ini, investasi asing yang terserap tercatat sebesar US\$ 4,30 miliar yang tersebar di 3.094 proyek. Begitupula dengan sektor listrik, gas dan air yang mencatat kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, investasi yang terserap sebesar US\$ 4,38 miliar atau 14,96 persen dari total investasi pada tahun 2018.

Gambar 8.3
Nilai Investasi PMA yang Terealisasi Menurut Sektor (persen) Triwulan I 2019



Pada Triwulan I tahun 2019 proyek Penanaman Modal Asing (PMA) yang direalisasikan berjumlah 10.453 proyek dengan nilai investasi 7,19 miliar US dolar. Jika dilihat secara sektoral, PMA tersebut didominasi oleh Sektor Perindustrian (26,04 persen), kemudian diikuti oleh Sektor Transpor, Pergudangan dan Komunikasi serta Sektor Listrik, Gas dan Air masing-masing mempunyai kontribusi sebesar 22,82 persen dan 21,22 persen.

Untuk mendukung pertumbuhan investasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Perpres No 13 dan 78 tahun 2010 dan No 12 tahun 2011 untuk mendorong pembangunan infrastruktur, dan juga dikeluarkannya kembali paket kebijakan ke-16 guna menarik lebih banyak investasi asing demi memperbaiki defisit transaksi berjalan. Paket kebijakan tersebut terdiri dari perluasan penerima fasilitas libur pajak (*tax holiday*), relaksasi aturan daftar negatif investasi (DNI), dan pengaturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA). Hal ini dilakukan mengingat akselerasi investasi belum sepenuhnya didukung perkembangan pada sisi infrastruktur yang merata, terutama infrastruktur di wilayah timur Indonesia yang masih minim. Selain itu, percepatan pembangunan ekonomi berbasis kawasan juga sudah mulai digulirkan dengan membentuk enam koridor spesifik, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua.

Belum meratanya pembangunan infrastruktur Indonesia terlihat dari investasi yang terserap menurut wilayah. Baik investasi domestik maupun investasi asing sebagian besar masih didominasi di kawasan Pulau Jawa, hal ini karena Pulau Jawa mempunyai daya tarik bagi investor dan didukung oleh infrastruktur yang memadai. Investasi asing yang masuk di Pulau Jawa pada tahun 2016-2018 menunjukkan tren yang terus meningkat, pada tahun 2016 jumlah investasi tercatat US\$ 14,77 miliar atau 51,00 persen dari total investasi

Tabel 8.4 Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Yang Disetujui Pemerintah Menurut Pulau (Juta US \$) Tahun 2016–2018

Pulau	2016		2017		2018	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Sumatera	2 964	5 665,3 (19,56)	2 529	5 497,2 (17,05)	2 356	4 839,4 (16,51)
Jawa	17 060	14 772,4 (51,00)	19 475	16 761,1 (51,99)	15 533	17 046,0 (58,16)
Bali dan Nusa Tenggara	2 171	947,9 (3,27)	2 199	1 158,0 (3,59)	2 316	1 354,4 (4,62)
Kalimantan	1 630	2 588,7 (8,94)	1 101	2 887,4 (8,96)	914	1 954,4 (6,67)
Sulawesi	1 084	2 765,2 (9,55)	669	3 487,0 (10,82)	608	2 323,9 (7,93)
Maluku dan Papua	412	2 224,5 (7,68)	284	2 448,9 (7,60)	245	1 789,9 (6,11)
Jumlah	25 321	28 964,1 (100,00)	26 257	32 239,8 (100,00)	21 972	29 307,9 (100,00)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah

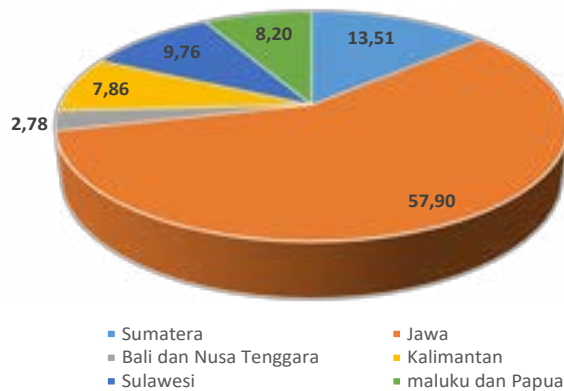
Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

dengan jumlah proyek 17.060, kembali meningkat hingga tahun 2018 sebesar 15,39 persen menjadi US\$ 17,05 miliar atau 58,16 persen dari total investasi. Namun peningkatan nilai investasi ini tidak diikuti dengan jumlah proyek yang justru mengalami penurunan dari 19.475 proyek pada tahun 2017 turun menjadi 15.533 proyek pada tahun 2018 atau turun sebesar 20,24 persen.

Pulau Bali dan Nusa Tenggara mempunyai tren yang juga meningkat untuk investasi asing, investasi asing yang masuk di pulau tersebut dari tahun 2106-2018 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2016 tercatat investasi yang masuk sebesar US\$ 0,95 miliar dan terus meningkat hingga tahun 2018 sebesar 42,88 persen menjadi US\$ 1,35 miliar dengan jumlah proyek tercatat sebesar 2.316. Hal ini tidak diikuti oleh pulau pulau lain yang justru mengalami penurunan investasi asing. Pulau Sulawesi pada tahun 2017 mencatat investasi asing sebanyak US\$ 3,49 miliar, turun sebesar 33,36 persen menjadi US\$ 2,32 miliar pada tahun 2018. Sementara yang terserap di Pulau Kalimantan mencapai US\$ 1,95 miliar pada tahun 2018 turun jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Tidak berbeda jauh dengan Pulau Maluku dan Papua yang juga mengalami penurunan investasi pada tahun 2018 yang mencatat sebesar US\$ 1,79 miliar turun sebesar 26,91 persen jika dibanding dengan tahun sebelumnya.

Memasuki kuartal pertama tahun 2019, Pulau Jawa masih menjadi dominasi dalam penanaman modal oleh pihak asing, dimana pada kuartal I 2019 investasi asing yang masuk senilai US\$ 4,17 miliar atau sebesar 57,90 persen dari total investasi pada periode tersebut. Sementara Pulau Sumatera menduduki posisi kedua dalam penyerapan investasi asing pada Kw I 2019 yaitu tercatat sebesar US\$ 0,97 miliar atau 13,51 persen dari total penanaman investasi asing. Selanjutnya Pulau Sulawesi, Pulau Maluku dan Papua, dan Pulau Kalimantan dengan investasi masing-masing sebesar US\$ 702,2 juta (9,76 persen), US\$ 0,59 miliar (8,20 persen), dan US\$ 0,56 miliar atau 7,86 persen dari total investasi pada triwulan I 2019.

Gambar 8.4
Nilai Investasi PMA yang Terealisasi Menurut Pulau (persen) Triwulan I 2019



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Bursa Efek Indonesia (BEI)

Memasuki tahun 2018, secara makro kondisi perekonomian diharapkan lebih kondusif. Stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah melalui beberapa paket kebijakan mulai terasa dampaknya. Proyek infrastruktur mulai bergerak, seperti jalan tol, listrik, dan jalur kereta api. Sektor pertambangan batu bara diharapkan akan tertolong dengan berbagai proyek pembangkit listrik. Begitu juga sumber-sumber minyak baru seperti di Masela dan Mahakam mulai akan memproduksi.

Di sektor pariwisata, pemerintah mulai melakukan upaya untuk menjadikan sektor ini sebagai salah satu andalan devisa. Pembangunan 10 kawasan pariwisata unggulan, misalnya, diharapkan akan menggerakkan roda perekonomian domestik. Sumber devisa sektor pariwisata yang saat ini ada di posisi nomor empat diprediksi akan mampu mengalahkan sektor perkebunan dan pertambangan.

Kondisi ini perlu disambut positif oleh para pelaku industri pasar modal seperti kalangan emiten, calon emiten, Anggota Bursa, dan investor baik institusi maupun perorangan. Apalagi, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter mulai menurunkan tingkat suku bunga acuan. Tingkat suku bunga diyakini akan semakin rendah.

Selain pengaruh dari ekonomi makro, secara internal manajemen BEI juga melakukan berbagai langkah terobosan untuk meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di pasar modal. Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tidak pernah berhenti. BEI berharap, ketika kondisi ekonomi lebih baik, maka investor kembali memburu saham-saham yang dianggap favorit. Hal ini terbukti pada tahun 2018 IHSG bisa naik kembali dan menembus angka 6.000, tepatnya 6.355,65. Namun di tahun 2018 IHSG melemah dan ditutup pada nilai 6.194,50.

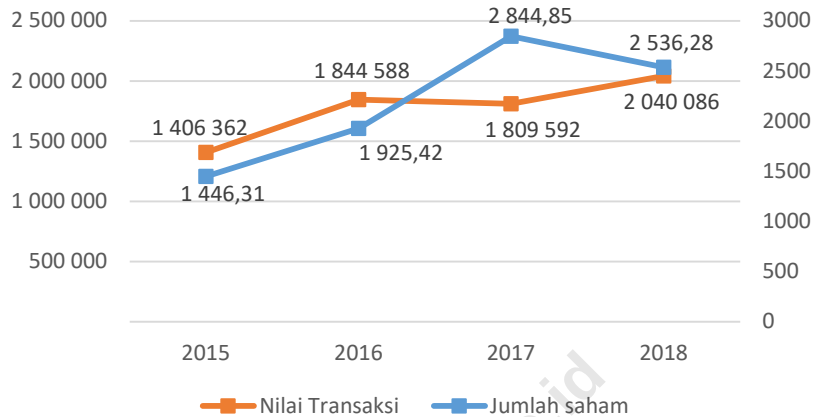
Perekonomian Indonesia yang tetap tumbuh di tengah pemulihan ekonomi global, telah mampu mendorong tingginya arus modal masuk ke bursa saham domestik. Dari sisi jumlah saham yang diperdagangkan disepanjang tahun 2015-2017, secara umum mengalami peningkatan jumlah saham yang

**Tabel 8.5 Transaksi dan Indeks Saham di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2015–2018**

Akhir Periode	Jumlah Saham yang Diperdagangkan (Miliar lembar)	Nilai Transaksi (Miliar Rupiah)	Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	Jumlah Emiten	Emisi Saham (miliar lembar)	Nilai Emisi (triliun rupiah)
2015	1 446,31	1 406 362	4 593,01	636	78 893,68	730,34
2016	1 925,42	1 844 588	5 296,71	650	317 492,72	809,54
2017	2 844,85	1 809 592	6 355,65	688	611 290,20	907,33
2018	2 536,28	2 040 086	6 194,50	745	4 651 478,77	959,09

Sumber: BEI dan SEKI

Gambar 8.5
Jumlah dan Nilai Transaksi Saham di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018



Sumber : Bursa Efek Indonesia, SEKI

diperdagangkan, namun pada tahun 2018 sedikit mengalami penurunan sebesar 10,85 persen. Pada tahun 2017 jumlah saham yang diperdagangkan menunjukkan peningkatan sebesar 33,13 persen dibanding tahun 2016 menjadi 2.844,85 miliar lembar saham. Dari jumlah saham yang diperdagangkan di tahun 2017 diperoleh nilai transaksi mencapai Rp 1.809,59 triliun. Pada tahun 2018 dari saham yang diperdagangkan diperoleh nilai transaksi sebesar Rp 2.040,09 miliar meningkat sekitar 12,74 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 jumlah saham yang diperdagangkan menunjukkan adanya penurunan kinerja, hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah saham yang diperdagangkan, yaitu sebesar 2.536,28 miliar lembar saham.

Kinerja pasar modal Indonesia masih sangat baik di tengah dinamika sektor keuangan akibat berbagai faktor eksternal yang terjadi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dihitung setiap hari dimana terjadi transaksi, dengan menggunakan harga saham terakhir yang terjadi di lantai bursa. Indeks Harga Saham merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga-harga saham. Sebagai besaran statistik, indeks harga saham juga sering digunakan untuk menggambarkan dan meramalkan kecenderungan pasar.

Seiring dengan perekonomian domestik yang masih tumbuh positif dan ditopang oleh kondisi makro ekonomi yang terjaga serta kebijakan moneter yang cenderung longgar serta semakin baiknya kinerja keuangan emiten dari hasil yang dilaporkan, kepercayaan pelaku pasar masih cukup kuat. Kinerja positif di pasar saham, meskipun terlihat pada pergerakan IHSG yang terus bergejolak dari tahun 2016-2018. Akhir tahun 2016 IHSG di tutup pada level 5.296,71 dan diakhir tahun 2017 IHSG naik pada level 6.355,65. Memasuki tahun 2018 IHSG menurun lagi diakhir penutupan tahun 2018 sebesar 2,54 persen, yaitu mencapai 6.194,50.

Pergerakan Jumlah emiten yang terdaftar di BEI menunjukkan tren yang terus meningkat selama 2015-2018. Tahun 2015, jumlah emiten tercatat

sebanyak 636 emiten dan terus bergerak naik menjadi 650 pada tahun 2016, berlanjut menjadi 688 emiten di tahun 2017. Pada tahun 2018, ada tambahan emiten sekitar 57 sehingga total menjadi 745 emiten. Kehadiran emiten baru mengindikasikan pasar saham masih menjadi alternatif penting bagi dunia usaha untuk mengakses dana segar dan menopang ekspansi usaha.

Bertambahnya jumlah emiten, diikuti pula dengan emisi saham yang diperdagangkan yang mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dari 78,89 triliun lembar pada tahun 2015 menjadi 317,49 triliun lembar pada tahun 2016. Jumlah emisi saham menunjukkan peningkatan yang sangat fantastis pada tahun 2017 dan 2018 dengan pertambahan masing masing sebesar 92,54 persen dan 660,93 persen menjadi 611,29 triliun lembar dan 4.651,48 triliun lembar. Hal ini dikarenakan adanya emiten baru yang menginvestasikan dananya dengan cara membeli saham yang mereka anggap lebih aman. Nilai emisi juga mencatatkan adanya pertumbuhan setiap tahun selama 2015-2018. Pada tahun 2015 nilai emisi saham tercatat sebesar Rp 730,34 triliun dan tahun 2016 meningkat menjadi Rp 809,54 triliun atau naik 12,08 persen. Kenaikan nilai emiten terus berlanjut hingga tahun 2018 yaitu mencapai 5,70 persen menjadi Rp 959,09 triliun.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) tahun 2019 diproyeksi akan menembus level 7.000. Sejumlah faktor pendorong akan membuat pergerakan IHSG lebih bertenaga, salah satunya kembalinya investor asing masuk ke Indonesia, serta nilai tukar rupiah yang akan terus menguat. Investor asing akan kembali ke Indonesia karena potensi melambatnya ekonomi AS dan global. Nilai rupiah akan terus menguat, menopang pergerakan IHSG.

Investasi Asing yang Masuk ke Indonesia

Secara keseluruhan sepanjang 2018, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang membaik dengan struktur lebih kuat dengan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,17 persen dan merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir. Perbaikan kinerja ekonomi tersebut didukung struktur yang lebih kuat seiring dengan meningkatnya kinerja investasi dan ekspor. Kenaikan kinerja investasi itu sejalan dengan berlanjutnya

Tabel 8.6 Jumlah dan Nilai Perdagangan Saham yang Dilakukan oleh Investor Asing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015–2018

Akhir Periode	Volume		Nilai (Miliar rupiah)	
	Beli	Jual	Beli	Jual
2015	239 364	262 216	596 329	618 918
2016	290 055	327 492	688 492	672 323
2017	308 851	441 427	642 946	682 816
2018	297 835	321 724	728 937	779 683

Sumber: Bapepam, idx-annually-2018

pembangunan infrastruktur dan tetap tingginya investasi nonbangunan sebagai antisipasi peningkatan permintaan ke depan.

Hal ini menjadi salah satu pendorong utama kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Sentimen positif investor juga ditopang oleh kondisi perekonomian global yang memasuki fase pemulihan, penguatan harga komoditas, dan membaiknya fundamental ekonomi domestik yang didukung oleh peningkatan kinerja ekspor. Pasar modal Indonesia menjadi satu tujuan investasi bagi investor negara-negara maju. Investasi disamping dapat memberikan manfaat besar seperti penciptaan lapangan kerja, penambahan pajak, transfer teknologi, dan tumbuhnya sektor turunan lain, namun di sisi lain, investasi asing dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan, baik ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan pemerintah adalah bahwa investasi asing harus tetap di bawah kekuatan kendali negara, sehingga segala aktivitas bisnis dan operasi mereka selalu bisa dikontrol oleh negara.

Kinerja pasar saham pada tahun 2018, mencatatkan kinerja yang baik meskipun lebih rendah bila dibanding tahun 2017, dan diharapkan ke depannya kondisi pasar saham Indonesia masih akan bergerak positif seiring dengan meningkatnya keyakinan konsumen.

Investor asing pada umumnya berinvestasi dalam bentuk saham. Karena itu, perdagangan saham di Indonesia tidak terlepas dari peran investor asing yang melakukan transaksi jual beli saham. Tahun 2015-2018, volume saham yang dibeli investor asing lebih rendah dibandingkan volume saham yang dijual, pada tahun 2017 volume saham yang dibeli lebih tinggi jika dibanding tahun 2016, atau meningkat sebesar 6,48 persen. BEI mencatat volume saham yang dibeli oleh pihak asing pada tahun 2018 sebesar 297.835 juta lembar dengan nilai mencapai Rp 728.937 miliar. Sementara itu, saham yang dijual oleh pihak asing sepanjang tahun 2018 mencapai 321.724 juta lembar saham dengan nilai mencapai Rp 779.683 miliar.

Masih mendominasinya investasi asing pada investasi langsung dalam bentuk penanaman modal, seharusnya persentase investor lokal harus lebih tinggi untuk dapat bersaing dan menahan gempuran *profit taking* asing. Diharapkan pemerintah harus mulai dapat membatasi investasi asing yang masuk. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan dibidang investasi harus dapat membatasi investasi asing dan bukan kebijakan investasi yang membuka lebar-lebar pintu investasi asing karena dinilai akan menempatkan Indonesia di bawah dominasi ekonomi asing. Seharusnya Indonesia menjadikan investasi asing sebagai pendukung atau pelengkap saja, bukan sebagai penopang utama sistem perekonomian nasional.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) tahun 2019 diproyeksi akan menembus level 7.000. Sejumlah faktor pendorong akan membuat pergerakan IHSG lebih bertenaga, salah satunya kembalinya investor asing masuk ke Indonesia, serta nilai tukar rupiah yang posisinya kembali menguat, sehingga penguatan nilai rupiah akan membuat investor asing nyaman berada di pasar modal Indonesia. IHSG bisa tumbuh dengan memperbanyak emiten dan

instrumen sehingga investor prioritasnya makin banyak. kepercayaan investor asing sudah mulai kembali lagi untuk melakukan investasi di pasar modal Indonesia. Hal itu bisa berdampak pada aliran dana asing yang kembali masuk ke Indonesia (*capital inflows*).

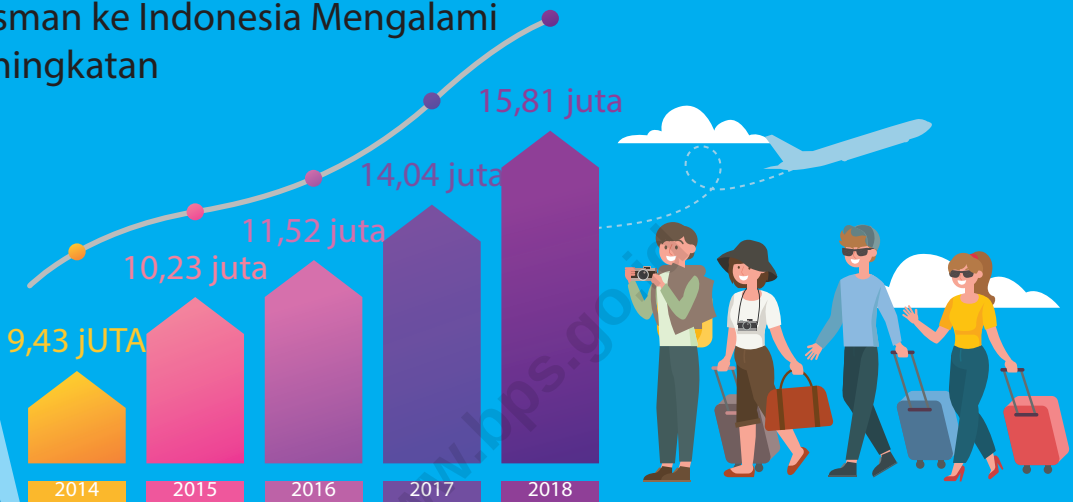
Ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab potensi melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Satu, naiknya suku bunga acuan bank sentral AS atau *The US Federal Reserve (The Fed)*. Dua, perang dagang yang berlangsung antara AS dan Tiongkok telah membuat perekonomian kedua negara menderita. Tanda-tanda pelemahan ekonomi Tiongkok bisa terlihat dari laporan output industri dan pertumbuhan penjualan ritelnya untuk bulan November yang meleset dari ekspektasi.

Pemerintah melalui Bank Indonesia mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan pemerintah, lembaga keuangan, para pemilik saham, dan emiten untuk meningkatkan kinerja perdagangan saham di tahun 2019 mendatang. Secara umum, pasar obligasi maupun saham di 2018 memiliki prospek yang positif. Hal ini didukung kondisi makro baik dalam negeri maupun global yang stabil. Perhelatan pemilihan kepala daerah juga tidak akan memengaruhi pasar saham maupun obligasi secara signifikan.

Pariwisata

9

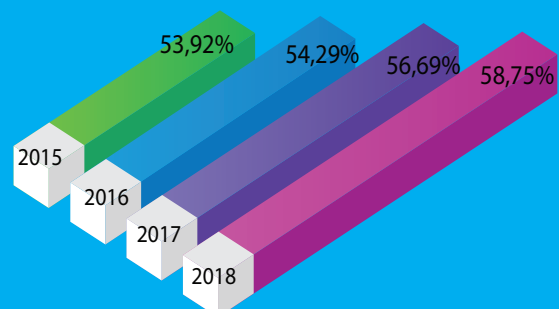
Selama 5 Tahun Terakhir Jumlah Kunjungan Wisman ke Indonesia Mengalami Peningkatan



Wisman dari Malaysia Terbanyak Berkunjung ke Indonesia



Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang Terus Meningkat



Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah dan dianggap sebagai sektor yang strategis yang dapat menggerakkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, sektor pariwisata menjadi program prioritas nasional. Sektor pariwisata dinilai sebagai sektor yang mampu memberikan kontribusi yang cukup penting dalam penerimaan devisa negara. Selain itu, sektor pariwisata dapat membuka lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja baru dan mengurangi angka pengangguran. Lebih lanjut lagi, sektor pariwisata mampu mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi lainnya seperti kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya.

Salah satu indikator pencapaian sektor pariwisata di Indonesia yaitu meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Selama lima tahun terakhir, kunjungan wisman ke Indonesia selalu menunjukkan peningkatan, walaupun belum memenuhi target jumlah kunjungan wisman dari pemerintah setiap tahunnya. Dari sisi perolehan devisa, Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan bahwa sektor pariwisata mampu memberikan sumbangan penerimaan devisa sebesar US\$ 17,6 miliar pada tahun 2018 dan menempatkan sektor pariwisata di posisi teratas sebagai penghasil devisa. Selanjutnya, berbagai prestasi sektor pariwisata telah diraih Indonesia seperti meningkatnya indeks daya saing pariwisata Indonesia. Menurut *The Travel and Tourism Competitiveness Index* (TTCI) yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF), indeks daya saing pariwisata Indonesia mengalami peningkatan dari *ranking* 74 pada tahun 2011 menjadi *ranking* 70 pada tahun 2013. Kemudian meningkat kembali menjadi *ranking* ke-50 pada tahun 2015 dan terakhir meningkat ke *ranking* 42 pada tahun 2017.

Prestasi lainnya yang diraih oleh sektor pariwisata yaitu Indonesia terpilih menjadi destinasi wisata halal terbaik dunia tahun 2019 dari *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2019. Hasil dari pencapaian menunjukkan bahwa Indonesia lebih unggul dibandingkan 130 destinasi wisata lain dari seluruh dunia. Bahkan, Indonesia mengungguli destinasi wisata halal dari negara-negara di Kawasan Timur Tengah. Lebih lengkapnya mengenai 10 negara destinasi wisata halal terbaik dunia versi GMTI 2019 yaitu : 1. Indonesia (skor 78), 2. Malaysia (skor 78), 3. Turki (skor 75), 4. Arab Saudi (skor 72), 5. Uni Emirat Arab (skor 71), 6. Qatar (skor 68), 7. Maroko (skor 67), 8. Bahrain (skor 66), 9. Oman (skor 66), dan 10. Brunei Darussalam (skor 65). Pencapaian yang diraih Indonesia ini didukung dengan adanya Indonesia Muslim *Travel Index* (IMTI) yang mengadopsi dan berpedoman pada ketentuan sesuai standar GMTI. Perlu diketahui bahwa standar di dalam Laporan GMTI yaitu melakukan kajian analisis berdasarkan 4 kriteria penilaian strategis. Keempat kriteria tersebut adalah akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Selain itu, Indonesia gencar menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) dan *workshop* 10 destinasi pariwisata halal unggulan.

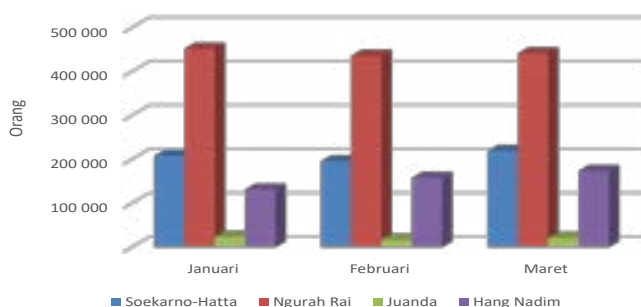
Pada tahun 2019 pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebesar 20 juta orang, target tersebut meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 15 juta orang dan target tahun 2018 sebesar

17 juta orang. Untuk mencapai target pemerintah tersebut, Kemenpar RI mencanangkan program pariwisata dengan tema *The Winner: Wonderful Indonesia Energy*. Tema ini diambil untuk dijadikan sebagai landasan semangat dan strategi untuk menjadi pemenang dalam upaya pencapaian target kunjungan wisman 20 juta orang. Selain itu, untuk menarik perhatian dari kaum milenial, Kemenpar RI juga merilis *Calendar of Events (CoE) 2019* yang mempunyai maksud untuk mempromosikan tempat tujuan wisata dan beragam kegiatan-kegiatan pariwisata yang berkualitas dan berstandar internasional agar lebih dikenal dan dikunjungi oleh banyak orang. Kemenpar mempromosikan 100 *CoE Wonderful 2019* yang pelaksanaannya tersebar dari Aceh hingga Papua. Dalam situs Kemenpar RI, kegiatan pariwisata yang masuk ke dalam list CoE 2019 harus mempunyai beberapa kriteria seperti memiliki nilai kreatifitas (*creative value*), nilai komersil (*commercial value*), nilai komunikasi (*communication value*), serta didukung oleh komitmen/keseriusan kepala daerah (*CEO commitment*) untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya. Selain itu, kegiatan pariwisata yang dilaksanakan harus mempunyai pengaruh langsung kepada sosial ekonomi masyarakat dan meningkatkan nilai media (*media value*) bagi citra destinasi wisata daerah.

Kunjungan Wisatawan Mancanegara Melalui Pintu Masuk/ Bandara

Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sepanjang tahun 2018 mencapai 15,81 juta atau meningkat sebesar 12,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar 14,04 juta kunjungan. Dari sebanyak 15,81 juta kunjungan wisman ke Indonesia, 12,89 juta kunjungan di antaranya melalui 20 pintu utama, sedangkan 2,92 juta sisanya di luar pintu utama. Angka kunjungan wisman 2018 tersebut masih jauh dari target pemerintah yang ditetapkan sebesar 17 juta wisman. Salah satu hal yang menyebabkan target kunjungan wisman ke Indonesia tidak tercapai yaitu terjadinya sejumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2018 yang memberikan dampak kepada wisatawan. Beberapa bencana alam yang terjadi diantaranya gempa besar di Lombok, masih terjadinya erupsi Gunung Agung di Bali, kecelakaan jatuhnya pesawat Lion Air, terjadinya tsunami

Gambar 9.1
Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia melalui Bandara, 2019 (Januari-Maret)



di Sulawesi Tengah dan Selat Sunda. Dengan kejadian bencana tersebut, beberapa negara mengeluarkan peringatan perjalanan (*travel warning*) bagi warga negaranya untuk bepergian ke Indonesia. Akibatnya, wisatawan mancanegara memutuskan untuk berpikir ulang dan tidak berkunjung ke Indonesia.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari Tabel 9.1 terlihat bahwa jumlah kunjungan wisman ke Indonesia tahun 2013 mencapai 8,80 juta orang dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai lebih dari 15,81 juta wisman pada tahun 2018. Peningkatan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia tidak terlepas dari keberhasilan program pemerintah seperti program *Calendar of Event Wonderful Indonesia* (CoE WI) dan paket *tour VIWI 2018*, serta dengan mengikuti pameran atau workshop di luar negeri dalam rangka mempromosikan destinasi dan *event* wisata yang ada di tanah air. Selain itu, kegiatan akbar yang bertaraf internasional juga diadakan di Indonesia yaitu kejuaraan multi *event Asian Games 2019* pada bulan Agustus dan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia pada bulan Oktober 2018.

Tabel 9.1 Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Melalui 19 Pintu Masuk Utama (orang) Tahun 2013–2019¹

Tahun	Bandara					Jumlah
	Soekarno Hatta (Jakarta)	Ngurah Rai (Bali)	Juanda (Surabaya)	Hang Nadim (P. Batam)	Lainnya	
2013	2 240 502	3 241 889	225 041	1 336 430	1 758 267	8 802 129
2014	2 246 437	3 731 735	217 193	1 454 110	1 785 936	9 435 411
2015	2 368 628	3 936 066	204 200	1 585 719	2 136 162	10 230 775
2016	2 603 195	4 885 062	231 455	1 510 203	2 289 360	11 519 275
2017	2 749 321	5 682 248	247 166	1 564 717	3 796 347	14 039 799
2018	2 814 586	6 025 760	320 529	1 887 284	4 762 146	15 810 305
Januari	210 494	345 191	21 532	115 590	405 032	1 097 839
Februari	201 981	443 805	19 621	155 671	376 425	1 197 503
Maret	244 467	484 846	26 391	175 194	432 528	1 363 426
April	224 978	516 143	26 306	144 104	390 790	1 302 321
Mei	191 631	526 281	24 420	142 157	358 216	1 242 705
Juni	182 887	540 462	27 329	167 398	404 598	1 322 674
Juli	322 808	624 263	33 390	144 235	422 535	1 547 231
Agustus	308 698	571 380	34 166	159 218	437 559	1 511 021
September	250 058	555 888	24 835	153 944	386 218	1 370 943
Oktober	244 775	515 181	25 938	141 337	364 374	1 291 605
Nopember	206 820	406 679	29 992	155 283	358 709	1 157 483
Desember	224 989	495 641	26 609	233 153	425 162	1 405 554
2019*						
Januari	208 450	452 405	23 872	131 490	341 945	1 158 162
Februari	195 859	436 370	17 561	158 088	462 947	1 270 825
Maret	219 291	441 775	21 565	173 947	482 088	1 338 666

Catatan : * Angka sementara

Sumber : Dirjen Imigrasi dan Statistik Indonesia 2019

Bila dilihat berdasarkan pintu utama, jumlah kunjungan wisman yang masuk melalui Bandara Internasional Ngurah Rai masih yang terbanyak dibandingkan bandara lainnya, yaitu sebanyak 6,02 juta wisman (38,11 persen dari total wisman). Jumlah wisman yang terbanyak berikutnya masuk ke Indonesia adalah melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta sebanyak 2,81 juta wisman (17,80 persen dari total wisman) dan melalui bandara Hang Nadim Batam sebanyak 1,89 juta wisman (11,94 persen dari total wisman).

Bali masih menjadi destinasi wisata yang menarik bagi para wisman. Walaupun sempat terkena imbas dari adanya bencana gempa di Lombok dan masih terjadinya beberapa kali erupsi Gunung Agung, namun pencapaian jumlah kunjungan wisman ke Bali masih cukup tinggi. Bali juga menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund* atau IMF) dan Bank Dunia pada bulan Oktober 2018. Dilihat dari sisi kenaikan jumlah kunjungan wisman, selama tahun 2018 kenaikan jumlah kunjungan wisman terjadi di 10 pintu masuk utama. Kenaikan kedatangan wisman melalui Bandara Internasional Ngurah Rai Bali yaitu sebesar 6,05 persen. Sementara kunjungan wisman yang melalui bandara Soekarno Hatta, Juanda, dan Hang Nadim Batam masing-masing mengalami peningkatan sebesar 2,37 persen, 29,68 persen dan 20,62 persen.

Jika dilihat perkembangan jumlah wisman yang masuk ke Indonesia per bulan selama tahun 2018, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia terbanyak berada pada pertengahan tahun (Juli-Agustus) dan akhir tahun (Desember). Hal ini disebabkan karena adanya liburan pada pertengahan tahun dan menjelang natal dan tahun baru. Oleh karena itu, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada semester kedua tahun 2018 (Juli-Desember) mencapai 8,28 juta orang atau lebih tinggi dibandingkan jumlah kunjungan wisman pada semester pertama tahun 2018 (Januari-Juni) yaitu sebesar 7,53 juta orang. Berdasarkan pintu masuk utama juga terlihat bahwa selama April-Oktober 2018, Bandara Ngurah Rai masih terus menjadi pintu utama kedatangan para wisman yang ingin berkunjung ke Bali sebagai destinasi wisata favorit dengan jumlah kunjungan rata-rata di atas 500 ribu orang dan bahkan pada bulan Juli tembus lebih dari 624 ribu orang.

Memasuki tahun 2019 yaitu pada triwulan I (Januari-Maret), jumlah kunjungan wisman telah mencapai 3,77 juta wisman atau sekitar 18,84 persen dari target kunjungan wisman tahun 2019 yang sebesar 20 juta orang. Jumlah kunjungan wisman selama triwulan pertama tahun 2019 ini juga dapat dikatakan mengalami kenaikan sebesar 2,98 persen dibanding kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang berjumlah 3,66 juta wisman. Berdasarkan pintu masuk utama kedatangan wisman, jumlah kunjungan wisman yang masuk melalui bandara Ngurah Rai (Bali) pada triwulan pertama tahun 2019 sudah mencapai 1,33 juta orang. Sementara itu, kedatangan wisman melalui Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta) sebanyak 623.600 orang, dan pintu masuk bandara Hang Nadim (P. Batam) sebanyak 463.525 orang. Diharapkan selama tahun 2019, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia akan terus mengalami peningkatan mengingat Indonesia mempunyai

potensi yang sangat besar menarik wisatawan karena mempunyai berbagai macam destinasi wisata yang bagus dan indah di seluruh wilayah tanah air.

Jika dilihat berdasarkan kebangsaan, wisman yang datang ke Indonesia dalam waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018 didominasi oleh wisman yang berasal dari negara Malaysia, Singapura dan Tiongkok. Pada tahun 2018, jumlah wisman dari ketiga negara tersebut secara total berjumlah 6,41 juta orang atau sekitar 40,55 persen dari total wisman yang berkunjung ke Indonesia. Wisman asal Malaysia adalah yang terbanyak berkunjung ke Indonesia selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2017 wisman asal Malaysia tercatat paling banyak yaitu mencapai 2,12 juta orang dan kemudian pada tahun 2018 meningkat hingga mencapai 2,50 juta orang. Peningkatan jumlah kunjungan wisman dari Malaysia ke Indonesia disebabkan sudah dibukanya beberapa rute baru penerbangan langsung dari dan ke Malaysia sejak beberapa tahun yang lalu. Selain itu, pemerintah mengikuti berbagai program acara yang diselenggarakan di Malaysia dalam rangka promosi destinasi wisata yang menarik di Indonesia, seperti mengikuti *Malaysian Association of Tour and Travel Agents (MATTA) Fair* pada bulan Maret di Kuala Lumpur, Perak, dan Penang.

Dilihat dari perkembangan jumlah kunjungan wisman menurut kebangsaan, selama tahun 2018 jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia menurut kebangsaan sebagian besar negara mengalami peningkatan. Negara di kawasan Asia Timur yang diharapkan terus meningkat jumlah wisman yang datang berkunjung ke Indonesia, justru mengalami penurunan yaitu Jepang, Korea, dan Taiwan yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 7,45 persen, 15,20 persen, dan 21,18 persen. Sebagai negara maju di kawasan Asia, Jepang dan Korea tentunya menjadi pasar yang harus diberi perhatian pemerintah. Oleh karena itu kedua negara tersebut menjadi fokus pasar utama

Tabel 9.2 Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Kebangsaan Tahun 2014–2018

Kebangsaan	Wisman (Orang)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Malaysia	1 418 256	1 431 728	1 541 197	2 121 888	2 503 344
Singapura	1 559 044	1 594 102	1 515 701	1 554 119	1 768 744
J a p a n	505 175	528 606	545 392	573 310	530 573
Korea, Rep.	352 004	375 586	386 789	423 191	358 885
Taiwan	220 328	223 478	252 849	264 278	208 317
Tiongkok	1 052 705	1 249 091	1 556 771	2 093 171	2 139 161
Australia	1 145 576	1 090 025	1 302 292	1 256 927	1 301 478
Amerika Serikat	246 397	269 062	316 782	344 766	387 856
Jerman	184 463	201 202	243 873	267 823	274 166
Belanda	168 494	172 371	200 811	210 426	209 978
Inggris	244 594	286 806	352 017	378 131	392 112
Lainnya	2 338 375	2 808 718	3 304 801	4 551 769	5 735 691
Jumlah	9 435 411	10 230 775	11 519 275	14 039 799	15 810 305

Sumber : Statistik Indonesia, 2019

pariwisata Indonesia. Pada tahun 2018 wisman dari Jepang yang berkunjung ke Indonesia sudah mencapai 530.573 orang, wisman dari Korea tercatat sebanyak 358.885 orang dan wisman dari Taiwan sebanyak 208.317 orang.

Akomodasi

Salah satu sarana pendukung berkembangnya sektor pariwisata yaitu akomodasi. Akomodasi yang dimaksudkan dengan sektor pariwisata yaitu akomodasi untuk tempat penginapan/hotel dan penyediaan makan dan minum bagi para wisatawan. Menurut Setzer Munavizt (2009) akomodasi dalam pariwisata yaitu sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang ketika melakukan kegiatan wisata sebagai tempat untuk menginap atau tinggal sementara selama bepergian. Akomodasi yang dimaksud dapat berupa tempat untuk menginap dan beristirahat, mandi, makan, minum serta menikmati jasa pelayanan lainnya yang telah disediakan. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM. 37/PW.304/MPPT-86 tanggal 7 Juni 1986, “akomodasi adalah wahana untuk menyediakan pelayanan jasa penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya”.

Jenis akomodasi yang sering dikenal dengan tempat penginapan/hotel. Pada tahun 2018 jumlah usaha penyedia akomodasi di Indonesia tercatat sebanyak 28.230 usaha dengan jumlah kamar tersedia mencapai 712.202 kamar. Hal ini berarti dalam waktu dua tahun terjadi penambahan sebanyak 9.401 usaha dan 185.026 kamar atau masing-masing mengalami peningkatan sebesar 49,93 persen dan 35,10 persen dibandingkan tahun 2016. Dari usaha akomodasi tersebut, 3.314 usaha atau sekitar 11,74 persen adalah hotel-hotel yang diklasifikasikan sebagai hotel berbintang dengan kamar sebanyak 314.051 kamar. Jumlah hotel berbintang tahun 2018 ini bertambah sebanyak 927 usaha dibandingkan tahun 2016, atau meningkat sekitar 38,84 persen. Penambahan

Tabel 9.3 Banyaknya Usaha, Kamar, dan Tempat Tidur pada Usaha Akomodasi Dirinci Menurut Klasifikasi Akomodasi Tahun 2016 dan 2018

Klasifikasi Akomodasi	Usaha		Kamar		Tempat Tidur	
	2016	2018	2016	2018	2016	2018
Berbintang	2 387	3 314	233 007	314 051	346 959	454 611
- Bintang 5	183	210	39 118	39 918	55 035	55 621
- Bintang 4	453	682	68 425	95 201	102 454	141 034
- Bintang 3	839	1 302	72 951	110 965	110 268	158 930
- Bintang 2	528	745	34 596	51 890	52 262	75 575
- Bintang 1	384	375	17 917	16 077	26 940	23 451
Akomodasi lainnya	16 442	24 916	294 169	398 151	428 284	589 701
- Melati	10 149	11 981	233 390	277 508	345 919	416 548
- Jasa Akomodasi Lainnya	6 293	12 935	60 779	120 643	82 365	173 153
Jumlah	18 829	28 230	527 176	712 202	775 243	1 044 312

Catatan : Data Tahun 2017 Bergabung Dengan Kegiatan Sensus Ekonomi
Sumber : Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia, 2016 dan 2018

jumlah usaha ini salah satunya adalah karena adanya perubahan status dari hotel non bintang menjadi hotel berbintang dan ada pembangunan hotel berbintang yang baru. Sementara itu usaha akomodasi lainnya tercatat sebanyak 24.916 usaha dengan jumlah kamar sebanyak 398.151 kamar.

Hotel bintang tiga merupakan hotel berbintang yang jumlahnya terbanyak, dimana pada tahun 2018 jumlah usaha mencapai sebanyak 1.302 usaha dengan jumlah kamar sebanyak 110.965 kamar. Tertinggi berikutnya adalah hotel bintang dua yang jumlahnya mencapai 745 usaha dengan jumlah kamar sebanyak 51.890 kamar. Urutan ketiga adalah hotel bintang empat yaitu sebanyak 682 usaha dengan jumlah kamar sebanyak 95.201 kamar. Sementara itu, usaha akomodasi lainnya sebagian besar adalah hotel dengan klasifikasi melati. Pada tahun 2018 jumlah hotel dengan klasifikasi melati sebanyak 11.981 usaha dengan jumlah kamar sebanyak 277.508 kamar, kemudian jasa akomodasi lainnya sebanyak 12.935 usaha dengan jumlah kamar sebanyak 120.643 kamar.

**Tabel 9.4 Banyaknya Usaha, Kamar, dan Tempat Tidur pada Hotel Berbintang
Dirinci Menurut Provinsi Tahun 2016 dan 2018**

Provinsi	Usaha		Kamar		Tempat Tidur	
	2016	2018	2016	2018	2016	2018
Aceh	20	21	1 503	1 603	2 579	2 654
Sumatera Utara	116	124	10 732	10 296	16 418	15 509
Sumatera Barat	61	74	3 653	4 493	6 015	7 717
Riau	58	87	5 206	6 988	7 832	9 802
Jambi	31	37	2 187	2 461	2 885	3 780
Sumatera Selatan	64	76	4 781	6 161	6 800	8 811
Bengkulu	9	9	523	538	786	845
Lampung	18	19	1 954	1 997	2 847	2 477
Kep. Bangka Belitung	42	46	2 528	2 927	3 653	4 426
Kepulauan Riau	88	132	11 393	13 756	15 836	19 425
DKI. Jakarta	232	326	39 806	46 899	55 293	60 849
Jawa Barat	314	463	29 053	43 034	46 013	62 725
Jawa Tengah	217	291	17 246	23 516	26 878	33 530
DI. Yogyakarta	94	143	9 256	14 328	14 432	23 477
Jawa Timur	158	231	17 014	26 585	26 393	38 540
Banten	58	113	5 939	10 607	8 844	15 507
B a l i	317	551	33 599	52 927	49 549	78 801
Nusa Tenggara Barat	75	83	4 525	5 678	6 721	8 328
Nusa Tenggara Timur	23	24	1 646	1 830	2 652	2 541
Kalimantan Barat	36	41	3 821	4 269	5 264	6 204
Kalimantan Tengah	12	13	1 051	968	1 548	1 496
Kalimantan Selatan	49	52	3 584	4 075	5 254	6 488
Kalimantan Timur	51	63	5 468	6 438	8 048	9 293
Kalimantan Utara	10	1	461	81	710	113
Sulawesi Utara	35	35	2 576	3 072	3 752	3 484
Sulawesi Tengah	8	16	766	1 492	1 182	2 361
Sulawesi Selatan	93	139	6 475	10 418	9 420	15 757
Sulawesi Tenggara	18	19	1 295	1 439	1 959	2 122
Gorontalo	8	8	471	535	750	804
Sulawesi Barat	7	5	374	164	587	260
Maluku	22	22	1 110	1 193	1 566	1 865
Maluku Utara	3	2	313	116	492	116
Papua Barat	15	16	1 014	980	1 477	1 348
Papua	25	32	1 684	2 187	2 524	3 156
Indonesia	2 387	3 314	233 007	314 051	346 959	454 611

Catatan : Data Tahun 2017 Bergabung Dengan Kegiatan Sensus Ekonomi

Sumber : Statistik Hotel dan Akomodasi lainnya di Indonesia, 2016 dan 2018

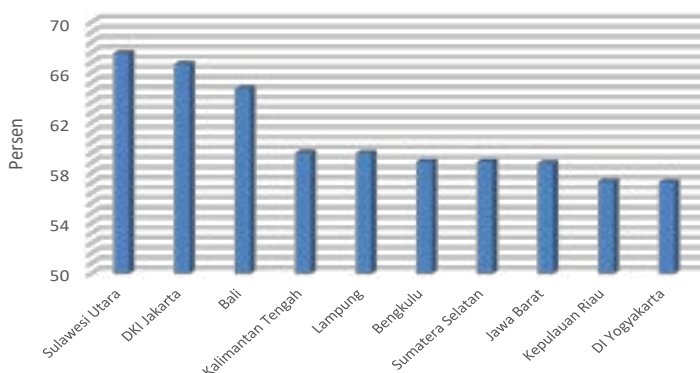
Dari seluruh usaha akomodasi, banyaknya tempat tidur yang disediakan dari seluruh usaha akomodasi berjumlah 1.044.312 tempat tidur. Tempat tidur yang tersedia dirinci sebagai berikut, sebanyak 454.611 tempat tidur atau 43,53 persen disediakan oleh hotel-hotel berbintang dan 416.548 tempat tidur atau 39,89 persen oleh hotel-hotel melati serta 173.153 tempat tidur atau 16,58 persen tersedia pada usaha jenis jasa akomodasi lainnya.

Jika ditinjau menurut provinsi di Indonesia, yang memiliki usaha akomodasi untuk hotel berbintang yang terbanyak adalah Provinsi Bali dan Jawa Barat diikuti selanjutnya Provinsi DKI Jakarta. Demikian juga untuk banyaknya fasilitas kamar yang tersedia. Di Provinsi Bali, jumlah kamar yang tersedia pada akomodasi sebanyak 52.927 kamar atau 16,85 persen dari seluruh kamar hotel berbintang. Akomodasi yang berada pada urutan selanjutnya adalah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dimana masing-masing memiliki kamar sebanyak 46.899 kamar (14,93 persen) dan 43.034 kamar (13,70 persen).

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan sektor pariwisata di suatu daerah yaitu dengan melihat tingkat penghunian kamar dari tempat penginapan baik hotel bintang maupun non bintang di tempat tujuan wisata. Tingkat penghunian kamar dipengaruhi oleh fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh penyedia akomodasi. Semakin lengkap fasilitas yang diberikan dan pelayannya memuaskan bagi wisatawan yang menginap akan menarik para wisatawan untuk berkunjung kembali dan merasa betah untuk menginap lebih lama di usaha akomodasi tersebut. Oleh karena itu, akomodasi yang baik dapat meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu tempat tujuan wisata.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Indonesia secara total selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu 2014-2018. Selama kurun waktu tersebut TPK hotel berbintang selalu berada di atas 50 persen. Pada tahun 2014 TPK hotel berbintang mencapai 52,56 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 sebesar 58,75 persen.

Gambar 9.2
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada Hotel Berbintang di 10 Provinsi Terbesar (persen) Tahun 2018



Peningkatan TPK hotel berbintang ini tidak terlepas dari meningkatkan TPK hotel berbintang di sebagian besar provinsi di Indonesia. Tercatat TPK Hotel berbintang di 20 provinsi pada tahun 2018 mengalami peningkatan, sementara 14 provinsi lainnya mengalami penurunan. Peningkatan TPK hotel berbintang tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu masing-masing sebesar 36,11 persen dan 22,71 persen. Sementara dari 14 provinsi yang mengalami penurunan TPK hotel berbintang, yang tertinggi penurunannya terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah turun sebesar 21,96 persen, dan penurunan terendah terjadi di Provinsi Banten sebesar 0,66 persen.

Tabel 9.5 juga menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tercatat ada sebanyak 8 provinsi dengan angka TPK hotel berbintang di atas angka nasional dan sisanya sebanyak 26 provinsi yang mencatatkan angka TPK hotel berbintang di bawah angka nasional. Pada tahun yang sama tiga provinsi memiliki angka TPK tertinggi tercatat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 67,51 persen, Provinsi DKI Jakarta sebesar 66,65 persen dan Provinsi Bali sebesar

**Tabel 9.5 Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang Menurut Provinsi (persen)
Tahun 2014–2018**

Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018 *
Aceh	50,56	47,95	46,03	48,58	43,58
Sumatera Utara	50,59	56,12	54,19	55,22	56,87
Sumatera Barat	52,65	49,85	54,32	55,03	56,18
Riau	43,42	45,09	48,51	47,24	48,71
Jambi	46,58	44,08	48,20	46,10	43,44
Sumatera Selatan	46,90	51,57	52,81	60,16	58,88
Bengkulu	48,71	53,20	60,45	58,35	58,91
Lampung	57,11	48,83	50,43	56,08	59,55
Kep. Bangka Belitung	40,19	39,21	39,97	39,40	40,02
Kepulauan Riau	48,18	49,42	49,41	52,84	57,33
DKI Jakarta	58,27	62,47	57,89	67,66	66,65
Jawa Barat	48,60	46,20	55,14	56,80	58,76
Jawa Tengah	46,89	46,13	46,76	49,17	45,49
DI Yogyakarta	57,28	59,38	58,55	59,06	57,24
Jawa Timur	50,81	55,56	59,57	56,54	55,82
Banten	48,77	57,31	53,88	54,47	54,11
Bali	59,88	61,08	61,74	64,24	64,72
Nusa Tenggara Barat	49,23	41,84	42,75	47,91	43,85
Nusa Tenggara Timur	40,81	46,44	53,65	54,67	56,62
Kalimantan Barat	49,48	49,33	51,11	47,43	53,34
Kalimantan Tengah	57,74	54,84	55,76	57,74	59,59
Kalimantan Selatan	50,66	46,55	43,10	48,57	54,99
Kalimantan Timur	56,73	57,14	50,06	50,39	51,34
Kalimantan Utara ¹	...	51,58	41,31	31,60	43,01
Sulawesi Utara	53,42	59,69	71,12	62,62	67,51
Sulawesi Tengah	53,82	59,29	59,07	60,56	47,26
Sulawesi Selatan	48,79	46,09	44,68	45,75	50,75
Sulawesi Tenggara	37,63	39,24	40,43	39,37	48,31
Gorontalo	41,98	40,63	47,64	46,19	46,90
Sulawesi Barat	31,35	38,65	45,71	38,41	46,67
Maluku	38,35	37,49	37,50	40,20	39,21
Maluku Utara	44,06	41,44	45,86	51,00	46,13
Papua Barat	49,38	42,85	49,95	59,03	54,20
Papua	49,18	52,29	60,80	56,68	53,28
Indonesia	52,56	53,92	54,29	56,69	58,75

Catatan : * Angka sementara

¹ Data tahun 2014 masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur

Sumber : Statistik Indonesia 2019

64,72 persen, sedangkan Provinsi Maluku merupakan provinsi yang memiliki angka TPK hotel berbintang terendah yaitu sebesar 39,21 persen.

Indikator lain untuk mengetahui perkembangan sektor akomodasi adalah rata-rata lama menginap baik bagi tamu asing maupun tamu domestik. Selama periode 2016-2018 rata-rata lama menginap baik tamu asing maupun domestik pada hotel berbintang mengalami peningkatan. Jika dilihat secara nasional rata-rata lama menginap tamu pada hotel berbintang pada tahun 2016 mencapai 1,82 hari, kemudian naik pada tahun 2017 menjadi 1,91 hari. Kemudian pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan rata-rata lama menginap tamu pada hotel berbintang menjadi 1,98 hari.

Pada tahun 2018, jika dilihat menurut provinsi rata-rata lama menginap tamu pada hotel berbintang yang di atas angka nasional terdapat di 7 provinsi,

Tabel 9.6 Rata-Rata Lama Menginap Tamu Pada Hotel Bintang Menurut Provinsi (hari) Tahun 2014–2018

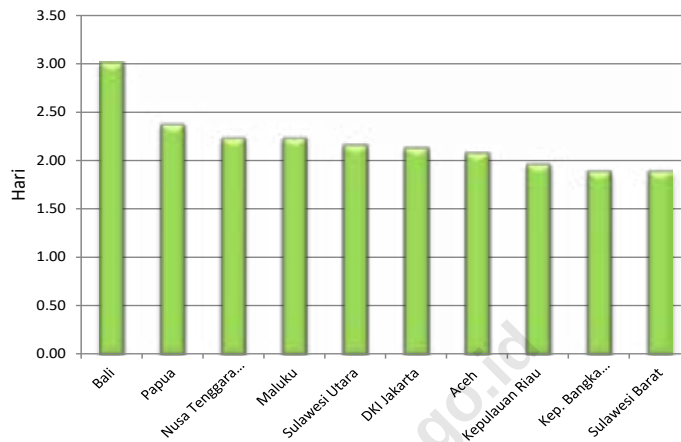
Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018 *
Aceh	2,32	1,90	1,69	1,99	2,09
Sumatera Utara	1,76	1,66	1,56	1,77	1,64
Sumatera Barat	1,92	1,45	1,46	1,49	1,56
Riau	1,96	1,59	1,69	1,70	1,53
Jambi	1,99	1,75	1,85	1,80	1,64
Sumatera Selatan	2,09	1,87	1,72	1,66	1,67
Bengkulu	1,96	1,86	1,50	1,67	1,80
Lampung	2,06	1,49	1,70	1,51	1,52
Kep. Bangka Belitung	2,02	1,85	1,80	1,83	1,90
Kepulauan Riau	2,05	1,88	1,82	2,17	1,97
DKI Jakarta	2,25	2,05	1,84	1,93	2,14
Jawa Barat	1,67	1,57	1,78	1,77	1,73
Jawa Tengah	1,56	1,51	1,43	1,50	1,36
DI Yogyakarta	1,90	1,70	1,61	1,75	1,66
Jawa Timur	1,90	1,87	1,68	1,77	1,66
Banten	1,62	1,67	1,60	1,54	1,47
Bali	3,47	3,06	2,91	2,99	3,02
Nusa Tenggara Barat	2,94	2,23	1,75	2,09	2,24
Nusa Tenggara Timur	2,13	2,03	2,06	1,99	1,70
Kalimantan Barat	1,85	1,75	1,68	1,73	1,79
Kalimantan Tengah	1,77	1,66	1,51	1,57	1,56
Kalimantan Selatan	1,70	1,32	1,50	1,62	1,72
Kalimantan Timur	2,10	2,04	1,59	1,81	1,83
Kalimantan Utara ¹	...	1,96	1,49	1,25	1,36
Sulawesi Utara	2,50	1,96	2,16	2,16	2,17
Sulawesi Tengah	1,86	2,17	1,93	1,98	1,83
Sulawesi Selatan	1,84	1,97	1,60	1,88	1,89
Sulawesi Tenggara	1,87	1,70	1,66	1,82	1,85
Gorontalo	1,99	1,45	1,33	1,59	1,69
Sulawesi Barat	1,38	1,47	1,56	1,41	1,90
Maluku	2,05	2,02	2,02	2,18	2,24
Maluku Utara	2,46	2,34	2,39	1,67	1,55
Papua Barat	2,33	2,30	2,18	2,32	1,85
Papua	2,52	3,10	1,96	2,27	2,38
Indonesia	2,15	1,94	1,82	1,91	1,98

Catatan : * Angka sementara

¹ Data tahun 2014 masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur

Sumber : Statistik Indonesia 2019

Gambar 9.3
Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Indonesia pada Hotel
Berbintang di 10 Provinsi Terbesar (persen) Tahun 2018



sementara 27 provinsi lainnya masih berada di bawah angka nasional. Bali masih memiliki daya tarik pariwisata yang sangat memikat para wisatawan. Pada tahun 2018, rata-rata lama tamu menginap pada hotel berbintang di Provinsi Bali mencapai 3,02 hari, atau tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Selanjutnya, rata-rata lama tamu menginap tertinggi selanjutnya di Provinsi Papua mencapai 2,38 hari dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Maluku yang sama-sama mencapai 2,24 hari.

KESENJANGAN UPAH ANTAR GENDER SEMAKIN MELEBAR

RATA-RATA UPAH PEKERJA¹ JUUTA RUPIAH/BULAN



Catatan: Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai
dan pekerja bebas pertanian/nonpertanian

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek dalam pengukuran keberhasilan pembangunan nasional. Kemajuan ekonomi yang baik tergambar dengan pertumbuhan yang diiringi dengan pembangunan yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tersedia. Seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkau akses yang luas terhadap kesempatan dan kemakmuran ekonomi. Pembangunan inklusif juga didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai peningkatan laju pertumbuhan dan perluasan skala ekonomi, serta penciptaan lapangan investasi yang merata dan peningkatan kesempatan kerja yang produktif (www.indonesiadevelopmentforum.com).

Pembangunan yang inklusif ini tentunya harus dilakukan pada aspek ketenagakerjaan untuk mencapai Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Penciptaan lapangan kerja dapat dilaksanakan melalui informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, dan perluasan kesempatan kerja (padat karya, wirausaha baru, Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan inkubasi bisnis). Ketenagakerjaan Indonesia juga harus berkontribusi dan berperan dalam meningkatkan peluang berbisnis dan daya saing dalam rangka perkembangan investasi. Dengan begitu, perekonomian akan terus tumbuh diiringi dengan terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat (www.kemnaker.go.id).

Tenaga kerja memiliki peranan penting sebagai pelaku utama dalam pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan, pembangunan ketenagakerjaan perlu dilaksanakan melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, dan yang lainnya. Tujuan pembangunan ketenagakerjaan ini juga tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), tepatnya dalam Tujuan 8 yang berbunyi “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua”. Pembangunan harus mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta mendorong formalisasi.

Angkatan Kerja di Indonesia

Investasi sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam pembangunan perekonomian. Sumber daya manusia harus berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. SDM yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi dapat tergambarkan dari angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Jumlah angkatan kerja dapat mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Di Indonesia, ketersediaan penduduk yang mampu aktif dan produktif dalam kegiatan ekonomi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, jumlah angkatan kerja di Indonesia tercatat sebanyak 122,38 juta orang dan meningkat menjadi 131,01 juta orang pada tahun 2018. Jumlah angkatan kerja rata-rata meningkat sebesar 2,30

persen setiap tahunnya selama tahun 2015-2018. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja dapat menjadi modal pembangunan Indonesia. Ketersediaan penduduk yang produktif akan mendorong perekonomian negara.

Namun demikian, jumlah angkatan kerja yang terus meningkat harus diiringi dengan persediaan lapangan kerja yang memadai. Dengan demikian, tenaga kerja akan terserap secara optimal dan dapat mendorong perekonomian negara dapat terdorong dengan cepat. Sebaliknya, tantangan terhadap pertumbuhan angkatan kerja yang direspon dengan tidak tepat dapat menjadi bencana bagi negara. Minimnya kesempatan kerja akan menambah jumlah pengangguran. Banyaknya pengangguran tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan kondisi perekonomian. Hal tersebut tentu akan menghambat pertumbuhan perekonomian negara.

Dari tahun ke tahun, kaum laki-laki mendominasi angkatan kerja di Indonesia. Pada tahun 2018, perbandingan angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan adalah 3:2. Meskipun demikian, secara persentase, angkatan kerja yang berjenis kelamin perempuan terus meningkat yaitu dari 37,24 persen pada tahun 2015 menjadi 38,63 persen pada tahun 2018. Peningkatan tersebut menunjukkan besarnya peluang perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan negara. Hal ini dapat menjadi langkah awal untuk menghapuskan ketimpangan gender dalam perekonomian.

Angkatan kerja terbagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran. Jumlah penduduk yang bekerja juga terus meningkat, yaitu dari 114,82 juta orang pada tahun 2015 menjadi 124 juta orang pada tahun 2018.

Tabel 10.1 Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2015– 2019

Tahun	Jenis Kelamin	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
2015 (Agustus)	L	72.150.588	4.660.004	76.810.592	16.053.422
	P	42.668.611	2.900.818	45.569.429	47.669.474
	L+P	114.819.199	7.560.822	122.380.021	63.720.896
2016 (Agustus)	L	72.943.627	4.411.543	77.355.170	17.016.982
	P	45.468.346	2.620.232	48.088.578	46.635.992
	L+P	118.411.973	7.031.775	125.443.748	63.652.974
2017 (Agustus)	L	74.736.546	4.375.251	79.111.797	16.770.866
	P	46.285.877	2.665.072	48.950.949	47.245.804
	L+P	121.022.423	7.040.323	128.062.746	64.016.670
2018 (Agustus)	L	76.059.452	4.339.969	80.399.421	16.829.978
	P	47.945.498	2.660.722	50.606.220	46.943.822
	L+P	124.004.950	7.000.691	131.005.641	63.773.800
2019 (Februari)	L	77.321.029	4.259.666	81.580.695	16.495.978
	P	52.045.163	2.557.174	54.602.337	43.783.755
	L+P	129.366.192	6.816.840	136.183.032	60.279.733

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

Penduduk yang bekerja ini juga didominasi oleh kaum laki-laki. Pada tahun 2018, jumlah penduduk bekerja yang berjenis kelamin laki-laki ada sebanyak 76,06 juta orang atau 61,34 persen dari seluruh penduduk yang bekerja. Di tahun yang sama, penduduk yang bekerja dan berjenis kelamin perempuan ada sebanyak 47,94 juta orang.

Sementara itu, jumlah pengangguran cenderung mengalami penurunan selama tahun 2015-2018. Pada tahun 2015, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat sebesar 7,56 juta orang dan menurun menjadi 7 juta orang pada tahun 2018. Angka tersebut menunjukkan rata-rata penurunan jumlah pengangguran sebesar 2,53 persen setiap tahunnya. Walaupun demikian, jumlah pengangguran sedikit meningkat pada tahun 2017, yaitu meningkat sebesar 8.548 orang menjadi 7,04 juta orang dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 7,03 juta orang. Petambahan jumlah pengangguran dikarenakan peningkatan jumlah angkatan kerja di Indonesia.

Dominasi kaum laki-laki pada angkatan kerja juga terjadi pada pengangguran. Jumlah pengangguran yang berjenis kelamin laki-laki 1,6 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan yang berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2018, jumlah pengangguran berjenis kelamin laki-laki ada sebanyak 4,34 juta orang, sedangkan jumlah pengangguran yang berjenis kelamin perempuan ada sebanyak 2,66 juta orang.

Di sisi lain, jumlah bukan angkatan kerja cenderung fluktuatif selama tahun 2015-2018. Pada tahun 2018, jumlah bukan angkatan kerja tercatat sebesar 63,77 juta orang. Berbeda dengan angkatan kerja, kaum perempuan sangat mendominasi pada bukan angkatan kerja. Pada tahun 2018, jumlah bukan angkatan kerja yang berjenis kelamin perempuan ada sebanyak 46,94 juta orang atau sebesar 73,61 persen dari total bukan angkatan kerja. Hal ini menunjukkan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lain yang bukan bekerja, lebih banyak diduduki oleh perempuan.

Keberhasilan kebijakan pemerintah dalam dunia ketenagakerjaan dapat tergambar dari beberapa indikator ketenagakerjaan. Indikator tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Ketiga indikator tersebut disajikan juga berdasarkan beberapa disagregasi, yaitu jenis kelamin dan klasifikasi daerah tempat tinggal. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kondisi ketenagakerjaan untuk populasi tertentu. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil kebijakan khusus.

Dalam lima tahun terakhir, TPAK di Indonesia meningkat secara perlahan. Pada tahun 2015, TPAK di Indonesia tercatat sebesar 65,76 persen dan meningkat menjadi 67,26 persen pada tahun 2018. Peningkatan partisipasi angkatan kerja ini menandakan semakin besarnya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang dapat memproduksi barang dan jasa atau melakukan kegiatan perekonomian. Pada Februari 2019, TPAK juga meningkat menjadi 69,32 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat 6 sampai 7 orang dari 10 penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang berpotensi aktif secara ekonomi.

Tabel 10.2 Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin, 2015–2019

Jenis Kelamin	2015 (Agustus)	2016 (Agustus)	2017 (Agustus)	2018 (Agustus)	2019 (Februari)
TPAK					
Laki-Laki	82,71	81,97	82,51	82,69	83,18
Perempuan	48,87	50,77	50,89	51,88	55,50
Total	65,76	66,34	66,67	67,26	69,32
TPT					
Laki-Laki	6,07	5,70	5,53	5,40	5,22
Perempuan	6,37	5,45	5,44	5,26	4,68
Total	6,18	5,61	5,50	5,34	5,01
TKK					
Laki-Laki	93,93	94,30	94,47	94,60	94,78
Perempuan	93,63	94,55	94,56	94,74	95,32
Total	93,82	94,39	94,50	94,66	94,99

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan kerja di Indonesia, BPS

Berdasarkan jenis kelamin, partisipasi angkatan kerja laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan partisipasi angkatan kerja perempuan. Pada tahun 2015, TPAK laki-laki tercatat sebesar 82,71 persen, sedangkan TPAK perempuan tercatat sebesar 48,87 persen. Meski demikian, perbedaan tersebut semakin lama semakin menyempit. Hingga tahun 2018, TPAK laki-laki tercatat sebesar 82,69 persen, sedangkan TPAK perempuan tercatat sebesar 51,88 persen.

Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan disebabkan oleh peran perempuan dalam rumah tangga. Faktor kultural dimana perempuan adalah orang yang bertanggung jawab penuh dalam pekerjaan domestik menjadikan perempuan cenderung sulit dalam membagi waktu untuk bekerja dan mengurus rumah tangga. Beban ganda yang ditanggung oleh kaum perempuan dewasa tersebut menjadikan mereka harus memilih antara berkarir dan mengurus rumah tangga. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya jumlah perempuan yang termasuk ke dalam golongan bukan angkatan kerja. Kondisi ini menjadi salah satu kendala ketenagakerjaan yang seharusnya merata bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kajian untuk memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan (www.tribunnews.com, 2019).

Kontribusi kaum perempuan dalam kegiatan perekonomian perlahan semakin membesar. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pengangguran perempuan yang terus menurun bahkan lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran laki-laki. Pada tahun 2015, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan sebesar 6,37 persen dan menurun menjadi 5,26 persen pada tahun 2018 dan terus menurun hingga 4,68 persen pada Februari 2019. Sementara itu, TPT laki-laki pada tahun 2018 tercatat sebesar 5,40 persen dan hanya mengalami sedikit penurunan menjadi 5,22 persen pada Februari 2019.

Perempuan memiliki peluang dan potensi untuk berkontribusi yang lebih besar kepada perekonomian Indonesia. Peran perempuan yang turut penting dalam pekerjaan domestik, dunia usaha merupakan salah satu pilihan bagi kaum perempuan untuk mereka yang ingin tetap bekerja. Dalam Rapat Kerja Nasional Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) ke-28 tahun 2018, Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyampaikan bahwa dari 52 juta pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia, 60 persen diantaranya dijalankan oleh perempuan. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, salah satunya melalui peningkatan kemampuan pengusaha perempuan. Pelaku usaha perempuan harus mampu dalam menghadapi perkembangan dunia usaha. Pemerintah dan para pemangku kebijakan perlu bersinergi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan dengan memperluas pelaku usaha, meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha, memperkuat akses permodalan dan usaha (www.merdeka.com, 2018).

Secara keseluruhan, tingkat pengangguran di Indonesia terus mengalami penurunan TPT di Indonesia tercatat sebesar 6,18 persen (2015) menurun menjadi 5,61 persen (2016), kemudian menurun menjadi 5,50 persen (2017), dan menurun hingga 5,34 persen (2018). Penurunan tingkat pengangguran ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Dengan peningkatan pasokan tenaga kerja yang terus menerus bertambah, pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, tingkat pengangguran mampu dikontrol dan ditekan.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, selama tahun 2015 hingga Desember 2018, lapangan kerja baru telah tercipta sebanyak 10.340.690 orang. Hal ini menunjukkan bahwa target penciptaan 10 juta lapangan kerja baru pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2015-2019 telah berhasil dicapai. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penciptaan lapangan kerja baru, salah satunya menciptakan dua juta lapangan kerja baru pada tahun 2019. Penciptaan lapangan kerja dilaksanakan melalui informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri serta perluasan kesempatan kerja (padat karya, wirausaha baru, Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan inkubasi bisnis) (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2019).

Kemampuan penyerapan tenaga kerja juga dapat terlihat dari Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Selama tahun 2015-2018, TKK di Indonesia hanya meningkat sebesar 0,84 poin persentase, yaitu dari 93,82 persen (2015) menjadi 94,66 persen (2018). Angka tersebut berarti bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja, 94 sampai 95 orang diantaranya telah terserap dalam pasar tenaga kerja dan mendapatkan pekerjaan. Peningkatan tingkat kesempatan kerja terus terjadi hingga Februari 2019 yang mencapai 94,99 persen. Hal ini menandakan semakin besarnya peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia pun semakin membaik.

Peningkatan tingkat kesempatan kerja ini juga terjadi baik pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Selama tahun 2015-2018, TKK laki-laki naik sebesar 0,67 poin persentase, sedangkan TKK perempuan naik sebesar 1,11 poin persentase. Fakta tersebut menandakan bahwa pertumbuhan peluang kaum perempuan untuk mendapatkan pekerjaan lebih cepat dibandingkan laki-laki. Kesenjangan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan pun tidak terlihat secara nyata. Ini tentu menjadi salah satu bukti nyata adanya kesetaraan gender untuk berperan serta dalam kegiatan perekonomian.

Tabel 10.3 Indikator Ketenagakerjaan Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2015–2019

Daerah Tempat Tinggal	2015 (Agustus)	2016 (Agustus)	2017 (Agustus)	2018 (Agustus)	2019 (Februari)
TPAK					
Perkotaan	63,88	63,94	64,83	65,21	67,26
Perdesaan	67,95	69,21	68,92	69,84	71,97
Jumlah	65,76	66,34	66,67	67,26	69,32
TPT					
Perkotaan	7,31	6,60	6,79	6,45	6,30
Perdesaan	4,93	4,51	4,01	4,04	3,45
Jumlah	6,18	5,61	5,50	5,34	5,01
TKK					
Perkotaan	92,69	93,40	93,21	93,55	93,70
Perdesaan	95,07	95,49	95,99	95,96	96,55
Jumlah	93,82	94,39	94,50	94,66	94,99

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

Selanjutnya, analisis ketenagakerjaan juga dapat dilihat berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal. Persentase penduduk usia kerja yang berpotensi aktif secara ekonomi di wilayah perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, TPAK di perkotaan tercatat sebesar 65,21 persen, sedangkan TPAK di perdesaan tercatat sebesar 69,84 persen. Lebih besarnya TPAK perdesaan ini tentu menjadi sebuah peluang dalam peningkatan perekonomian perdesaan. Akan tetapi, peluang tersebut tentu harus dimanfaatkan dengan baik dengan meningkatkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki.

Pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang besar di perdesaan menjadikan potensi yang baik untuk perdesaan. Potensi tersebut harus dioptimalkan dengan baik. Angkatan kerja di perdesaan harus ditingkatkan keterampilan dan pendidikannya sehingga mereka memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Dengan demikian, sumber daya manusia di perdesaan mampu membantu pembangunan dan meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut.

TPAK baik di perkotaan maupun di perdesaan cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015, TPAK di perkotaan tercatat sebesar 63,88 persen meningkat menjadi 63,94 persen (2016), kemudian meningkat menjadi 64,83 persen (2017), dan meningkat hingga 65,21 persen (2018). Sementara itu, TPAK di perdesaan sempat mengalami penurunan pada tahun 2017, yaitu dari 69,21 persen (2016), menjadi 68,92 persen (2017). Namun demikian TPAK di perdesaan meningkat kembali menjadi 69,84 persen pada tahun 2018.

Selanjutnya, pola perkembangan tingkat pengangguran di daerah perkotaan berbeda dengan perdesaan. Selama tahun 2015-2018, TPT di perkotaan cenderung menurun, yaitu dari 7,31 persen (2015) menjadi 6,45 persen (2018). Meski demikian, TPT di perkotaan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2017, yaitu dari 6,60 persen menjadi 6,79 persen. Sementara itu, TPT di perdesaan terus menurun selama tahun 2015-2017, yaitu dari 4,93 persen menjadi 4,01 persen. Akan tetapi, pada tahun 2018, TPT di perdesaan mengalami peningkatan sedikit, yaitu menjadi 4,04 persen.

Peningkatan jumlah pengangguran di perdesaan dikarenakan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian yang menurun. Berdasarkan data BPS, jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian pada tahun 2017 ada sebanyak 35,9 juta orang (29,68 persen), sedangkan jumlah tenaga kerja sektor pertanian pada tahun 2018 menurun menjadi 35,7 juta orang (28,79 persen). Padahal, pertanian adalah sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja di perdesaan. Oleh karena itu pemerintah perlu mencari solusi alternatif untuk menekan kembali pengangguran di perdesaan. Pemerintah pun berupaya mengembangkan sektor pariwisata dan industri kreatif di perdesaan agar mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak (*www.beritasatu.com*, 2018).

Sementara itu, penurunan tingkat pengangguran menandakan tingkat kesempatan kerja yang semakin luas. TTK di daerah perkotaan terus meningkat hingga 93,55 persen pada tahun 2018. Di sisi lain, TTK di daerah perdesaan sedikit menurun menjadi 95,96 persen pada tahun 2018. Angka tersebut berarti bahwa dari 100 angkatan kerja baik di perkotaan maupun di perdesaan, 9 orang diantaranya sudah memiliki pekerjaan dan aktif dalam kegiatan ekonomi.

Variasi Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi

Kebijakan ketenagakerjaan akan berbeda pada setiap wilayah. Ini bergantung pada kondisi ketenagakerjaan pada wilayah tersebut. Kebijakan ketenagakerjaan pada tingkat regional dibuat untuk pembangunan wilayah itu sendiri, karena setiap daerah memiliki potensi ketenagakerjaan yang berbeda-beda. Di samping itu, pembangunan ketenagakerjaan di tiap daerah juga harus dapat menghilangkan kesenjangan antarwilayah yang menjadi salah satu faktor lahirnya kemiskinan.

Pada tahun 2018, provinsi dengan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang berpotensi aktif secara ekonomi terbesar adalah Papua, yaitu mencapai 79,11 persen. Posisi ini masih sama dengan tahun 2017, walaupun pada tahun 2016 Bali menduduki sebagai provinsi dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tertinggi, yaitu sebesar 77,24 persen. Tingginya TPAK di provinsi Papua menandakan bahwa Papua memiliki sumber daya manusia yang cukup. Hal ini menjadi peluang yang sangat baik untuk meningkatkan perekonomian Papua. Akan tetapi, langkah yang dilakukan harus tepat dan responsif disertai dengan usaha peningkatan potensi sumber daya manusia yang ada.

Sementara itu, provinsi yang menduduki posisi dengan TPAK terendah sempat mengalami pergeseran. Selama tahun 2015-2016, provinsi dengan TPAK terendah adalah Jawa Barat, yaitu sebesar 60,34 persen (2015) dan 60,65 persen (2016). Kemudian pada tahun 2017, TPAK terendah bergeser ke Provinsi Maluku, yaitu sebesar 60,18 persen. Posisi ini masih terus bertahan hingga tahun 2018, dimana TPAK di Maluku hanya mencapai 62,90 persen.

Selama tahun 2016-2018, jumlah provinsi dengan TPAK di atas angka nasional mengalami penurunan. Pada tahun 2016, terdapat 22 provinsi dengan TPAK di atas angka nasional. Akan tetapi, pada tahun 2017 jumlah provinsi dengan TPAK di atas angka nasional menurun menjadi 21 provinsi dan masih

tetap berjumlah 21 provinsi hingga tahun 2018. Sebaliknya, jumlah provinsi dengan TPAK di bawah angka nasional ada sebanyak 13 provinsi. Provinsi dengan TPAK yang rendah, terutama yang jauh dari angka nasional perlu mendapatkan perhatian. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan antarprovinsi dalam hal sumber daya manusia.

Selanjutnya, selama empat tahun berturut-turut, Bali merupakan provinsi dengan peluang kesempatan kerja tertinggi di Indonesia. Tingkat Kesempatan Kerja

Tabel 10.4 Indikator Ketenagakerjaan Menurut Provinsi, 2015–2019

Provinsi	TPAK					TKK					TPT				
	2015 (Agt)	2016 (Agt)	2017 (Agt)	2018 (Agt)	2019 (Feb)	2015 (Agt)	2016 (Agt)	2017 (Agt)	2018 (Agt)	2019 (Feb)	2015 (Agt)	2016 (Agt)	2017 (Agt)	2018 (Agt)	2019 (Feb)
Aceh	63,44	64,26	63,74	64,24	66,49	90,07	92,43	93,43	93,64	94,47	9,93	7,57	6,57	6,36	5,53
Sumatera Utara	67,28	65,99	68,88	71,82	74,57	93,29	94,16	94,40	94,44	94,44	6,71	5,84	5,60	5,56	5,56
Sumatera Barat	64,56	67,08	66,29	67,26	70,27	93,11	94,91	94,42	94,45	94,71	6,89	5,09	5,58	5,55	5,29
Riau	63,22	66,25	64,00	65,23	68,26	92,17	92,57	93,78	93,80	94,43	7,83	7,43	6,22	6,20	5,57
Jambi	66,14	67,54	67,52	68,46	67,64	95,66	96,00	96,13	96,14	96,38	4,34	4,00	3,87	3,86	3,62
Sumatera Selatan	68,53	71,59	69,50	68,69	71,44	93,93	95,69	95,61	95,77	96,01	6,07	4,31	4,39	4,23	3,99
Bengkulu	70,67	72,69	69,30	70,06	72,24	95,09	96,70	96,26	96,49	97,50	4,91	3,30	3,74	3,51	2,50
Lampung	65,60	69,61	67,83	69,67	72,09	94,86	95,38	95,67	95,94	96,04	5,14	4,62	4,33	4,06	3,96
Kep.Bangka Belitung	66,71	68,93	66,72	67,79	67,89	93,71	97,40	96,22	96,35	96,61	6,29	2,60	3,78	3,65	3,39
Kepulauan Riau	65,07	65,93	66,41	64,72	68,15	93,80	92,31	92,84	92,88	93,59	6,20	7,69	7,16	7,12	6,41
DKI Jakarta	66,39	66,91	61,97	63,95	68,69	92,77	93,88	92,86	93,76	94,87	7,23	6,12	7,14	6,24	5,13
Jawa Barat	60,34	60,65	63,34	62,92	65,70	91,28	91,11	91,78	91,83	92,27	8,72	8,89	8,22	8,17	7,73
Jawa Tengah	67,86	67,15	69,11	68,56	70,21	95,01	95,37	95,43	95,49	95,78	4,99	4,63	4,57	4,51	4,22
D.I. Yogyakarta	68,38	71,96	71,52	73,37	73,16	95,93	97,28	96,98	96,65	97,14	4,07	2,72	3,02	3,35	2,86
Jawa Timur	67,84	66,14	68,78	69,37	70,02	95,53	95,79	96,00	96,01	96,17	4,47	4,21	4,00	3,99	3,83
Banten	62,24	63,66	62,32	63,49	66,19	90,45	91,08	90,72	91,48	92,42	9,55	8,92	9,28	8,52	7,58
Bali	75,51	77,24	75,24	76,78	76,68	98,01	98,11	98,52	98,63	98,81	1,99	1,89	1,48	1,37	1,19
Nusa Tenggara Barat	66,54	71,57	68,49	65,91	69,62	94,31	96,06	96,68	96,28	96,73	5,69	3,94	3,32	3,72	3,27
Nusa Tenggara Timur	69,25	69,18	69,09	70,17	70,91	96,17	96,75	96,73	96,99	96,90	3,83	3,25	3,27	3,01	3,10
Kalimantan Barat	69,68	69,32	68,63	68,65	71,47	94,85	95,77	95,64	95,74	95,86	5,15	4,23	4,36	4,26	4,14
Kalimantan Tengah	71,11	71,30	67,74	70,03	72,23	95,46	95,18	95,77	95,99	96,67	4,54	4,82	4,23	4,01	3,33
Kalimantan Selatan	69,73	71,57	70,06	70,27	73,98	95,08	94,55	95,23	95,50	96,50	4,92	5,45	4,77	4,50	3,50
Kalimantan Timur	62,39	67,79	63,75	64,99	70,44	92,50	92,05	93,09	93,40	93,34	7,50	7,95	6,91	6,60	6,66
Kalimantan Utara	63,45	62,40	68,24	67,81	69,06	94,32	94,77	94,46	94,78	94,20	5,68	5,23	5,54	5,22	5,80
Sulawesi Utara	61,28	65,11	60,85	63,01	63,52	90,97	93,82	92,82	93,14	94,63	9,03	6,18	7,18	6,86	5,37
Sulawesi Tengah	67,51	72,28	67,14	69,52	70,96	95,90	96,71	96,19	96,57	96,46	4,10	3,29	3,81	3,43	3,54
Sulawesi Selatan	60,94	62,92	60,98	63,02	65,29	94,05	95,20	94,39	94,66	94,58	5,95	4,80	5,61	5,34	5,42
Sulawesi Tenggara	68,35	73,47	68,70	69,78	71,62	94,45	97,28	96,70	96,74	97,04	5,55	2,72	3,30	3,26	2,96
Gorontalo	63,65	67,89	64,78	67,34	72,43	95,35	97,24	95,72	95,97	96,53	4,65	2,76	4,28	4,03	3,47
Sulawesi Barat	70,27	71,90	66,96	68,46	70,69	96,65	96,67	96,79	96,84	98,55	3,35	3,33	3,21	3,16	1,45
Maluku	64,47	64,51	60,18	62,90	63,12	90,07	92,95	90,71	92,73	93,09	9,93	7,05	9,29	7,27	6,91
Maluku Utara	66,43	66,19	63,65	65,21	64,80	93,95	95,99	94,67	95,23	94,91	6,05	4,01	5,33	4,77	5,09
Papua Barat	68,68	70,05	67,47	67,88	69,11	91,92	92,54	93,51	93,70	94,72	8,08	7,46	6,49	6,30	5,28
Papua	79,57	76,70	76,94	79,11	76,04	96,01	96,65	96,38	96,80	96,58	3,99	3,35	3,62	3,20	3,42
Indonesia	65,76	66,34	66,67	67,26	69,32	93,82	94,39	94,50	94,66	94,99	6,18	5,61	5,50	5,34	5,01

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

(TKK) Provinsi Bali pun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, TTK di Bali tercatat sebesar 98,01 persen, lalu meningkat menjadi 98,11 persen pada tahun 2016. Peningkatan TTK di Bali juga terjadi pada tahun 2017 menjadi 98,52 persen dan terus meningkat hingga 98,63 persen pada tahun 2018. Angka TTK tersebut berarti bahwa dari 100 angkatan kerja di Bali, 98 atau 99 orang diantaranya telah memiliki pekerjaan. Dengan TPAK yang berada di atas angka nasional, Bali mampu menyerap tenaga kerja dengan baik. Kondisi ini menunjukkan pemerintah daerah mampu melakukan kebijakan yang tepat dan efektif dan mampu mengiringi pertumbuhan angkatan kerja di Bali.

Di sisi lain, provinsi dengan TTK terendah berganti-ganti dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2015, Maluku dan Aceh adalah provinsi dengan TTK terendah, yaitu 90,07 persen. Kemudian, pada tahun 2016, TTK terendah berpindah ke Provinsi Banten yaitu sebesar 91,08 persen dan pada tahun 2017, TTK terendah bergeser ke daerah timur yaitu Provinsi Maluku (90,71 persen). Akan tetapi, pada tahun 2018, Banten kembali menjadi provinsi dengan TTK terendah yaitu sebesar 91,48 persen.

Tingginya angka pengangguran di Provinsi Banten didorong adanya potensi lapangan kerja yang juga tinggi. Keberadaan kawasan padat industri menjadi daya tarik para pencari kerja untuk bermigrasi ke Banten. Kabupaten Serang merupakan daerah industri dan banyak perusahaan padat modal yang memiliki kebutuhan banyak tenaga kerja. Akan tetapi, tidak semua migran pencari kerja dapat terserap oleh pasar kerja. Perusahaan akan selektif memilih pekerja yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan perusahaan. Tidak terserapnya semua pencari kerja ini menjadi penyebab tingginya angka pengangguran di Banten (*inilahbanten.co.id*, 2018).

Rendahnya Pendidikan Penduduk yang Bekerja

Pembangunan ekonomi yang cepat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pemeran utamanya. Tenaga kerja Indonesia yang berkualitas dapat menjadi modal bagi Indonesia dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional serta daerah. Kualitas tenaga kerja harus dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja. Kemampuan tenaga kerja yang tersedia harus berkompeten dan memenuhi kebutuhan di era revolusi industri 4.0 atau industri digital.

Akan tetapi, kualitas tenaga kerja di Indonesia masih menjadi masalah yang sudah lama. Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup tinggi. Namun dari segi kualitas, tingginya jumlah tenaga kerja tersebut tidak diiringi dengan kualitas yang memadai. Kualitas tenaga kerja di Indonesia masih rendah, dimana sebagian besar penduduk yang bekerja merupakan lulusan sekolah dasar atau lebih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja ini dapat berdampak pada rendahnya produktivitas kerja. Sementara itu, perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi guna menjawab tantangan perkembangan teknologi yang cukup cepat. Hal ini menjadi tantangan yang cukup serius dimana ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran berakibat rendahnya penyerapan tenaga kerja. Pada akhirnya, jumlah pengangguran akan terus meningkat.

Tabel 10.5 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2015–2019

Tingkat Pendidikan	2015 (Agustus)	2016 (Agustus)	2017 (Agustus)	2018 (Agustus)	2019 (Februari)
SD ke bawah	44,27	42,20	42,12	40,69	40,51
SMP	18,03	18,04	17,94	18,08	17,76
SMA	26,69	27,52	27,86	29,05	29,16
Diploma I/II/III	2,69	2,88	2,72	2,78	2,82
Universitas	8,32	9,36	9,36	9,40	9,75

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Nasional, BPS

Sekitar 40 persen penduduk yang bekerja di Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar atau bahkan lebih rendah. Namun demikian, persentase tersebut perlahan menurun dari 44,27 persen pada tahun 2015 menjadi 40,69 persen pada 2018. Selanjutnya, penduduk bekerja berpendidikan SMA atau sederajat merupakan persentase tertinggi kedua, yaitu 29,05 persen pada tahun 2018. Distribusi terbesar ketiga adalah penduduk bekerja lulusan SMP atau sederajat, yaitu sebesar 18,08 persen. Di sisi lain, persentase penduduk bekerja untuk lulusan Diploma I/II/III masih cukup rendah, hanya sebesar 2,78 persen dan untuk lulusan Universitas/Perguruan Tinggi ada sebesar 9,40 persen. Meski demikian, kedua jenjang pendidikan tersebut secara perlahan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Untuk mencapai kualitas yang baik walaupun dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, pemerintah perlu lebih fokus untuk pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu program prioritas pada tahun 2019. Untuk mencapai target yang diinginkan, Kementerian Ketenagakerjaan lebih serius lagi dalam melakukan program masififikasi pelatihan vokasi. Kemnaker melakukan beberapa langkah, yaitu masififikasi pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), pemagangan terstruktur, dan sertifikasi uji kompetensi. Masififikasi pelatihan di BLK melalui program *triple skilling*, yaitu *skilling*, *up-skilling*, dan *re-skilling*. *Skilling* untuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan keterampilan. *Up-skilling* untuk pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan, *re-skilling* untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2019). Dengan adanya pembangunan SDM ini, fenomena bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan maksimal serta penduduk usia produktif memiliki keahlian dan kompetensi yang berdaya saing.

Akibat Transformasi Ekonomi dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Jenis dan lapangan pekerjaan yang tersedia sangat bermacam-macam. Analisis ketenagakerjaan menurut lapangan pekerjaan diperlukan untuk melihat kemampuan daya serap tenaga kerja pada lapangan usaha tersebut. Dari analisis tersebut akan terlihat sektor usaha yang dominan dalam pasar kerja Indonesia dan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

Lapangan pekerjaan pertanian, kehutanan, dan perikanan masih dominan dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Namun, kontribusi lapangan usaha

ini terhadap perekonomian Indonesia bukanlah yang tertinggi. Pada tahun 2018, distribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap produk domestik bruto di Indonesia hanya mencapai 12,81 persen (www.bps.go.id). Kontribusi tersebut merupakan tertinggi ketiga setelah industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini menandakan bahwa penyerapan tenaga kerja yang tinggi di lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak memberikan produktivitas perekonomian yang tinggi pula.

Kemampuan lapangan pekerjaan pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam menyerap tenaga kerja juga perlahan menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, persentase penduduk yang bekerja pada lapangan pekerjaan tersebut adalah 32,88 persen, kemudian menurun menjadi 31,90 persen (2016), lalu menurun menjadi 29,68 persen (2017), dan terus menurun menjadi 28,79 persen (2018). Penurunan penyerapan tenaga kerja pada lapangan pekerjaan tersebut disebabkan adanya transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi adalah proses perubahan struktur perekonomian, dimana adanya pergeseran dari satu sektor ekonomi ke sektor ekonomi lainnya. Pergeseran struktur perekonomian ini ditandai juga dengan perlambatan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) lapangan usaha ini, yaitu dari 3,75 persen pada 2015 menjadi 3,91 persen pada 2018 (www.bps.go.id). Penurunan penyerapan tenaga kerja dan perlambatan pertumbuhan PDB ini menunjukkan menurunnya kehandalan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Tabel 10.6 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2015–2019

Lapangan Pekerjaan	2015 (Agt)	2016 (Agt)	2017 (Agt)	2018 (Agt)	2019 (Feb)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,88	31,90	29,68	28,79	29,46
B. Pertambangan dan Penggalian	1,15	1,24	1,15	1,17	1,06
C. Industri Pengolahan	13,53	13,41	14,51	14,72	14,09
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,22	0,25	0,27	0,24
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23	0,20	0,34	0,38	0,32
F. Konstruksi	7,15	6,74	6,72	6,69	5,89
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,59	18,20	18,57	18,61	18,91
H. Transportasi dan Pergudangan	4,02	4,20	4,18	4,35	4,02
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,56	5,28	5,71	6,18	6,80
J. Informasi dan Komunikasi	0,47	0,58	0,68	0,72	0,73
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,45	1,46	1,42	1,45	1,38
L. Real Estate	0,25	0,30	0,25	0,31	0,26
M,N. Jasa Perusahaan	1,19	1,21	1,37	1,34	1,31
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,51	4,21	3,79	3,78	3,98
P. Jasa Pendidikan	4,88	5,14	4,94	4,89	5,10
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	1,48	1,47	1,49	1,53
R,S,T,U. Jasa lainnya	4,68	4,23	4,96	4,85	4,91

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia (diolah), BPS

Selanjutnya, lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja terbanyak kedua adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha ini pun cukup stabil yaitu sekitar 18 persen selama tahun 2015-2018. Hal ini berarti dari 100 penduduk yang bekerja, 18 atau 19 orang diantaranya bekerja pada lapangan pekerjaan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Penyerapan tenaga kerja tertinggi ketiga selanjutnya adalah industri pengolahan. Pada tahun 2018, lapangan pekerjaan industri pengolahan tercatat sebesar 14,72 persen atau naik sebanyak 1,19 poin persentase dibandingkan tahun 2015.

Kenaikan penyerapan tenaga kerja terbesar ada pada lapangan pekerjaan penyediaan akomodasi dan makan minum. Pada tahun 2015, penduduk yang bekerja pada lapangan pekerjaan tersebut tercatat sebesar 4,56 persen. Kemudian, pada tahun 2018, penyerapan tenaga kerja pada penyediaan akomodasi dan makan minum naik sebesar 1,62 poin persentase, menjadi 6,18 persen. Laju pertumbuhan PDB lapangan usaha ini juga mengalami peningkatan, yaitu dari 4,31 persen (2015) menjadi 5,66 persen (2018). Lapangan pekerjaan ini memiliki eksistensi yang cukup baik. Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016, distribusi usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum ada sebesar 16,72 persen atau tertinggi kedua. Pembangunan di bidang pariwisata juga menjadi salah satu pendorong pertumbuhan usaha ini. Munculnya lapangan kerja baru pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum akan menyerap tenaga kerja yang ada.

Upah Pekerja

Upah adalah dapat berupa uang atau barang yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja sebagai tanda balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Besaran upah memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kinerja pekerja dan kesejahteraan pekerja. Kesesuaian upah akan mendorong pekerja untuk bekerja lebih giat. Selain itu, besaran upah yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari akan menjaga kelangsungan hidup mereka dan menjaminkannya kesejahteraan. Akan tetapi, perusahaan juga memiliki pertimbangan lain dari sisi produksi. Hal ini dikarenakan upah merupakan komponen biaya yang cukup tinggi dalam kegiatan produksi.

Pemerintah telah membuat kebijakan mengenai besaran upah untuk melindungi pekerja dan tetap mempertimbangkan dari sisi perusahaan, yaitu melalui kebijakan upah minimum. Upah minimum adalah sistem pengupahan agar nilai upah yang diterima cukup dan layak untuk menghidupi kehidupan bagi setiap pekerja dan keluarganya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum merupakan standar minimum yang dijadikan acuan oleh pelaku usaha untuk memberikan upah kepada pekerja di lingkungan usahanya. Selain melindungi pekerja, upah minimum juga dapat menjadi alat proteksi bagi perusahaan untuk menjaga produktivitas pekerja.

Secara khusus, kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan

dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Penetapan Upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum, dengan mempertimbangkan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Penghitungan UMP berdasarkan PP 78 merupakan upaya maksimal pemerintah mewujudkan kesejahteraan pada semua pihak yaitu pekerja, pengusaha dan calon pekerja. Kenaikan UMP yang terprediksi memudahkan pengusaha dan dunia usaha untuk menyusun rencana keuangan perusahaan. Dari sisi dunia pekerja, upah akan mengalami kenaikan yang signifikan karena berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi. Kemudian, bagi para pencari kerja, kenaikan upah diupayakan tidak menghambat mereka dalam memperoleh pekerjaan karena lapangan pekerjaannya menyempit sebagai akibat upah terlalu tinggi (*kemnaker.go.id*, 2018).

Berdasarkan Surat Kepala BPS-RI Nomor B-216/BPS/1000/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018, nilai inflasi nasional sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,15 persen. Hasil formulasi upah minimum dengan menggunakan kedua angka tersebut diperoleh persentase kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 persen. Namun berdasarkan data dari Pusdatin Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat beberapa provinsi dengan persentase kenaikan UMP yang lebih dari 8,03 persen, antara lain Nusa Tenggara Barat (10,28 persen), Nusa Tenggara Timur (8,13 persen), Kalimantan Barat (8,04 persen), Kalimantan Tengah (10,00 persen), Sulawesi Barat (8,55 persen), Maluku Utara (8,07 persen), dan Papua Barat (10,03 persen). Hal ini dapat dikarenakan selama ini besaran upah belum memenuhi nilai minimal dari Kebutuhan Hidup Layak di provinsi tersebut. Oleh karena itu, selain berdasarkan formulasi PP 78, penghitungan kenaikan besaran upah pada provinsi-provinsi tersebut menyesuaikan KHL di tiap provinsi tersebut (*www.liputan6.com*, 2018).

Tabel 10.7 Rata-Rata UMP (ribu rupiah) dan Pertumbuhan Rata-Rata UMP (persen), 2008–2019

Tahun	Rata-Rata UMP	Pertumbuhan Rata-Rata UMP (%)
2008	743,17	10,38
2009	841,53	13,24
2010	908,82	8,00
2011	988,83	8,80
2012	1088,90	10,12
2013	1355,33	24,47
2014	1579,56	16,54
2015	1790,34	13,34
2016	1997,82	12,48
2017	2074,15	3,82
2018	2268,87 ^r	9,39
2019	2455,66	8,23

Catatan : ^r Angka revisi

Sumber : Pusditnaker, Kementerian Ketenagakerjaan RI

Rata-rata UMP 2019 untuk 34 provinsi diperoleh sebesar Rp 2,46 juta. Rata-rata UMP 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 8,23 persen. Pertumbuhan rata-rata UMP 2019 ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata UMP 2018 yang sebesar 9,39 persen. Lebih rendahnya pertumbuhan rata-rata UMP ini dikarenakan inflasi 2019 lebih rendah dibandingkan inflasi 2018. Kemudian, provinsi dengan UMP 2019 tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp 3,94 juta. Sementara itu, D.I.Yogyakarta adalah provinsi dengan UMP 2019 terendah, yaitu sebesar Rp 1,57 juta.

Dampak kebijakan pengupahan ini dapat terlihat pula dari rata-rata upah yang diterima oleh pekerja. Berdasarkan data Sakernas, rata-rata upah yang diterima pekerja di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, rata-rata upah pekerja tercatat sebesar Rp 2,28 juta dan meningkat menjadi Rp 2,44 juta pada tahun 2017. Selanjutnya, peningkatan rata-rata upah pekerja terus terjadi hingga menjadi Rp 2,55 juta pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 4,59 persen dibandingkan tahun 2017. Peningkatan upah pekerja juga terjadi baik di perdesaan maupun di perkotaan. Kenaikan upah yang diterima oleh pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan mereka apabila kenaikan upah sebanding dengan kenaikan biaya kebutuhan hidup.

Selanjutnya, berdasarkan daerah tempat tinggal, rata-rata upah yang diterima pekerja perkotaan selalu lebih besar dari yang diterima pekerja perdesaan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, upah yang diterima pekerja

Tabel 10.8 Distribusi Pekerja* Menurut Upah dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2016–2019

Daerah Tempat Tinggal	Upah (Rp)¹				Rata- Rata Upah (Rp)
	< 1 000 000	1 000 000 - 1 499 999	1 500 000 - 1 999 999	2 000 000 +	
Tahun 2016 (Agt)					
Perkotaan	19,38	14,57	14,77	51,28	2 600 683
Perdesaan	33,23	18,55	17,08	31,14	1 734 064
Perkotaan+Perdesaan	24,44	16,02	15,61	43,92	2 284 115
Tahun 2017 (Agt)					
Perkotaan	16,65	12,24	14,00	57,12	2 827 617
Perdesaan	32,81	17,41	16,78	33,00	1 751 981
Perkotaan+Perdesaan	22,44	14,09	14,99	48,48	2 442 499
Tahun 2018 (Agt)					
Perkotaan	14,52	11,37	14,35	59,76	2 941 978
Perdesaan	28,56	16,51	17,93	37,01	1 852 039
Perkotaan+Perdesaan	19,51	13,20	15,62	51,68	2 554 703
Tahun 2019 (Feb)					
Perkotaan	15,80	11,71	14,43	58,06	2 880 202
Perdesaan	29,16	15,91	15,71	39,21	1 925 753
Perkotaan+Perdesaan	20,45	13,17	14,88	51,51	2 548 425

Catatan: *Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian

¹Angka direvisi

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS

di perkotaan mencapai Rp 2,94 juta, sedangkan upah yang diterima pekerja di perdesaan hanya sebesar Rp 1,85 juta. Meski demikian, kesenjangan rata-rata upah pekerja antara perkotaan dan perdesaan sedikit berkurang. Hal ini dapat tergambarkan dari rasio rata-rata upah pekerja perkotaan terhadap rata-rata upah pekerja perdesaan pada tahun 2018 sebesar 1,59 atau menurun dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 1,61.

Perbedaan upah antara perkotaan dan perdesaan perlu mendapat perhatian. Tingginya upah di daerah perkotaan dapat mendorong terjadinya perpindahan penduduk dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan. Fenomena ini akan menjadikan besarnya pertumbuhan jumlah angkatan kerja di perkotaan. Hal ini akan berujung pada kebutuhan lapangan pekerjaan yang meningkat dan tumbuhnya pekerjaan informal atau bahkan meningkatnya jumlah pengangguran.

Kemudian, indikator distribusi pekerja menurut upah dapat menunjukkan persebaran pekerja berdasarkan upah yang diterimanya. Distribusi pekerja yang menerima upah rendah cenderung menurun, sedangkan distribusi pekerja yang menerima upah cukup tinggi cenderung meningkat. Sebagian pekerja telah menerima upah sebesar dua juta rupiah atau lebih. Persentasenya juga terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 43,92 persen (2016) menjadi 48,48 persen (2017), dan terus meningkat hingga 51,68 persen (2018). Sementara itu, persentase pekerja dengan upah kurang dari satu juta rupiah menurun dari 10,59 persen (2016) menjadi 8,90 persen (2018). Kondisi ini menunjukkan kesejahteraan pekerja yang mulai meningkat.

Peningkatan kesejahteraan pekerja juga terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pekerja di perkotaan yang menerima upah Rp 2 Juta atau lebih meningkat dari 51,28 persen (2016) menjadi 59,76 persen (2018), sedangkan pekerja di perdesaan yang menerima upah dua juta rupiah atau lebih meningkat dari 31,14 persen (2016) menjadi 37,01 persen (2018). Akan tetapi, persentase pekerja perdesaan yang menerima upah minimal dua juta rupiah lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Persebaran pekerja di perdesaan masih cukup banyak pada penerimaan upah sebesar Rp 1,5 juta sampai kurang dari Rp 2 juta.

Jika dianalisis berdasarkan jenis kelamin, rata-rata upah yang diterima pekerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan. Meskipun, peningkatan upah terjadi baik pada pekerja laki-laki maupun pada pekerja perempuan, peningkatan upah pekerja perempuan belum mampu menyamakan upah pekerja laki-laki. Selama tahun 2016-2018, pertumbuhan upah pekerja perempuan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan upah pekerja laki-laki, yaitu 6,04 persen per tahun untuk pekerja laki-laki dan 4,96 persen per tahun untuk pekerja perempuan.

Lambatnya pertumbuhan upah pekerja perempuan menyebabkan kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan cenderung semakin melebar. Kondisi ini ditunjukkan dari peningkatan rasio upah pekerja laki-laki terhadap upah pekerja perempuan dari 1,23 (2016) menjadi 1,26 (2018). Pada tahun 2018, rata-rata upah pekerja laki-laki sebesar Rp 2,74 juta, sedangkan rata-rata upah pekerja perempuan sebesar Rp 2,18 juta.

Tabel 10.9 Distribusi Pekerja* Menurut Upah dan Jenis Kelamin (persen), 2016–2019

Jenis Kelamin	Upah (Rp) ^c				Rata- Rata Upah (Rp)
	< 1 000 000	1 000 000 - 1 499 999	1 500 000 - 1 999 999	2 000 000 +	
Tahun 2016 (Agt)					
Laki-Laki	17,35	17,06	17,98	47,61	2 435 619
Perempuan	38,81	13,92	10,81	36,45	1 977 207
Laki-Laki+Perempuan	24,44	16,02	15,61	43,92	2 284 115
Tahun 2017 (Agt)					
Laki-Laki	15,56	14,44	16,94	53,06	2 624 319
Perempuan	36,52	13,36	11,01	39,11	2 070 274
Laki-Laki+Perempuan	22,44	14,09	14,99	48,48	2 442 499
Tahun 2018 (Agt)					
Laki-Laki	12,95	12,91	17,09	57,04	2 738 739
Perempuan	32,92	13,78	12,60	40,70	2 178 134
Laki-Laki+Perempuan	19,51	13,20	15,62	51,68	2 554 703
Tahun 2019 (Feb)					
Laki-Laki	13,48	12,65	16,13	57,74	2 761 746
Perempuan	33,68	14,17	12,49	39,66	2 142 951
Laki-Laki+Perempuan	20,45	13,17	14,88	51,51	2 548 425

Catatan: *Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian
^cAngka direvisi

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS

Ketimpangan gender dalam hal upah sudah menjadi isu yang cukup lama. Kesenjangan upah ini dapat dikarenakan adanya anggapan perempuan kurang berkontribusi pada pekerjaan. Perempuan juga cenderung ditempatkan pada posisi yang bernilai rendah dan dianggap sebagai pembantu ekonomi. Perempuan harus menghadapi tantangan yang membatasi mereka dalam mendapatkan kesempatan pekerjaan dan pendapatan yang setara, serta kesempatan dalam kegiatan atau posisi kepemimpinan. Masalah ketimpangan gender ini menjadi fokus yang penting untuk diatasi oleh semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Hal ini harus segera dilakukan mengingat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan penggerak yang cukup berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economy.okezone.com*, 2019).

Berdasarkan distribusinya, sebagian besar pekerja baik laki-laki maupun perempuan menerima upah dua juta rupiah atau lebih. Persentase pekerja laki-laki yang menerima upah dua juta rupiah atau lebih ada sebesar 47,61 persen (2016) meningkat cukup signifikan menjadi 57,04 persen (2018). Sementara itu, persentase pekerja perempuan yang menerima upah dua juta rupiah atau lebih mengalami peningkatan dari 36,45 persen (2016) menjadi 40,70 persen (2018).

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu fokus pemerintah pada pembangunan tahun 2019. Pemerintah terus berupaya untuk menciptakan lapangan kerja baru setiap tahunnya atau dapat mencapai target yang ditentukan. Dengan adanya lapangan kerja, angkatan kerja dapat terserap dengan optimal dan mendukung pembangunan nasional. Penyerapan tenaga kerja yang optimal akan menekan jumlah pengangguran. Dengan demikian, fenomena kemiskinan dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Ketersediaan lapangan pekerjaan berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Secara teori, Arthur M. Okun menjelaskan bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat produksi suatu negara. Dengan kata lain, laju pertumbuhan ekonomi mampu mendorong laju pertumbuhan lapangan kerja baru. Hubungan antara kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi dapat tergambarkan melalui elastisitas kesempatan kerja. Elastisitas kesempatan kerja adalah perbandingan antara laju pertumbuhan kesempatan kerja dan laju pertumbuhan ekonomi yang tergambar melalui nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

Tabel 10.10 Elastisitas Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha, 2016–2018

Lapangan Usaha	Rata-Rata Laju		Elastisitas Kesempatan Kerja
	Kesempatan Kerja (%)	Pertumbuhan PDB (%)	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,78	3,89	-0,71
B. Pertambangan dan Penggalian	-0,53	1,40	-0,38
C. Industri Pengolahan	7,23	4,28	1,69
D. Pengadaan Listrik dan Gas	14,17	3,49	4,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	39,59	5,03	7,87
F. Konstruksi	2,00	6,44	0,31
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,46	4,71	0,73
H. Transportasi dan Pergudangan	4,22	7,75	0,54
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,71	5,53	1,94
J. Informasi dan Komunikasi	14,41	8,33	1,73
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,89	4,81	0,39
L. Real Estate	4,69	3,62	1,30
M,N. Jasa Perusahaan	7,62	8,54	0,89
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,11	4,51	-0,69
P. Jasa Pendidikan	-0,15	4,52	-0,03
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,68	6,99	0,38
R,S,T,U. Jasa lainnya	9,57	8,86	1,08
Jumlah	2,33	5,12	0,46

Catatan : Data PDB Tahun 2018 adalah Angka Sangat Sementara
Sumber : Diolah dari data Sakernas Agustus dan PDB

Selama tahun 2016-2018, elastisitas kesempatan kerja di Indonesia hanya sebesar 0,46 persen. Angka tersebut berarti setiap satu persen kenaikan PDB hanya mampu menciptakan 0,46 persen lapangan kerja baru. Angka elastisitas kesempatan kerja yang di bawah satu persen tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum mampu memperluas kesempatan kerja secara efektif. Pemerintah dan para pemangku kebijakan perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan penciptaan lapangan kerja baru. Dengan demikian, pembangunan dapat terlaksana di segala bidang, salah satunya ketenagakerjaan.

Elastisitas kesempatan kerja ini juga dapat dianalisis berdasarkan lapangan usaha. Dari 17 lapangan usaha, sepuluh diantaranya memiliki nilai elastisitas kesempatan kerja di bawah satu persen. Bahkan, sebanyak empat lapangan usaha memiliki nilai elastisitas kesempatan kerja yang negatif. Keempat lapangan usaha tersebut antara lain pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta jasa pendidikan. Padahal lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar, tetapi sektor ini memiliki elastisitas kesempatan kerja yang paling rendah.

Sementara itu, terdapat tujuh lapangan usaha yang memiliki angka elastisitas kesempatan kerja di atas satu persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tujuh lapangan usaha tersebut mampu menciptakan lapangan kerja yang baru. Lapangan usaha dengan nilai elastisitas kesempatan kerja tahun 2016-2018 yang cukup tinggi adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (7,87 persen) dan pengadaan listrik dan gas (4,06 persen). Dengan nilai elastisitas kesempatan kerja tertinggi berarti setiap kenaikan satu persen nilai produksi pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang selama tahun 2016-2018, lapangan usaha tersebut mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 7,87 persen.

Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan cita-cita di seluruh negara, tak terkecuali Indonesia. Kualitas SDM yang baik memiliki tingkat produktivitas yang baik pula. Produktivitas merupakan indikator penting dalam pembangunan nasional. SDM dengan tingkat produktivitas yang tinggi menunjukkan SDM yang berdaya saing tidak hanya di tingkat global tetapi juga di tingkat internasional. Tingkat produktivitas dapat menggambarkan efisiensi proses produksi dan dapat menunjukkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, produktivitas menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia.

Produktivitas merupakan tingkat produksi yang mampu dihasilkan oleh seorang tenaga kerja setiap tahunnya. Selama tahun 2014-2017, produktivitas tenaga kerja di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2014, produktivitas tenaga kerja di Indonesia sebesar Rp 92,21 juta per penduduk yang bekerja dalam setahun. Angka tersebut meningkat menjadi Rp 101,49 juta per penduduk yang bekerja pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi Rp 106,91 juta per penduduk yang

bekerja (2016), dan terus meningkat hingga Rp. 114,23 juta per penduduk yang bekerja (2017). Dengan kata lain, produktivitas tenaga kerja di Indonesia meningkat dengan laju pertumbuhan 7,4 persen setiap tahunnya selama tahun 2014-2017. Peningkatan produktivitas ini menunjukkan tingkat efisiensi yang semakin tinggi dalam memproduksi *output* berupa barang atau jasa. Hal ini menandakan bahwa kualitas, kompetensi, dan daya saing tenaga kerja Indonesia meningkat dan mampu mendukung pembangunan Indonesia.

Jika dianalisis menurut provinsi, hampir seluruh provinsi di Indonesia

Tabel 10.11 Produktivitas Menurut Provinsi (juta rupiah per penduduk yang bekerja), 2014– 2017

Provinsi	2014	2015 ^a	2016 ^a	2017
Aceh	66,21	65,66	65,79	68,50
Sumatera Utara	88,75	95,89	104,89	107,46
Sumatera Barat	75,65	82,37	83,67	91,51
Riau	269,76	255,55	246,68	253,75
Jambi	97,12	100,02	105,66	115,27
Sumatera Selatan	82,98	89,77	88,67	97,34
Bengkulu	52,24	55,66	57,40	65,03
Lampung	62,83	69,56	71,26	79,17
Kep. Bangka Belitung	93,30	97,74	94,78	104,03
Kepulauan Riau	220,68	238,53	251,88	256,14
DKI Jakarta	380,27	421,06	447,70	534,55
Jawa Barat	72,06	81,15	86,07	86,91
Jawa Tengah	55,74	61,51	66,21	69,07
DI Yogyakarta	47,46	53,64	53,86	58,04
Jawa Timur	79,66	87,33	97,18	100,46
Banten	88,33	99,33	101,85	111,16
Bali	68,82	75,88	80,54	89,80
Nusa Tenggara Barat	38,98	49,67	49,22	53,49
Nusa Tenggara Timur	31,51	34,30	36,87	39,29
Kalimantan Barat	59,44	65,59	70,54	77,05
Kalimantan Tengah	77,86	82,38	89,84	103,19
Kalimantan Selatan	68,48	72,54	74,44	80,80
Kalimantan Timur	349,75	354,72	321,95	384,57
Kalimantan Utara	-	231,15	242,29	247,77
Sulawesi Utara	82,25	91,14	90,53	105,84
Sulawesi Tengah	69,78	81,04	82,34	97,69
Sulawesi Selatan	84,50	97,66	102,75	116,41
Sulawesi Tenggara	75,79	81,60	79,55	92,56
Gorontalo	52,58	57,72	57,99	65,89
Sulawesi Barat	49,44	55,36	57,61	66,58
Maluku	52,62	52,43	53,64	62,11
Maluku Utara	52,72	55,20	57,91	66,04
Papua Barat	153,74	165,40	165,60	178,35
Papua	82,43	89,87	105,47	112,78
Indonesia	92,21	101,49	106,91	114,23

Catatan: ^a Angka revisi sesuai data PDB terbaru

Data PDB tahun 2016 adalah angka sementara dan data PDB tahun 2017 adalah angka sangat sementara

Sumber: Diolah dari Sakernas dan PDB

mengalami peningkatan produktivitas dari tahun 2014 ke tahun 2017. Namun, terdapat satu provinsi yang mengalami penurunan produktivitas yaitu Provinsi Riau dengan produktivitas tenaga kerja dari Rp 269,76 juta per penduduk yang bekerja (2014) menjadi Rp 253,75 juta per penduduk yang bekerja (2017). Selama tahun 2014-2017, produktivitas tenaga kerja di Riau memiliki laju pertumbuhan menurun sebesar 2,02 persen setiap tahunnya. Hal ini harus mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. Produktivitas tenaga kerja di Provinsi Riau harus ditingkatkan agar memiliki kompetensi yang tinggi dan berdaya saing. Upaya ini harus dilakukan mengingat tenaga kerja asing yang diperbolehkan masuk ke Provinsi Riau dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tenaga kerja lokal harus memiliki kualitas yang lebih baik agar tetap mendominasi di pasar tenaga kerja.

Selanjutnya, provinsi dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi tahun 2018 adalah Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp 534,55 juta per tenaga kerja. Provinsi DKI Jakarta selalu menempati posisi dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi dari tahun ke tahun. Tidak hanya itu, DKI Jakarta juga merupakan provinsi dengan laju pertumbuhan produktivitas tertinggi selama tahun 2014-2017, yaitu sebesar 12,02 persen setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan sebagai ibukota negara, tenaga kerja di DKI Jakarta memiliki kompetensi dan daya saing yang tinggi, sehingga mereka mampu memproduksi barang dan jasa dengan efektif dan optimal.

**Tabel 10.12 Produktivitas Menurut Kategori Lapangan Usaha
(juta rupiah per penduduk yang bekerja), 2015–2018**

Kategori Lapangan Usaha	2015	2016	2017 ^r	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41,20	44,25	49,75	53,23
B. Pertambangan dan Penggalian	669,30	606,10	742,34	824,47
C. Industri Pengolahan	155,68	160,33	156,03	161,48
D. Pengadaan Listrik dan Gas	645,15	548,24	536,86	521,04
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31,95	36,85	22,77	21,26
F. Konstruksi	143,41	161,38	173,35	188,22
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	71,81	75,87	78,70	83,73
H. Transportasi dan Pergudangan	125,18	129,77	145,18	147,68
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	65,21	58,07	56,04	53,84
J. Informasi dan Komunikasi	749,99	657,19	627,09	624,87
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	278,07	300,57	331,21	342,95
L. Real Estate	1129,95	985,22	1253,74	1042,86
M,N. Jasa Perusahaan	139,32	147,23	143,17	160,44
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	111,51	95,56	108,74	115,73
P. Jasa Pendidikan	69,14	68,58	74,65	79,47
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	84,39	75,34	81,16	85,43
R,S,T,U. Jasa lainnya	35,50	42,24	39,89	44,70

Catatan: ^r Angka revisi sesuai data PDB terbaru

Data PDB Tahun 2017 adalah angka sementara dan Data PDB tahun 2018 adalah angka sangat sementara

Sumber: Diolah dari Sakernas dan PDB

Sementara itu, nilai produktivitas tenaga kerja terendah selalu ditempati oleh Nusa Tenggara Timur dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, produktivitas tenaga kerja di Nusa Tenggara Timur hanya sebesar Rp 39,29 juta per penduduk yang bekerja. Meski demikian, angka produktivitas tersebut sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2014 produktivitas tenaga kerja di NTT baru mencapai Rp 31,51 juta per penduduk yang bekerja. Selama tahun 2014-2017, laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di NTT sebesar 7,64 persen setiap tahunnya.

Selain berdasarkan provinsi, produktivitas tenaga kerja juga dapat dilihat berdasarkan lapangan usaha. Selama empat tahun terakhir, lapangan usaha real estate terus menempati posisi sebagai lapangan usaha dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi. Produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha tersebut sempat meningkat dari Rp 985,22 juta per penduduk yang bekerja (2016) menjadi Rp 1,25 miliar per penduduk yang bekerja (2017). Akan tetapi, angka tersebut menurun kembali pada tahun 2018 menjadi Rp 1,04 miliar per penduduk yang bekerja.

Di sisi lain, produktivitas tenaga kerja terendah ada pada lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Laju pertumbuhan yang negatif atau menurun terus menjadikan lapangan usaha ini sebagai lapangan usaha dengan produktivitas tenaga kerja terendah dari tahun ke tahun. Penurunan produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang mencapai dua digit, yaitu menurun sebesar 12,70 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2018, produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha ini pun hanya sebesar Rp 21,26 juta per penduduk yang bekerja.

Peran Sektor Informal dalam Menyerap Tenaga Kerja

Jumlah pasokan tenaga kerja di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut harus mampu diiringi dengan penciptaan lapangan kerja baru. Kesembatan kerja yang tidak seimbang akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Selain itu, lapangan kerja yang tidak memadai akan menyebabkan tumbuhnya pekerjaan di sektor informal.

Di Indonesia, sektor informal masih mendominasi dalam menyerap angkatan kerja dibandingkan sektor formal. Jumlah penduduk yang bekerja pada sektor informal terus meningkat dari 66,31 juta orang (2015) menjadi 68,20 juta orang (2016), kemudian meningkat menjadi 69,02 juta orang (2017), dan terus naik hingga 70,48 juta orang (2018). Peningkatan juga terus terjadi hingga Februari 2019 yaitu sebesar 74,09 juta orang.

Selama tahun 2015-2018, jumlah tenaga kerja pada sektor formal juga meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 3,33 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah tenaga kerja sektor formal ada sebanyak 48,51 juta orang dan meningkat menjadi 53,52 juta orang pada tahun 2018. Meski demikian, pertumbuhan jumlah tenaga kerja formal belum mampu melebihi jumlah pekerja informal atau mendominasi di pasar tenaga kerja.

Tabel 10.13 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2015–2019

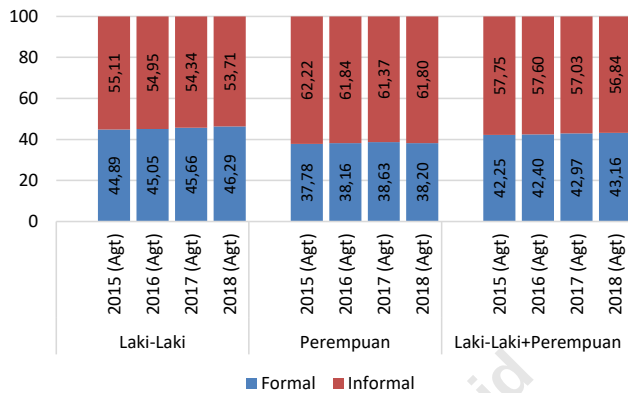
Jenis Kelamin	Formal	Informal
Tahun 2015 (Agt)		
Laki-Laki	32 386 435	39 764 153
Perempuan	16 120 295	26 548 316
Laki-Laki+Perempuan	48 506 730	66 312 469
Tahun 2016 (Agt)		
Laki-Laki	32 859 246	40 084 381
Perempuan	17 348 541	28 119 805
Laki-Laki+Perempuan	50 207 787	68 204 186
Tahun 2017 (Agt)		
Laki-Laki	34 121 708	40 614 838
Perempuan	17 879 989	28 405 888
Laki-Laki+Perempuan	52 001 697	69 020 726
Tahun 2018 (Agt)		
Laki-Laki	35 205 424	40 854 028
Perempuan	18 316 267	29 629 231
Laki-Laki+Perempuan	53 521 691	70 483 259
Tahun 2019 (Feb)		
Laki-Laki	35 759 854	41 561 175
Perempuan	19 513 114	32 532 049
Laki-Laki+Perempuan	55 272 968	74 093 224

Sumber : Diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional

Pertumbuhan pekerjaan sektor informal ini dapat menjadi suatu hal dengan dua pandangan, menguntungkan atau merugikan. Kecanggihan zaman yang serba digital dan penggunaan teknologi secara masif mendorong tumbuhnya wiraswasta secara *online* dan mandiri. Ditambah lagi dengan karakteristik kaum milenial ingin lebih fleksibel atau tidak mau bekerja di sektor formal. Namun demikian, pertumbuhan pekerja informal juga dapat dikarenakan mereka yang terpaksa terjun untuk sekadar mendapatkan pekerjaan. Selain akibat dari digitalisasi ekonomi, fenomena sektor informal juga disebabkan oleh fokus pembangunan daerah yang tidak merata, dimana sektor informal yang merupakan potensi daerah tidak dikembangkan dengan baik (*ekonomi.bisnis.com*, 2018). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji dan mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi pekerjaan sektor informal.

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, peningkatan tenaga kerja di sektor informal terjadi baik pada tenaga kerja laki-laki maupun tenaga kerja perempuan. Jumlah tenaga kerja informal laki-laki meningkat dari 39,76 juta orang (2015) menjadi 40,85 juta orang (2018). Kemudian jumlah tenaga kerja informal perempuan meningkat dari 26,55 juta orang (2015) menjadi 29,63 juta orang (2018). Sementara itu, pada tahun 2018, jumlah tenaga kerja formal ada sebanyak 35,21 juta orang untuk laki-laki dan 18,32 juta orang untuk perempuan.

Gambar 10.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2015-2018



Sumber: Diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional

Meski jumlah tenaga kerja informal terus meningkat, persentase tenaga kerja di sektor informal ini perlahan menurun, dari 57,75 persen (2015) menjadi 56,84 persen (2018). Penurunan persentase tenaga kerja informal juga terjadi pada kedua jenis kelamin. Persentase tenaga kerja laki-laki pada sektor informal menurun dari 55,11 persen (2015) menjadi 53,71 persen (2018). Untuk perempuan, tenaga kerja di sektor informal mengalami penurunan dari 62,22 persen (2015) menjadi 61,80 persen (2018).

Fakta yang cukup menarik adalah persentase tenaga kerja perempuan yang berada pada sektor informal cukup tinggi, yang artinya kaum perempuan lebih cenderung terjun ke dalam pekerjaan sektor informal. Pada tahun 2018, dari 10 perempuan yang bekerja, terdapat 6 atau 7 orang yang bekerja pada sektor informal. Tingginya persentase tenaga kerja informal pada kaum perempuan ini dapat disebabkan oleh peran ganda yang menjadi tanggung jawab perempuan. Disamping bekerja, perempuan memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya. Dengan begitu, beberapa diantara mereka lebih memilih untuk terjun di sektor informal yang memiliki waktu lebih fleksibel. Meski demikian, kondisi ini juga perlu dilihat lebih dalam karena kesenjangan gender masih mungkin saja terjadi, dimana perempuan belum mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja di sektor formal. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil kebijakan pada beberapa hal, yaitu menciptakan lapangan kerja formal, mengembangkan dan melindungi pekerjaan sektor informal, serta menghapuskan kesenjangan gender dalam ketenagakerjaan.



Pertumbuhan ekonomi dunia melambat dari 3,8 persen di tahun 2017 menjadi 3,7 persen di tahun 2018. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia ini merupakan imbas dari penurunan pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global. Perekonomian dunia berdampak pada kondisi perekonomian di dalam negeri, dalam buku Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2019 mencoba menguraikan kondisi perekonomian di sepanjang tahun 2018 dan yang terjadi di awal tahun 2019. Selain itu juga mencoba menguraikan mengenai target dan rencana pemerintah di tahun 2019. Sejumlah poin utama dapat diringkas sebagai berikut:

- Negara maju di tahun 2018 hanya tumbuh 2,5 persen, sedangkan pada negara-negara maju di kawasan Eropa, hanya sebesar 1,8 persen lebih rendah dibanding tahun 2017. Negara berkembang mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi, dari 4,7 persen pada 2014 menjadi 4,5 persen pada 2018. Untuk negara-negara di kawasan ASEAN, secara umum angka pertumbuhan ekonomi berada di atas angka pertumbuhan ekonomi dunia, negara maju, dan negara berkembang. Rata-rata pertumbuhan ekonomi negara ASEAN mencatatkan tren positif dari 4,6 persen pada 2014 menjadi 5,1 persen pada 2018.
- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17 persen, angka pertumbuhan ekonomi ini meleset dari target yang ditetapkan di APBN 2018 sebesar 5,4 persen. Masih tumbuhnya perekonomian Indonesia di tahun 2018 ditopang oleh investasi domestik dan konsumsi swasta (konsumsi rumah tangga dan konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga), konsumsi pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto. Pada tahun 2019 BI memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sekitar 5,0-5,4 persen.
- Laju inflasi Indonesia selama tahun 2018 tercatat sebesar 3,13 persen, atau mengalami penurunan jika dibandingkan laju inflasi tahun 2017 yang mencapai sebesar 3,61 persen. Laju inflasi tahun 2018 masih berada di bawah prediksi Bank Indonesia yang mengestimasi angka inflasi tahun 2018 sebesar 3,5 persen.
- Posisi inflasi Indonesia tahun 2018 berada di tingkatan keempat tertinggi diantara negara-negara ASEAN setelah Filipina, Myanmar dan Vietnam dengan nilai inflasi sebesar 3,2 persen. Namun jika dibandingkan dengan negara Thailand dan Singapura, inflasi Indonesia masih lebih tinggi. Inflasi Thailand sebesar 1,1 persen dan Singapura hanya sebesar 0,4 persen.
- Sejalan dengan inflasi nasional di tahun 2018, dari 82 kota hanya terdapat 32 kota dengan angka inflasi di atas atau sama dengan angka inflasi nasional dan 50 kota lainnya mengalami inflasi di bawah angka inflasi nasional. Inflasi terendah terjadi di Kota Meulaboh (0,96 persen) dan inflasi tertinggi di Kota Jayapura (6,70 persen).
- Tahun 2018 inflasi Indonesia masih berada dalam target dan sasaran prediksi pemerintah, tetapi lebih rendah jika dibandingkan inflasi tahun 2017. Ini menunjukkan pemerintah berhasil mencapai sasaran atau target inflasi yang telah ditentukan. Realisasi inflasi tahun 2018 tersebut melengkapi pencapaian sasaran inflasi dalam empat tahun berturut-turut. Memasuki tahun 2019 pada

bulan Januari terjadi inflasi sebesar 0,32 persen, dimana kelompok bahan makanan masih menjadi penyumbang terbesar dengan angka inflasi mencapai 0,92 persen diikuti kelompok sandang dengan angka inflasi 0,47 persen. Pada bulan Februari 2019 terjadi deflasi sebesar 0,08 persen dan di bulan Maret 2019 terjadi inflasi 0,11 persen. Kelompok bahan makanan di bulan Februari - Maret mengalami deflasi masing-masing 1,11 persen dan 0,01 persen.

- Sebagai negara berkembang di Asia Tenggara, daya saing Indonesia menempati urutan keempat GCI 4.0 di kawasan ASEAN setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dibandingkan dengan negara tetangga Singapura di peringkat kedua dunia, Indonesia masih jauh tertinggal. Singapura berhasil mencatatkan skor daya saing yang tinggi pada pilar institusi, infrastruktur, stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, dan kesehatan.
- Dalam APBN 2019 ini, pemerintah menganggarkan pembiayaan untuk program kesejahteraan rakyat. Di bidang kesehatan pada tahun ini, pemerintah menganggarkan untuk membuat program penurunan stunting terintegrasi di 160 Kab/Kota; di bidang pendidikan, penajaman anggaran pendidikan dengan cara kesesuaian pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri atau lapangan pekerjaan; melaksanakan program keluarga harapan untuk bidang kesehatan dan pendidikan; menerapkan program *tax expenditure*; dan antisipasi dana penanggulangan bencana; program pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha); dan menerapkan DAU Tambahan di tingkat kelurahan.
- Pada tahun 2019, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 2.165,10 triliun atau tumbuh 11,39 persen dari realisasi APBN 2018 (Rp 1.943,67 triliun). Pajak memegang peran besar dalam pertumbuhan pendapatan negara, dimana pajak memiliki kontribusi mencapai 80 persen dari penerimaan negara.
- Pada APBN tahun 2019, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp 2.461,11 triliun atau tumbuh 11,20 persen dari realisasi tahun 2018 (Rp 2.213,12 triliun). Anggaran untuk pemerintah pusat pada APBN 2019 mencapai Rp 1.634,34 triliun atau sekitar 66,41 persen dari total anggaran belanja Negara. Anggaran pengeluaran pemerintah pusat terdiri dari pengeluaran untuk kementerian/ lembaga (K/L) dan untuk non kementerian/ lembaga. Anggaran untuk K/L digunakan untuk menjalankan program dan atau kebijakan dari kementerian/ lembaga. Anggaran belanja K/L pada tahun 2019 ditargetkan tumbuh 1,05 persen dari realisasi APBN 2018 (Rp 846,56 triliun), yaitu sebesar Rp 855,45 triliun. Sementara anggaran belanja non K/L diperkirakan mencapai Rp 778,89 triliun pada tahun 2019, atau tumbuh 27,94 persen dari realisasi APBN 2018 (Rp 608,76 triliun).
- Ditinjau menurut fungsinya, sebagian besar pengeluaran negara digunakan untuk fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, dan fungsi perlindungan sosial. Fungsi pelayanan umum digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan pelaksanaan pemilu 2019 yang dianggarkan sebesar Rp 517,3 triliun atau 32 persen dari total belanja negara. Sementara fungsi ekonomi digunakan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi

yang berkualitas melalui pembangunan transportasi, infrastruktur, energi dan kedaulatan pangan.

- Perekonomian Indonesia tahun 2018 yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp 10,425 triliun. Pemerintah sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018 sebesar 5,4 persen, direvisi menjadi 5,2 persen. Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai masih dibawah target awal, bahkan masih di bawah pula dari target revisi.
- Pada tahun 2018, semua kategori lapangan usaha tercatat mengalami pertumbuhan yang positif. Apabila dilihat berdasarkan pertumbuhan pada masing-masing kategori lapangan usaha, terdapat 11 kategori lapangan usaha yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan dan 6 kategori lapangan usaha yang mengalami pelemahan laju pertumbuhan dari pertumbuhan tahun sebelumnya.
- PDB dilihat dari sisi penggunaan yang terbesar adalah pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Secara keseluruhan, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh stabil selama 4 tahun terakhir. Pertumbuhan komponen ini di tahun 2018 sebesar 5,05 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu yang tumbuh sebesar 4,94 persen. Pertumbuhan yang stabil dipicu dari inflasi nasional yang stabil dan terkendali. Inflasi nasional pada tahun 2015 hingga tahun 2018 berturut-turut sebesar 3,35 persen; 3,01 persen; 3,61 persen dan 3,13 persen.
- Berdasarkan kontribusi per wilayah, Pulau Jawa masih mendominasi perekonomian nasional dengan kontribusi di tahun 2018 sebesar 59 persen. Sedangkan Pulau Sumatera menjadi terbesar kedua dengan kontribusi sekitar 22 persen menjadi penopang perekonomian setelah Pulau Jawa. Sedangkan wilayah yang lainnya berkontribusi kurang dari 10 persen di tahun 2018.
- Dilihat dari sisi kontribusi terhadap perekonomian nasional, kategori C (Industri Pengolahan) memberikan kontribusi tertinggi setiap tahun selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2018, kontribusi kategori C (Industri Pengolahan) sebesar 17,63 persen (Rp 2.947 triliun). Kontribusi terbesar ke dua ada pada kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) memberikan kontribusi sebesar 13,02 persen (Rp 1.932 triliun) pada tahun 2018. Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) menjadi kategori penyumbang kontribusi terbesar ketiga di tahun 2018. Secara nominal, kategori ini mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 1.900 triliun di tahun 2018 dengan kontribusi sebesar 12,81 persen.
- Pada tahun 2018, pendapatan per kapita riil Indonesia mencapai Rp 39,40 juta dan pendapatan per kapita nominal Indonesia mencapai Rp 55,99 juta. Angka pendapatan per kapita di tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, pertumbuhan pendapatan riil Indonesia yang sebesar 4,4 persen berada di atas pertumbuhan pendapatan riil dunia yang besarnya hanya 2,2 persen.

- Kondisi perekonomian Indonesia di triwulan I tahun 2019 dilihat dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan komponen pembentukan modal tetap domestik bruto. Struktur PDB untuk komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah sebesar 56,82 persen, sedangkan untuk komponen pembentukan modal tetap domestik bruto sebesar 32,17 persen.
- Target konsumsi ikan nasional sebesar 54,49 kg/kapita/tahun dan proyeksi jumlah penduduk sebesar 266,91 juta jiwa pada 2019, maka dibutuhkan sekitar 14,54 juta ton stok ikan. Tahun 2018, KKP menargetkan total volume produksi perikanan sebesar 33,53 juta ton, dengan target produksi perikanan tangkap sebesar 9,46 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 24,08 juta ton. Jika dilihat realisasi tahun 2018, volume produksi perikanan secara keseluruhan sebesar 24,49 juta ton belum mencapai target yang diharapkan. Tahun 2019, Renstra KKP 2015-2019 mencatat target produksi perikanan di angka 39,97 juta ton, sementara pada RPJMN 2015-2019 dipatok 24,86 juta ton. Jika merujuk pada target Renstra KKP 2015-2019, diperlukan kerja keras dari semua elemen terkait untuk mewujudkan target tersebut. Produksi perikanan tangkap tahun 2019 ditargetkan sebesar 10,47 juta ton.
- Volume ekspor produk perikanan Indonesia tahun 2018 mencapai 1,13 juta ton. KKP pada tahun 2018 menargetkan nilai ekspor perikanan sebesar US\$ 5 miliar, namun realisasinya baru mencapai US\$ 4,86 miliar. Berdasarkan Renstra KKP 2015-2019, untuk tahun 2019 nilai ekspor produk perikanan ditargetkan sebesar US\$ 9,50 miliar. Target yang dipatok tahun 2019 cukup tinggi.
- Ada tiga isu penting yang masih menjadi hambatan bagi pembangunan perikanan berkelanjutan di Indonesia, yaitu terkait pengelolaan perikanan, penegakan hukum, dan pelaku usaha perikanan.
- Kementerian Perdagangan yang sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekspor di tahun 2018 antara 5-7 persen. Namun dengan melihat perkembangan yang terjadi di awal tahun 2018 dan beberapa bulan berikutnya membuat kemendag melakukan revisi target pertumbuhan ekspor menjadi 11 persen di tahun 2018. Namun apa yang sudah di targetkan pemerintah mengenai ekspor di tahun 2018 tidak tercapai, sampai akhir tahun 2018 kinerja ekspor Indonesia hanya mampu tumbuh sebesar 6,76 persen didukung dengan ekspor migas yang tumbuh sebesar 10,59 persen dan ekspor non migas tumbuh sebesar 6,36 persen.
- Ekspor unggulan yang masih menjadi andalan Indonesia adalah ekspor sektor non migas. Sumbangan ekspor non migas di tahun 2016 sudah menembus angka 90 persen tepatnya 90,97 persen dari total nilai ekspor dengan ekspor non migas mencapai nilai US\$ 132,08 miliar. Nilai ekspor non migas di tahun 2017 dan 2018 tercatat masing-masing sebesar US\$ 153,08 miliar (90,68 persen) dan US\$ 162,84 miliar (90,36 persen).
- Tahun 2018, nilai impor menurut golongan barang ekonomi semuanya

mengalami kenaikan. Nilai impor barang konsumsi tahun 2018 mencapai US\$ 17,18 miliar, bahan baku mencapai US\$ 141,58 dan barang modal mencapai US\$ 29,95 miliar, masing-masing mengalami kenaikan sebesar 22,07 persen, 22,13 persen dan 19,51 persen dibanding impor tahun 2017.

- Neraca Perdagangan Indonesia di tahun 2017 mencatat surplus sebesar US\$ 11,85 miliar, namun surplus perdagangan Indonesia tidak berlangsung lama di tahun 2018 neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar US\$ 8,50 miliar. Tahun 2018 surplus dari neraca perdagangan non migas hanya mencapai US\$ 3,97 miliar jauh dibanding surplus perdagangan tahun 2017 sebesar US\$ 20,49 miliar. Neraca perdagangan migas Indonesia mengalami defisit sebesar US\$ 8,66 miliar di tahun 2017. Penurunan neraca perdagangan migas Indonesia terus terjadi hingga tahun 2018 sehingga mengalami defisit mencapai US\$ 12,46 miliar.
- Neraca perdagangan Indonesia di triwulan I 2019 secara total menunjukkan defisit sebesar US\$ 0,06 miliar. Namun jika dilihat berdasarkan migas dan non migas, neraca perdagangan non migas Indonesia di triwulan I 2019 memberikan nilai surplus sebesar US\$ 1,21 miliar sedangkan neraca perdagangan migas mengalami defisit yang nilainya lebih besar dari surplus perdagangan non migas yaitu mencapai US\$ 1,27 miliar.
- Sepanjang tahun 2018, jumlah uang yang beredar cenderung terus mengalami peningkatan setiap bulannya. Pada tahun 2018, jumlah uang beredar mengalami puncak peredaran tertinggi pada bulan Desember yaitu mencapai Rp 5.760,05 triliun.
- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika pada tahun 2018 terus mengalami depresiasi sampai bulan Oktober. Pada awal tahun, nilai tukar rupiah tercatat Rp 13.413 mengalami penguatan dibandingkan bulan Desember 2017. Selanjutnya, mulai Februari 2018 nilai tukar rupiah kembali mengalami depresiasi bahkan pada bulan Juni 2018 nilai tukar rupiah sudah menembus lebih dari Rp 14.000 per US\$ 1. Pada bulan Oktober nilai tukar rupiah kembali terdepresiasi hingga Rp 15.227 per US\$ 1.
- Jumlah investasi yang dialirkan oleh masyarakat ataupun perusahaan domestik sepanjang tahun 2018 mencapai Rp 328,35 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 25,25 persen. Begitupula dengan jumlah proyek yang mampu menyerap nilai investasi di tahun 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 22,37 persen menjadi 10.815 proyek.
- Investasi asing yang masuk ke Indonesia pada tahun 2018 mengalami penurunan dari US\$ 32,24 miliar pada tahun 2017 menjadi US\$ 29,31 miliar atau turun sekitar 9,69 persen. Demikian pula dengan jumlah proyek mengalami penurunan sebesar 16,32 persen yaitu dari 26.257 proyek pada tahun 2017 menurun menjadi 21.972 proyek pada tahun 2018.
- Berdasarkan sektor, bahwa sektor industri masih menjadi sektor yang sangat

diminati oleh para investor asing.

- Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sepanjang tahun 2018 mencapai 15,81 juta atau meningkat sebesar 12,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar 14,04 juta kunjungan. Memasuki tahun 2019 yaitu pada triwulan I (Januari–Maret), jumlah kunjungan wisman telah mencapai 3,77 juta wisman atau sekitar 18,84 persen dari target kunjungan wisman tahun 2019 yang sebesar 20 juta orang.
- Bila dilihat berdasarkan pintu utama, jumlah kunjungan wisman yang masuk melalui Bandara Internasional Ngurah Rai adalah yang terbanyak di tahun 2018, yaitu sebanyak 6,02 juta wisman (38,11 persen dari total wisman).
- Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Indonesia secara total tahun 2018 sebesar 58,75 persen. pada tahun 2018 tercatat ada sebanyak 8 provinsi dengan angka TPK hotel berbintang di atas angka nasional dan sisanya sebanyak 26 provinsi yang mencatatkan angka TPK hotel berbintang di bawah angka nasional.
- TPAK di Indonesia tercatat sebesar 67,26 persen pada tahun 2018 dan pada Februari 2019, TPAK terlihat meningkat menjadi 69,32 persen. Berdasarkan jenis kelamin, partisipasi angkatan kerja laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan partisipasi angkatan kerja perempuan. Pada tahun 2018, TPAK laki-laki tercatat sebesar 82,69 persen, sedangkan TPAK perempuan tercatat sebesar 51,88 persen.
- Secara keseluruhan, tingkat pengangguran di Indonesia terus mengalami penurunan, TPT di Indonesia tercatat sebesar 6,18 persen (2015) menurun hingga 5,34 persen (2018). Penurunan tingkat pengangguran ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Dengan peningkatan pasokan tenaga kerja yang terus menerus bertambah, pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, tingkat pengangguran mampu dikontrol dan ditekan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, selama tahun 2015 hingga Desember 2018, lapangan kerja baru telah tercipta sebanyak 10.340.690 orang.
- Kemampuan penyerapan tenaga kerja juga dapat terlihat dari Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). TKK di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 94,66 persen. Angka tersebut berarti bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja, 94 sampai 95 orang diantaranya telah terserap dalam pasar tenaga kerja dan mendapatkan pekerjaan. Peningkatan tingkat kesempatan kerja terus terjadi hingga Februari 2019 yang mencapai 94,99 persen.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. 2019. *Asian Development Outlook 2019: Strengthening Disaster Resilience*. Filipina: ADB.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Laporan Perekonomian Indonesia 2018*. Jakarta: Nario Sari.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Indonesia 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Indikator Ekonomi Desember 2018*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Indikator Ekonomi April 2019*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. Diakses melalui www.bps.go.id.
- Bank Indonesia. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>.
- Bank Indonesia. 2018. *Laporan Perekonomian Indonesia 2018: Inflasi dan Nilai Tukar*. Jakarta: BI.
- Bank Indonesia. 2018. *Laporan Perekonomian Indonesia 2018: Kebijakan Moneter*. Jakarta: BI.
- Bank Indonesia. 2018. *Prospek Ekonomi Indonesia Membaik dengan Stabilitas yang Terjaga*. Diakses melalui https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_209018.aspx.
- Bank Indonesia. 2018. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) edisi Desember 2018*. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/moneter/Contents/Default.aspx>.
- Bank Indonesia. 2018. *Tinjauan Kebijakan Moneter*. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/moneter/tujuan-kebijakan/Contents/Default.aspx>.
- Bank Indonesia. 2018. *Uang Beredar Tumbuh Meningkat pada Bulan Juli 2018*. Jakarta: Departemen Komunikasi BI.
- Bank Indonesia. 2019. *Analisis Uang Beredar Januari 2019: Uang Beredar (M2) dan Faktor yang Memengaruhi*. Jakarta: BI.
- Bank Indonesia. 2019. *BI 7-day (Reverse) Repo Rate*. Jakarta: BI.
- Bank Indonesia. 2019. *Kajian Ekonomi Regional*. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/sulsel/Pages/Kajian-Ekonomi-dan-Kuangan-Regional-Provinsi-Sulawesi-Selatan-Periode--Februari-2019.aspx>.
- Bank Indonesia. 2018. *Giro Wajib Minimum (GWM)*. Jakarta: BI.
- Bank Indonesia. 2019. *Kerangka Operasi Moneter*. Jakarta: BI.
- Bank Indonesia. 2019. *Laporan Perekonomian Indonesia 2018*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2019. *Ringkasan Metadata*. Jakarta: BI.
- Bank Indonesia. 2019. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) edisi Januari 2019*. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/moneter/Contents/Default.aspx>.
- Bank Indonesia. 2019. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) edisi Februari 2019*. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/moneter/Contents/Default.aspx>.
- Bank Indonesia. 2019. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) edisi Maret 2019*. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/moneter/Contents/Default.aspx>.
- Bank Indonesia. 2019. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) edisi*

- April 2019. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/moneter/Contents/Default.aspx>
- Bank Indonesia. 2019. *Tinjauan Kebijakan Moneter Januari 2019 (Ekonomi, Moneter, dan Keuangan)*. Jakarta: BI.
- Bappenas. 2018. *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan I Tahun 2018*. Jakarta : Bappenas.
- Bappenas. 2018. *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan II Tahun 2018*. Jakarta : Bappenas
- Bappenas. 2018. *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III Tahun 2018*. Jakarta : Bappenas
- Bappenas. 2018. *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan IV Tahun 2018*. Jakarta : Bappenas
- Bappenas. *Isu Strategis dan Permasalahannya*. Diakses melalui https://www.bappenas.go.id/files/9214/4401/4205/8_BAB_6_ISU_STRATEGIS_DAN_PERMASALAHANNYA.pdf diunduh 14 Maret 2019 pukul 16.06.
- Berita Resmi Statistik. *Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan I-2019 serta Perkiraan Triwulan II-2019*. Jakarta: BPS.
- Berita Resmi Statistik. *Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan IV-2018 serta Perkiraan Triwulan I-2019*. Jakarta: BPS.
- Berita Resmi Statistik. *Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Desember 2018*. Jakarta: BPS.
- Berita Resmi Statistik. *Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Desember 2018*. Jakarta: BPS.
- Berita Resmi Statistik. *Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi November 2018*. Jakarta: BPS.
- Berita Resmi Statistik. *Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Oktober 2018*. Jakarta: BPS.
- Berita Resmi Statistik. *Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Januari 2019*. Jakarta: BPS.
- Berita Resmi Statistik. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2019*. Jakarta: BPS.
- Berita Satu. *60 Produk Perikanan Tidak Dilaporkan*. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/ekonomi/538997/susi-pudjiastuti-60-produk-perikanan-tidak-dilaporkan-pada-8-April-2019-pukul-12.24>.
- Berita Satu. (2018, Desember 10). *Angka Pengangguran di Pedesaan Meningkat 0,03 Persen*. Dipetik Mei 20, 2019, dari BERITASATU: <https://www.beritasatu.com/nasional/527003/angka-pengangguran-di-pedesaan-meningkat-003-persen>.
- Bisnis.com. (2018, Agustus 24). *LAPSUS: Mengangkat Derajat Sektor Informal*. Dipetik Mei 28, 2019, dari Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180824/9/831131/lapsus-mengangkat-derajat-sektor-informal/1>.
- CNN. 2019. *Inflasi Tercatat 313 Persen Gara-Gara Beras dan Rokok*. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190102103729-532-357865/inflasi-2018-tercatat-313-persen-gara-gara-beras-dan-rokok> diunduh tanggal 18 juni 2019 pukul 14.36.
- CNN. 2019. *Kenaikan Harga Tiket Pesawat*. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190115191331-92-361065/kenaikan-harga-tiket-pesawat-sempat-tembus-120-persen>.
- CNN. 2019. *Selamat Indonesia Menjadi Destinasi Wisata Halal Terbaik di Dunia*. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190409174407-33-65545/selamat-indonesia-jadi-destinasi-wisata-halal-terbaik-dunia>.
- DetikFinance. (20 Desember 2018). Bank Indonesia Sebut Stabilitas Keuangan Tetap terjaga. Diakses melalui <https://finance.detik.com/>

- moneter/d-4352668/bi-sebut-stabilitas-keuangan-tetap-terjaga.
- Dewi, Diah Ananta. 2010. *Deindustrialisasi di Indonesia 1983-2008 : Analisis dengan Pendekatan Kaldorian*. Bogor : Disertasi
- <http://industri.bisnis.com/read/20180203/12/733967/>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160615/9/558008/presiden-jokowi-kontribusi-kelautan-ke-pdb-rendah> diunduh tanggal 29 Maret 2019 pukul 16.16.
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180507/99/792565/terganggu-cuaca-dan-penyakit-kinerja-perikanan-melambat-awal-2018> diunduh 8 April 2019 pukul 9.34.
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3895542/pemerintah-harus-lakukan-ini-untuk-optimalkan-potensi-laut-ri> diunduh 9 April 2019 pukul 11.55. <https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD>.
- <https://investasi.kontan.co.id/news/tumbuh-paling-tinggi-prospek-saham-sektor-pertambangan-makin-terbatas>
- <https://katadata.co.id/berita/2019/04/15/bantah-deindustrialisasi-kemenperin-sumbangan-pdb-manufaktur-tinggi>.
- https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/2019/2019.02.12%20Diskusi%20Media%20Pers_KSP.pdf diunduh 28 Februari 2019 pukul 16.06.
- <https://sumatra.bisnis.com/read/20181204/436/865903/peta-jalan-pembangunan-bappenas-susun-roadmap-perikanan-berkelanjutan> diunduh pada 15 Maret 2019 pukul 16.20
- <https://www.antaranews.com/berita/788297/kkp-dukung-upaya-peningkatan-ekspor-sektor-perikanan> diunduh 9 April 2019 pukul 9.18.
- <https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD>.
- <https://www.merdeka.com/uang/ini-penyebab-kecilnya-kontribusi-sektor-maritim-ke-perekonomian-ri.html> diunduh tanggal 29 Maret 2019 pukul 16.11.
- <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/11/21/pijrbp383-kkp-konsumsi-ikan-nasional-naik-setiap-tahun>.
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read183075/kkp-harap-konsumsi-ikan-masyarakat-terus-meningkat.html>.
- Indonesia Deveopment Forum 2018. (2018, Agustus 1). *Indonesia Luncurkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di IDF 2018*. Diambil kembali dari Indonesia Deveopment Forum 2018: <https://indonesiadevelopmentforum.com/2018/article/7172-indonesia-luncurkan-indeks-pembangunan-ekonomi-inklusif-di-idf-2018>.
- InilahBanten. (2018, November 8). *Lapangan Kerja di Banten Tinggi, Angka Pengangguran Juga Tinggi*. Dipetik Mei 21, 2019, dari InilahBanten: <https://inilahbanten.co.id/detail/lapangan-kerja-di-banten-tinggi-angka-pengangguran-juga-tinggi/>.
- Investopedia. (t.thn.). *Okun's Law*. Diambil kembali dari Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/o/okunslaw.asp>.
- IMF. 2019. *World Economic Outlook: Growth Slowdown, Precarious Recovery*. Washington: IMF.
- Jaramaya, R., & Zuraya, N. (2018, Januari 19). *JK: Perempuan Berperan dalam Pertumbuhan Ekonomi*. Diambil kembali dari Republika.co.id: <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/01/19/p2sldq383-jk-perempuan-berperan-dalam-pertumbuhan-ekonomi>.
- KabarPapua.co. (2018, Februari 28). *Ternyata, Tiap Tahun Angka Pengangguran di Papua Naik Enam Persen*. Dipetik Mei 7, 2018, dari KabarPapua.co: <https://kabarpapua.co/ternyata-tiap-tahun-angka-pengangguran-di-papua-naik-enam-persen/>.

- Kemenperin. *Kemenperin Tepis Isu Deindustrialisasi*. Diakses melalui <http://www.kemenperin.go.id/artikel/19621/Kemenperin-Tepis-Isu-Deindustrialisasi>.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Maritim Indonesia Kemewahan yang Luar Biasa*. Diakses melalui <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>, diunduh tanggal 19 Februari 2019 pukul 10.15.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Menuju Laut Masa Depan Bangsa*. Diakses melalui <https://kkp.go.id/infografis-detail/206-3-tahun-pembangunan-kkp-menuju-laut-masa-depan-bangsa>, diunduh 19 Februari 2019 pukul 11.56.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diakses melalui <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/2019/Materi%20Paparan%20Forum%20Bisnis%20Perikanan%20Tangkap/Materi%20Dirjen%20PT%20Forum%20Bisnis%20Perikanan%20Tangkap..pdf>, diunduh tanggal 26 Februari 2019 pukul 15.14.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diakses melalui <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/Berita/Analisis%20NTN%202015.pdf>, diunduh pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 10.14.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2016. *Laporan Kinerja Tahun 2016*. Jakarta: KKP.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2019. *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2018*. Jakarta: KKP.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2017, Mei 15). *Pemerintah Akan Terus Dorong Pertumbuhan Wirausaha Perempuan Di Indonesia*. Dipetik Mei 2, 2018, dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia: <http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/pemerintah-akan-terus-dorong-pertumbuhan-wirausaha-perempuan-di-indonesia>.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2018, November 2). *Menaker: 26 Provinsi Sudah Laporkan Penetapan UMP 2019*. Dipetik Mei 24, 2019, dari Kementerian Ketenagakerjaan RI: <http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/menaker-26-provinsi-sudah-laporkan-penetapan-ump-2019>.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2019, April 8). *Kemnaker Prioritaskan Pembangunan SDM melalui Pelatihan Vokasi*. Dipetik Mei 23, 2019, dari Kementerian Ketenagakerjaan RI: <http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/kemnaker-prioritaskan-pembangunan-sdm-melalui-pelatihan-vokasi>.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2019, Januari 9). *Menaker Hanif: Target Penciptaan 10 Juta Lapangan Kerja Baru Terlampaui*. Diambil kembali dari Kementerian Ketenagakerjaan RI: <http://kemnaker.go.id/berita/berita-naker/menaker-hanif-target-penciptaan-10-juta-lapangan-kerja-baru-terlampaui>.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2019, Januari 9). *Menaker Hanif: Target Penciptaan 10 Juta Lapangan Kerja Baru Terlampaui*. Dipetik Mei 20, 2019, dari Kementerian Ketenagakerjaan RI: <http://kemnaker.go.id/berita/berita-naker/menaker-hanif-target-penciptaan-10-juta-lapangan-kerja-baru-terlampaui>.
- Kementerian Keuangan. 2016. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2015*. Jakarta : Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan. 2017. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016*. Jakarta : Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan. 2019. *APBN Kita Edisi Mei 2019*. Jakarta : Kemenkeu.

- Kementerian Keuangan. 2019. *Buku II : Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta : Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan. 2019. *Informasi APBN 2019*. Jakarta : Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan. 2019. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018*. Jakarta : Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan. 2019. *Prospek Ekonomi Indonesia Tahun 2019*. Diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/berkaca-dari-2018-prospek-ekonomi-indonesia-tahun-2019-diprediksi-baik>/Diakses pada 31 Mei 2019.
- kla.id. (2018, April 30). *Disnakertrans Maros Melaksanakan Sosialisasi Norma Kerja Perempuan dan Anak*. Dipetik Mei 2, 2018, dari Kabupaten/Kota Layak Anak: <http://www.kla.id/disnakertrans-maros-melaksanakan-sosialisasi-norma-kerja-perempuan-dan-anak/>.
- Kominfo. 2019. Diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/15873/siap-sambut-20-juta-kunjungan-wisman-kemenpar-promosikan-100-calendar-of-events-coe-wonderful-2019/0/artikel_gpr.
- Kompas. 2017. *Ini Strategi Kemenpar Tuntaskan Target Kunjungan 17 Wisman Tahun 2018*. Diakses melalui <https://travel.kompas.com/read/2017/12/12/160000927/ini-strategi-kemenpar-tuntaskan-target-kunjungan-17-wisman-tahun-2018>.
- Kompas. (2018, Februari 3). *Maluku Minta Ada Kebijakan Lanjutan Menteri Susi Setelah Moratorium*. Dipetik Mei 7, 2018, dari Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2018/02/03/08193081/maluku-minta-ada-kebijakan-lanjutan-menteri-susi-setelah-moratorium>.
- Kompas. 2018. *PDB Sektor Perikanan Kuartal III 2018 Capai Rp. 5998 Triliun*. Diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/17/180720726/pdb-sektor-perikanan-kuartal-iii-2018-capai-rp-5998-triliun> pada 8 April 2019 pukul 9.28.
- Kompas. 2018. *Pertumbuhan Ekonomi Melambat*. Kompas, terbit 27 Oktober 2018.
- Kompas. 2019. *Defisit Neraca Perdagangan Jeblok di 2019, Bagaimana 2019?*. Diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/16/123100826/defisit-neraca-perdagangan-jeblok-di-2018-bagaimana-2019->.
- Kompas. 2019. *Jebakan Pertumbuhan*. Kompas, terbit 12 Februari 2019
- Kompas. 2019. *Jebakan Pertumbuhan 5 Persen*. Kompas, terbit 14 Mei 2019.
- Kompas. 2019. *Mengatasi Hambatan Utama bagi Pertumbuhan Ekonomi*. Kompas, terbit 27 Maret 2019.
- Kompas. 2019. *Merajut Pertumbuhan Ekonomi*. Kompas, terbit 30 April 2019.
- Kompas. 2019. *Peringkat Utang Naik Indonesia Makin Menarik*. Kompas, terbit 31 Mei 2019.
- Liputan6. 2018. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3798847/terendah-sepanjang-2018-harga-batu-bara-sentuh-usd-9251-per-ton>.
- Liputan6. 2018. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3621095/cara-pln-sukseskan-gelaran-asian-games-2018>.
- Liputan6. 2018. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3614158/pln-siapkan-pengamanan-listrik-berlapis-di-asian-games-2018>.
- Liputan6. (2018, Oktober 17). *Kenaikan UMP 2019 di 8 Provinsi Ini Bakal Lebih dari 8,03 Persen*. Dipetik Mei 24, 2019, dari Liputan6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3669377/kenaikan-ump-2019-di-8-provinsi-ini-bakal-lebih-dari-803-persen>.

- Merdeka. (2018, Oktober 9). *Kemenko PMK: Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat 55 persen*. Dipetik Mei 17, 2019, dari Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenko-pmk-tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-perempuan-meningkat-55-persen.html>.
- Okezone. 2018. *Catatan Gemilang Kinerja Sektor Pertanian*. Diakses melalui <https://news.okezone.com/read/2018/03/23/337/1876887/catatan-gemilang-kinerja-sektor-pertanian>.
- Okezone. (2019, Maret 13). *Sri Mulyani: Upah Pekerja Wanita Masih 32% Lebih Rendah dari Pria*. Dipetik Mei 27, 2019, dari OKEFINANCE: <https://economy.okezone.com/read/2019/03/13/320/2029492/sri-mulyani-upah-pekerja-wanita-masih-32-lebih-rendah-dari-pria>.
- PoskotaNews. (30 Januari 2019). *Menkeu: Sistem Keuangan Indonesia Stabil dan Aman*. Diakses melalui <http://poskotanews.com/2019/01/30/menkeu-sistem-keuangan-indonesia-stabil-dan-aman/>.
- Praditya, I. I. (2017, Desember 9). *Dana Desa Wajib Ciptakan Lapangan Kerja Minimal 200 Orang*. Dipetik Mei 4, 2018, dari Liputan6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3190058/dana-desa-wajib-ciptakan-lapangan-kerja-minimal-200-orang>.
- PresidenRI.go.id. (2017, Mei 18). *Upaya Nyata Pemerintah Membuka Lapangan Kerja*. Dipetik Mei 2, 2018, dari PresidenRI.go.id: <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/upaya-nyata-pemerintah-membuka-lapangan-kerja.html>.
- Purnamasari, Riri Haerina. 2009. *Analisis Perbandingan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Investasi Nasional di Sektor Primer, Sekunder dan Tersier*. Bogor : Skripsi
- Sangaji, I. M. (2018, April 19). Diakses dari kkp.go.id: <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>.
- Tabloidjubi. (2018, Februari 28). *Angka pengangguran Mimika dan Kota Jayapura tertinggi di Papua*. Dipetik Mei 7, 2018, dari tabloidjubi.com: <http://tabloidjubi.com/artikel-14124-angka-pengangguran-mimika-dan-kota-jayapura-tertinggi-di-papua.html>.
- Tempo. 2018. Diakses melalui <https://asiangames.tempo.co/read/1093541/asian-games-2018-delegasi-negara-dan-media-intip-jakabaring/full&view=ok>.
- Tribunnews. 2018. *Bappenas Fokus Konservasi Perikanan dan Kelautan untuk Kurangi Angka Kemiskinan dan Stunting*. Diakses melalui <http://bali.tribunnews.com/2018/12/05/bappenas-fokus-konservasi-perikanan-dan-kelautan-untuk-kurangi-angka-kemiskinan-dan-stunting?page=2> diunduh tanggal 22 Maret 2019 pukul 15.23.
- Tribunnews. (2019, Januari 8). *Menaker Beberkan Alasan Kecilnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia*. Dipetik Mei 17, 2019, dari TRIBUNNEWS.COM: <http://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/08/menaker-beberkan-alasan-kecilnya-angka-partisipasi-angkatan-kerja-perempuan-di-indonesia>.
- World Economic Forum. 2018. *The Global Competitiveness Report 2018*. Jenewa: World Economic Forum.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 Fax: (021) 3857046

Email: bpsdq@bps.go.id Homepage: <http://www.bps.go.id>

ISSN 1858-0963

